



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2024-2026  
WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Kota Parepare merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan kebijakan, sasaran dan prioritasnya bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera;

b. bahwa rencana pembangunan daerah berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah Kota Parepare dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;

c. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Daerah Kota Parepare wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, c dan d perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota Parepare tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8 Kota Parepare Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2024-2026.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

7.Perangkat.....

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :
  - a. bahwa RPD merupakan target indikator makro dan program prioritas nasional RPJM Nasional 2020-2024;
  - b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Parepare sampai dengan Tahun 2025;
  - c. hasil evaluasi capaian indikator Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; dan
  - d. ketentuan umum Perubahan RPJMD yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku dan untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Parepare dengan pembangunan Provinsi dan Nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :
  - a. sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
  - b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

## BAB III PELAKSANAAN RPD

### Pasal 3

- (1) RPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode hasil pilkada serentak Tahun 2024.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 9 (sembilan) BAB sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (4) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pagu anggaran setiap program prioritas yang sifatnya indikatif.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rancangan RPD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan melakukan kesesuaian antara RPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota paling lambat minggu kedua bulan April Tahun 2023.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 3





Pemerintah Kota Parepare

# DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan tersebut adalah memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan itu, maka dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Periodesasi RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Parepare periode 2018-2023. Dengan demikian, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Parepare dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, sehingga pembangunan di Kota Parepare dapat berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan

hal tersebut dan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru mengamanahkan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Sekaitan hal tersebut memerintahkan pula seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Mencermati hal tersebut maka Kota Parepare yang periode Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 sehingga wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi panduan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 sampai ditetapkan kepala daerah hasil Pilkada serentak atau sampai dengan terbitnya Perda tentang RPJMD Kota Parepare.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Parepare sampai dengan tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023;
4. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. kebijakan nasional;



7. Regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Kota Parepare sebagai pengganti RPJMD Kota Parepare, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Namun demikian, tetap memperhatikan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024 - 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka penentuan tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan isu strategis aktual. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024 – 2026 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026 pada Bulan November Tahun 2022 dengan memperhatikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Rancangan RPD Provinsi Sulsel 2024-2026;
2. Perangkat Daerah Kota Parepare menyusun Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rancangan RPD Kota Parepare Tahun 2024-

2026;

3. Perangkat Daerah Kota Parepare melakukan forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan / atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam berita acara forum Perangkat Daerah serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. BAPPEDA Kota Parepare melakukan forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan / atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam berita acara forum konsultasi publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
5. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dan forum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
6. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra PD Kota Parepare Tahun 2024-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi.
7. Bappeda Kota Parepare melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026. dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Fasilitasi;
8. Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Rancangan Akhir RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Fasilitasi diajukan oleh Kepala BAPPEDA Kota Parepare Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
10. RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra

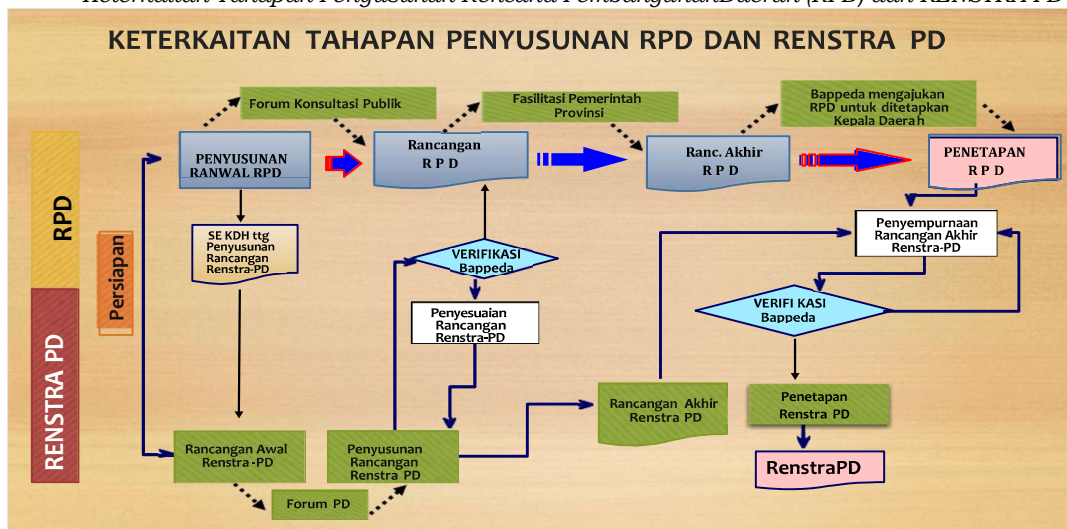
Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026 ;

11. Kepala BAPPEDA Kota Parepare melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026;
12. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) antara Tahapan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I- 1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RENSTRA PD



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 dan Inmendagri 52 Tahun 2022

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kota Parepare, Provinsi, maupun Pusat, maka RPD Kota Parepare juga disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Rancangan RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, dan RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki,

faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat RPD sebagai pengganti RPJMD Kota Parepare sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Kota Parepare, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan konsultasi publik Rancangan RPD Kota Parepare. Proses penyusunan RPD Kota Parepare dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPJPD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPD memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. RPD Kota Parepare Tahun 2024 - 2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun

2024-2026;

2. RPD Kota Parepare Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman pembangunan selama 3 (tiga) tahun;
3. RPD Kota Parepare Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPD Kota Parepare Tahun 2024 - 2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan;
5. RPD Kota Parepare Tahun 2024 - 2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Pj. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun;
6. RPD Kota Parepare Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi;
7. RPD Kota Parepare Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026 di landaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri dan peraturan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan



- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah ;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
  38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi



Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
44. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Parepare Nomor 127);

46. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148);
47. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1 Hubungan RPD Kota Parepare dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan ketentuan didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Makna ini mengamanahkan bahwa rencana pembangunan di Kota Parepare, harus berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan provinsi sulawesi selatan baik rencana jangka panjang, maupun rencana pembangunan menengah. Oleh karena itu penyusunan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 ini berpedoman pada dokumen nasional dan provinsi.

#### **1.3.2 Hubungan RPD dengan RPJMN**

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Menengah Daerah harus mengacu dan selaras dengan RPJPN dan RPJMN karena keberhasilan pembangunan di daerah termasuk perencanaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan nasional.

RPJMN dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) menjadi perhatian Pemerintah Kota Parepare dalam merancang pembangunan di daerah

sesuai kondisi daerah. Oleh karena itu, substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari RPD Kota Parepare Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

### **1.3.3 Hubungan RPD dengan RPJPD**

Dokumen RPD Tahun 2024 - 2026 merupakan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang masuk dalam periode Keempat dari periodisasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 - 2025. Oleh karena itu, berdasarkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan RPD juga berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPD Kota Parepare Tahun 2005 - 2025.

### **1.3.4 Hubungan RPD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan**

Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi, oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026, Pemerintah Kota Parepare juga mempedomani Rancangan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024-2026.

### **1.3.5 Hubungan RPD dengan RPD Sulawesi Selatan**

Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPD Provinsi, oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026, Pemerintah Kota Parepare juga mempedomani Rancangan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024-2026.

**1.3.6 Hubungan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).**

Penyusunan RPD senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kota Parepare sebagai dasar untuk menetapkan lokasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan pola ruang daerah di Kota Parepare.

**1.3.7 Hubungan RPD dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016, tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) maka RPPLH wajib dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan, oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare wajib memasukkan program dan kegiatan sekaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**1.3.8 Hubungan RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).**

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk masa 3 (tiga) tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Bappeda Kota Parepare.

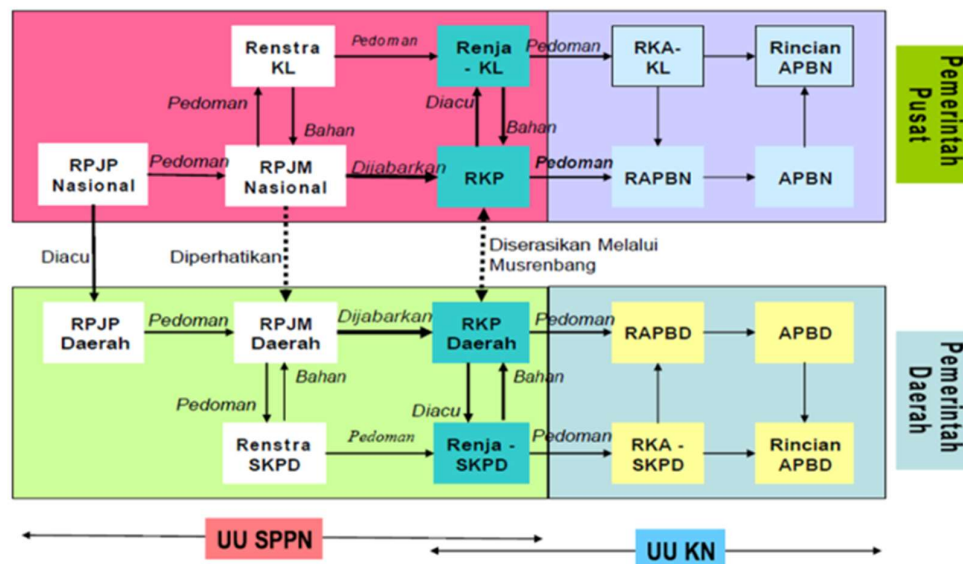
**1.3.9 Hubungan RPD dengan RKPD.**

Pelaksanaan RPD Tahun 2024 - 2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja

Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Perangkat Daerah.

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) dokumen antara RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut ini:

*Gambar I- 2 :  
Hubungan antar Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
sebagai Satu Kesatuan Sistem*



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017;  
Diolah Bappeda 2023.

#### 1.4 Maksud Dan Tujuan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai dokumen transisi pemerintahan periode 2024-2026 yang akan berakhir pada tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Walikota dalam memberikan pedoman bagi seluruh komponen

daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Parepare sesuai dengan sasaran pokok dan arah kebijakan periode keempat RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Dokumen RPD Kota Parepare Tahun 2024 – 2026 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dan RAPBD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 .
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023- 2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan arah pembangunan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan;
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026;
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang;
7. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) dan Indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Parepare periode 2024 – 2026;



8. Menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan awal RPD yang berisi latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah serta dokumen rencana pembangunan antar daerah; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar – dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah dan kebutuhan perumusan strategi.

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penjelasan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu – isu strategi daerah yang menjadi dasar utama tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir – butir penting isu – isu strategis yang menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Penyajian isu – isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan regional maupun nasional yang dapat memberikan manfaat serta pengaruh dimasa datang terhadap Kota Parepare.

**BAB V TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada : visi misi RPJPD Kota Parepare dan/atau Analisa sasaran pokok dan/atau Analisa arah kebijakan RPJPD Kota Parepare Tahap Keempat dan/atau isu strategis aktual, Tujuan dan sasaran paling sedikit mengidentifikasi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome serta indikator masing-masing.

## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

Dalam bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing – masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah ini memuat kerangka pendanaan seluruh program PD Tahun 2024-2026 dan program prioritas dalam pencapaian visi, misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menguraikan Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs)/(TPB) pada akhir periode RPD.

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan karena berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni periode 2018-2023 dimana dokumen RPD ini akan memasukkan program – program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai pada periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kaidah perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dokumen.

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Wilayah Kota Parepare di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah barat yaitu berbatasan dengan Teluk Parepare/Selat Makassar.

Secara administratif terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan 22 Kelurahan sesuai tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Kota Parepare  
Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022

| No                            | Kecamatan      | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Kelurahan |
|-------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1                             | BACUKIKI       | 66,70              | 4                |
| 2                             | BACUKIKI BARAT | 13,00              | 6                |
| 3                             | UJUNG          | 11,30              | 5                |
| 4                             | SOREANG        | 8,33               | 7                |
| <b>TOTAL<br/>LUAS WILAYAH</b> |                | <b>99,33</b>       | <b>22</b>        |

Sumber : BPS Kota Parepare 2023

Berdasarkan data luas wilayah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022, Kota Parepare memiliki luas wilayah sebesar 89,69 Km<sup>2</sup> terdiri atas 4 kecamatan yaitu:

- Kecamatan Bacukiki terdiri dari 4 kelurahan yaitu: kel. Lompoe, kel. WT. Bacukiki, kel. Lemoe, dan kel. Galung Maloang;
- Kecamatan Ujung terdiri dari 5 kelurahan yaitu: kel. Labukkang, kel. Ujung Sabbang, kel. Ujung Bulu, kel. Lapadde, dan kel. Mallusetasi;
- Kecamatan Soreang terdiri dari 7 kelurahan yaitu: kel. Lakessi, kel. Ujung Baru, kel. Watang Soreang, kel. Kampung Pisang, kel. Ujung Lare, kel. Bukit Indah, dan kel. Bukin Harapan;
- Kecamatan Bacukiki Barat terdiri dari 6 kelurahan yaitu: kel. Kampung Baru, kel. Cappa Galung, kel. Lumpue, kel. Tiro Sompe, kel. Sumpang Minangae, dan Bumi Harapan.

Maka jumlah total kelurahan yang terdapat di Kota Parepare adalah 22 kelurahan. Luas Wilayah Indikatif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021. Dan informasi berdasarkan kepmendagri 050-145 tahun 2022



yaitu bahwa jumlah penduduk Kota Parepare adalah sebanyak 153.459 Jiwa.

#### 2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara-Selatan maupun arah Timur-Barat. Secara geografis, Kota Parepare terletak antara 3°57'39"-4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24"-119°43'40" Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia Bagian Tengah.

#### 2.1.1.2. Topografi

Dari aspek topografi Wilayah Kota Parepare ditinjau terdiri dari daerah datar sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80% luas daerahnya merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah dataran dengan ketinggian 7-53 meter di atas permukaan laut (mdpl), posisi dan tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) menurut kecamatan di Kota Parepare dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Kondisi Topografi Wilayah Kota Parepare

| Kecamatan      | Luas Ketinggian Wilayah (Ha) |        |          |           |         |
|----------------|------------------------------|--------|----------|-----------|---------|
|                | 0-7 m                        | 8-25 m | 26-100 m | 101-500 m | ≥ 500 m |
| Bacukiki       | 154,6                        | 776,4  | 2668,78  | 3119,0    | 316,11  |
| Ujung          | 87,16                        | 214,78 | 476,64   | 54,40     | -       |
| Soreang        | 70,84                        | 38,6   | 914,64   | 105,92    | -       |
| Bacukiki Barat | *                            | *      | *        | *         | *       |

Sumber: RTRW Kota Parepare 2021-2041 \*mengacu pada kecamatan induk (bacukiki)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Kota Parepare sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian atau perbukitan terutama pada wilayah Kecamatan Bacukiki dengan ketinggian >50 mdpl. Khusus untuk Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang, berada pada ketinggian 0-43 mdpl. Dengan kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa morfologi Kota Parepare terbagi atas morfologi rendah dan tinggi (perbukitan/pegunungan). Kecamatan Bacukiki Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Bacukiki berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007. Kecamatan Bacukiki Barat yang dimekarkan terdiri dari 6 (enam) kelurahan: Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappagalung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Tirosompe, Kelurahan Bumi Harapan.

#### 2.1.1.3. Geologi

Geologi wilayah Kota Parepare secara umum dapat dibagi menjadi tiga satuan yaitu: (1) dataran rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai KarajaE, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar Soreang. Tingginya berkisar antara 0 sampai 25 meter di atas muka laut, dengan lereng landai hingga datar. (2) perbukitan secara luas menempati bagian Timur wilayah kota, memanjang dengan arah kurang lebih Utara Selatan, umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar antara 25 sampai 53 meter di atas muka laut di sekitar Bacukiki dan Lapadde.

#### 2.1.1.4. Hidrologi

Sumber air permukaan di Kota Parepare berasal dari aliran air sungai yang melintas di Kota Parepare dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat kota dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Parepare dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih. Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Sumber air tanah dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu Sumur Dalam P-1f Harapan, Sumur Dalam P-1g Harapan, Sumur Dalam P-2 G Soreang, Sumur Dalam P-4 C Takkalao, Sumur Dalam P-4 D Takkalao, Sumur Dalam P-5 C Wekke'e, Sumur Dangkal Labatu, Sumur Dalam P-8 A Ladoma 2, Sumur Dalam P-9 A Lapadde, Sumur Dalam P-10 A Lanyer, Sumur Dalam P-11 A Tegal, Sumur Dalam P-12 A Gudang Obat, Sumur Dalam P-13a Gelora Mandir. Gambaran perkembangan kapasitas air bawah tanah dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3  
Perkembangan Kapasitas Produksi Air Tanah Dalam Tahun 2018–2022

| Instalasi Air Tanah Dalam       | 2018<br>(ltr/dt) | 2019<br>(ltr/dt) | 2020<br>(ltr/dt) | 2021<br>(ltr/dt) | 2022<br>(ltr/dt) |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sumur Dalam P-1D Harapan        | -                | -                | -                | -                | -                |
| Sumur Dalam P-1E Harapan        | -                | -                | -                | -                | -                |
| Sumur Dalam P-1F Harapan        | 19,31            | 20,00            | 21,40            | 14,50            | 12,90            |
| Sumur Dalam P-1G Harapan        | 18,47            | 8,60             | 7,43             | 4,70             | 5,30             |
| Sumur Dalam P-2F Soreang        | 19,63            | -                | -                | -                | -                |
| Sumur Dalam P-2G Soreang        | 18,24            | 26,88            | 26,10            | 22,50            | 19,63            |
| Sumur Dalam P-4C Takkalao       | 19,58            | 18,23            | 17,87            | 12,10            | 9,95             |
| Sumur Dalam P-4D Takkalao       | 20,00            | 17,16            | 21,62            | 17,00            | 18,70            |
| Sumur Dalam P-5C Wekke'e        | 19,52            | 21,20            | 20,73            | 17,20            | 19,45            |
| Sumur Dangkal Labatu            | 3,51             | 3,31             | 3,25             | 3,25             | 3,10             |
| Sumur Dalam P-6A Korem          | 17,77            | -                | -                | -                | -                |
| Sumur Dalam P-7A Laupe          | 8,21             | 8,01             | -                | -                | -                |
| Sumur Dalam P-8A Ladoma 1       | 18,15            | 18,90            | 16,67            | -                | -                |
| Sumur Dalam P-8A Ladoma 2       | 18,27            | 12,20            | 17,68            | 15,50            | 16,85            |
| Sumur Dalam P-9A Lapadde        | 20,00            | 16,60            | 14,48            | 14,20            | 16,60            |
| Sumur Dalam P-10A Larianyareng  | 20,00            | 7,10             | 9,44             | 5,00             | 5,56             |
| Sumur Dalam P-11A Tegal         | 20,00            | 19,00            | 18,37            | 15,80            | 14,78            |
| Sumur Dalam P-12A Gudang Obat   | 20,00            | 17,00            | 19,39            | 13,70            | 14,30            |
| Sumur Dalam P-13A Glora Mandiri | 20,00            | 12,40            | 10,67            | 7,00             | 6,10             |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>300,66</b>    | <b>226,59</b>    | <b>225,10</b>    | <b>162,45</b>    | <b>163,22</b>    |

Sumber: Profil PDAM Kota Parepare tahun 2023

Gambaran perkembangan kapasitas produksi air permukaan dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan Tahun 2018–2022

| Air Permukaan        | 2018<br>(ltr/dt) | 2019<br>(ltr/dt) | 2020<br>(ltr/dt) | 2021<br>(ltr/dt) | 2022<br>(ltr/dt) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| IPA 1 Sungai Karajae | 30,12            | 29,58            | 29,58            | 30,10            | 25,30            |
| IPA 2 Sungai Karajae | 30,18            | 27,38            | 27,38            | 21,30            | 17,20            |
| IPA 3 Sungai Karajae | 13,67            | 14,00            | 14,00            | 19,30            | 16,67            |
| IPA 4 Sungai Karajae | 16,79            | 21,16            | 21,16            | 17,30            | 14,17            |
| IPA 5 Sungai Karajae | 16,43            | 20,56            | 20,56            | 19,70            | 16,05            |
| <b>Jumlah</b>        | <b>107,19</b>    | <b>112,68</b>    | <b>112,68</b>    | <b>107,70</b>    | <b>89,39</b>     |

Sumber Data : Profil PDAM Kota Parepare tahun 2023

Gambaran perkembangan produksi air bersih, distribusi dan kebocoran teknis penyediaan air bersih yang dikelola PDAM Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Data Produksi, Distribusi dan Kebocoran Teknis Penyediaan Air Bersih  
yang dikelola PDAM Kota Parepare Tahun 2022

| No         | Uraian                 | Satuan               | Volume         | Kondisi            |
|------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| <b>I</b>   | <b>Data Produksi</b>   |                      |                |                    |
| 1          | Kapasitas Produksi     | ltr / dtk            | 252,61         |                    |
| 2          | Kapasitas Desain       | ltr / dtk            | 335,00         |                    |
| 3          | Kapasitas Pasang       | ltr / dtk            | 335,00         |                    |
| 4          | Produk Aktual          | ltr / thn            |                |                    |
| <b>II</b>  | <b>Data Distribusi</b> |                      |                |                    |
| 1          | Kapasitas Distribusi   | ltr / dtk            | 270,54         |                    |
| 2          | Asumsi Kebutuhan Air   | ltr / dtk            | 337,20         |                    |
| 3          | Ratio Kebutuhan        | %                    |                |                    |
| 4          | Air Terjual            | m <sup>3</sup> / thn | 4.6628.506     |                    |
| 5          | Air Terdistribusi      | m <sup>3</sup> / thn | 7.345.739      |                    |
| 6          | Total Penjualan Air    | Rp                   | 35.175.528.679 |                    |
| 7          | Jumlah Mobil Tanki     | unit                 | 3,00           | 2 Baik,<br>1 Rusak |
| <b>III</b> | <b>Data Kebocoran</b>  |                      |                |                    |
| 1          | Kebocoran Teknis       | %                    | 36,99          |                    |

Sumber: Profil PDAM Kota Parepare tahun 2023

Ditinjau dari keadaan hidrologisnya, Kota Parepare dalam memanfaatkan sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air sungai KarajaE. Sungai ini mempunyai debit air 250 liter/detik pada saat normal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan daerah aliran sungai di Kota Parepare sangat mendesak dilakukan, terlebih lagi dengan wilayah yang terkait langsung dengannya, seperti kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan daerah resapan hujan.

Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 m yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah.

#### 2.1.1.5. Klimatologi

Wilayah Kota Parepare memiliki dua pola musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dari data curah hujan yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV menunjukkan bahwa curah hujan tahunan mencapai 5998 mm<sup>3</sup>/thn

untuk 2 lokasi pos data hujan. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 250 mm<sup>3</sup> dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan April dan tertinggi pada bulan November.

Tabel. 2.6  
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Tahun                                                               | 2018                           |            | 2019                           |            | 2020                           |            | 2021                           |            | 2022                           |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Bulan                                                               | Curah Hujan (mm <sup>3</sup> ) | Hari Hujan | Curah Hujan (mm <sup>3</sup> ) | Hari Hujan | Curah Hujan (mm <sup>3</sup> ) | Hari Hujan | Curah Hujan (mm <sup>3</sup> ) | Hari Hujan | Curah Hujan (mm <sup>3</sup> ) | Hari Hujan |
| <b>DATA POS HUJAN BUKIT HARAPAN KEL. BUKIT HARAPAN KEC. SOREANG</b> |                                |            |                                |            |                                |            |                                |            |                                |            |
| Januari                                                             | 210                            | 13         | 144                            | 18         | 721                            | 20         | 313                            | 21         | 284                            | 10         |
| Februari                                                            | 213                            | 16         | 204                            | 15         | 482 "                          | 17         | 172                            | 14         | 280                            | 17         |
| Maret                                                               | 170                            | 11         | 108                            | 11         | 205                            | 14         | 315                            | 19         | 189                            | 10         |
| April                                                               | 193                            | 11         | 58                             | 11         | 154                            | 16         | 90                             | 9          | 69                             | 14         |
| Mei                                                                 | 177                            | 9          | 33                             | 4          | 91                             | 13         | 87                             | 4          | 209                            | 14         |
| Juni                                                                | 169                            | 16         | 44                             | 8          | 91                             | 9          | 51                             | 8          | 114                            | 13         |
| Juli                                                                | 40                             | 3          | -                              | -          | 85                             | 11         | 117                            | 9          | 86                             | 13         |
| Agustus                                                             | 20                             | 1          | 31                             | 1          | 83                             | 3          | 66                             | 8          | 83                             | 7          |
| September                                                           | 5                              | 4          | -                              | -          | 71                             | 10         | 149                            | 10         | 228                            | 12         |
| Oktober                                                             | 26                             | 3          | 31                             | 1          | 188                            | 14         | 144                            | 12         | 255                            | 24         |
| November                                                            | 154                            | 14         | 149                            | 9          | 323                            | 10         | 276                            | 17         | 522                            | 19         |
| Desember                                                            | 455                            | 25         | 216                            | 13         | 386                            | 22         | 393                            | 16         | 467                            | 24         |
| Total                                                               | 1662                           | 126        | 1018                           | 76         | 2398                           | 159        | 2173                           | 147        | 2786                           | 177        |
| <b>DATA POS HUJAN BULU DUA KEL. GALUNG MALOANG KEC. BACUKIKI</b>    |                                |            |                                |            |                                |            |                                |            |                                |            |
| Januari                                                             | 596                            | 12         | 37                             | 7          | 473                            | 7          | 334                            | 14         | 197                            | 7          |
| Februari                                                            | 226                            | 10         | 80                             | 5          | 226                            | 7          | 269                            | 10         | 503                            | 14         |
| Maret                                                               | 94                             | 7          | 125                            | 7          | 251                            | 10         | 357                            | 7          | 474                            | 13         |
| April                                                               | 228                            | 7          | 128                            | 5          | 96                             | 4          | 119                            | 4          | 43                             | 6          |
| Mei                                                                 | 124                            | 7          | 19                             | 1          | 112                            | 7          | 131                            | 3          | 222                            | 11         |
| Juni                                                                | 140                            | 7          | 45                             | 7          | 72                             | 5          | 60                             | 3          | 93                             | 6          |
| Juli                                                                | 17                             | 4          | 13                             | 1          | 52                             | 5          | 44                             | 4          | 75                             | 5          |
| Agustus                                                             | 10                             | 1          | 38                             | 1          | 2                              | 1          | 122                            | 2          | 87                             | 1          |
| September                                                           | 4                              | 1          | -                              | -          | 39                             | 4          | 111                            | 2          | 137                            | 6          |
| Oktober                                                             | 21                             | 2          | 1                              | 1          | 168                            | 7          | 138                            | 3          | 217                            | 11         |
| November                                                            | 80                             | 5          | 137                            | 8          | UI                             | 6          | 304                            | 16         | 696                            | 9          |
| Desember                                                            | 475                            | 20         | 121                            | 5          | 456                            | 12         | 766                            | 20         | 468                            | 16         |
| Total                                                               | 2015                           | 83         | 744                            | 48         | 1947                           | 75         | 2755                           | 88         | 3212                           | 105        |
| Total Pos Bukit Harapan + Bulu Dua                                  | 3677                           | 209        | 1762                           | 124        | 4345                           | 234        | 4928                           | 235        | 5998                           | 282        |

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV, 2023

Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV terkait data jumlah curah hujan dan hari hujan bulanan Kota Parepare tahun 2018-2022 bersumber dari data pos hujan. Di Kota

Parepare terdapat dua pos ketersediaan peralatan perhitungan curah hujan yakni berlokasi di Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang dan Bulu Dua, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki.

#### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kota Parepare terdiri atas beberapa bagian diantaranya yaitu Lahan Hutan, Lahan Permukiman dan Lahan Ladang. Namun untuk lebih jelasnya komposisi penggunaan lahan di Kota Parepare pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7  
Komposisi Penggunaan Lahan Tahun 2021

| No. | Penggunaan Lahan         | Luasan Ha       | persentase    |
|-----|--------------------------|-----------------|---------------|
| 1   | Bangunan Industri        | 33,39           | 0,34          |
| 2   | Belukar                  | 858,13          | 8,67          |
| 3   | Hamparan Pasir Pantai    | 0,9813          | 0,01          |
| 4   | Hutan Campuran           | 2.135,85        | 21,58         |
| 5   | Jaringan Jalan           | 6,91            | 0,07          |
| 6   | Ladang                   | 4.290,13        | 43,34         |
| 7   | Pelabuhan Laut           | 8,40            | 0,08          |
| 8   | Perkebunan               | 105,22          | 1,06          |
| 9   | Permukiman               | 1.169,02        | 11,81         |
| 10  | Pertambangan             | 18,28           | 0,18          |
| 11  | Peternakan               | 37,72           | 0,38          |
| 12  | Sawah Irigasi            | 908,07          | 9,17          |
| 13  | Sungai                   | 79,28           | 0,8           |
| 14  | Tambak Ikan              | 95,55           | 0,97          |
| 15  | Tanah Kosong             | 147,24          | 1,49          |
| 16  | Tempat Penimbunan Sampah | 4,97            | 0,05          |
|     | <b>Jumlah</b>            | <b>9.933,22</b> | <b>100,00</b> |

Sumber data: Peta Revisi RTRW Kota Parepare\_ Peta RBI Skala 1:25.000\_Citra, Satelit SPOT7

#### 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kota Parepare, adalah sebagai berikut:

- Untuk tanah longsor diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan

pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budi daya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut.

- Untuk daerah rawan banjir dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya di kawasan yang sering terkena banjir terutama pada pusat kota dan bantaran sungai KarajaE.
- Melaksanakan penanaman atau pengendalian disekitar pesisir pantai dengan tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang.
- Menetapkan kawasan rawan bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti membangun hidran-hidran air yang tersebar merata disepanjang jalan primer, kawasan perumahan dan permukiman serta kawasan yang diidentifikasi rawan bencana kebakaran.
- Untuk rawan gempa bumi, gelombang tsunami dan gelombang pasang diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada sepanjang pesisir pantai Kota Parepare.

Titik rawan bencana dan lokasi evakuasi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare

| Kecamatan      | Rawan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi Evakuasi                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ujung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Bulu (rawan longsor)</li> <li>- Kawasan BTN Pepabri/BTN Lapadde (rawan longsor)</li> <li>- Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin)</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan/Alun-alun A. Makkasau</li> <li>- SMAN 4</li> <li>- Polsek Ujung</li> <li>- Lapangan Korem</li> </ul> |
| Bacukiki Barat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cappa Galung, (rawan longsor)</li> <li>- Kawasan SPPBE Lumpue (rawan kebakaran/ledakan)</li> <li>- Belakang SMKN 1/SMPN 5, kampung lapangape (rawan longsor)</li> <li>- Kawasan Kampung Baru/Kesuma Timur (rawan longsor)</li> <li>- Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Upacara Kota</li> <li>- Lapangan Sumpang</li> </ul>                                                  |
| Bacukiki       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Mangimpuru/Lontangnge (rawan banjir dan longsor)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Lemoe</li> <li>- Lapangan Lompoe</li> </ul>                                                          |
| Soreang        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Baru (rawan longsor)</li> <li>- Kawasan Depot Pertamina (rawan kebakaran)</li> <li>- Sekitar Bukit Indah/Ujung Baru (rawan longsor)</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Sepak Bola Laupe (kampung duri)</li> <li>- Lapangan Lauleng</li> </ul>                               |



| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                                                                                                                                                                       | Tahun 2024-2026                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kecamatan                                      | Rawan Bencana                                                                                                                                                                         | Lokasi Evakuasi                                                                                                              |
|                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belakang Kantor Kec. Soreang/SMA 3 (rawan longsor)</li> <li>- Kawasan Perumahan Sosial (rawan longsor)</li> <li>- Pesisir Pantai.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Takkalao</li> <li>- Lapangan Kavelari</li> <li>- Lapangan Umpar</li> </ul> |

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

#### 2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

##### 2.1.1.8.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur tata ruang wilayah Kota Parepare merupakan rencana pembentukan dari berbagai elemen kegiatan serta jaringan transportasi, jaringan sarana dan prasarana yang mendukung pusat-pusat pelayanan, sehingga membentuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan potensi wilayah Kota Parepare, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Kota Parepare utamanya dalam era keterbukaan. Penjenjangan sistem pusat-pusat pelayanan diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pemerataan pembangunan pada setiap kawasan di Kota Parepare, sehingga peran dari pusat-pusat pelayanan menjadi pusat distribusi dan pelayanan yang akan terbentuk secara terhirarki.

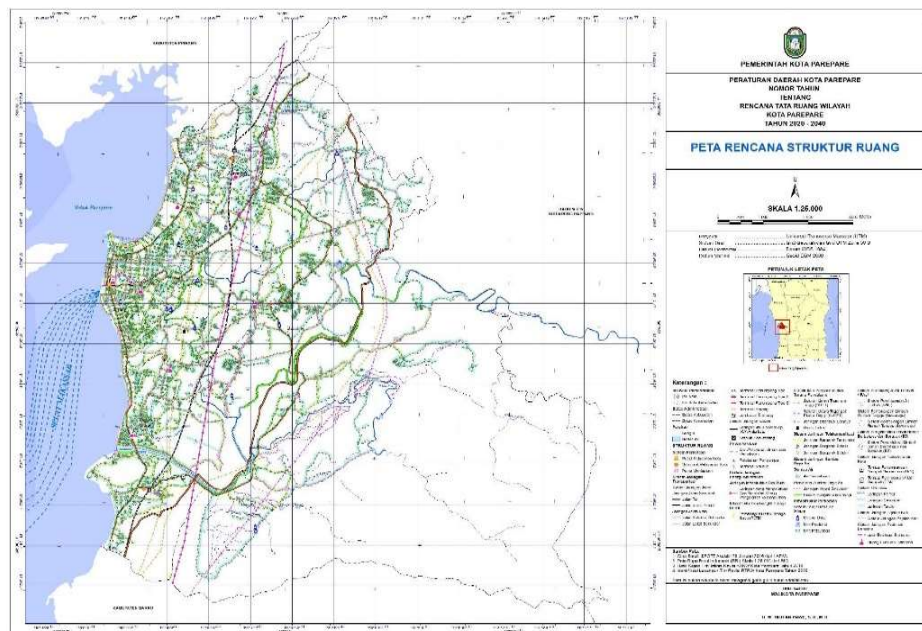
Kota Parepare yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Parepare di Kawasan Timur Indonesia yang berbatasan dengan selat Makassar dan rencana struktur ruang wilayah kota merupakan pusat kegiatan wilayah (PKW). Kota Parepare sebagai KSN Kawasan Parepare berfungsi kuat sebagai salah satu jalur transportasi laut nasional dan internasional, dan mempunyai beberapa pelabuhan yang sangat potensial dijadikan muara keluar masuk arus barang dari daerah yang satu ke daerah lainnya. Selain dari pada itu, pembangunan jalur lingkaran tengah dan jalur lingkaran luar juga sangat mendukung perkembangan kawasan perkotaan di kota atas.

Secara umum sistem pusat dan skala pelayanan di Kota Parepare terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah yang meliputi; pusat industri manufaktur dan pergudangan, pusat perdagangan, pusat pelayanan transportasi laut, pusat pelayanan transportasi darat, pusat pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan serta pusat pelayanan olahraga.

Sedangkan untuk pusat pelayanan kota meliputi; Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota di Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat dan Pusat Pelayanan Transportasi, Perdagangan dan Jasa di Kawasan Kota Lama Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung. Untuk Sub Pusat Pelayanan Kota ada tiga buah yaitu: Pelayanan Kecamatan Bacukiki Barat di Lumpue, Pelayanan Kecamatan Soreang di Bukit Harapan (Pindah ke kawasan Stasiun Soreang), Pelayanan Kecamatan Bacukiki di Lompoe (Pindah ke Kawasan Permukiman Baru di Lompoe), dan Pelayanan Kecamatan Ujung di Lapadde.

Untuk Pusat Lingkungan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, olahraga, hubungan sosial dan pengembangan budaya, serta pelayanan administrasi dan perbelanjaan barang kebutuhan harian maupun jasa. Pusat lingkungan dialokasikan menyebar pada setiap kelurahan dan lingkungan perumahan dan permukiman.

**Gambar 2.2**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kota Parepare 2021-2041**



Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

#### 2.1.1.8.2. Kawasan Strategis Kota Parepare

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare menetapkan kawasan strategis Kota Parepare merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi. Penetapan Kawasan Strategis Kota (KSK) di Parepare adalah:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terletak pada pusat bisnis utama kota lama dan atau jalur jalan utama meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung dan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang; dan
2. Kawasan Pengembangan agrowisata di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki;

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi :

1. kawasan pusat pemerintahan kota terletak disepanjang jalur jalan Jend. Sudirman (jalan lingkar bawah) di Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Cappa Galung di Kecamatan Bacukiki Barat;
2. kawasan pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki; dan
3. kawasan olahraga di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki

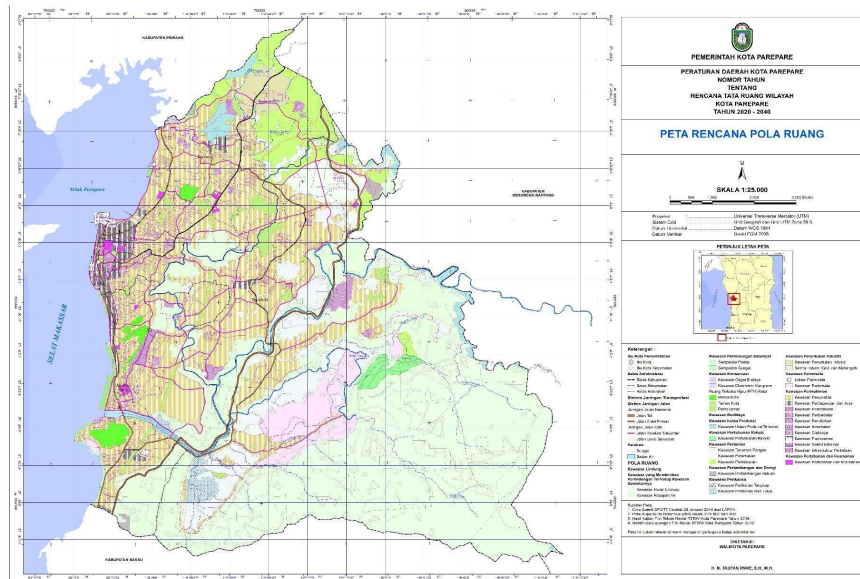
c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya dukung dan Lingkungan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu:

1. Kebun Raya Jompie yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang;
2. Kawasan taman hutan penelitian dan wanawisata (Kawasan Hutan Alitta) di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang.



Gambar 2.4.  
Peta Rencana Pola Ruang Kota Parepare



Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

#### 2.1.1.8.4. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan

Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan luas kurang lebih 1.155 hektar yang tersebar di 4 (empat) kecamatan.

Pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas keseluruhan kurang lebih 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi:

- Kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki dengan luas keseluruhan kurang lebih 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
- Kawasan persawahan tadah hujan di Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, dan Kelurahan Lumpue dengan luas keseluruhan kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) hektar.

Pengelolaan kawasan pertanian hortikultura dengan komoditas utama tanaman bayam, sawi, terong, kacang panjang, kangkung,

mangga, dan di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Soreang. Kawasan pertanian perkebunan dengan komoditas utama jambu mete, kemiri, cengkeh dan kelapa yang tersebar di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang berupa pertanian lahan kering, tegalan dan ladang dan semak belukar dengan luas keseluruhan kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar.

Pengelolaan kawasan peternakan dengan komoditas utama ternak sapi, kambing dan ayam di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung dengan luas keseluruhan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar.

Pengelolaan kawasan peruntukan perikanan dengan kebijakan pengembangan hasil perikanan laut dengan memperhatikan daya dukung dan ketersediaan potensi sumber daya pada kawasan-kawasan dimaksud. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budi daya. Pengelolaan Kawasan peruntukan perikanan tangkap dengan jalur penangkapan ikan dengan batas 0 (nol) sampai 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai dan fasilitas operasional Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang. Pengelolaan Kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri atas:

- a. pengembangan budi daya perikanan darat terletak di Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang;
- b. pengembangan terumbu karang sebagai kawasan konservasi alam yang terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
- c. budi daya rumput laut di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang.

#### 2.1.1.8.5. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Parepare diarahkan pada perannya sebagai tujuan untuk menyelenggarakan jasa



pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kota Parepare dengan luasan kurang lebih 310 (tiga ratus sepuluh) hektar terdiri atas:

- a. Kawasan pariwisata di Kelurahan Lemoe, Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki; Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Ujung Lare di Kecamatan Soreang; Kelurahan Ujung Sabbang di Kecamatan Ujung
- b. Pengembangan daya tarik wisata lainnya, meliputi:
  1. Museum Labangenge di Kecamatan Bacukiki Barat;
  2. Museum BJ. Habibie di Kecamatan Ujung;
  3. Desa Wisata Bacukiki di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki;
  4. Saoraja di Kecamatan Ujung;
  5. Monumen Alam Batu Kiki' di Kecamatan Bacukiki;
  6. Pesisir Tonrangeng di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
  7. Taman wisata Lappa Anging di Kecamatan Bacukiki;
  8. Kawasan wisata alam ladoma di Kecamatan Bacukiki;
  9. Kawasan Keanekaragaman Hayati di Bilalangge (goa kelelawar/air terjun) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan bacukiki;
  10. Kawasan Cempae/Sumur Jodoh di Kecamatan Soreang;
  11. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bacukiki.
  12. Kolam Renang Jompie di Kecamatan Soreang;
  13. Kolam Renang/Water Boom Ujung Lare di Kecamatan Soreang;
  14. Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun dan Kawasan Alun-alun Kota Lapangan A. Makkasau di Kecamatan Ujung; dan
  15. Taman Bermain Lamario di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat



#### 2.11.8.6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kota Parepare dengan luasan kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan industri; dan
- b. sentra industri kecil dan menengah

Kawasan peruntukan industri di Kota Parepare ditetapkan di:

- a. Kawasan peruntukan industri berupa kawasan peruntukan industri di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang dan Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung
- b. Sentra industri kecil dan menengah di Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang.

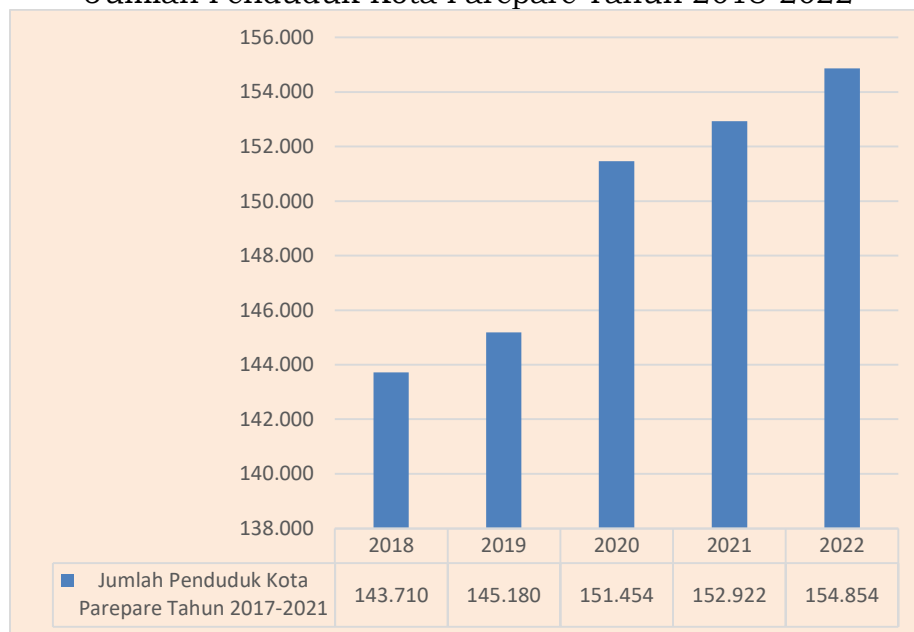
#### 2.1.1.8.7. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Parepare tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, Kelurahan labukkang, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung.

#### 2.1.1.8.9. Demografi

Jumlah penduduk Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare tersebut disajikan dalam Grafik berikut ini:

Grafik 2.1  
Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2022

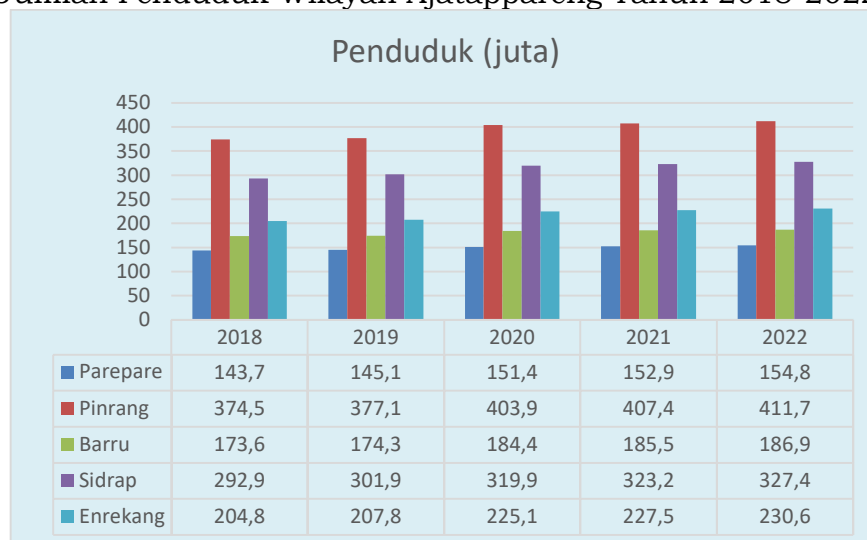


Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2023

Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare bahwa jumlah penduduk Kota Parepare tahun 2022 sebanyak 157.442 Jiwa. Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistika, melihat gratis di atas bahwa, tahun 2018 meningkat menjadi 143.710 jiwa dan tahun 2019 mencapai 145.180 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 151.454 jiwa. Jumlah angka pada tahun 2021 adalah 152.922 jiwa. Tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare menjadi 154,854 per satuan ribu jiwa.

Jumlah penduduk Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 terus meningkat tiap tahunnya, jika dibanding dengan jumlah penduduk daerah sekitarnya di Kawasan Ajatappareng. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.2  
Jumlah Penduduk Wilayah Ajatappareng Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Dari grafik tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, dan terakhir Kota Parepare. Secara berturut-turut pada tahun 2022 adalah Kabupaten Pinrang sebesar 411,7 juta jiwa, disusul Kabupaten Sidrap sebanyak 327,4 juta jiwa, Kabupaten Enrekang sebanyak 230,6 juta jiwa, Kabupaten Barru sebanyak 186,9 juta jiwa, dan terakhir Kota Parepare dengan jumlah penduduk sebanyak 154,8 juta jiwa.

Adapun Penyebaran penduduk Kota Parepare dari Tahun 2018-2022 terlihat pada tabel ini:

Tabel 2.9  
Jumlah Penduduk (ribu) Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022

| KECAMATAN      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bacukiki       | 19.190  | 21.239  | 25.511  | 26.327  | 28.129  |
| Bacukiki Barat | 44.033  | 44.186  | 45.197  | 45.660  | 45.934  |
| Ujung          | 34.847  | 33.463  | 33.843  | 33.863  | 33.758  |
| Soreang        | 45.640  | 46.292  | 46.903  | 47.072  | 47.033  |
| Jumlah         | 143.710 | 145.180 | 151.454 | 152.922 | 154.854 |

Sumber: BPS Kota Parepare Tahun 2023

Kecamatan dengan jumlah penduduk **terbesar** pada tahun 2022 adalah Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk mencapai 47.033 jiwa, kemudian menyusul Kecamatan Bacukiki barat dengan jumlah

penduduk 45.934 jiwa, kemudian menyusul Kecamatan Ujung dengan jumlah penduduk 33.758 jiwa dan terakhir Kecamatan Bacukiki dengan jumlah Penduduk terkecil sebesar 28.129 jiwa.

Tabel 2.10  
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022

| Kecamatan       | Persentase Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk<br>(Orang/ $km^2$ ) |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| (1)             | (2)                     | (3)                                    |
| Bacukiki        | 17,22                   | 422                                    |
| Bacukiki Barat  | 29,86                   | 3,533                                  |
| Ujung           | 22,14                   | 2,987                                  |
| Soreang         | 30,78                   | 5,646                                  |
| <b>Parepare</b> | <b>100,00</b>           | <b>1,559</b>                           |

Sumber: BPS Kota Parepare Tahun 2023

Pada Tabel ini, tergambarakan kepadatan Penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Soreang dengan tingkat kepadatan 5650,90 Orang/ $km^2$  dengan persentase penduduk mencapai 30,78% dari total penduduk Kota Parepare. Disusul Kecamatan Bacukiki Barat dengan tingkat kepadatan 3512,31 Orang/ $km^2$  dengan persentase penduduk mencapai 29,86%. Kecamatan Ujung dengan tingkat kepadatan 2996,73 Orang/ $km^2$  dan persentase penduduk mencapai 22,14%. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Bacukiki yaitu 394,71 Orang/ $km^2$  dengan persentase penduduk mencapai 17,22%. Tingkat kepadatan Kota Parepare pada tahun 2021 mencapai 1539,53 Orang/ $km^2$ .

Untuk dapat melihat kondisi kependudukan suatu daerah tergambarakan pada jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Parepare terkategoriikan sebagai tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

Tabel 2.11  
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Kota Parepare Tahun 2022

| Kelompok<br>Umur | Jenis Kelamin/ Sex (Jiwa) |           |        |
|------------------|---------------------------|-----------|--------|
|                  | Laki-laki                 | Perempuan | Jumlah |
| (1)              | (2)                       | (3)       | (4)    |
| 0 – 4            | 7633                      | 7316      | 14949  |
| 5 – 9            | 6383                      | 6037      | 12420  |
| 10 – 14          | 6413                      | 6107      | 12520  |
| 15 – 19          | 6792                      | 6470      | 13262  |
| 20 – 24          | 6733                      | 6665      | 13398  |
| 25 – 29          | 6908                      | 6799      | 13707  |

| Kelompok<br>Umur | Jenis Kelamin/ Sex (Jiwa) |              |               |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------|
|                  | Laki-laki                 | Perempuan    | Jumlah        |
| 30 – 34          | 6454                      | 6344         | 12798         |
| 35 – 39          | 5907                      | 5994         | 11901         |
| 40 – 44          | 5431                      | 5406         | 10837         |
| 45 – 49          | 4682                      | 4819         | 9501          |
| 50 – 54          | 4042                      | 4417         | 8459          |
| 55 – 59          | 3474                      | 3873         | 7347          |
| 60 – 64          | 2567                      | 2920         | 5487          |
| 65 – 69          | 1563                      | 1992         | 3555          |
| 70 – 74          | 967                       | 1426         | 2393          |
| 75 +             | 839                       | 1481         | 2320          |
| <b>Jumlah</b>    | <b>76788</b>              | <b>78066</b> | <b>154854</b> |

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2023

Pada tabel ini terlihat bahwa kelompok umur 0-4 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 14.949 jiwa atau 9,65% dari populasi, kemudian disusul kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 13.707 jiwa atau 8,85% dari populasi, dan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 13.398 jiwa atau 8,65% dari populasi. Juga terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk Laki-laki. Penduduk perempuan mencapai 78.066 jiwa atau 50,41% sedangkan Laki-laki mencapai 76.788 jiwa atau 49,5%.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

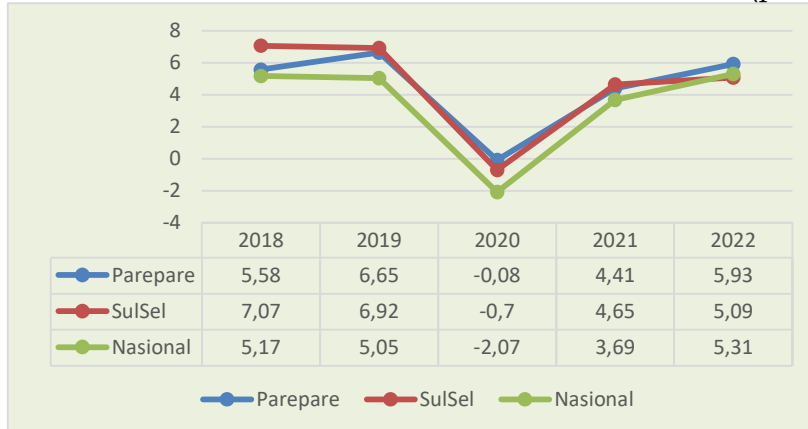
##### 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1994 hingga tahun 2003, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 1993 sebagai tahun dasar dan tahun 2004-2012 pertumbuhannya dihitung berdasarkan tahun dasar 2000. Namun pada tahun 2013 hingga saat ini, pertumbuhan dihitung dengan harga konstan 2010.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2018-2022 dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.3.  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen)

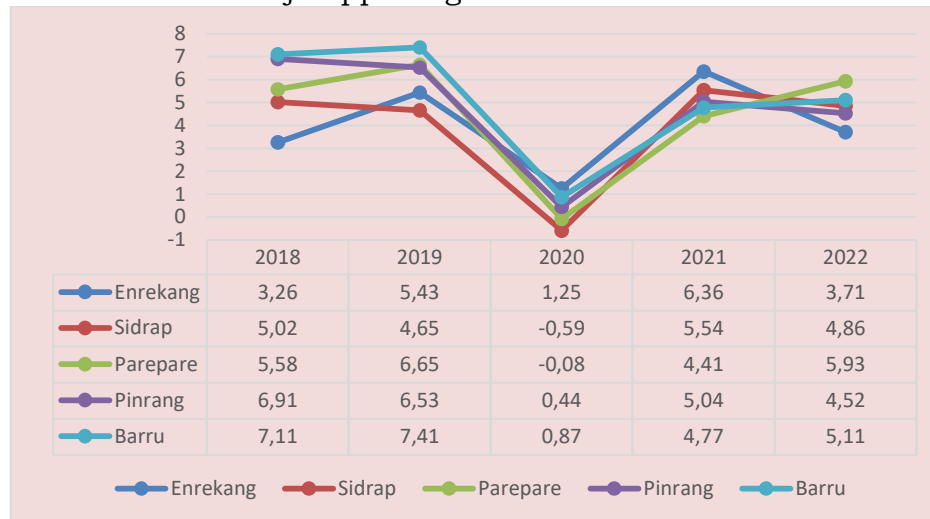


Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi baik ditingkat Nasional maupun regional cenderung mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan Kota Parepare pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare berkurang hanya tumbuh 5,58% (provinsi 7,07% dan nasional 5,17%), sebelum kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 6,65% (provinsi 6,92% dan nasional 5,05%). Selanjutnya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi disemua tingkatan mengalami kontraksi yang cukup dalam sebagai dampak dari pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare -0,08%, lebih tinggi dibanding dengan Sulawesi Selatan sebesar -0,07% dan nasional sebesar -2,07. Sedangkan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional dan Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Parepare-SulSel-Nasional mengalami peningkatan positif menjadi 4,41-4,65-3,69. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor

Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Berikut merupakan data grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah se-Ajattappareng tahun 2018-2022.

Grafik 2.4.  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah  
Se-Ajatappareng Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Kinerja Ekonomi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2020 menghadapi tekanan yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 yang dimulai di awal tahun hingga saat ini ditahun 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi berkelanjutan. Namun, dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Parepare dalam menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 mampu menahan laju kelesuan ekonomi Kota Parepare sehingga berkontraksi tidak terlalu dalam. Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional, sehingga kontraksi ekonomi yang dialami secara nasional dan regional sangat mempengaruhi ekonomi Kota Parepare. Pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari Nilai PDRB 17 kategori lapangan usaha yang ada. Untuk Kota Parepare nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dapat dilihat seperti yang tertera dibawah ini.



Tabel 2.12  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga **Konstan** 2010  
Menurut Lapangan Usaha Kota Parepare Tahun 2018-2022  
(milyard Rupiah)

| Lapangan Usaha                                                     | 2018             | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                              | 306,083          | 323,07          | 327,94          | 326,23          | 326,32          |
| 2. Pertambangan Dan Galian                                         | 11,353           | 11,30           | 11,19           | 11,23           | 11,24           |
| 3. Industri Pengolahan                                             | 95,732           | 103,61          | 101,54          | 109,15          | 118,24          |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 4,646            | 4,90            | 5,03            | 5,23            | 5,45            |
| 5. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah                            | 13,547           | 13,96           | 14,46           | 14,38           | 14,56           |
| 6. Konstruksi                                                      | 640,812          | 689,15          | 685,45          | 697,51          | 728,30          |
| 7. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor             | 777,251          | 830,80          | 796,22          | 856,06          | 941,08          |
| 8. Transportasi dan Pergudangan                                    | 266,204          | 290,11          | 247,19          | 264,72          | 309,55          |
| 9. Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum                           | 303,385          | 323,43          | 320,13          | 337,47          | 362,35          |
| 10. Informasi Dan Komunikasi                                       | 340,329          | 361,14          | 390,83          | 410,77          | 415,83          |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 382,998          | 390,77          | 407,24          | 429,48          | 425,72          |
| 12. Real Estate                                                    | 449,620          | 465,56          | 483,91          | 492,11          | 499,26          |
| 13. Jasa Perusahaan                                                | 12,435           | 13,20           | 12,06           | 12,50           | 13,32           |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 358,221          | 409,96          | 407,91          | 434,06          | 452,03          |
| 15. Jasa Pendidikan                                                | 304,132          | 321,80          | 337,31          | 350,07          | 378,08          |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 229,001          | 239,92          | 265,05          | 281,50          | 303,15          |
| 17. Jasa Lainnya                                                   | 143,697          | 155,11          | 130,58          | 129,45          | 163,96          |
| <b>Kota Parepare</b>                                               | <b>4.639,447</b> | <b>4.947,79</b> | <b>4.944,03</b> | <b>5.161,92</b> | <b>5.468,43</b> |

Sumber: (i) BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya kebijakan pembatasan sosial dalam penanganan Pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada kegiatan perekonomian di sektor lapangan usaha tersebut. Di tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi di era pandemik mengalami peningkatan angka lapangan usaha menjadi 5.161,92 miliar rupiah.

Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh positif sebesar

15,97% dari Rp. 796,22 milyar pada tahun 2020 bertambah menjadi Rp. 856,06 Milyard, sektor konstruksi sebesar Rp. 685,45 Milyard pada tahun 2020 bertambah menjadi Rp. 697,51 Milyard atau tumbuh 15,33% pada tahun 2021, menyusul sektor real estate yang pada tahun 2020 sebesar Rp. 483,91 Milyard menjadi Rp. 492,11 Milyard atau bertumbuh 10,04%. Pertumbuhan riil setiap kategori Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.13  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga  
**Konstan** 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Parepare,  
Tahun 2018-2022 (%)

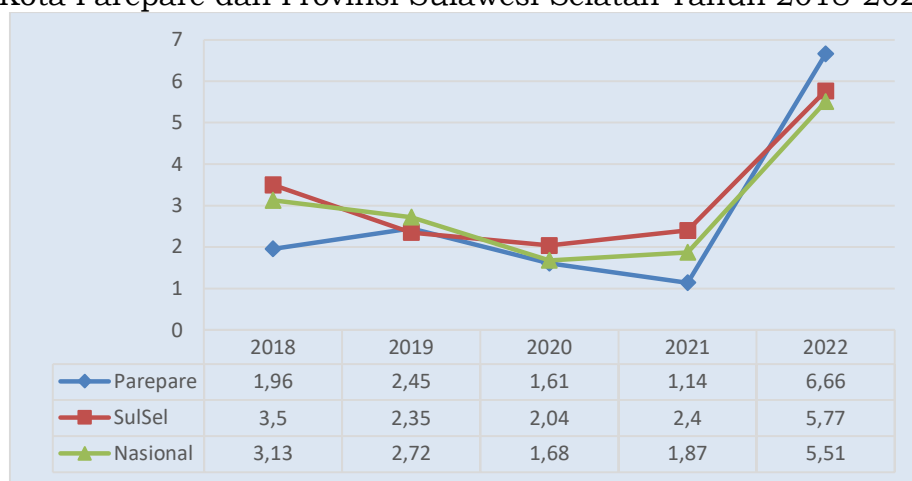
| No. | Lapangan Usaha                                      | 2018        | 2019        | 2020          | 2021        | 2022        |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1   | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                  | 8,34        | 5,57        | 1,51          | -0,52       | 0,03        |
| 2   | Pertambangan Dan Galian                             | 2,40        | (0,43)      | (1,00)        | 0,37        | 0,03        |
| 3   | Industri Pengolahan                                 | 2,25        | 8,23        | (2,01)        | 7,50        | 8,33        |
| 4   | Pengadaan Listrik dan Gas                           | 8,01        | 5,56        | 2,62          | 3,94        | 4,27        |
| 5   | Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah                | 8,03        | 3,01        | 3,61          | -0,52       | -0,06       |
| 6   | Konstruksi                                          | 6,48        | 7,54        | (0,54)        | 1,76        | 4,41        |
| 7   | Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor | 9,26        | 6,89        | (4,16)        | 7,52        | 9,93        |
| 8   | Transportasi dan Pergudangan                        | 8,47        | 8,98        | (14,79)       | 7,09        | 16,93       |
| 9   | Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum               | 11,40       | 6,61        | (1,02)        | 5,42        | 7,37        |
| 10  | Informasi Dan Komunikasi                            | 10,00       | 6,12        | 8,22          | 5,10        | 1,23        |
| 11  | Jasa Keuangan dan Asuransi                          | 2,84        | 2,03        | 4,21          | 5,46        | -0,88       |
| 12  | Real Estate                                         | 4,94        | 3,55        | 3,94          | 1,69        | 1,45        |
| 13  | Jasa Perusahaan                                     | 8,26        | 6,12        | (8,61)        | 3,63        | 6,59        |
| 14  | Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial    | (14,87)     | 14,44       | (0,50)        | 6,41        | 4,14        |
| 15  | Jasa Pendidikan                                     | 8,91        | 5,81        | 4,82          | 3,78        | 8,00        |
| 16  | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                  | 9,76        | 4,77        | 10,47         | 6,21        | 7,69        |
| 17  | Jasa Lainnya                                        | 11,47       | 7,94        | (15,82)       | -0,87       | 26,67       |
|     | <b>Pertumbuhan PDRB</b>                             | <b>5,58</b> | <b>6,65</b> | <b>(0,08)</b> | <b>4,41</b> | <b>5,93</b> |

Sumber: BPS Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

#### 2.1.2.1.2. Perbandingan Inflasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Nasional

Inflasi adalah peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terkendali. Untuk perbandingan tingkat inflasi Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.5  
Perbandingan Tingkat Inflasi  
Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2023

Laju inflasi Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2018, inflasi berkurang menjadi 1,96% dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 2,45% dan kemudian berkurang kembali menjadi 1,61% pada tahun 2020. Tahun 2021, inflasi mencapai angka 2,91%. Inflasi yang terjadi pada tahun 2020 merupakan inflasi terendah sebesar 1,61%, disaat yang sama inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional juga mencatat inflasi terendah yaitu masing-masing 2,04% dan 1,68%. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, dimana inflasi di Kota Parepare tercatat sebesar 6,66%, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,77% dan nasional sebesar 5,51%. Data ini memperlihatkan inflasi yang terjadi ditingkat regional dan nasional sangat mempengaruhi inflasi di Kota Parepare.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Nasional pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran  $3,0 \pm 1\%$ . Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga.

Tabel 2.14  
Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Komoditi                                | 2018        | 2019        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>UMUM</b>                             | <b>1,96</b> | <b>2,45</b> |
| Makanan                                 | 0,02        | 2,73        |
| Makanan, Minuman, Rokok                 | 3,02        | 4,03        |
| Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BBM    | 2,31        | 1,45        |
| Sandang                                 | 3,99        | 3,10        |
| Kesehatan                               | 2,41        | 2,52        |
| Pendidikan; Rekreasi dan Olahraga       | 2,18        | 5,10        |
| Transport; Komunikasi dan Jasa Keuangan | 2,14        | 0,32        |

Untuk tahun 2020 hingga tahun 2021, terjadi perubahan struktur komponen komoditi untuk Indeks Harga Konsumen menurut Kelompok Pengeluaran.

| Komoditi                                                     | 2020        | 2021        | 2022        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UMUM</b>                                                  | <b>1.61</b> | <b>4.09</b> | <b>1,14</b> |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau                               | 2.91        | 7.51        | 3,11        |
| Pakaian dan Alas Kaki                                        | 0.17        | 0.42        | 0,00        |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga        | 0.07        | 4.75        | 0,31        |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 2.12        | 2.85        | 0,11        |
| Kesehatan                                                    | 9.67        | 0.41        | -0,92       |
| Transportasi                                                 | 0.33        | 2.03        | 0,15        |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan                     | -0.99       | 0.69        | -0,04       |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                               | 1.23        | 2.38        | 0,14        |
| Pendidikan                                                   | -5.80       | 0.46        | 0,00        |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran                     | 1.42        | 2.83        | 0,43        |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                           | 5.48        | 2.89        | 0,57        |

Sumber: BPS Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2019, tiga komoditi penyumbang tertinggi pada angka inflasi kota parepare adalah pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,10%, kemudian makanan, minuman, rokok sebesar 4,03% dan ketiga komoditi sandang sebesar 3,10%. Dari data ini terlihat pergeseran komoditi yang menyumbang inflasi terbesar dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, komoditi penyumbang tertinggi pada

angka inflasi Kota Parepare adalah Kesehatan sebesar 9,67% kemudian Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 5,48%. Dan urutan ketiga adalah Makanan, Minuman, dan tembakau yang mencapai 2,91%. Di tahun 2021, penyumbang tertinggi adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 7,51%. Kemudian Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 4,75%.

#### 2.1.2.1.3. Kontribusi/Struktur Ekonomi

Penguasaan faktor-faktor ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak selalu sama. Keadaan ekonomi (dalam hal ini diwakili dengan angka PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Perbedaan tersebut selain mengakibatkan perbedaan besarnya PDRB antar wilayah juga mengakibatkan perbedaan pola atau struktur ekonomi antar wilayah. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Nilai produksi masyarakat dalam satu wilayah atau daerah merupakan kata lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dulunya dikenal dengan 9 sektor, namun sekarang menjadi 17 kategori lapangan usaha, yang menggambarkan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat dalam periode satu tahun. Berikut adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Parepare lima tahun terakhir.

Tabel 2.15

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Di Kota Parepare Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (milyard Rupiah)

| Lapangan Usaha                       | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan   | 496,97 | 527,68 | 545,28 | 572,87 | 619,23 |
| Pertambangan Dan Galian              | 21,69  | 21,73  | 21,97  | 22,17  | 22,86  |
| Industri Pengolahan                  | 134,92 | 150,98 | 148,83 | 161,17 | 182,10 |
| Pengadaan Listrik dan Gas            | 5,38   | 5,67   | 5,77   | 5,72   | 5,98   |
| Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah | 16,97  | 17,96  | 19,95  | 20,06  | 25,98  |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare                 |                  |                 |                 |                 | Tahun 2024-2026 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lapangan Usaha                                                 | 2018             | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
| Konstruksi                                                     | 1.013,11         | 1.135,45        | 1.131,62        | 1.199,36        | 1.329,05        |
| Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor            | 1.056,29         | 1.163,52        | 1.136,60        | 1.250,18        | 1.450,12        |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 359,85           | 396,81          | 339,51          | 374,34          | 487,14          |
| Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum                          | 409,89           | 452,61          | 461,61          | 495,39          | 560,64          |
| Informasi Dan Komunikasi                                       | 299,36           | 321,23          | 344,75          | 365,39          | 374,38          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 575,08           | 601,52          | 625,79          | 690,06          | 745,51          |
| Real Estate                                                    | 678,03           | 716,80          | 761,81          | 785,75          | 807,40          |
| JasaPerusahaan                                                 | 17,30            | 18,78           | 17,49           | 18,55           | 21,09           |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 564,74           | 660,97          | 669,37          | 718,92          | 752,90          |
| Jasa Pendidikan                                                | 434,62           | 470,17          | 502,62          | 504,76          | 572,31          |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 306,44           | 332,92          | 388,87          | 436,49          | 468,14          |
| Jasa Lainnya                                                   | 211,74           | 236,08          | 201,79          | 204,78          | 272,44          |
| <b>Kota Parepare</b>                                           | <b>6.602,518</b> | <b>7.230,40</b> | <b>7.323,65</b> | <b>7.825,98</b> | <b>6.679,28</b> |

Sumber : (i) BPS Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Adapun gambaran kontribusi/Struktur ekonomi Kota Parepare lima tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16  
Kontribusi/Struktur Ekonomi Kota Parepare Tahun 2018-2022 (%)

| No | Kategori/Sub kategori                               | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                  | 7,53         | 7,30         | 7,45         | 7,32         | 7,12         |
| 2  | Pertambangan Dan Galian                             | 0,33         | 0,30         | 0,30         | 0,28         | 0,26         |
| 3  | Industri Pengolahan                                 | 2,04         | 2,09         | 2,03         | 2,06         | 2,09         |
| 4  | Peng. Listrik dan Gas                               | 0,08         | 0,08         | 0,08         | 0,07         | 0,07         |
| 5  | Pengolahan Air dan Peng Sampah                      | 0,26         | 0,25         | 0,27         | 0,26         | 0,30         |
| 6  | Konstruksi                                          | <b>15,34</b> | <b>15,70</b> | <b>15,45</b> | <b>15,33</b> | <b>15,28</b> |
| 7  | Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor | <b>16,00</b> | <b>16,09</b> | <b>15,52</b> | <b>15,97</b> | <b>16,67</b> |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                        | 5,45         | 5,49         | 4,64         | 4,78         | 5,60         |
| 9  | Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum               | 6,21         | 6,25         | 6,30         | 6,33         | 6,45         |
| 10 | Informasi Dan Komunikasi                            | 4,53         | 4,44         | 4,71         | 4,67         | 4,30         |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                          | 8,71         | 8,32         | 8,54         | 8,82         | 8,57         |
| 12 | Real Estate                                         | <b>10,27</b> | <b>9,91</b>  | <b>10,40</b> | <b>10,04</b> | <b>9,28</b>  |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                                        |            |            |            | Tahun 2024-2026 |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| No                                             | Kategori/Sub kategori                                  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021            | 2022       |
| 13                                             | Jasa Perusahaan                                        | 0,26       | 0,26       | 0,24       | 0,24            | 0,24       |
| 14                                             | Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jamsos Wajib | 8,55       | 9,14       | 9,14       | 9,19            | 8,66       |
| 15                                             | Jasa Pendidikan                                        | 6,58       | 6,50       | 6,86       | 6,45            | 6,58       |
| 16                                             | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                     | 4,64       | 4,60       | 5,31       | 5,58            | 5,38       |
| 17                                             | Jasa Lainnya                                           | 3,21       | 3,27       | 2,76       | 2,62            | 3,13       |
| <b>PDRB</b>                                    |                                                        | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>      | <b>100</b> |

Sumber: BPS Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Dari Tabel di atas dapat dilihat struktur ekonomi distribusi persentase produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha Kota Parepare tahun 2018-2022 Kota Parepare mengalami pergeseran Pada tahun 2018, sektor real estate berhasil masuk urutan ketiga dengan nilai kontribusi 10,27% menggeser sektor administrasi pemerintahan ke posisi keempat dengan nilai kontribusi 8,55%, sedangkan urutan pertama adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,00% dan urutan kedua adalah sektor konstruksi sebesar 15,34%. Pada tahun 2019, komposisi ini tidak mengalami perubahan dimana sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,09%, sektor konstruksi sebesar 15,70% dan sektor real estate sebesar 9,91%. Sektor perdagangan besar dan eceran kembali berkontribusi terbesar pada struktur ekonomi Kota Parepare tahun 2020 dengan nilai kontribusi 15,52%, disusul sektor konstruksi sebesar 15,45% dan sektor real estate sebesar 10,40%. Di tahun 2021, tiga sector yang paling berkontribusi dalam peningkatan ekonomi Kota Parepare, yaitu: Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 15,97 persen kemudian sector konstruksi sebesar 15,33 persen dan sector real estate sebesar 10,04 persen.

Dari tujuh belas kategori yang ada dalam PDRB, maka dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok/sector Primer, kelompok/sector sekunder dan kelompok/sector tersier. **Kelompok Primer** terdiri dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian. Kemudian **sektor sekunder**

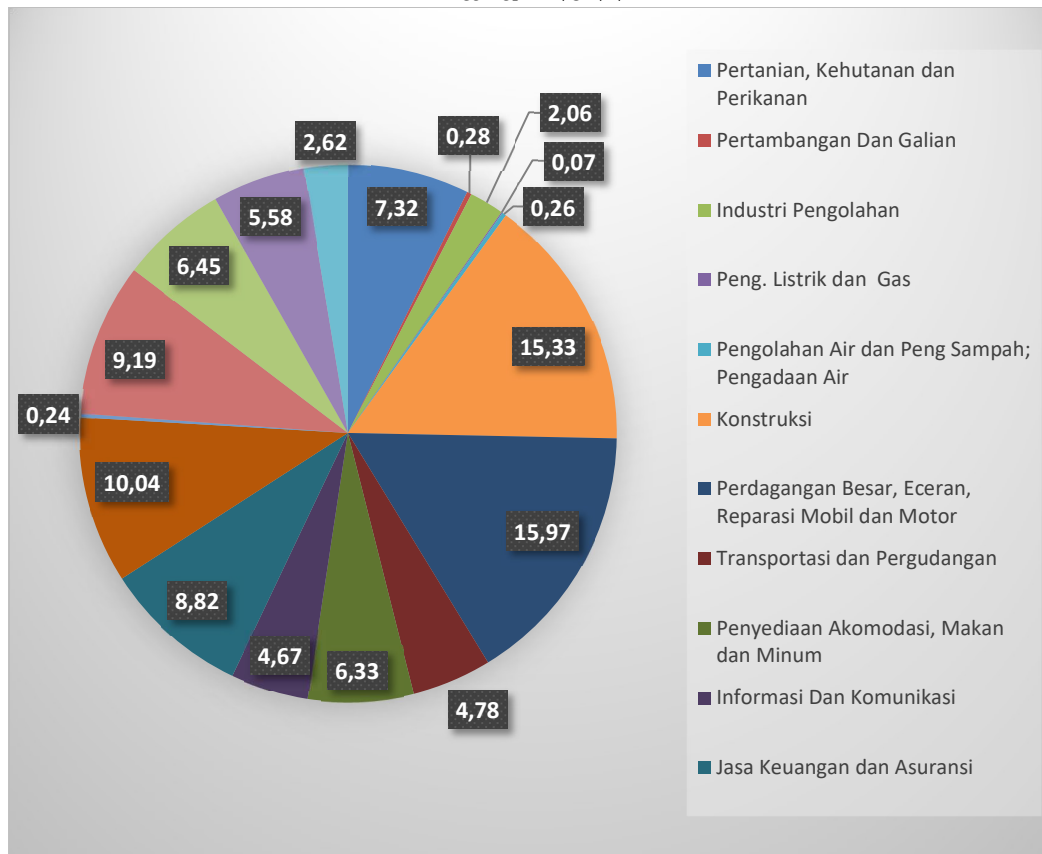


terdiri dari kategori industri pengolahan; kategori pengadaan listrik dan gas; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; kategori transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan kategori informasi dan komunikasi. Selanjutnya **sektor tersier** termasuk sektor jasa yang terdiri dari kategori jasa keuangan dan asuransi, real estate, kategori jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang terakhir kategori jasa lainnya.

Apabila dicermati, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2018-2022 di Kota Parepare, sektor primer tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Kota Parepare, misalnya saja pada tahun 2021, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan hanya menyumbang 7,32% bagi perekonomian Kota Parepare, sedikit menurun dibanding tahun 2020 sebesar 7,45% dan 7,30% pada tahun 2019. Sama halnya dengan Pertambangan dan Penggalan yang bahkan kontribusinya lebih kecil yaitu 0,30% pada tahun 2019-2020 dan 0,33% pada tahun 2018. Ini merupakan gambaran yang umum terjadi di daerah perkotaan, dimana sektor primer semakin tergeser oleh sektor-sektor lainnya. Kembali menurun di tahun 2021 menjadi 0,28 persen untuk kontribusi sektor pertambangan dan galian di Parepare.

Hingga tahun 2021, kontribusi sektor sekunder dan tersier masih mendominasi dalam pembentukan angka PDRB Kota Parepare. Sektor sekunder sebesar 49,47%, sedangkan sektor tersier 42,94%, dan sektor primer mempunyai kontribusi sebesar 7,6%. Kontribusi setiap sektor tersebut dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 2.6  
Struktur Ekonomi Kota Parepare Berdasarkan Tiga Sektor  
Tahun 2022

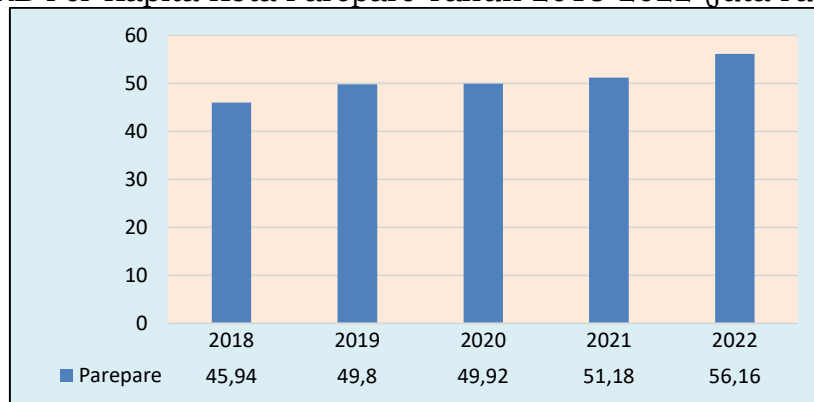


Sumber : BPS Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

#### 2.1.2.1.4. PDRB Per Kapita

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah yaitu PDRB per Kapita, PDRB per Kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita Kota Parepare sepanjang Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 45,94 juta. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kota Parepare telah mencapai Rp. 49,80 juta dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 49,92 juta. Pada tahun 2021 menjadi Rp. 51,18 juta PDRB per kapita. Kota Parepare tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

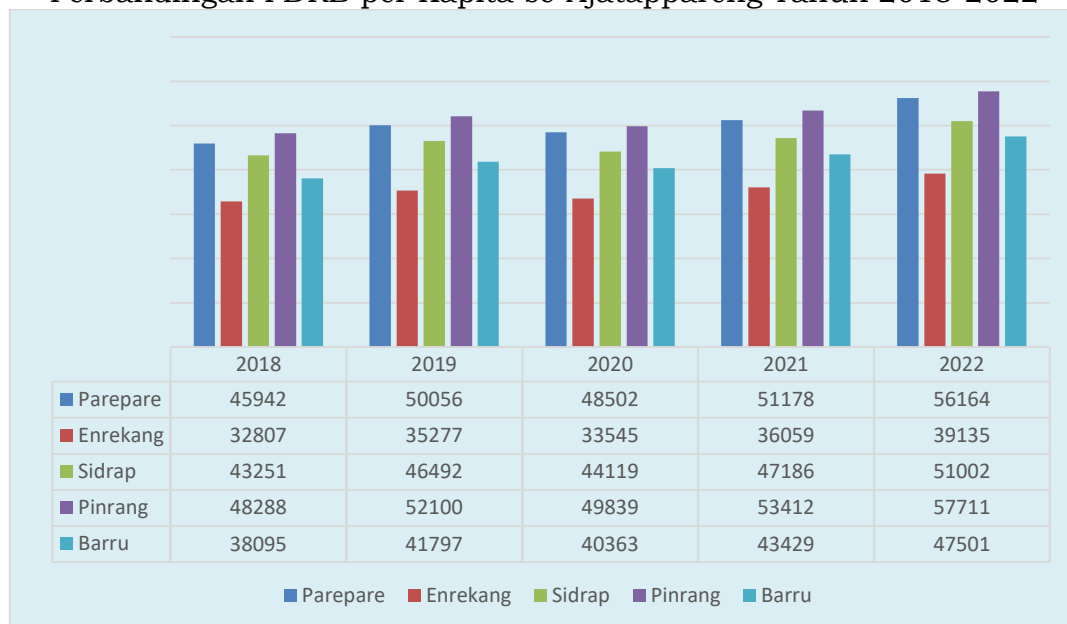
Grafik 2.7  
PDRB Per Kapita Kota Parepare Tahun 2018-2022 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita daerah lain se-Ajattappareng maka dapat dilihat pada grafik di bawah:

Grafik 2.8  
Perbandingan PDRB per Kapita se-Ajattappareng Tahun 2018-2022



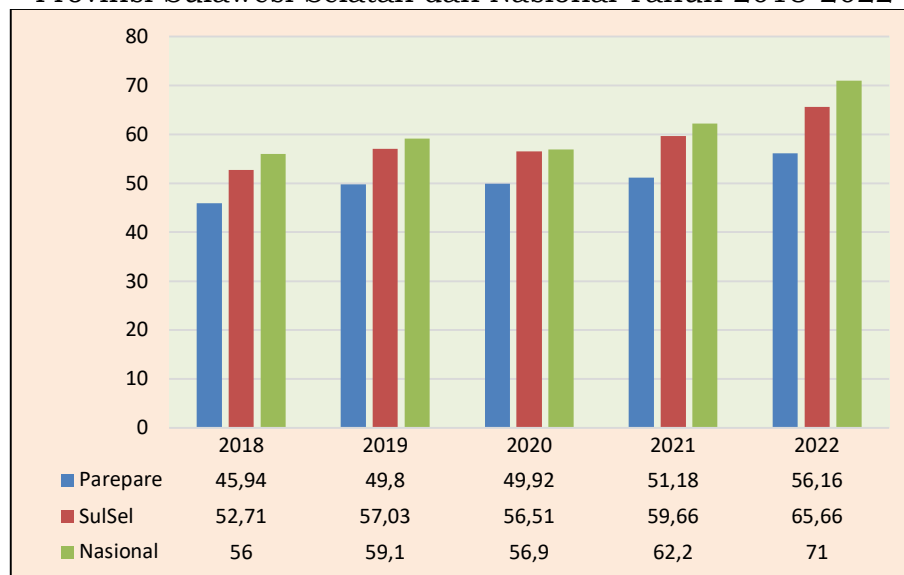
Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Pendapatan per kapita Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan ini masih selalu di bawah dari PDRB per kapita secara nasional maupun regional. Melihat tren pertumbuhan nilai PDRB per kapita Kota Parepare terus meningkat di tiap tahunnya. Hingga tahun 2021 mencapai angka Rp. 51,18 juta. Pada nilai PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sejak tahun 2018

hingga tahun 2019 masing-masing Rp. 52,71 juta ke Rp. 57,03 juta. Hingga pada tahun 2020 terjadi penurunan ke angka Rp. 56,51 juta dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar Rp. 59,66 juta. Adapun PDB per kapita nasional tahun 2017-2019 mengalami kasus yang sama pada tingkat nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang meningkat namun terjadi penurunan angka di tahun 2020 sebesar Rp. 56,90 juta dari angka Rp. 59,10 juta di tahun 2019. Hingga pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 5,3 juta atau sama dengan Rp. 62,20 juta.

Tahun 2020, PDRB Sulawesi Selatan mencapai Rp. 56,51 juta dan PDB per kapita nasional mencapai Rp. 56,90 juta. Namun demikian, PDRB per Kapita Kota Parepare dapat ditingkatkan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sedangkan PDRB per kapita Sulawesi Selatan dan PDB per kapita nasional mengalami penurunan. Tahun 2021 PDRB per kapita Kota Parepare, PDRB Sulawesi Selatan, dan PDB Nasional meningkat kembali. Perbandingan ini dapat dilihat pada grafik berikut:

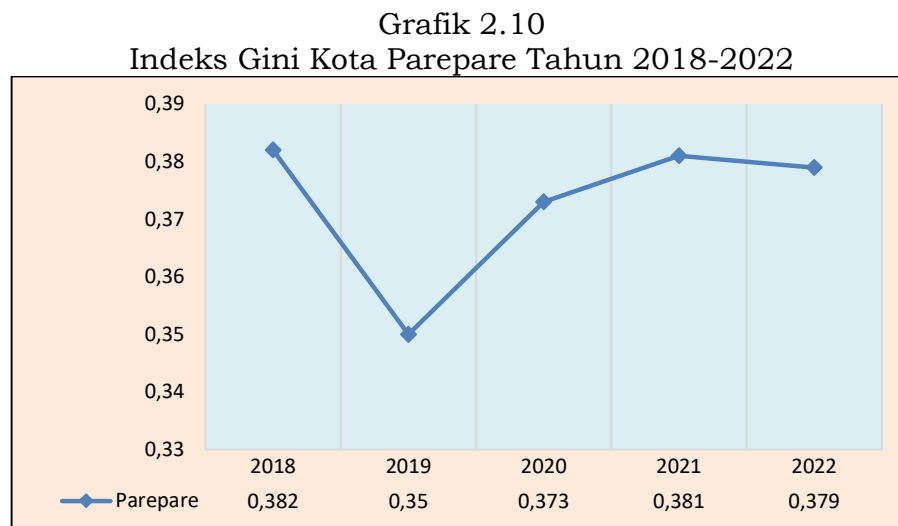
Grafik 2.9  
Perbandingan Nilai PDRB per Kapita Kota Parepare,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

## 2.1.2.1.5. Indeks Gini

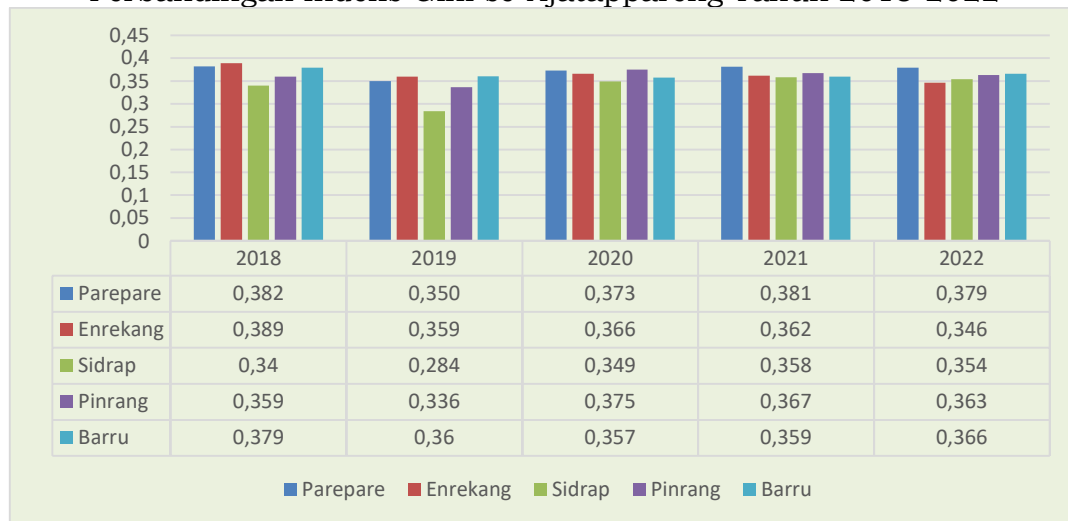
Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisien gini mendekati satu. Indeks Gini Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan membaik. Indeks gini Kota Parepare tahun 2018 sebesar 0,382 dan berkurang kembali pada tahun 2019 menjadi 0,350. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan indeks gini kembali meningkat menjadi 0,373. Di tahun 2021 indeks gini rasio terlihat pada angka 0,381. Indeks Gini Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Indeks gini di seluruh daerah dalam perbandingan antara daerah se-Ajattappareng secara lengkap dapat dilihat pada tabel grafik berikut:

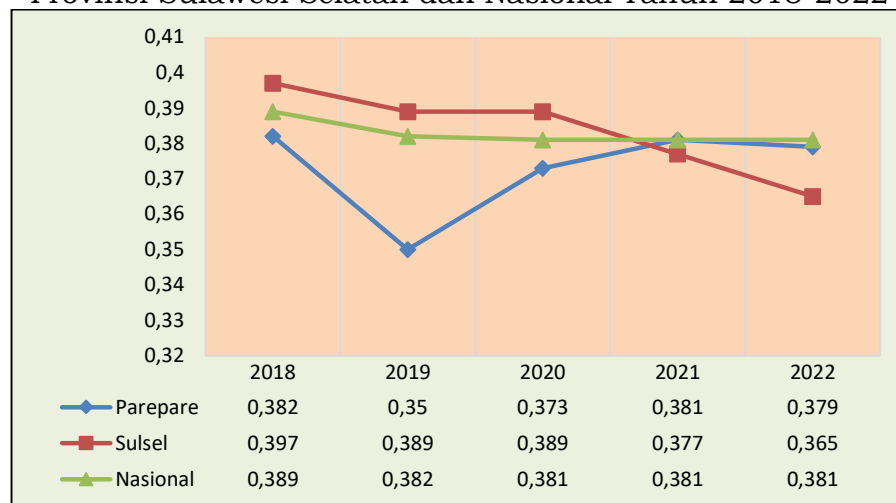
Grafik 2.11  
Perbandingan Indeks Gini se-Ajatappareng Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2023

Indeks Gini Kota Parepare sepanjang tahun 2018-2022 masih lebih baik dibanding Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2018, indeks gini Kota Parepare kembali menurun menjadi 0,382, Sulawesi Selatan sebesar 0,397, dan nasional sebesar 0,389. Pada tahun 2019-2020, indeks gini Kota Parepare masing-masing sebesar 0,350 dan 0,373, sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 0,389 dan Nasional sebesar 0,382 dan 0,381. Tahun 2022, lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12  
Perbandingan Indeks Gini Kota Parepare,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

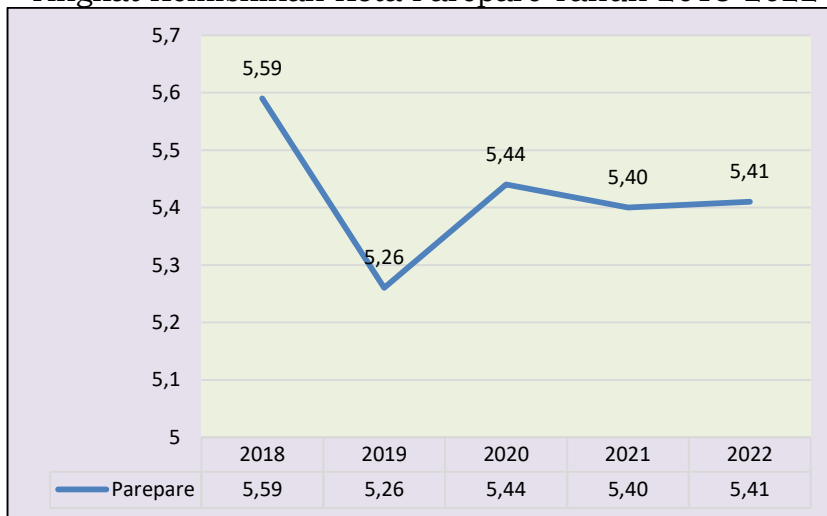


Sumber: BPS Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

## 2.1.2.1.6. Penduduk Miskin

Mengacu pada data BPS, persentase penduduk miskin di Kota Parepare, terus mengalami penurunan secara konsisten sejak tahun 2018-2019, namun dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan angka kemiskinan kembali meningkat. Pada tahun 2018 mencapai angka 5,59% dan tahun 2019 kembali menurun drastis menjadi 5,26%. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan angka kemiskinan di Kota Parepare kembali meningkat menjadi 5,44%. Di tahun 2021 angka kemiskinan berada pada titik 5,40 mengingat di tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi. Grafik di bawah ini memperlihatkan tingkat kemiskinan Kota Parepare tahun 2018-2022, sebagai berikut:

Grafik 2.13  
Tingkat Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dalam suatu daerah, maka penting mengetahui indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dalam suatu daerah. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahkan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin,

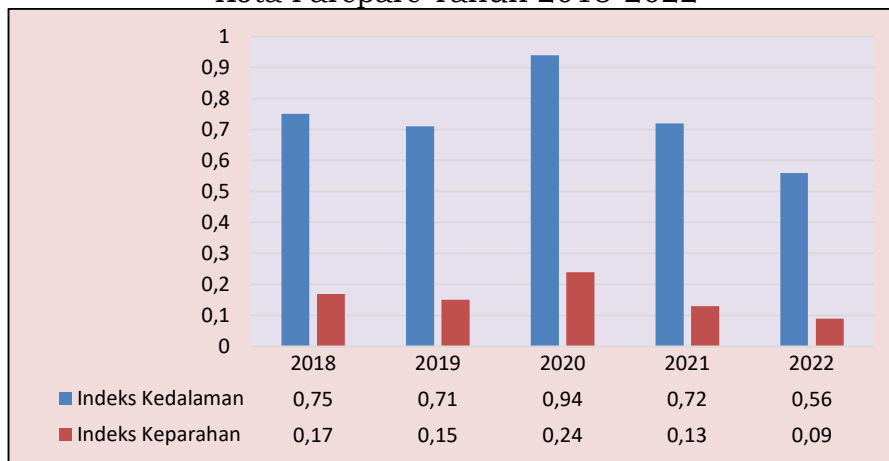


semakin tinggi nilai indeksnya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalamam Kemiskinan Kota Parepare sepanjang tahun pada tahun 2018 menurun menjadi 0,75 dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 0,71. Namun, pada tahun 2020 indeksinya meningkat menjadi 0,94 akibat adanya pandemi COVID-19. Tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kota Parepare menunjukkan angka 0,72 yang terjadi pengurangan sebesar 0,22.

Demikian pula Indek Keparahan Kemiskinan yang tahun 2018 menjadi 0,17. Pada tahun 2019, kembali mengalami penurunan menjadi 0,15, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,24 dan tahun Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Parepare adalah 0,13 yang menunjukkan penurunan angka dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Parepare pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14  
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Ini mengindikasikan bahwa baik jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) maupun kesenjangan (*gap*) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri (P2), sebelum tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan angka ini menunjukkan terjadinya naiknya taraf hidup penduduk miskin, sekalipun mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun dengan adanya

pandemi COVID-19, angka P1 maupun P2 kembali mengalami peningkatan di tahun 2020. Yang kemudian di tahun 2021 kembali mengalami penurunan angka. Hal ini dapat terlihat pada table berikut:

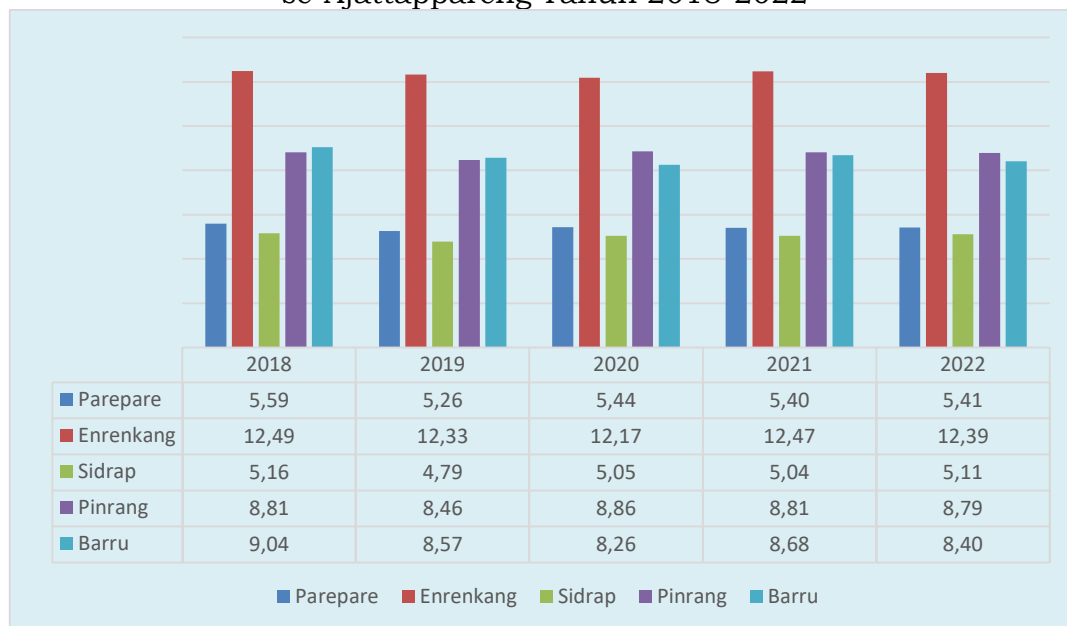
Tabel 2.17  
Kondisi Kemiskinan Kota Parepare 2018-2022

| URAIAN                                 | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) | 323.839 | 323.839 | 363.710 | 383,471 | 402.126 |
| Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)     | 8,01    | 7,62    | 7,96    | 7,93    | 8,01    |
| Persentase Penduduk Miskin (P0)        | 5,59    | 5,26    | 5,44    | 5,40    | 5,41    |
| Inderks Kedalaman Kemiskinan (P1)      | 0,75    | 0,71    | 0,94    | 0,72    | 0,56    |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)       | 0,17    | 0,15    | 0,24    | 0,13    | 0,09    |

Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

Tingkat kemiskinan di Kota Parepare relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah se-ajattappareng. Maka, Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Kota Parepare sebesar 5,41%, lebih rendah dibanding Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Barru. Namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten Sidrap, Perbandingan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut:

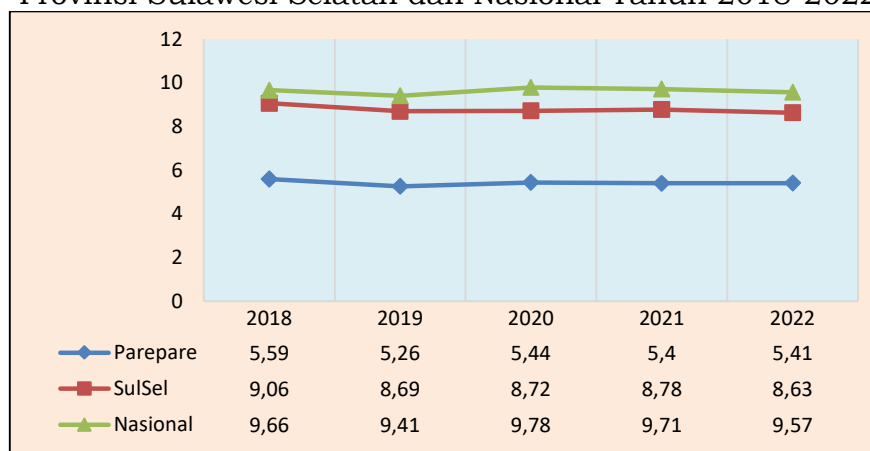
Grafik 2.15  
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare Dengan Daerah Lain se-Ajattappareng Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistikan Sulawesi Selatan

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka persentase penduduk miskin di Kota Parepare relatif jauh lebih rendah dari keduanya. Dimana pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan meningkat menjadi 8,72% dan nasional meningkat menjadi 9,78%. Untuk tahun 2021 perbandingan kondisi kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional secara berturut-turut menunjukkan angka 5,4 persen, 8,78 persen, dan 9,71 persen.

Grafik 2.16  
Perbandingan Kondisi Kemiskinan Kota Parepare,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

#### 2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi saja namun juga memperhatikan pembangunan sosial sehingga pembangunan daerah menggambarkan pembangunan yang menyeluruh (inklusif). Indikator sosial utama yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu; Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup serta Indeks Paritas Daya Beli.

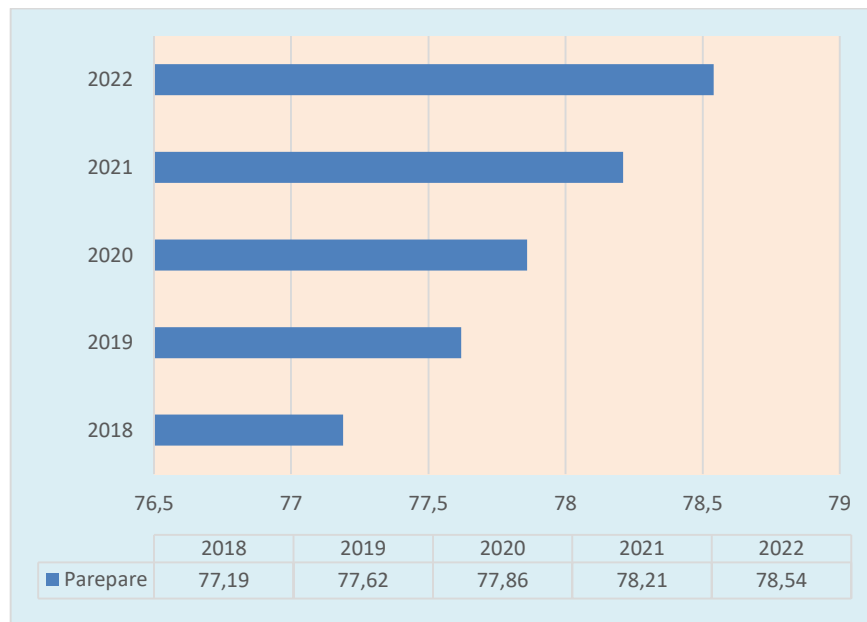
##### 2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan kondisi pembangunan yang berkualitas, menggambarkan kondisi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak. Secara absolut, Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare mengalami peningkatan secara

paralel dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan serta daerah yang ada di sekitarnya dalam lima tahun terakhir.

Tahun 2020 meningkat menjadi 77,86. Tahun 2021, menunjukkan pada angka 78,21. Di tahun 2022 mencapai 78,54.

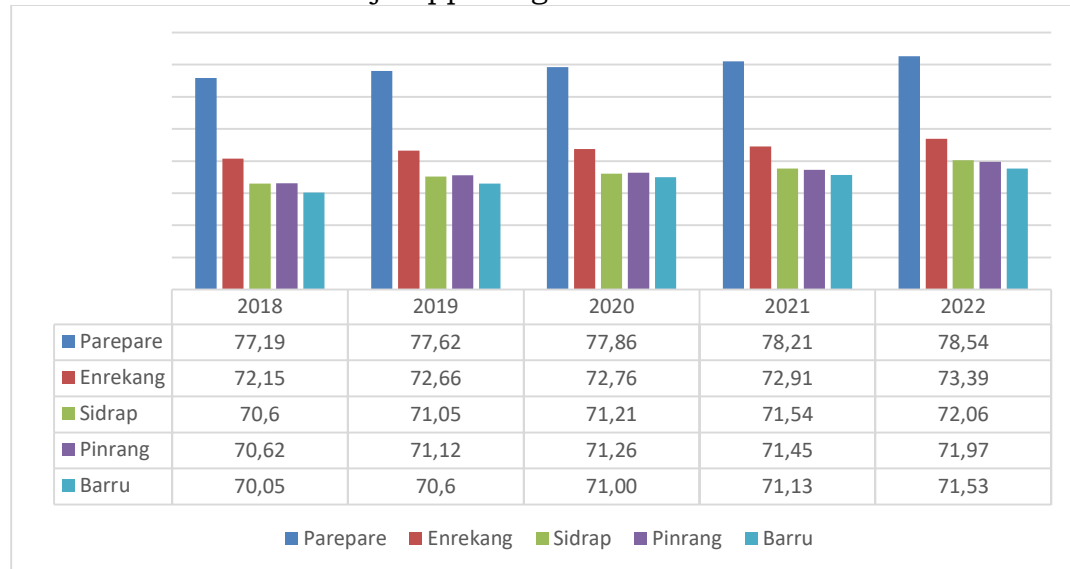
Grafik 2.17  
Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare Tahun 2018-2022



IPM BPS; Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

IPM Kota Parepare pada tahun 2022 sebesar 78,54 menempati urutan ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah Kota Makassar (82,66) dan Kota Palopo (78,38). Namun berdasarkan pembagian wilayah setara, IPM Kota Parepare berada diurutan pertama, dibandingkan dengan capaian kabupaten yang termasuk dalam pembagian wilayah setara. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

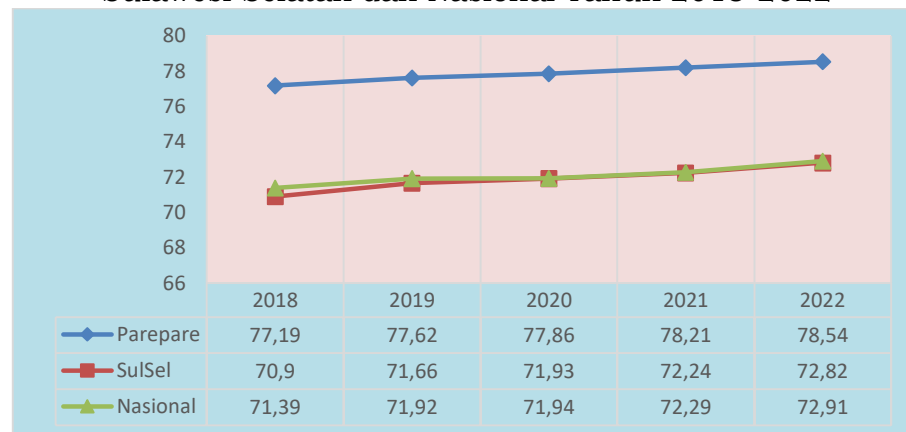
Grafik 2.18  
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia  
se-Ajatappareng Tahun 2018-2022



Sumber: BPS; Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Pencapaian IPM Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir juga jauh lebih tinggi dibanding IPM Nasional dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, IPM Provinsi Sulawesi Selatan hanya tercatat pada angka 72,82 dan nasional sebesar 72,91.

Grafik 2.19  
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, Provinsi  
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun sejumlah pilihan, ada 3 pilihan yang sangat esensial

untuk dipenuhi yaitu, (1) pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, (2) pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan (3) pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak.

Apabila ketiga pilihan mendasar ini dapat terpenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

#### 2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena mengikuti program wajib belajar, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung pada penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Tabel 2.18  
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah

| Tahun | Harapan Lama Sekolah (HLS) |        |          | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |        |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|------------------------------|--------|----------|
|       | Nasional                   | Sulsel | Parepare | Nasional                     | Sulsel | Parepare |
| 2018  | 12,91                      | 13,34  | 14,47    | 8,17                         | 8,02   | 10,29    |
| 2019  | 12,95                      | 13,38  | 14,49    | 8,35                         | 8,26   | 10,30    |
| 2020  | 12,98                      | 13,45  | 14,50    | 8,48                         | 8,38   | 10,45    |
| 2021  | 13,08                      | 13,52  | 14,51    | 8,54                         | 8,46   | 10,65    |
| 2022  | 13,10                      | 13,53  | 14,52    | 8,69                         | 8,63   | 10,66    |

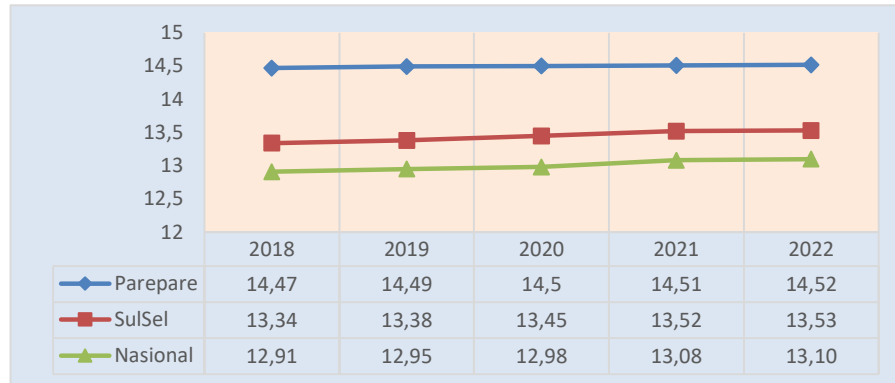
Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023; bps.go.id

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan keberhasilan program pendidikan yang telah diusahakan. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah salah satunya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Parepare terus mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatannya sangatlah kecil sehingga dapat dikatakan terjadi perlambatan pertumbuhan angka

harapan sekolah. Perbandingan HLS antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.20

Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Jika dilihat, angka HLS Kota Parepare lebih tinggi dibanding Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021, angka HLS Kota Parepare 14,51 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Parepare yang berumur 7 tahun ke atas dapat menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA bahkan sampai semester 4–5 perguruan tinggi atau setara dengan diploma II. Sedangkan angka harapan lama sekolah Propinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021 sebesar 13,52 tahun sehingga bisa diartikan bahwa rata-rata penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang berumur 7 tahun ke atas diperkirakan dapat menyelesaikan pendidikannya sampai semester 2 perguruan tinggi atau setara dengan diploma I. Sedangkan angka HLS nasional adalah 13,08 tahun atau setara dengan semester 2 perguruan tinggi atau diploma I.

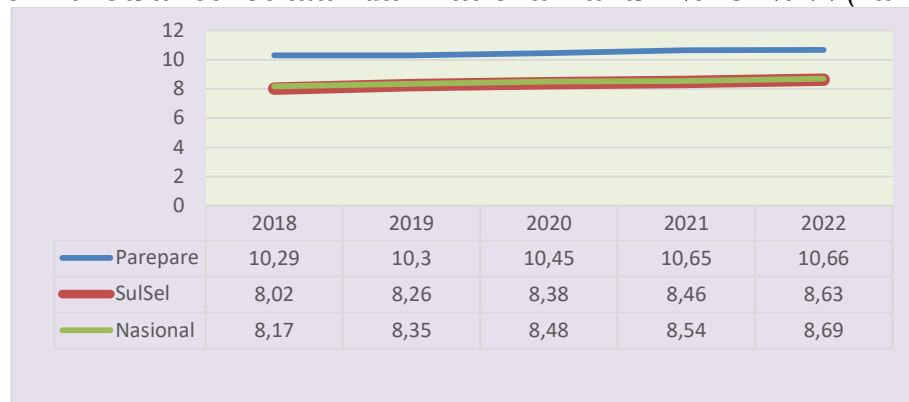
#### 2.1.2.2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Seperti halnya dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kota Parepare juga mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, angka RLS Kota Parepare jauh lebih tinggi. Perbandingan RLS antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.21

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018–2022 (Tahun)



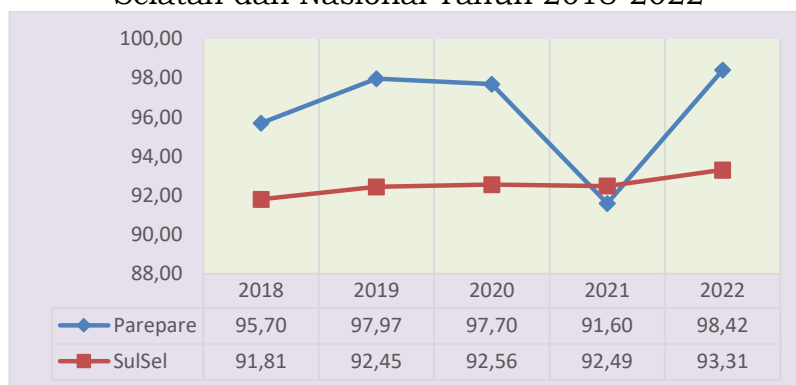
Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

#### 2.1.2.2.4. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam membaca dan menulis. AMH juga merupakan salah satu indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Semakin tinggi AMH maka semakin rendah Angka Buta Huruf (ABH) dalam suatu daerah, karena AMH berbanding terbalik dengan ABH. AMH Kota Parepare dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020 AMH Kota Parepare menjadi 97,66%. Tahun 2021 sebesar 97,75.

Grafik 2.22

Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

## 2.1.2.2.5. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan.

Dari tabel di berikut bahwa APK Kota Parepare untuk tingkat SD/MI/Paket A, APK sebesar 106,92% pada tahun 2020. Di tahun 2021 menurun ke angka 105,90 persen. Untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, APK sebesar 81,32% pada tahun 2020. Tahun 2021 meningkat ke angka 82,38 persen.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, APK tahun 2021 tingkat SD/MI/Paket A Kota Parepare lebih tinggi dibanding APK Sulawesi Selatan yang hanya 106,85%. Untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, APK Sulawesi Selatan sebesar 86,82% lebih tinggi dibanding Kota Parepare.

Tabel 2.19  
Angka Partisipasi Kasar Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Jenjang Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) |        |        |        |        |
|--------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2018                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| <b>Parepare</b>    |                                   |        |        |        |        |
| SD/MI/Paket A      | 99,55                             | 107,33 | 106,92 | 105,90 | 110,53 |
| SMP/Mts/Paket B    | 92,41                             | 79,68  | 81,32  | 82,38  | 77,27  |
| SMA/SMK/Paket C    | 72,21                             | 90,86  | 92,07  | 114,99 | 95,75  |
| <b>Sulsel</b>      |                                   |        |        |        |        |
| SD/MI/Paket A      | 110,28                            | 108,71 | 99,94  | 106,85 | 106,71 |
| SMP/Mts/Paket B    | 86,97                             | 83,49  | 86,23  | 86,82  | 86,19  |
| SMA/SMK/Paket C    | 81,74                             | 86,09  | 86,44  | 87,07  | 86,49  |

Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka dan Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

## 2.1.2.2.6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM SD/MI di Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 99,38%. Di tahun 2021 sebesar 98,88 persen. Sementara APM pada jenjang SMP/MTs berada pada angka 73,82% pada tahun 2020. Untuk tahun 2021, sebesar 74,63 persen.

Tabel 2.20

Angka Partisipasi Murni Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Jenjang Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) (%) |        |       |       |       |
|--------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|                    | 2018                              | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>Parepare</b>    |                                   |        |       |       |       |
| SD/MI/Paket A      | 88,97                             | 94,66  | 99,38 | 98,88 | 99,57 |
| SMP/MTs/Paket B    | 71,99                             | 73,63  | 73,82 | 74,82 | 74,87 |
| SMA/SMK/Paket C    | 57,40                             | 62,35  | 63,47 | 63,86 | 64,27 |
| <b>Sulsel</b>      |                                   |        |       |       |       |
| SD/MI/Paket A      | 97,85                             | 110,28 | 97,98 | 98,26 | 98,41 |
| SMP/Mts/Paket B    | 74,08                             | 86,97  | 76,17 | 77,02 | 77,42 |
| SMA/SMK/Paket C    | 60,03                             | 60,14  | 60,32 | 60,35 | 60,44 |

Sumber: BPS Kota Parepare Dalam Angka dan Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2023

Perkembangan APM di Kota Parepare cukup bervariasi sejalan dengan perkembangan waktu, demikian pula dengan kondisi APM pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. APM tahun 2021 tingkat SD/MI/Paket A Kota Parepare lebih tinggi dibanding APM Sulawesi Selatan yang hanya 98,26%. Untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, APM Sulawesi Selatan sebesar 77,17% lebih tinggi dibanding Kota Parepare.

#### 2.1.2.2.7. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Secara umum, kualitas kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin meningkat berdasarkan rata-rata angka harapan hidup yang semakin panjang.

Tabel 2.21

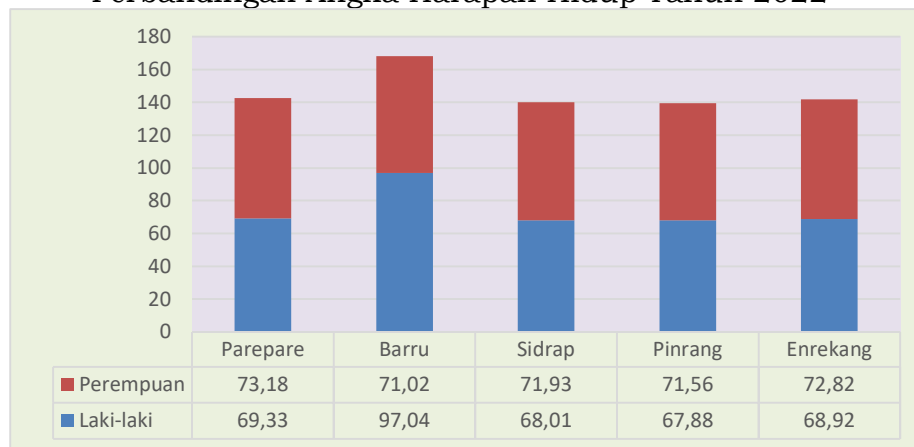
Angka Umur Harapan Hidup Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                | Satuan | Tahun |      |      |       |       |
|--------------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
|                          |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  |
| Angka Umur Harapan Hidup | Tahun  | 70,88 | 71,2 | 71,3 | 71,31 | 71,57 |

Sumber : BPS Kota Parepare Dalam Angka, 2023

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa perkembangan Angka harapan hidup Kota Parepare selama kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan menjadi 71,31 pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa target AHH dalam RPJMD sebesar 70,74 tahun telah terlampaui. Secara terperinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.23  
Perbandingan Angka Harapan Hidup Tahun 2022



Sumber : BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Selanjutnya, AHH Kota Parepare sepanjang tahun 2018–2022 juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional.

Tabel 2.22  
Angka Umur Harapan Hidup Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

| No | Prov/Nasional    | Tahun |       |       |       |       |
|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Parepare         | 70,88 | 71,18 | 71,27 | 71,31 | 71,57 |
| 2  | Sulawesi Selatan | 70,08 | 70,43 | 70,57 | 70,66 | 70,97 |
| 3  | Nasional         | 71,20 | 71,38 | 71,47 | 71,61 | 71,85 |

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

#### 2.1.2.2.8. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Jumlah balita gizi buruk di Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 ditahun 2020, jumlah balita gizi buruk dapat diturunkan menjadi 49 jiwa atau 0,33% dari jumlah balita

keseluruhan sebanyak 14.919 jiwa. Di tahun 2021, jumlah Balita masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 14.919 Jiwa dengan jumlah total Balita Gizi Buruk yang berkurang drastic ke angka 15 Jiwa atau sebesar 0,1 persen untuk persentase balita gizi buruk di Kota Parepare.

Tabel 2.23

Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator Kinerja Dan Jenis Data                  | Satuan | T A H U N   |             |             |            |            |
|----|---------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|    |                                                   |        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021       | 2022       |
| 1  | Jumlah Balita Gizi Buruk                          | Jiwa   | 3           | 139         | 49          | 15         | 9          |
| 2  | Jumlah Balita                                     | Jiwa   | 8.334       | 13.932      | 14.919      | 14.919     | 7.321      |
|    | <b>Persentase balita gizi buruk Kota Parepare</b> | %      | <b>0,04</b> | <b>1,00</b> | <b>0,33</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare, 2023

Peningkatan jumlah balita gizi buruk tahun 2019 dan tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya perbaikan data standar penentuan gizi buruk bagi balita. Persentase Gizi buruk pada tahun 2020 masih jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu hanya 0,02%. Sedangkan pada tahun 2021 angka jumlah Balita Gizi Buruk mengalami penurunan signifikan sebesar 0,1%. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare tetap perlu mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan gizi buruk secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders* guna mengurangi dan mempertahankan capaian.

#### 2.1.2.2.9. Prevalensi Gizi Kurang

Prevalensi gizi kurang di Kota Parepare tahun 2020, terdapat 14.919 jiwa balita terdapat 195 jiwa atau 1,31% yang mengalami gizi kurang. Memperhatikan di tahun 2021, Prevalensi balita gizi buruk Kota Parepare sebesar 1,94 persen dengan jumlah balita 14.919 jiwa dan jumlah balita gizi kurang sebanyak 289 jiwa.

Tabel 2.24

Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator Kinerja Dan Jenis Data                   | Satuan | Tahun       |             |             |             |             |
|----|----------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                    |        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1  | Jumlah Balita Gizi Kurang                          | Jiwa   | 37          | 259         | 195         | 289         | 361         |
| 2  | Jumlah Balita                                      | Jiwa   | 8.334       | 13.932      | 14.919      | 14.919      | 7.321       |
|    | <b>Prevalensi balita gizi kurang Kota Parepare</b> | %      | <b>0,44</b> | <b>1,86</b> | <b>1,31</b> | <b>1,94</b> | <b>4,93</b> |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

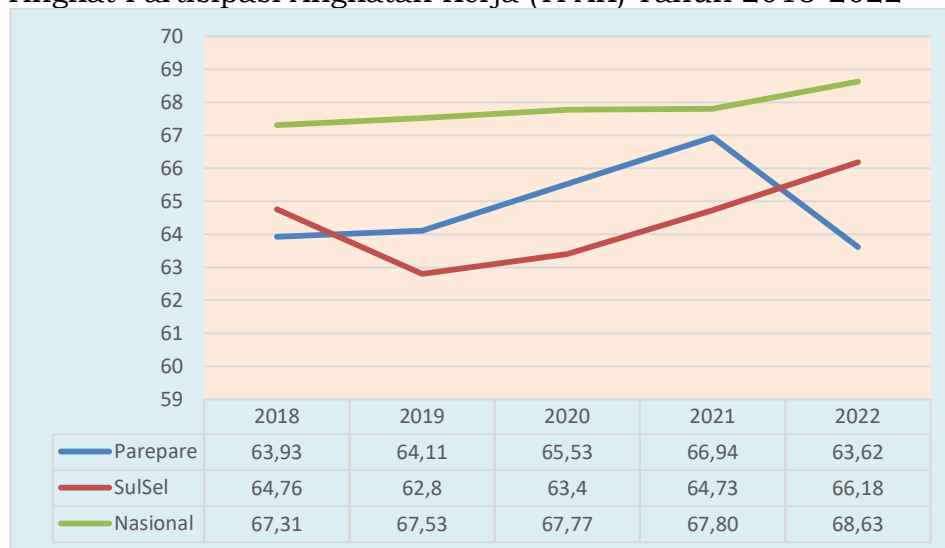
Peningkatan jumlah balita gizi kurang tahun 2019 dan tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya perbaikan data standar penentuan gizi kurang bagi balita, seperti halnya penentuan gizi buruk. Persentase Gizi kurang pada tahun 2020 masih jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu hanya 0,03%. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare perlu lebih mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan gizi buruk secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Jika dibandingkan dengan capaian angka di tahun 2021, 1,94 persen.

#### 2.1.2.2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relative dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 2.24

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Parepare, 2023; Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023

TPAK Kota Parepare demikian pula TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional berfluktuatif hingga tahun 2021. TPAK Kota Parepare mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 63,40%, demikian pula TPAK Sulawesi Selatan menjadi 65,53% dan Nasional meningkat menjadi 67,77%. Pada tahun 2021, TPAK Kota Parepare menjadi 66,94

persen. Sedang provinsi Sulawesi Selatan menjadi 64,73 persen yang sebelumnya 65,53 persen.

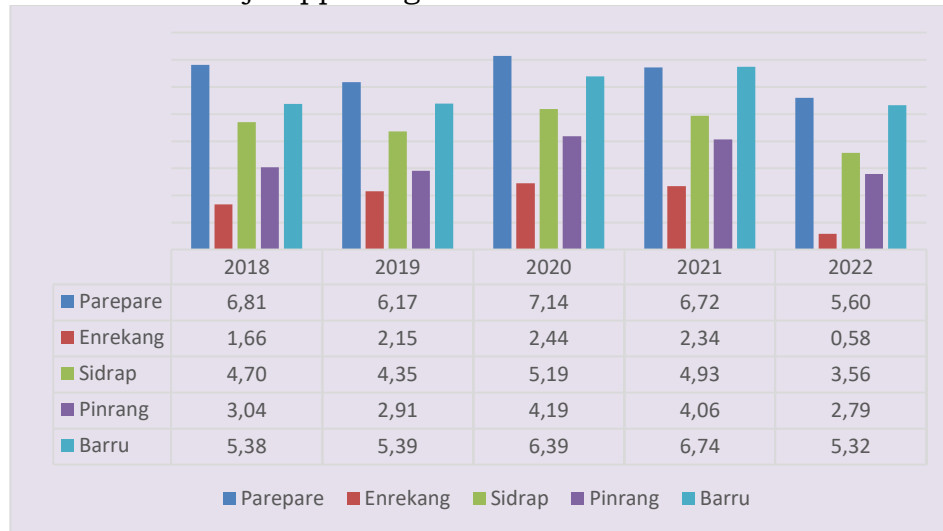
#### 2.1.2.2.11. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare maupun Provinsi Sulawesi Selatan serta nasional berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dengan adanya pandemi COVID-19 maka TPT pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 7,14 %. Dan di tahun 2021 menjadi 6,72 persen. Realisasi TPT tahun 2021 jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 5,90%. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Parepare untuk merumuskan program-program pemulihan ekonomi di tahun 2021 yang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja, yang akan menurunkan tingkat pengangguran di Kota Parepare.

Berdasarkan grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Parepare jika dibandingkan dengan TPT pada perbandingan dengan wilayah se-Ajattappareng, TPT Kota Parepare tahun 2022 berada pada angka 5.60 dari TPT daerah Kab. Barru (5,32), Kab. Sidrap (3.56), Kab. Pinrang (2,79), dan Kab. Enrekang (0,58). Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare Dengan se-Ajattappareng Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



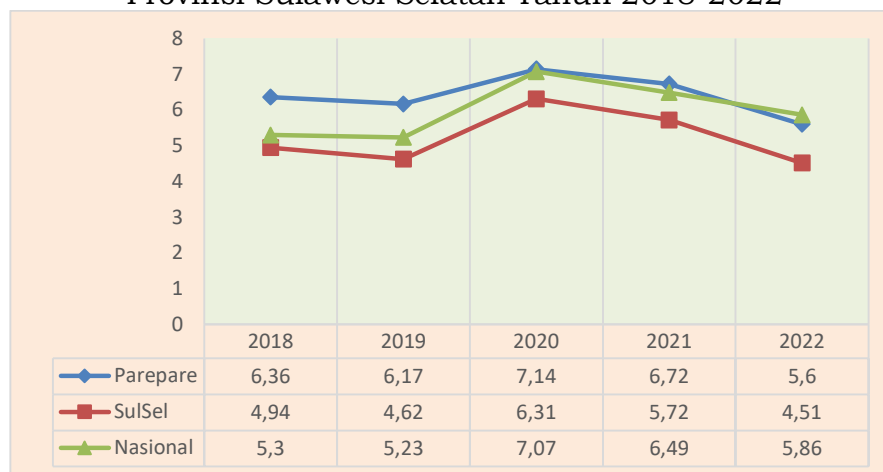
Grafik 2.25  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka  
se-Ajatappareng Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan selalu lebih baik dibanding Kota Parepare. TPT Provinsi Sulsel ditahun 2020 meningkat menjadi 6,31%. Demikian pula jika dibandingkan dengan TPT nasional mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi 7,07%. Di tahun 2021, TPT Parepare lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 5,72. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.26  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Walaupun angka TPT Kota Parepare cenderung mengalami perbaikan namun angkanya masih tinggi dibanding Provinsi dan Nasional. Untuk itu, masih perlu kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan agar angka TPT Kota Parepare pada tahun berikutnya dapat diturunkan dan lebih baik dari angka nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 2.1.2.2.12. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Kota Parepare selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020 Rasio Penduduk yang Bekerja mencapai angka 92,86% dengan jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 67.207 jiwa dan angkatan kerja sejumlah 72.372 jiwa. Di tahun 2021, rasio penduduk yang bekerja di Kota Parepare adalah 93,28 persen dengan jumlah penduduk yang bekerja adalah 69.777 jiwa dan jumlah Angkatan kerja adalah 74.806 jiwa.

Tabel 2.25  
Rasio Penduduk Yang Bekerja  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Bidang/Urusan               | Sat. | Tahun  |        |        |        |        |
|----|-----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                             |      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| a. | Penduduk yang bekerja       | Jiwa | 61.911 | 63.984 | 67.207 | 69.777 | 67.904 |
| b. | Angkatan kerja              | Jiwa | 66.435 | 68.321 | 72.372 | 74.806 | 71.929 |
| c. | Rasio penduduk yang bekerja | %    | 93,19  | 93,65  | 92,86  | 93,28  | 94,40  |

Sumber : BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2023

#### 2.1.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup manusia, terlebih khusus lagi bagi pemuda. Pencapaian pembangunan seni budaya dan olahraga di Kota Parepare dapat dilihat dari beberapa indikator dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.26  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

|   | Uraian                | Tahun |      |      |      |      |
|---|-----------------------|-------|------|------|------|------|
|   |                       | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah grup kesenian. | 126   | 126  | 126  | 130  | 70   |

|   | Uraian                                                    | Tahun |      |      |      |      |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|   |                                                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Jumlah sarana gedung kesenian.                            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3 | Jumlah klub olahraga                                      | 28    | 28   | 28   | 29   | 32   |
| 4 | Jumlah gedung/ lap. olahraga.                             | 195   | 265  | 265  | 265  | 265  |
| 5 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                  | 1     | 2    | 1    | 4    | 5    |
| 6 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan   | 41    | 41   | 41   | 41   | 41   |
| 7 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 41    | 41   | 41   | 41   | 102  |
| 8 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu          | -     | -    | -    | 24   | 37   |

Sumber : Dinas Kepemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Tahun 2023; dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Tahun 2023

Jumlah group kesenian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sejumlah 126 grup, tahun 2021 berjumlah 130 grup dan tahun 2022 berjumlah 70 grup. Pemerintah Kota Parepare belum memiliki sarana gedung kesenian, sehingga penyelenggaraan kegiatan seni budaya dilaksanakan disarana/gedung umum, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Jumlah klub olahraga pada tersedia 28 klub hingga tahun 2020. Bertambah menjadi 29 ditahun 2021. Tahun 2022 bertambah menjadi 32 klub olahraga. Adapun gedung/lapangan olahraga juga mengalami peningkatan, dimana terdapat 195 gedung/lapangan olahraga pada tahun 2017-2018. Kemudian pada tahun 2019-2021 meningkat menjadi 265 gedung/lapangan, dan terakhir pada tahun 2022 menjadi 265 gedung/lapangan olah raga. Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2020 penyelenggaraan festival terlaksana 1 kegiatan saja. Tahun 2021, 4 penyelenggaraan festival seni dan budaya. Tahun 2022 terlaksana 5 penyelenggaraan festival seni dan budaya. Adapun Benda, Situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2018-2022 dengan jumlah tiap tahunnya sama yakni 41 buah tidak. Begitu pula dengan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sepanjang Tahun 2018 hingga tahun 2021 yakni 41 buah, hingga di tahun 2022 meningkat pesat dengan jumlah total sebanyak 102. Untuk cagar budaya yang dikelola secara terpadu sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 berjumlah 24 dan meningkat di tahun 2022.

**2.1.3 Aspek Pelayanan Umum****2.1.3.1 Urusan Layanan Wajib**

Layanan urusan pemerintah wajib terdiri dari Pelayanan Dasar dan Bukan Pelayanan Dasar. Untuk urusan pemerintah yang wajib dasar terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, terdiri dari urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan.

**2.1.3.1.1 Urusan Layanan Wajib Dasar****2.1.3.1.1.1 Bidang Urusan Pendidikan****2.1.3.1.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

PAUD Adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang yang merupakan suatu upaya yang ditujukan bagi sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan dan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Parepare pada Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Di tahun 2018 sampai dengan 2019 persentase PAUD mengalami peningkatan yakni indikator PAUD pada tahun 2018, jumlah siswa TK/RA/penitipan anak sebanyak 2.302 siswa dengan persentase sebesar 40,96 persen. Kemudian di tahun 2019, jumlah siswa TK/RA/penitipan anak sebanyak 2.923 dengan persentase sebesar 52,14 persen. Pada tahun 2020 persentase PAUD mengalami penurunan angka yakni jumlah siswa TK/RA/penitipan anak sebanyak 2.428 dengan persentase sebesar

41,97 persen. Yang kemudian pada tahun berikutnya 2021, angka persentase PAUD menurun ke angka 36,66 persen. Tahun 2022 meningkat menjadi 42,01 persen.

Tabel 2.27.

## Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                        | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Pendidikan anak usia dini (PAUD) | %      | 40,96 | 52,14 | 41,97 | 36,66 | 42,01 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2.28.

## Angka Partisipasi Kasar Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator              | Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) |        |        |        |        |
|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 2018                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| APK SD/MI/Paket A      | 99,55                             | 107,33 | 106,92 | 92,77  | 94,48  |
| APK SMP/Mts/Paket B    | 92,41                             | 79,68  | 81,32  | 96,70  | 87,96  |
| APK SMA/SMK/MA/Paket C | 72,21                             | 90,86  | 92,07  | 114,99 | 115,25 |

Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka dan Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator APK Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun mengalami kondisi fluktuasi. APK SD/MI di Kota Parepare tahun 2018 APK SD/MI/Paket A Kota Parepare meningkat menjadi 99,55 persen, kemudian tahun 2019 kembali meningkat menjadi 107,33 persen, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 106,92 persen. Tahun 2021 capaian APM SD/MI Kota Parepare meningkat menjadi 92,77 persen. Tahun 2022 berada pada angka 94,48 persen.

Sementara APK pada jenjang SMP/MTs dengan capaian 89,40 persen pada tahun 2018 adalah 92,41 persen. Dari tahun 2019 capaiannya adalah 79,68 persen hingga tahun 2020 terjadi menjadi 81,32

persen dan tahun 2021, angka APM jenjang SMP/MTs Kota Parepare adalah 96,70 persen. Tahun 2022 adalah 87,96 persen.

Untuk APK SMA/SMK/MA/Paket C dengan angka partisipasi kasar yang memperlihatkan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2018 yang APKnya adalah 72,21 persen yang kemudian ditahun 2019 menunjukkan capaian 90,86 persen, tahun 2020 capaiannya mencapai 92,07, tahun 2021 mencapai 114,99 hingga tahun 2022 meningkat ke angka 115,25 persen.

#### 2.1.3.1.1.1.3 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Parepare sepanjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                        | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angka pendidikan yang ditamatkan | 1,69  | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

Indikator angka pendidikan yang ditamatkan Kota Parepare dari tahun 2018 turun diangka 1,69, tahun 2019 meningkat kembali menjadi 1,75. Pada periode tahun 2020 angka pendidikan yang ditamatkan kembali meningkat ke angka 2,00. Tahun 2021, angka Pendidikan yang ditamatkan berada pada angka capaian 6,73. Tahun 2022 menurun menjadi 1,00.

#### 2.1.3.1.1.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk

kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM SD/MI di Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tahun 2018 APM SD/MI/Paket A Kota Parepare menurun menjadi 88,97 persen, kemudian tahun 2019 kembali meningkat menjadi 94,66 persen. Tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai angka 99,38 persen. Tahun 2021, capaian APM SD/MI Kota Parepare mengalami penurunan menjadi 82,70 persen. Tahun 2022 meningkat ke angka 93,45 persen.

Sementara APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2018 adalah 71,99 persen, tahun 2019 naik menjadi 78,60 persen, di tahun 2020 turun ke angka 62,73 persen. Tahun 2021 angka APM jenjang SMP/MTs Kota Parepare adalah 65,74 persen. Tahun 2022 terjadi peningkatan ke angka 87,33 persen.

APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2018 menunjukkan angka capaian 57,40 persen yang terus meningkat di tahun 2019 menjadi 62,35 persen. Meningkat di tahun 2020 menjadi 63,47 persen dan tahun 2021 mencapai 85,50 persen. Hingga tahun 2022 meningkat mencapai 121,17 persen.

Secara rinci, APM Kota Parepare dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.

Angka Partisipasi Murni Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                        | Tahun |       |       |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
| <b>SD/MI/Paket A</b>                             |       |       |       |       |        |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A      | 88,97 | 94,66 | 99,38 | 82,70 | 93,45  |
| <b>SMP/MTs /Paket B</b>                          |       |       |       |       |        |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B    | 71,99 | 78,60 | 62,73 | 65,74 | 87,33  |
| <b>SMA/SMK/MA/Paket C</b>                        |       |       |       |       |        |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | 57,40 | 62,35 | 63,47 | 85,50 | 121,17 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.1.5 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS), ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah. Angka tersebut juga

memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama penduduk usia muda. APS dapat sebagai indikasi dari bertambahnya infrastruktur sekolah dan akses masuk sekolah, jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat diartikan bahwa semakin baik infrastruktur dan semakin baik pula akses penduduk terhadap Pendidikan.

Adapun indikator Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI/Paket A pada periode tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan tahun 2018 meningkat kembali menjadi 889,67, dan di tahun 2019 turun kembali menjadi 822,31. Kemudian diakhir periode tahun 2020, APS berada dikisaran 801,09. Tahun 2021 berada diangka 927,72. Tahun 2022 meningkat ke angka 934,51.

Sedangkan angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B pada periode tahun 2018 kembali meningkat menjadi 830,59, dan di tahun 2019 turun kembali menjadi 785,97. Data untuk tahun 2020 menunjukkan angka partisipasi sekolah sebesar 627,28, angka terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B adalah 967,07 dan tahun 2022 turun ke angka 873,36.

APS jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di tahun 2018 adalah 968,94. Tahun 2019 meningkat menjadi 1267,59. Tahun 2020 turun ke angka 1074,67 dan perlahan meningkat menjadi 1149,93 di tahun 2021 dan 1211,73 di tahun 2022.

Tabel 2.31.  
Angka Partisipasi Sekolah Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                          | Tahun  |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                                    | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| <b>SD/MI/Paket A</b>                               |        |         |         |         |         |
| Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A      | 889,67 | 822,31  | 801,09  | 927,72  | 934,51  |
| <b>SMP/MTs /Paket B</b>                            |        |         |         |         |         |
| Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B    | 830,59 | 785,97  | 627,28  | 967,07  | 873,36  |
| <b>SMA/SMK/MA/Paket C</b>                          |        |         |         |         |         |
| Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C | 968,94 | 1267,59 | 1074,67 | 1149,93 | 1211,73 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023



## 2.1.3.1.1.1.6 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah pada usia sekolah 7-12 tahun (SD/MI), usia 13-15 tahun (SMP/MTs), dan usia 16-18 tahun (SMA/MA/SMK) di kota Parepare selama periode tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan hampir setengah dari persentase. Dari ketiga jenjang pendidikan, APS tertinggi berada di jenjang pendidikan SM/MTs, kemudian SMA/MA/SMK dan terendah di jenjang SD/MI. Hal ini menunjukkan bahwa kasus terbesar siswa yang putus sekolah terjadi di jenjang pendidikan SD/MI dengan APS sebesar 0,12 persen di tahun 2022 dan merupakan angka terendah di tahun 2022 pada jenjang SMP/MTs.

Peningkatan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA dari tahun ke tahun menurun di tahun 2018 sampai dengan 2020 yakni, dari angka 0,25 persen turun lagi ke 0,21 persen hingga 0,18 persen namun di tahun 2021 terjadi peningkatan ke angka 0,23 persen. Turun di tahun 2022, yaitu 0,09 persen.

Angka putus sekolah usia 7-12 tahun (SD/MI) pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan angka yakni 2018 sama dengan 0,10 persen, 2019 adalah 0,03 persen dan sama dengan 2020 yaitu 0,07 persen. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka ke 0,12 persen. Capaian tahun 2022 terjadi stagnansi pada angka 0,12 persen.

Angka putus sekolah usia 13-15 tahun (SMP/MTs) tahun 2018 berada pada angka 1,01 persen. Pada tahun 2019 turun menjadi 0,16 persen. Pada tahun 2020 angka putus sekolah anak usia 13-15 berada pada angka 0,24 persen meningkat ke 0,29 di tahun 2021 dan drastik turun ke angka 0,04 persen di tahun 2022.

Tabel 2.32.

Angka Putus Sekolah Kota Parepare Tahun 2018-2022

| NO | BIDANG / URUSAN                      | SATUAN | TAHUN |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|    |                                      |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI      | %      | 0,10  | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
| 2  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs    | %      | 1,01  | 0,16 | 0,24 | 0,29 | 0,04 |
| 3  | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | %      | 0,25  | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,09 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.1.7 Angka Kelulusan

Tamat sekolah adalah jika responden telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik.

Berdasarkan data terlampir pada tabel di bawah menggambarkan bahwa, di tahun 2018 sampai dengan 2020 untuk semua jenjang Pendidikan termasuk diantaranya SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA mencapai tingkat kelulusan 100 persen. Tahun 2021 hingga tahun 2022, pada jenjang SD/MI berada pada angka 94,57 persen dan 96,87 persen. Pada jenjang SMP/MTs mencapai tingkat kelulusan 97,02 persen dan 93,70 persen. Pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA untuk tahun 2021 sampai dengan 2022 melebihi capaian 100 persen, yakni 109,70 dan 107,98 persen.

Tabel 2.33.  
Angka Kelulusan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Jenjang Pendidikan | Tingkat Kelulusan (%) |        |        |        |        |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2018                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| SD/MI              | 100,00                | 100,00 | 100,00 | 94,57  | 96,87  |
| SMP/Mts            | 100,00                | 100,00 | 100,00 | 97,02  | 93,70  |
| SMA/SMK/MA         | 100,00                | 100,00 | 100,00 | 109,70 | 107,98 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.1.8 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Berdasarkan data menunjukkan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke jenjang pendidikan SMP/MTs dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs selalu diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa semua siswa yang lulus di jenjang pendidikan SD/MI semua melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs. Angka melanjutkan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 138%, artinya terdapat 38% siswa lulusan dari jenjang pendidikan

SD/MI dari daerah lain yang melanjutkan pendidikan di jenjang SMP/MTs di Kota Parepare. Dan angka melanjutkan terendah terjadi di akhir periode pada tahun 2020 yaitu sebesar 105,89%. Berlanjut pada periode tahun akhir 2021, persentase angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs menurun signifikan ke angka 97,53 persen dan tahun 2022 mencapai 96,70 persen.

Berbeda dengan angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA selama periode 2018 terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 yakni berurutan pada angka 103,74 persen, 99,78 persen, dan 90,86 persen. Kemudian dari tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA hingga sebesar 126,99 persen. Terus meningkat hingga tahun 2022 berada pada angka 125,93 persen.

Dari data terlihat bahwa angka di atas 100%, yang berarti bahwa Sekolah jenjang SMP/MTs dan jenjang SMA/SMK/MA di Kota Parepare juga menampung siswa melanjutkan dari daerah tetangga (AJATTAPARENG) sehingga persentase angka melanjutkan lebih besar dibanding angka kelulusan di Kota Parepare.

Tabel 2.34.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Dan  
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator                                         | Satuan | Tahun  |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                   |        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 1  | Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts      | %      | 138,01 | 108,46 | 105,89 | 97,53  | 96,70  |
| 2  | Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | %      | 103,74 | 99,78  | 90,86  | 126,99 | 125,93 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.1.9 Fasilitas Pendidikan

Kondisi fasilitas pendidikan Kota Parepare selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi tapi cenderung meningkat. Di tahun 2018 sebesar 75,60 persen dan di tahun 2019 kembali turun menjadi 65,13 persen. Tahun 2020 berada pada angka 91,26 persen yang kemudian meningkat mencapai angka 92,38 persen di periode tahun 2021. Tahun 2022 meningkat ke angka 93,50 persen.

Selanjutnya kondisi fasilitas pendidikan Kota Parepare selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi tapi cenderung meningkat. Pada tahun 2018 sebesar 81,70 persen dan di tahun 2019 turun ke angka 62,53 persen. Di tahun 2020 fasilitas pendidikan meningkat secara signifikan menjadi 94,44 persen dan periode tahun 2021 signifikan meningkat drastis mencapai 90,63 persen. Tahun 2022 meningkat ke angka 91,29 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kondisi fasilitas pendidikan di Kota Parepare.

Tabel 2.35.

Kondisi Fasilitas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                       | Tahun  |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik                  | 75,60% | 65,13% | 91,26% | 92,38% | 93,50% |
| Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 81,70% | 62,53% | 99,44% | 90,63% | 91,29% |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.1.10 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 capaian berada pada angka 52,39, ditahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 51,94 Pada tahun 2020 pada angka 53,34. Untuk tahun 2021 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar mengalami penurunan ke angka 53,71. Tahun 2022 Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Parepare berada pada angka 51,51.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio SD/MI dan SMP/MTs. Untuk jenjang SMA/MA/SMK Selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 37,04. Pada tahun 2019 rasionya sebesar 48,37, kemudian

kembali mengalami penurunan rasio menjadi 31,58. Yang kemudian pada tahun 2021 kembali menurun ke 27,62. Tahun 2022 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Parepare berada pada angka 37,92.

Tabel 2.36.  
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                     | Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>SD/MI + SMP/MTs</b>                                                        |       |       |       |       |       |
| Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar             | 52,39 | 51,94 | 53,34 | 53,71 | 51,51 |
| <b>SMA/MA/SMK</b>                                                             |       |       |       |       |       |
| Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | 37,04 | 48,37 | 31,58 | 27,62 | 37,92 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.1.11 Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka rasionya menunjukkan semakin banyaknya siswa yang harus dilayani atau semakin kurang jumlah guru yang ada.

Pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, rasio guru terhadap murid pada tahun 2018 sampai dengan 2022, tahun 2020 adalah tahun dimana Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar adalah capaian yang paling tinggi diantara tahun lain sebelumnya yaitu 854,15 dari data lima tahun terakhir. Yang kemudian Data terakhir yaitu pada tahun 2022 menunjukkan penurunan ke angka 809,22.

Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA rasio guru terhadap murid dari data lima tahun terakhir, rasio terendah 594,92 dan rasio tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 1178,52. Dan di tahun 2022 menurun ke angka 894,93.

Tabel 2.37.  
Rasio Guru terhadap Murid Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                 | Tahun  |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                           | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| <b>Pendidikan Dasar dan Menengah</b>      |        |        |        |        |        |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | 608,57 | 613,94 | 854,15 | 518,25 | 809,22 |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Indikator                                     | Tahun  |        |         |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                               | 2018   | 2019   | 2020    | 2021   | 2022   |
| <b>Pendidikan Menengah</b>                    |        |        |         |        |        |
| Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | 810,11 | 793,94 | 1178,52 | 594,92 | 894,93 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.1.12 Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata digunakan untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa per kelasnya. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk sekolah dasar selama lima tahun terakhir yaitu 2018 sampai dengan 2022 untuk rasio tertinggi sebesar 82,22 dan terendah sebesar 44,50 dari data lima tahun terakhir.

Tabel 2.38.

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata, Jenjang Pendidikan Dasar Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Status Sekolah                                     | Satuan     | Jenjang Pendidikan Dasar (SD – SMP) |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                    |            | 2018                                | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Guru/murid | 60,86                               | 61,39 | 82,22 | 44,50 | 45,25 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

Sedangkan untuk rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tertinggi berada pada tahun 2020 yaitu dengan rasio sebesar 1178,52 dan terendah berada pada tahun 2022 dengan rasio sebesar 416,71.

Tabel 2.39.

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata, Jenjang Pendidikan Menengah Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Status Sekolah                                | Satuan | Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/MA – SMK) |        |         |        |        |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
|     |                                               |        | 2018                                       | 2019   | 2020    | 2021   | 2022   |
| 3.  | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata |        | 810,11                                     | 793,94 | 1178,52 | 480,08 | 416,71 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.1.13. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 naik menjadi 109,70 persen. Kemudian di tahun 2019 turun

menjadi 91,62 dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 96,26. Tahun 2021 menunjukkan pengurangan angka menjadi 86,97 persen. Turun Kembali ke angka 82,05 persen.

Tabel 2.40.  
Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                     | Satuan | Tahun  |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                               |        | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | %      | 109,70 | 91,62 | 96,26 | 86,97 | 82,05 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.1.14. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kota Parepare tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai 100%, sedangkan penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tida buta aksara), pada tahun 2018 angka persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sama dengan tahun lalu yakni 96,80%. Di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 97,53%. Dan di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar 97,15%. Lalu di tahun 2021 menjadi 97,81 persen. Di akhir periode tahun 2022 berada pada angka 98,17%.

Tabel 2.41.  
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                            | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                      |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun                          |        |       |       |       |       |       |
| Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | %      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)      |        |       |       |       |       |       |
| Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)      | %      | 96,80 | 97,53 | 97,15 | 97,81 | 98,17 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2023



## 2.1.3.1.1.1.15. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 capaian angka 73,19%. Kemudian pada tahun 2019 bertambah menjadi 96,49%. Namun pada tahun 2020 berkurang secara signifikan menjadi 45,26%, artinya hanya 1.221 orang guru yang berijazah kualifikasi S1/D IV dari jumlah guru yang ada di Kota Parepare. Yang kemudian di tahun 2021, peningkatan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV menjadi 95,63 persen. Di tahun 2022 menurun jauh ke angka 77,79%.

Tabel 2.42.  
Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV | %      | 73,19 | 96,49 | 45,26 | 95,63 | 77,79 |

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2 Bidang Urusan Kesehatan

## 2.1.3.1.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Baru

Berdasarkan data Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Bayi tahun 2018, menunjukkan adanya peningkatan. Dan terlihat Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 10,24. Tahun 2019 penurunan yang drastic ke angka 1,10. Kemudian pada tahun 2020 angka kematian bayi (AKB) di Kota Parepare meningkat dengan rasio 2,11 per 1000 kelahiran baru. Meningkat lagi di periode tahun 2021 sebesar 7,23. Meningkat Kembali di tahun 2022 yaitu 9,76. Selengkapnya pada tabel berikut:



Tabel 2.43.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Baru Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                                   | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran baru | 10,24 | 1,10 | 2,11 | 7,23 | 9,76 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi di Kota Parepare, memperlihatkan kecenderungan yang tidak tetap jumlahnya. Pada tahun 2018 sebanyak 990. Sedangkan di tahun 2019 kembali berada pada angka 999. Di tahun 2020 angkanya mencapai 995. Tahun 2021 dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka paling rendah sebanyak 981. Di tahun 2022 berada pada angka 977.

Tabel 2.44.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                     | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                               | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angka Kelangsungan Hidup Bayi | 990   | 999  | 995  | 981  | 977  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.3 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan data kematian balita dari tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,73. Sedangkan di tahun 2019 hingga 2022 di Kota Parepare tidak ada kasus kematian balita per 1000 kelahiran hidup menunjukkan angka 0,00.

Tabel 2.45.

Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                      | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup | 0,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal tahun 2018 bernilai 7,68 sedang tahun 2019 angka kematian yaitu sebesar 6,61. Di tahun 2020, angka kematian neonatal berada pada angka terendah dalam kurun waktu lima tahun

terakhir dengan rasio 1,69 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian di tahun berikutnya tahun 2021 terjadi peningkatan angka mencapai 5,33. Meningkatkan signifikan mencapai 8,49.

Tabel 2.46.  
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                        | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup | 7,68  | 6,61 | 1,69 | 5,33 | 8,49 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Dalam kurun waktu capaian tahun 2018 dan 2019 berada pada rasio 146,31 dan 146,79 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 angka kematian ibu memiliki rasio 73,39 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2021 adalah periode peningkatan signifikan pada angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 228,31. Tahun 2022 masih pada angka 212,31.

Tabel 2.47.  
Angka Kematian dan Kelangsungan Hidup  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                      | Tahun  |        |       |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
|                                                | 2018   | 2019   | 2020  | 2021   | 2022   |
| Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | 146,31 | 146,79 | 73,39 | 228,31 | 212,31 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tahun 2018-2022, jumlah posyandu dan jumlah balita di Kota Parepare relatif meningkat. Pada tahun 2018 menjadi 15,36 dimana jumlah posyandu meningkat menjadi 126 unit dan jumlah balita adalah 13.970 jiwa. Pada tahun 2019, rasio posyandu per satuan balita menurun cukup signifikan, yaitu menjadi 9,06, dimana terdapat 129 unit posyandu yang melayani balita sebanyak 14.246 jiwa. Di tahun 2020 rasio posyandu per satuan balita mengalami penurunan diangka 8,46 dimana jumlah balita adalah 15.246 jiwa dan jumlah posyandu 129 unit. Penurunan rasio

terjadi karena tidak ada penambahan jumlah posyandu, sedangkan jumlah balita yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di tahun periode berikutnya, tahun 2021 rasio posyandu per satuan balita meningkat namun tidak begitu signifikan hanya 8,71. Hingga tahun 2022 meningkat pesat ke angka 61,3.

Tabel 2.48.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang/ Urusan                   | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                  |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio Posyandu per satuan balita |        | 15,36 | 9,06 | 8,46 | 8,71 | 61,3 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Kota Parepare sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 berfluktuasi. Tahun 2018, jumlah penduduk meningkat menjadi 143.710 jiwa dan jumlah Puskesmas/Poliklinik/Pustu berkurang menjadi 31 unit, sehingga rasionya juga berkurang menjadi 0,22. Pada tahun 2019, jumlah Puskesmas/Poliklinik/Pustu bertambah menjadi 37 unit dengan jumlah penduduk yang juga meningkat menjadi 145.180 jiwa, sehingga rasionya kembali menjadi 0,25. Pada tahun 2020 rasio puskesmas, poliklinik, pustu sebesar 0,29 per satuan penduduk dengan jumlah penduduk mencapai 151.454 jiwa dan Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas pembantu bertambah jumlahnya menjadi 44. Tahun 2021 dengan jumlah penduduk 152.922 jiwa rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk menunjukkan angka 0,26. Di tahun 2022 rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk kota parepare berada pada angka 0,29.

Tabel 2.49.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang/Urusan                                                           | Sat. | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
|                                                                         |      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), puskesmas pemb. Per 100.000 pnddk |      | 0,22  | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,29 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kota Parepare dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Jumlah seluruh Rumah Sakit pada tabel Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Parepare pada tahun tahun 2018–2019 terdapat 4 unit. Pada tahun 2020 terjadi penambahan jumlah rumah sakit menjadi 5 unit yaitu: RSUD Andi Makkasau, RSAL dr. Sumantri, RS Fatima Parepare, RSIA Ananda Trifa, dan RS Regional dr. Hasri Ainun Habibie. Tahun 2021 hingga tahun 2022 jumlah Rumah Sakit di Kota Parepare masih berjumlah 5.

Membandingkan dengan jumlah penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2022, maka rumah sakit persatuan penduduk pada tahun 2018 sampai 2022 rasio rumah sakit di Kota Parepare sebesar 0,03 per satuan penduduk.

Tabel 2.50.  
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| No | Indikator                             | Tahun |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                       | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|    | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 0,03  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk di Kota Parepare sepanjang Tahun 2018-2022 juga berfluktuatif. Peningkatan jumlah dokter terjadi pada tahun 2018 jumlah dokter kembali meningkat menjadi 147 orang dan jumlah penduduk sebanyak 143.710 orang, sehingga rasio dokter juga meningkat menjadi 1,00. Pada tahun 2019, jumlah dokter berkurang menjadi 137 orang jumlah penduduk tetap bertambah menjadi 145.180 orang, namun rasio dokter kembali berkurang menjadi 0,90. Pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 167 Orang dan jumlah penduduk sebanyak 151.454 orang, dengan rasio 1,10 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk, rata-rata 1 dokter bisa melayani 11 penduduk. Di tahun 2021 peningkatan angka pada rasio

dokter per satuan penduduk hingga mencapai angka 1,60. Tahun 2022, rasio dokter persatuan penduduk mencapai 4,50.

Tabel 2.51.  
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                       | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                 |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio dokter persatuan penduduk |        | 1,00  | 0,90 | 1,10 | 1,60 | 4,50 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis di Kota Parepare per 1000 penduduk tahun 2018 adalah 7,38 dan tahun 2019 menurun ke angka 6,72. Rasio tenaga medis pada tahun 2020 mencapai 9,13. Ditahun berikutnya rasio tenaga medis menjadi 9,9 per tahun 2021. Tahun 2022 terjadi penurunan drastic ke angka 1,02. Peningkatan rasio tenaga medis per 1.000 penduduk secara linier mengikuti peningkatan jumlah tenaga medis.

Tabel 2.52.  
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                             | Sat | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----|-------|------|------|------|------|
|                                       |     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio tenaga medis per 1.000 Penduduk |     | 7,38  | 6,72 | 9,13 | 9,9  | 1,02 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Data cakupan kasus komplikasi kebidanan sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan kinerja yang menggembirakan selama 5 tahun terakhir cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 100%. Pada tahun 2020, jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja mencapai 412 orang dan yang mendapat penanganan mencapai 412 orang atau mencapai 100%. Dapat diartikan bahwa jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan jumlah

ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama mengalami perubahan yang sama di tiap tahunnya.

Dengan rincian pada tahun 2018 meningkat menjadi 503 orang, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 451 orang, dan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 412 orang. Kemudian tahun 2021 jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 438 orang dan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 438 orang. Kondisi tersebut menunjukkan komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dan akan menyebabkan risiko kematian ibu yang akan berdampak pada angka kematian ibu di Kota Parepare sudah tertangani dengan baik.

Tabel 2.53.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                                   | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                             |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tahun 2018, jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga medis sejumlah 2.720 dengan sasaran ibu bersalin sejumlah 2.862 atau cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis mencapai 95,04%. Tahun 2019, jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga medis sejumlah 2.721 dengan sasaran ibu bersalin sejumlah 2.879 atau cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis mencapai 95,51%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga medis sejumlah 2.383 dengan sasaran ibu bersalin sejumlah 3.111 atau cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis mencapai 76,60 dan merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima tahun. Tahun

berikutnya kembali meningkat mencapai angka 86,50 persen untuk Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tahun 2022 meningkat Kembali ke angka 87,00 persen.

Tabel 2.54.

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                               | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                         |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | %      | 95,04 | 94,51 | 76,60 | 86,50 | 87,00 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Data menunjukkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization di Kota Parepare dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 stagnan dijumlah 22 kelurahan UCI dari 22 kelurahan yang ada atau cakupan kelurahan UCI mencapai angka 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan kelurahan yang berada pada Kota Parepare telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Namun pada tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan menjadi 90,91 persen, hal ini disebabkan karena jumlah kelurahan UCI berkurang menjadi 20 dari keseluruhan kelurahan yang ada. Tahun 2021, Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI) kembali mencapai angka 100 persen yang berarti terjadi peningkatan di periode tahun 2021 hingga tahun 2022.

Tabel 2.55.

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                            | Satuan | Tahun |      |       |      |      |
|------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------|------|
|                                                      |        | 2018  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
| Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI) | %      | 100   | 100  | 90,91 | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Parepare yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100% sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 penentuan terjadinya kasus gizi buruk mengalami perubahan metode sehingga kasus gizi buruk mengalami penurunan menjadi 2 (dua) orang. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2020 kembali mengalami penambahan menjadi 3 (tiga) orang. Semua kasus gizi buruk yang terjadi telah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Tahun 2021, Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu berjumlah 15 dan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama berjumlah 15 sehingga Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2021 mencapai 100 persen.

Tabel 2.56.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                                    | Sat. | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
|                                              |      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | %    | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.1.2.15. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah  
Tingkat Konsumsi Minimum

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum, pada periode tahun 2018 proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum Kota Parepare adalah 71,20 persen. Tahun 2019 menjadi 72,85 persen, Tahun 2019 banyaknya jumlah penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari yaitu mencapai 103.786 jiwa, dengan jumlah balita sebanyak 148.265 jiwa dan proporsi penduduk sebanyak 72,85 persen. Tahun 2020 mengalami penurunan ke angka 70,90 persen. Di tahun 2020 Jumlah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum sebesar 70,90% dengan jumlah balita 15.246 jiwa dan sebanyak 108.103 jiwa penduduk yang tingkat



konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari). Kembali mengalami penurunan sebesar 0,2 persen untuk tahun 2021 dengan capaian persentase adalah 70,70 persen. Tahun 2022 Jumlah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum adalah 60 persen.

Tabel 2.57.

Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                                       | Sat. | Tahun |       |       |       |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                                                 |      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|     | Jumlah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum | %    | 71,20 | 72,85 | 70,90 | 70,70 | 60   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.16. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dalam lima tahun terakhir, dimana di tahun 2018 naik lagi mencapai 116,66 persen, dan tahun 2019 sebesar 110,69 persen. Pada tahun 2020 Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun sebanyak 3.135 jiwa, dengan jumlah anak usia 1 tahun sebanyak 2.440 jiwa atau persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sebesar 128,48 persen. Yang kemudian turun hingga angka 101,30 persen untuk tahun 2021. Tahun 2022 capaiannya masih pada ranah 100 persen.

Tabel 2.58.

Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                            | Sat. | Tahun  |        |        |        |      |
|-----|------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|     |                                                      |      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
| 3.  | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | %    | 116,66 | 110,69 | 128,48 | 101,30 | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.17. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Non polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kota Parepare selama periode 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami stagnasi setiap

tahun diangka 0,00 persen. Angka ini jauh dibawah standar minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 2/ 100.000 penduduk usia <15 tahun. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 0,01.

Tabel 2.59.  
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                               | Sat. | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
|                                         |      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | %    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.18. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Cakupan balita pneumonia yang ditangani dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah mencapai persentase sebesar 100 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua balita yang terkena pneumonia sudah mendapatkan perawatan medis, dan sudah ditangani dengan baik oleh sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.60.  
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                               | Sat. | Tahun  |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         |      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Cakupan balita pneumonia yang ditangani | %    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.19. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Parepare, jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) di Kota Parepare pada tahun 2018, jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 2.204 penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama 1 tahun berjumlah 323 penderita atau cakupan penemuan dan penanganan meningkat menjadi

14,66%. Tahun 2019, jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 450 penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama 1 tahun berjumlah 372 penderita atau cakupan penemuan dan penanganan meningkat signifikan menjadi 82,67%. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 622 penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama 1 tahun berjumlah 295 penderita atau cakupan penemuan dan penanganan kembali mengalami penurunan menjadi 47,42%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) cukup baik dalam mendeteksi kejadian penularan penyakit TBC, meskipun masih perlu dorongan peningkatan kinerja pemantauan. Tahun 2021, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Parepare kembali mengalami penurunan hingga 44,53% sedangkan tahun 2022 capaiannya adalah 70,42%.

Tabel 2.61.

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                  | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                            |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | %      | 14,66 | 82,67 | 47,42 | 44,53 | 70,42 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.20. Tingkat Prevalensi dan Kematian Karena Tuberkulosis

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dalam lima tahun terakhir, memperlihatkan kecenderungan yang tidak tetap jumlahnya, dimana tahun 2018 meningkat dengan mencapai angka sebesar 1533,64, dan tahun 2019 turun menjadi 309,96. Tahun 2020 banyaknya kasus penderita TBC sebanyak 295 jiwa, dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama yaitu 151.454 jiwa, dan tingkat prevalensi tuberkulosis sebesar 194,77. Tahun 2021 tingkat prevalensi tuberkulosis adalah 183,46. Dan meningkat Kembali di tahun 2022 mencapai angka 290,09.

Tingkat prevalensi dan kematian karena tuberkulosis dalam lima tahun terakhir, juga mengalami fluktuasi, dimana tahun 2018 menyisakan angka sebesar 8,35, dan di tahun 2019 naik dengan mencapai angka sebesar 12,39. Tahun 2020 jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal sebanyak 15 jiwa, dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama yaitu 151.454 jiwa, dan tingkat kematian yang karena tuberkulosis sebesar 9,90. Kemudian di tahun 2021 tingkat kematian karena tuberkulosis sebesar 6,44 menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2022 tingkat kematian karena tuberkulosis makin berkurang dan menurun menunjukkan angka 3,65.

Tabel 2.62.

Tingkat Prevalensi dan Kematian Karena Tuberkulosis  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator                                                          | Tahun   |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                    | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|    | <b>Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)</b>      |         |        |        |        |        |
|    | Tingkat prevalensi Tuberkulosis                                    | 1533,64 | 309,96 | 194,77 | 183,46 | 290,09 |
|    | <b>Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)</b> |         |        |        |        |        |
|    | Tingkat kematian karena Tuberkulosis                               | 8,35    | 12,39  | 9,90   | 6,44   | 3,65   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.1.2.21. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS dan Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS berdasarkan data pada di bawah, maka dapat diketahui bahwa di tahun 2018, jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS, yaitu sebanyak 323 orang dengan persentase sebesar 14,66 persen. Sedangkan di tahun 2019, jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS, yaitu sebanyak 372 orang dengan persentase sebesar 82,67 persen. Tahun 2020, jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS yaitu sebanyak 295 orang dengan persentase proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami penurunan menjadi 47,42 persen. Dan di tahun 2021 Proporsi jumlah kasus yang terdeteksi dalam program DOTS sebanyak 44,53

persen. Di tahun 2022 meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 87,00 persen.

Sedangkan untuk proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, juga mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2018, jumlah pasien TB paru BTA yang sembuh selama 1 tahun yaitu sebanyak 258 orang dengan persentase sebesar 79,88 persen. Sedangkan di tahun 2019, jumlah pasien TB paru BTA yang sembuh selama 1 tahun yaitu sebanyak 326 orang dengan persentase sebesar 87,63 persen. Tahun 2020, jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh selama 1 tahun yaitu sebanyak 84 orang, dengan persentase proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS turun menjadi 28,47 persen. Tahun 2021 proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 90,17 persen, peningkatan drastis dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 meningkat ke angka 87,00 persen.

Tabel 2.63.

Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS dan Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator                                                                     | Tahun  |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|    | <b>Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS</b>  |        |        |        |        |        |
|    | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS         | 14,66% | 82,67% | 47,42% | 44,53% | 87,00% |
|    | <b>Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS</b> |        |        |        |        |        |
|    | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS        | 79,88% | 87,63% | 28,47% | 90,17% | 87,00% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.22. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2018, jumlah kasus berkurang menjadi 113 kasus dan dapat tertangani semuanya. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan kembali kasus DBD yaitu mencapai 193 kasus dan dapat ditangani semuanya dengan baik atau 100 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 161 kasus

dan yang ditangani sesuai SOP berjumlah 161 kasus atau cakupan penemuan dan penanganan mencapai 100%. Hingga tahun 2022 persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah 100 persen.

Tabel 2.64.  
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                              | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                        |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.23. Penderita Diare yang Ditangani

Jumlah penderita diare yang ditangani dalam waktu 5 tahun di tahun 2018 naik lagi menjadi 30,39 persen dan tahun 2019 sebesar 31,64 persen. Tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah penderita diare yang ditangani adalah 100 pesen.

Tabel 2.65.  
Penderita Diare yang Ditangani Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                      | Satuan | Tahun |       |      |      |      |
|-----|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|------|
|     |                                |        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3.  | Penderita diare yang ditangani | %      | 30,39 | 31,64 | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.24. Angka Kejadian dan Tingkat Kematian Akibat Malaria

Data angka kejadian malaria berdasarkan di tahun 2018 juga terdapat 15,48 angka kejadian malaria. Sedangkan di tahun 2019 total angka kejadian malaria sebesar 9,44 per 1000 penduduk. Tahun 2020, angka kejadian malaria meningkat menjadi 13,20 per 1000 penduduk. Tahun 2021 untuk angka kejadian adalah sebesar 11. Tahun 2020 menurun ke angka 10.

Tingkat kematian akibat malaria dalam 5 tahun terakhir memiliki nilai yang tetap, dengan 0 jumlah kematian di tiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua penduduk yang menderita malaria sudah mendapatkan perawatan medis, dan sudah ditangani dengan baik oleh sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.66.  
Angka Kejadian dan Tingkat Kematian Akibat Malaria  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator                              | Tahun |      |       |      |      |
|----|----------------------------------------|-------|------|-------|------|------|
|    |                                        | 2018  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
|    | <b>Angka kejadian Malaria</b>          |       |      |       |      |      |
|    | Angka kejadian Malaria                 | 15,48 | 9,44 | 13,20 | 11   | 10   |
|    | <b>Tingkat kematian akibat malaria</b> |       |      |       |      |      |
|    | Tingkat kematian akibat Malaria        | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.25. Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida mengalami stagnasi, dengan nilai proporsi dalam tahun 2018 sampai 2022 yaitu 0,00.

Tabel 2.67.  
Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida  
di Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                     | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                               |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|     | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida | %      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.26. Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat, dalam periode Tahun 2018-2022 memiliki persentase sebesar 0,00. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya jumlah penderita balita yang positif malaria dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.68.  
Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                                          | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                                                    |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3.  | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat | %      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.27. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 turun menjadi 0,197 persen dan tahun 2019 naik sebesar 0,290 persen. Tahun 2020 persentase prevalensi HIV/AIDS dari total populasi mengalami sedikit penurunan menjadi 0,224 persen. Tahun 2021 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi sebesar 0,20 persen. Tahun 2022 menjadi 0,35 persen.

Tabel 2.69.  
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                               | Satuan | Tahun  |        |        |      |      |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
|                                         |        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 |
| Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi | %      | 0,1970 | 0,2900 | 0,2244 | 0,20 | 0,35 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.28. Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Persentase penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 pengguna kondom hubungan seks pada usia 15–24 tahun adalah sebesar 75,00 persen dengan banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 Bulan terakhir sebanyak 5.749 sedangkan Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir adalah 8.213. Ditahun 2018 mencapai 75,00 persen yang di tahun berikutnya perlahan mulai memperlihatkan penurunan hingga tahun 2021. Tahun 2019 sebesar 74,99 persen, tahun 2020 sebesar 74,55, dan tahun 2021 sebesar 74,70 persen. Tahun 2022 meningkat Kembali ke angka 75 persen.

Tabel 2.70.  
Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                     | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                               |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|     | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | %      | 75,00 | 74,99 | 74,55 | 74,70 | 75   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023



2.1.3.1.1.2.29. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tabel di bawah dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di tahun 2018 hingga 2020 masing-masing sebesar 35,00 persen, 34,90 persen, dan 39,53 persen. Tahun 2021 proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS mencapai 42 persen. Dan tahun 2022 meningkat hingga ke angka 50 persen.

Tabel 2.71.

Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                                                         | Satuan | Tahun |       |       |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|     |                                                                                                   |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| 3.  | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | %      | 35,00 | 34,90 | 39,53 | 42   | 50   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.1.2.30. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2018 berada pada angka 21 persen. Pada tahun 2019, jumlah masyarakat miskin berada pada cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 28 persen. Pada tahun 2020, cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin mencapai 18 persen. Tahun 2021 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan drastic hingga mencapai Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.72.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                    | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                              |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Persen | 21    | 28   | 18   | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.31. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada Tahun 2018 persentase cakupan kunjungan bayi adalah 114,15 persen yang memperoleh pelayanan kesehatan. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan bayi adalah 2.461 bayi dan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan mencapai 2.461 bayi, sehingga cakupan kunjungan bayi pada tahun 2019 adalah 100 persen. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan sebanyak 2.347 bayi dan keseluruhan bayi yang lahir sebanyak 2.368 bayi atau cakupan kunjungan bayi mencapai 99,11 persen. Dan tahun 2021 mencapai 100 persen untuk cakupan kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan. Tahun 2022 jumlah Cakupan kunjungan bayi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar menurun menjadi 90 persen. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.73.  
Cakupan Kunjungan Bayi Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator              | Satuan | Tahun  |      |       |      |      |
|------------------------|--------|--------|------|-------|------|------|
|                        |        | 2018   | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
| Cakupan kunjungan bayi | %      | 114,15 | 100  | 99,11 | 100  | 90   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.32. Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Parepare, cakupan puskesmas pada periode Tahun 2018 dan 2019 sudah mencapai angka 150 persen, dengan 4 jumlah kecamatan dan 6 puskesmas. Tahun 2020 hingga 2022 terjadi penambahan puskesmas sebagai bentuk peningkatan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi 8 dari 4 kecamatan yang ada atau cakupan puskesmas meningkat menjadi 200 persen.

Sedangkan cakupan pembantu puskesmas dalam 5 tahun terakhir terdapat sebanyak 21 pembantu puskesmas dengan cakupan sebesar 95,45 persen tahun 2021 dan 2022. Sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat sebanyak 30 pembantu puskesmas dari keseluruhan kelurahan yang ada dengan cakupan sebesar 136,36 persen.

Tabel 2.74.  
Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator                         | Tahun  |        |        |       |       |
|----|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|    |                                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  |
|    | <b>Cakupan puskesmas</b>          |        |        |        |       |       |
| 3. | Cakupan Puskesmas                 | 150    | 150    | 200    | 200   | 200   |
|    | <b>Cakupan pembantu puskesmas</b> |        |        |        |       |       |
| 3. | Cakupan pembantu puskesmas        | 136,36 | 136,36 | 136,36 | 95,45 | 95,45 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.33. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2018 sebesar 90,26 persen, dan di tahun 2019 turun lagi menjadi 86,63 persen. Tahun 2020 cakupannya kembali menurun menjadi 68,15 persen. Tahun 2021 kembali meningkat ke angka 76,76 persen. Tahun 2022 capaian persentase kunjungan ibu hamil K4 menjadi 65,8 persen.

Tabel 2.75.  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                      | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|-----|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|     | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | %      | 90,26 | 86,63 | 68,15 | 76,76 | 65,8 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.34. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebesar 96,79 persen, dan di tahun 2019 turun lagi menjadi 94,51 persen. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan nifas kembali turun menjadi 74,44 persen. Tahun 2021 Cakupan pelayanan nifas adalah sebesar 82,73 persen. Tahun 2022 menurun menjadi 69,7 persen.

Tabel 2.76.  
Cakupan Pelayanan Nifas Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator               | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|-----|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                         |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| 3.  | Cakupan pelayanan nifas | %      | 96,79 | 94,51 | 74,44 | 82,73 | 69,7 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.35. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Jumlah persentase dari cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani dalam 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2018 berada pada angka 68,54 persen dan tahun 2019 turun dengan nilai persentase menjadi 56,20 persen. Tahun 2020 cakupannya sedikit mengalami peningkatan menjadi 56,28 persen. Kemudian drastic meningkat ditahun 2021 mencapai 100 persen untuk cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Tahun 2022, angka cakupan neonatas dengan komplikasi yang ditangani menjadi 90 persen.

Tabel 2.77.

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                          | Satuan | Tahun |       |       |      |      |
|-----|----------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|     |                                                    |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| 3.  | Cakupann neonatus dengan komplikasi yang ditangani | %      | 68,54 | 56,20 | 56,28 | 100  | 90   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.2.36. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Dalam 5 tahun terakhir, ditahun 2018 cakupan pelayanan anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di Kota Parepare adalah 99,18 persen nyaris sempurna 100 persen. Kemudian di tahun 2019 dimana jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama sebanyak 14.246 balita, dengan jumlah yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu yaitu sebanyak 14.111 balita, atau sama dengan 99,05 persen. Di tahun 2020 Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu 9.156 balita, Jumlah seluruh anak balita sebanyak 15.353 balita, dengan Cakupan pelayanan anak balita mencapai 59,63 persen. Dan di tahun 2021 cakupan pelayanan anak balita sebesar 75,74 persen cakupan balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali tersebut.

Tabel 2.78.

## Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                     | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|-----|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                               |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| 3.  | Cakupan pelayanan anak balita | %      | 99,18 | 99,05 | 59,63 | 75,74 | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.37. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6–24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin sebesar 100 persen setiap tahunnya. Hal ini mendakan bahwa seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin mendapatkan makanan pendamping ASI secara optimal.

Tabel 2.79.

## Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6–24 Bulan Keluarga Miskin Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                                            | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                                                      |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|     | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.38. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 selalu berada diatas angka 99 persen (99,98 persen dan 99,97 persen). Namun, diakhir periode tahun 2020 cakupannya menurun secara drastic dan signifikan menjadi 25,50 persen. Perubahan cakupan yang signifikan dikarenakan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang tidak berjalan optimal yang dilakukan terhadap murid SD dan setingkat. Dan berlanjut ke tahun 2021 yang hanya mencapai 26,2 persen. Tahun 2022, Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Parepare yang diperiksa

kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih adalah 100 persen.

Tabel 2.80.

Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                             | Satuan | Tahun |       |       |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|     |                                                       |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|     | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat | %      | 99,98 | 99,97 | 25,50 | 26,2 | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.39. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah mencapai persentase sebesar 100 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sudah ditangani dengan baik oleh sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.81.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                           | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                     |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.2.40. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini berarti bahwa semua pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan sudah ditangani dengan baik oleh sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.82.

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                                          | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                                                    |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|     | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.1.2.41. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai angka 100 persen tiap tahunnya, dimana terdapat 1 KLB di desa/kelurahan dan tertangani kurang dari 24 jam.

Tabel 2.83.

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                                              | Satuan | Tahun  |        |        |        |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|     |                                                                                        |        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
|     | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | %      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

**2.1.3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

2.1.3.1.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan hal penting untuk mengakselerasikan perwujudan kemajuan pembangunan transportasi jalan. Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mengalami fluktuasi, yang mana pada tahun 2018 sebesar 57,65. Untuk tahun 2019 kembali mengalami kenaikan dengan proporsi sebesar 60,45. Pada tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi 62,50. Di tahun 2021 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik meningkat menjadi 78,65. Tahun 2022 terkait proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 83,17.

Tabel 2.84.

Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                          | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                    |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | %      | 57,65 | 60,45 | 62,50 | 78,65 | 83,17 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.3.2 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pembangunan jalan dilakukan untuk menunjang akses/pergerakan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sedangkan perhitungan Panjang jalan didasarkan pada SK Menteri, SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota. Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat dilihat dari tabel di bawah dimana mengalami penurunan menjadi 2,12 m/jumlah penduduk di tahun 2018 dan di tahun 2019 menjadi 2,10 m/jumlah penduduk. Tren penurunan ini berlanjut sampai di tahun 2020 dengan rasio Panjang jalan menjadi 1,75 m/jumlah penduduk akibat adanya penyesuaian penetapan SK status jalan dan kartu inventaris barang milik daerah. Tahun 2021 perubahan angka tidak begitu signifikan hanya bertambah 0,01 persen menjadi 1,76 m/jumlah penduduk. Tahun 2022, menjadi 1,9 m/jumlah penduduk.

Tabel 2.85  
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                  | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                            | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk | 2,12  | 2,10 | 1,75 | 1,76 | 1,9  |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.3.3 Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Untuk indikator persentase Kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 tidak tersaji datanya, sehingga tidak bisa diukur untuk angka capaian indikatornya.

Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.85.  
Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui  
Kendaraan Roda 4 Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                              | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                                        |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 | %      | -     | -    | -    | -    | -    |

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023



#### 2.1.3.1.1.3.4 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dalam periode Tahun 2018 dengan angka 57,65 persen. Sedangkan di tahun 2019 terjadi peningkatan, dengan jumlah persentase sebesar 60,45 persen. Di tahun 2020 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) sebesar 62,50 persen dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 78,65 persen. Meningkat Kembali di tahun 2022 menjadi 83,17 persen.

Tabel 2.86.

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                  | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                            |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) | %      | 57,65 | 60,45 | 62,50 | 78,65 | 83,17 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.5 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)

Ketersediaan trotoar dan drainase jalan merupakan bagian dari ruang milik jalan serta menjadi penunjang kelengkapan jalan menuju standar. Pada tahun 2018 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) sebanyak 16,79 persen dan setiap tahun nya mengalami peningkatan sampai pada tahun 2020 yaitu 18,79 persen. Namun di tahun 2021, peningkatan yang terjadi stagnan di angka 18,79 persen. Tahun 2022 menjadi 18,9 persen.

Tabel 2.87.

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran  
Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                  | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                                            |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (minimal 1,5 m) | %      | 16.79 | 17.46 | 18.79 | 18.79 | 18,9 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.6 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar mengalami stagnasi dalam 5 tahun terakhir, dengan jumlah presentase setiap tahunnya yaitu sebesar 38 persen. Pedagang kaki lima atau bangunan liar yang ada disempadan jalan memang tidak diperkenankan, kecuali bangunan yang ada selama ini diberikan toleransi sepanjang tidak mengganggu pengguna jalan.

Tabel 2.88.

Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                          | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                    |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar | %      | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38,00 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.7 Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi

Cakupan rumah tinggal bersanitasi tahun 2018 sebesar 90,68 persen dan tahun 2019 sebesar 90 persen. Tahun 2020 dan 2021 mencapai angka 93,35 dan 93,76 persen. Tahun 2022 turun menjadi 88,81 persen.

Tabel 2.89.

Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                         | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi | %      | 90,68 | 90,00 | 93,35 | 93,76 | 88,81 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.8 Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak ada sempadan sungai yang dipakai bangunan liar atau sempadan sungai sudah digunakan sebagaimana fungsinya.

Tabel 2.90.

Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                             | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                       |        | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar | %      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.9 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dalam 5 tahun dimana pada tahun 2018 sebesar 85,00 persen. Sedangkan di tahun 2019 dan 2020 dikisaran angka 86,46 dan 86,87 persen. Di tahun 2021 meningkat ke 87,10 persen sebab adanya dukungan alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin drainase, dan pelibatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah dalam pemeliharaan drainase. Tahun 2022, signifikan menjadi 104,29 persen Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat.

Tabel 2.91.

Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                    | Satuan | Tahun |       |       |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                              |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
| Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | %      | 85.00 | 86.46 | 86.87 | 87.10 | 104,29 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.10 Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor :01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal sistem jaringan drainase skala kota adalah tidak terjadinya genangan lebih dari 2 kali setahun dengan ketinggian genangan lebih dari 30 cm, selama 6 jam. Berdasarkan data dari tabel di bawah, maka dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir, persentase tidak terjadinya genangan > 2 kali setahun di Kota Parepare mengalami deflasi. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 masing-masing sebesar 92,50 persen. Kemudian di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 93,00 persen. Tahun 2021 angka capaian persentase tidak terjadi genangan >2 kali setahun adalah 94,25 persen. Pada daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di tahun 2022 tidak terjadinya genangan >2 kali setahun adalah 94,69 persen.

Tabel 2.92.  
Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                               | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                         |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | %      | 92.50 | 92.50 | 93.00 | 94.25 | 94,69 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.1.3.11 Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor pada periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 memiliki persentase masing-masing sebesar 47,90 persen. Kemudian di tahun 2020, persentasenya meningkat menjadi 52,50 persen. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Parepare Tahun 2021 adalah 80,00 persen hingga tahun 2022.

Tabel 2.93.  
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                          |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | %      | 47.90 | 47.90 | 52.50 | 80.00 | 80,00 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.12 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kota Parepare dalam 5 tahun terakhir mengalami inflasi. Dari data tabel di bawah, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 memiliki persentase sebesar 89,50 persen. Dan di tahun 2019 naik menjadi 90,46 persen. Di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 91,78 dan merupakan persentase tertinggi dari data lima tahun terakhir. Tahun 2021 meningkat ke 94,74 persen untuk indikator Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik. Tahun 2022 meningkat menjadi 95,07 persen.

Tabel 2.94.

Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                       | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                 |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | %      | 89.50 | 90.46 | 91.78 | 94.74 | 95,07 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.13 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Parepare memperlihatkan terjadinya peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 bernilai 17,27 meter. Rasio Jaringan Irigrasi di tahun 2020 hingga tahun 2022 meningkat pada angka 26,84. Penyebab peningkatan rasio jaringan irigasi tahun 2020 karena adanya perbaikan saluran dan rehab daerah irigasi.

Tabel 2.95.

Rasio Jaringan Irigasi Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator               | Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Rasio Jaringan Irigrasi | 17.27 | 17.27 | 26.84 | 26.84 | 26,84 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.14 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum pada periode tahun 2018 mencapai 84,29 persen, tahun 2019 mencapai 87,56 persen. Tahun 2020 meningkat menjadi 96,87 persen dan di tahun 2021 mencapai 97,90 persen dikarenakan sumur dalam di kelurahan Bumi Harapan tahun 2021 dan adanya penyambungan rumah. Tahun 2022, meningkat menjadi 97,97 persen.

Tabel 2.96.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                              | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                        |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase penduduk berakses air minum | %      | 84.29 | 87.56 | 96.87 | 97.90 | 97,97 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.15 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 92,50%. Kemudian tahun 2019 kembali meningkat menjadi 93,50 persen dan di akhir tahun 2020 proporsinya mencapai 97,14 persen. Meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 98,17 persen. Hingga tahun 2022 mencapai 98,22 persen.

Tabel 2.97.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                          | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                    |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | %      | 92,50 | 93,50 | 97,14 | 98,17 | 98,22 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.16 Persentase Areal Kawasan Kumuh

Persentase areal kawasan kumuh di Kota Parepare cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari tahun 2018 sebesar 22,48 persen. Sedangkan di tahun 2019, persentase areal Kawasan kumuh menurun menjadi 12,65 persen. Yang kemudian tahun 2020, jumlah persentase areal Kawasan kumuh stagnan di 12,65 persen.

Tabel 2.98.

Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                      | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Persentase areal Kawasan kumuh | %      | 22,48 | 12,65 | 12,65 | 12,54 | -    |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.17 Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 menjadi 13,00%. Sedangkan di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 13,50% dan di tahun 2020, persentase tersedianya

fasilitas pengurangan sampah di perkotaan menjadi 14,50 persen. Tahun 2021 adalah 14,51 persen.

Tabel 2.99.

Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                             | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                       |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | %      | 13,00 | 13,50 | 14,50 | 14,51 | -    |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.3.19 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Parepare, dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tahun 2018 rasionya sebesar 1,41. Kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 1,55, dan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,60. Tahun 2021 menjadi 1,62.

Tabel 2.100.

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                               | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | 1.41  | 1,55 | 1,60 | 1.62 | -    |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.1.3.20 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat. Tahun 2018 rasionya stagnan di angka 47,90. Kemudian di tahun 2019 meningkan menjadi 50,70 dan di tahun 2020 rasionya mencapai 70,88 dan merupakan rasio tertinggi dari data lima tahun terakhir. Dari data yang ada menunjukkan bahwa setiap tahun semakin banyak bangunan yang ber-IMB di Kota Parepare. Tahun 2021 meningkat menjadi 74,18 sedang tahun 2022 menurun menjadi 59,66.

Tabel 2.101.

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                  | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                            |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan | jml    | 47.90 | 50.70 | 70,88 | 74.18 | 59,66 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.3.21 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 persentase ruang publik yang berubah peruntukannya sebesar 0 persen. Hal ini dikarenakan tidak terdapat kasus ruang publik di Kota Parepare yang berubah peruntukannya.

Tabel 2.102.  
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya  
Kota Parepare tahun 2018-2022

| Indikator                               | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                         |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ruang Publik yang berubah peruntukannya | %      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.3.22 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki persentase sebesar 0 persen. Hal ini dikarenakan tidak terdapat kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan.

Tabel 2.103.  
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                                                    | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.3.23 Ketaatan terhadap RTRW

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa persentase ketaatan terhadap RTRW di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana dari tahun 2018 persentase ketaatan sebesar 95,00 persen dan di tahun 2019 mengalami



peningkatan menjadi 99,97 persen. Sedangkan diakhir tahun 2020 dan tahun 2021 hanya mengalami penambahan 0,01 persen menjadi 99,98 persen. Di tahun 2022 menurun ke angka 99,86.

Tabel 2.104.

Ketaatan terhadap RTRW Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator              | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Ketaatan terhadap RTRW | %      | 95,00 | 99,97 | 99,98 | 99,98 | 99,86 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### 2.1.3.1.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Selama periode tahun 2018 dan tahun 2019 rasio rumah layak huni di Kota Parepare berada pada angka 0,253. namun di periode tahun 2020 rasionya menurun dan merupa rasio terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 rasionya menurun menjadi 0,220 artinya hanya ada sekitar 28.989 rumah laya huni di Kota Parepare. Tahun 2021 meningkat menjadi 0,230 dan tahun 2022 adalah 0,24.

Tabel 2.105.

Rasio Rumah Layak Huni Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator              | Tahun |       |       |       |      |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Rasio rumah layak huni | 0,253 | 0,253 | 0,220 | 0,230 | 0,24 |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023

##### 2.1.3.1.1.4.2 Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni di Kota Parepare mengalami . Pada tahun 2018 memiliki Rasio permukiman layak huni sebesar 1,027, tahun 2019 sebesar 1,024 dan di tahun 2020 menurun menjadi 0,685. Tahun 2021 hingga 2022 berada pada kondisi stagnansi sebesar 0,768.

Tabel 2.106.

Rasio Permukiman Layak Huni Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                   | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Rasio permukiman layak huni | 1,027 | 1,024 | 0,685 | 0,768 | 0,768 |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Parepare pada tahun 2018 sebesar 97,00 persen dan terus bertambah hingga di tahun 2019 menjadi 97,11 persen. Namun di tahun 2020 cakupan ketersediaan rumah layak huni menurun ke angka 93,89 persen. Tahun 2021 meningkat menjadi 95,81 persen. Hingga tahun 2022 meningkat menjadi 96,53 persen.

Tabel 2.107.  
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                             | Tahun |       |       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 97,00 | 97,11 | 93,89 | 95,81 | 96,53 |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 cakupan menjadi 53,47 persen. Pada tahun 2019 cakupan layanan mencapai 55,01 persen dan di akhir tahun 2020 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau kembali turun menjadi 40,07 persen. Tahun 2021 peningkatan melonjak ke angka 85,18 persen untuk layanan rumah layak huni yang terjangkau di Parepare. Dan di tahun 2022 menjadi 82,70 persen.

Tabel 2.108.  
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau  
di Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                        | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 53,47 | 55,01 | 40,07 | 85,18 | 82,70 |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.4.5 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kota Parepare dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah pemukiman kumuh yang semakin berkurang. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2018

jumlah persentase lingkungan pemukiman kumuh sebesar 10,043 persen, sedangkan di tahun 2019 menurun dengan hanya menyisakan 1,71 persen. Di tahun 2020 persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kota Parepare berada pada angka 3,63 persen. Penyebab perubahan persentase lingkungan kumuh yaitu karena adanya perubahan SK kumuh. Tahun 2021, Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh adalah 0,02 persen mengalami penurunan yang cukup dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 menjadi 2,68 persen.

Tabel 2.109.  
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                             | Tahun   |       |       |       |       |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 10,043% | 1,71% | 3,63% | 0,02% | 2,68% |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.4.6 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2018 yaitu 0,633 persen. Namun di tahun 2019 meningkat signifikan dengan jumlah persentase sebesar 11,659 persen. Tahun 2020 berkurang ke angka 8,91 persen. Penyebab perubahan persentase luas pemukiman kumuh yaitu karena adanya perubahan SK kumuh. Tahun 2021 makin menurun menyentuh angka 0,28 persen. Mulai meningkat ditahun 2022 sebesar 4,71 persen.

Tabel 2.110.  
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                               | Tahun  |         |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|
|                                                         | 2018   | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 0,633% | 11,659% | 8,91% | 0,28% | 4,71% |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.4.7 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2018 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 3,33 persen dan di tahun 2019 turun menjadi 2,82 persen. Tahun 2020 proporsinya meningkat secara signifikan menjadi 15,78 persen, dikarenakan jumlah rumah di Kota Parepare sebanyak 35.853 unit dan jumlah rumah tangga kumuh berdasarkan data dari KOTAKU sebanyak 5.660 unit atau ada perubahan kawasan kumuh dalam proses pendataan. Tahun 2021 angka Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan mengalami penurunan hingga 7,29. Namun Kembali meningkat di tahun 2022 sebesar 12,72 persen.

Tabel 2.111.  
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                             | Tahun |      |       |      |       |
|---------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|
|                                       | 2018  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022  |
| Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | 3,33  | 2,82 | 15,78 | 7,29 | 12,72 |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.1.4.8 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

Berdasarkan data dari tabel di bawah, maka dapat diketahui bahwa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU sebesar 100 persen.

Tabel 2.112.  
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan  
PSU Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                       | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Parepare Tahun 2023

### 2.1.3.1.1.5 Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

#### 2.1.3.1.1.5.1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pelaksanaan tugas penegakan ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan tugas dari linmas. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka sangat ditentukan dari data terkait cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas). Cakupan Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) terus mengalami penambahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2018 stagnan sebesar 0,88 persen. Sedangkan di tahun 2019 dan 2020 cakupan petugas linmas meningkat diangka 2 persen, masing-masing 2,06 persen dan 2,01 persen. Tahun 2021 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) meningkat drastic mencapai 25,09 persen. Makin meningkat di tahun 2022 menjadi 32 persen.

Tabel 2.113.  
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang/Urusan                                    | Satuan | Tahun |      |      |       |      |
|--------------------------------------------------|--------|-------|------|------|-------|------|
|                                                  |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 |
| Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) | %      | 0,88  | 2,06 | 2,01 | 25,09 | 32   |

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 penyelesaian pelanggaran K3 kembali meningkat hingga 91,04%. Untuk tahun 2019, jumlah K3 yang terselesaikan sebanyak 125 pelanggaran dari jumlah total pelanggaran K3 sebanyak 135 pelanggaran atau tingkat penyelesaiannya meningkat menjadi 92,59%. Dan pada tahun 2020 tingkat penyelesaian K3 sebesar 98,20%, artinya hampir semua kasus pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi dapat terselesaikan dengan baik. Tahun 2021 hingga tahun 2022 capaian

untuk Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah 100 persen.

Tabel 2.114.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                               | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|------|------|
|                                                                         |        | 2018            | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | %      | 91,04           | 92,94 | 98,20 | 100  | 100  |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.5.3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Parepare selama kurun waktu lima tahun terakhir selalau mencapai angka 100 persen, hal ini menandakan jangkauan manajemen kebakaran bisa mengakomodir total luas wilayah kota Parepare.

Tabel 2.115.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                          | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|     |                                                    |        | 2018            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|     | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.5.4 Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakar. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 persentasenya selalu diangka 100 persen, artinya semua kasus kebakaran di WMK tertangani waktu maksimal 15 menit.

Tabel 2.116.

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                            | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|                                                                                                      |        | 2018            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | %      | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.5.5 Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan PERDA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 persentasenya 92,16 persen, kemudian tahun 2019 mengalami sedikit penambahan menjadi 93,87 persen. Dan di akhir tahun 2020 persentase penegakan PERDA meningkat menjadi 96,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari semua pelanggaran PERDA semuanya terselesaikan dengan penegakan PERDA. Tahun 2021 Persentase Penegakan PERDA mencapai 99,2 persen. Tahun 2022 mencapai angka 100 persen untuk penegakan PERDA.

Tabel 2.117.

Persentase Penegakan PERDA Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                  | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |      |      |
|----------------------------|--------|-----------------|-------|-------|------|------|
|                            |        | 2018            | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| Persentase Penegakan PERDA | %      | 92,16           | 93,87 | 96,33 | 99,2 | 100  |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.6 Bidang Urusan Sosial

##### 2.1.3.1.1.6.1 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Data PMKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun social secara memadai dan wajar.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Parepare dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018 angka PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah 56,82 persen yang kemudian meningkat menjadi 68,88 di tahun 2019 dan meningkat lagi di tahun 2020 dengan capaian 82,75 persen. Tahun 2021 persentasenya meningkat signifikan, dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dimana 85,23 persen diantaranya sudah diberikan bantuan sosial. Tahun 2022 yang memperoleh bantuan sosial adalah 114,33 persen.

Tabel 2.118.

Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                           | Satuan | Tahun |       |       |       |        |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                     |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
| PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | %      | 56,82 | 68,88 | 82,75 | 85,23 | 114,33 |

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Parepare 2023

#### 2.1.3.1.1.6.2 Persentase PMKS yang Tertangani

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 menjadi 79,18 dan merupakan persentase tertinggi dari data lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2019 menurun menjadi 75,59 persen dan pada akhir tahun 2020, persentase PMKS yang tertangani kembali turun menjadi 65,79 persen. Tahun 2021 bernilai 63,81 persen yang menggambarkan tren turun sejak tahun 2019. Tahun 2022 Persentase PMKS yang tertangani meningkat menjadi 114,33 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119.

Persentase PMKS yang Tertangani Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                       | Satuan | Tahun |       |       |       |        |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                 |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
| Persentase PMKS yang tertangani | %      | 79,18 | 75,59 | 65,79 | 63,81 | 114,33 |

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023



#### 2.1.3.1.1.6.3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 79,18 dan merupakan persentase tertinggi dari data lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2019 menurun menjadi 75,59 persen dan pada akhir tahun 2020, persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kembali turun menjadi 65,79 persen, tahun 2021 kembali menurun hingga angka 63,81 menjadi persentase terendah dari data lima tahun terakhir. Tahun 2022 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar meningkat hingga angka 116,63 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.120.

Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                            | Satuan | Tahun |       |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                      |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
| Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | %      | 79,18 | 75,59 | 65,79 | 63,81 | 116,63 |

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.6.4 Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau sosial ekonomi sejenis lainnya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan PMKS. Di Kota Parepare persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, mengalami stagnasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 setiap tahunnya memiliki persentase hanya sebesar 11,00 persen. Artinya hanya 11,00 persen panti sosial yang menerima manfaat dari program pemberdayaan

sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis. Angka yang tergolong rendah dalam rangka memberdayakan PMKS dan menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare.

Tabel 2.121.

Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                                                                            | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                                                                                                      |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | %      | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | -    |

Sumber Data: : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.6.5 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai persentase sebesar 100 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua sarana prasarana pelayanan kesehatan telah disediakan dengan baik oleh panti sosial.

Tabel 2.122.

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                            | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                      |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.6.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mengalami stagnasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022

setiap tahunnya memiliki persentase hanya sebesar 11,00 persen. Angka yang rendah dalam menggambarkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang belum optimal oleh wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

Tabel 2.123.

Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                         | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                   |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | %      | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

Sumber Data: : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.6.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini berarti bahwa semua korban bencana sudah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2.124.

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                          | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                    |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber Data: : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.6.8 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini berarti bahwa semua korban bencana sudah dievakuasi dengan baik dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat yang lengkap.

Tabel 2.125.

Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                             | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                       |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber Data: : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.1.6.9 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami fluktuasi selama periode tahun 2018 menurun menjadi 31,09 persen. Tahun 2019 kembali menurun menjadi 20,09 dan merupakan persentase terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kemudian di akhir periode tahun 2020, penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial meningkat menjadi 31,32 persen. Di tahun 2021 dan tahun 2022 angka Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial adalah 32,1 persen.

Tabel 2.126.

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                                          | Satuan | Tahun |       |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|                                                                                                                    |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | %      | 31,22 | 20,09 | 31,32 | 32,1 | 32,1 |

Sumber Data: : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

**2.1.3.1.2 Urusan Layanan Wajib non Dasar****2.1.3.1.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja****2.1.3.1.2.1.1 Angka Sengketa****Pengusaha-Pekerja Per Tahun**

Angka sengketa antara pengusaha dengan pekerja selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus berkurang. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 angka sengketa pengusaha-pekerja cenderung terus mengalami penurunan, hal karena jumlah sengketa yang terus mengalami penurunan dan jumlah perusahaan yang terus bertambah. Hal ini menandakan bahwa jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja masih tergolong tidak banyak, namun tetap harus menjadi perhatian. Terkecuali ditahun 2021 menunjukkan peningkatan capaian Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun yaitu 21,00. Tahun 2018 sebesar 27,48; tahun 2019 sebesar 16,81; tahun 2020 sebesar 15,18. Tahun 2022 adalah tahun yang capaian Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun terendah sebesar 13,00. Untuk data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                  | Satuan    | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                            |           | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun | Perseribu | 27,48 | 16,81 | 15,18 | 21,00 | 13,00 |

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

**2.1.3.1.2.1.2 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**

Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren naik. Tahun 2018 persentase kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebesar 71,43 persen kemudian naik menjadi 88,89 persen untuk tahun 2019 dan 2020, terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 90,91 persen. Namun terjadi penurunan capaian ditahun 2022 yang hanya mencapai 61,50 persen. Terlepas angka persentase besaran kasus yang

terselesaikan, yang mempengaruhi capaiannya adalah jumlah kasus yang diselesaikan melalui PB dan jumlah kasus yang dicatatkan. Untuk data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.128.

Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                 | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                           |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|     | Besaran kasus yang diselesaikan dengan PB | %      | 71,43 | 88,89 | 88,89 | 90,91 | 61,50 |

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.1.3 Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Angka besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2018 yang capaiannya 82,73 persen. Tahun 2019 mencapai 92,15 persen, mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 74,65 persen. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 83,17 persen, untuk tahun 2022 capaiannya berada pada angka 83,35 yang tidak banyak terjadi peningkatan. Untuk data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129.

Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                      | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Pencari Kerja yang ditempatkan | %      | 82,73 | 92,15 | 74,65 | 83,17 | 83,35 |

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.1.4 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 9.603 orang JAMSOSTEK dari jumlah pekerja/buruh 10.904 orang, dengan persentase yang sedikit bertambah menjadi 88,07 persen. Pada tahun 2019 terdapat 10.565 orang pekerja/buruh JAMSOSTEK dari jumlah pekerja/buruh 11.839 orang, dengan persentase sebesar 89,24 persen. Sedangkan diakhir tahun 2020 persentasenya

meningkat menjadi 91,36 persen, hal ini menandakan bahwa semua pekerja/buruh menjadi peserta program JAMSOSTEK. Hingga tahun 2021 menunjukkan tren naik untuk persentase Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK yaitu sebesar 97,50 persen dengan jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK sebanyak 10.725 orang dan jumlah pekerja/buruh adalah sebanyak 11.851 orang. Tahun 2022, Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK sebesar 97,64 persen.

Tabel 2.130.

Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                    | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                              |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|     | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK | %      | 88,07 | 89,24 | 91,36 | 97,50 | 97,64 |

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.1.5 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yaitu sebesar 0 persen, artinya tidak ada kasus penyelesaian perselisihan dengan kebijakan pemda.

Tabel 2.131.

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                                   | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                                             |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.  | Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda | Jml    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.  | Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda     | Jml    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.  | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah       | %      | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.1.6 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi tahun 2018 sedikit mengalami penurunan menjadi 86,47 persen, kemudian meningkat kembali menjadi 87,53 persen. Sedangkan diakhir tahun 2020 persentasenya menurun mencapai 62,34 persen, artinya hanya 240 orang yang dilatih dari jumlah pendaftar berbasis kompetensi yaitu sebanyak 385 orang dan di tahun 2021 angka Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi berada pada titik 86,76 persen dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih (berbasis kompetensi) sebanyak 642 orang sedang jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 740 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di tahun 2022 sebesar 79,82 persen.

Tabel 2.132.

**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kota Parepare Tahun 2018-2022**

| No. | Indikator                                                           | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                     |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|     | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | %      | 86,47 | 87,53 | 62,34 | 78,05 | 79,82 |

*Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023*

#### 2.1.3.1.2.1.7 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 78,69 persen, kemudian meningkat kembali menjadi 87,53 persen di tahun 2019. Sedangkan diakhir tahun 2020 persentasenya sedikit menurun mencapai 85,71 persen, dengan jumlah tenaga kerja terlatih hanya 30 orang dari jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 35 orang dan untuk tahun 2021 terjadi penurunan angka menjadi 87,60 persen dengan jumlah tenaga



kerja yang dilatih (berbasis masyarakat) sebanyak 325 orang dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 371 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di tahun 2022 meningkat menjadi 79,78 persen.

Tabel 2.133.

**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kota Parepare Tahun 2018-2022**

| No. | Indikator                                                           | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                     |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|     | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | %      | 78.69 | 89.77 | 85.71 | 77,33 | 79,78 |

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.1.8 Rasio lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Parepare, data rasio lulusan S1/S2/S3 disini berdasarkan data lulusan yang mendaftar AK-1. Rasio lulusan S1/S2/S3 terendah terjadi diakhir tahun 2020 dengan rasio mencapai angka 7,59 atau lulusan yang S1/S2/S3 yang mendaftar AK-1 sebanyak 115 orang dari jumlah penduduk yang ada. Tahun 2022 menjadi tahun dengan rasio tertinggi untuk 5 tahun terakhir sebesar 26,83 persen.

Tabel 2.134.

**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Parepare Tahun 2018-2022**

| No | Indikator              | Satuan | Tahun |       |      |       |       |
|----|------------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
|    |                        |        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  |
|    | Rasio lulusan S1/S2/S3 | %      | 10,08 | 17,28 | 7,59 | 24,52 | 26,83 |

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### 2.1.3.1.2.2.1 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kota Parepare berdasarkan tabel dibawah, menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan masih terdapat perbedaan

peluang dan partisipasi perempuan dalam jabatan struktural yang berkorelasi positif dengan golongan ruang. Sehingga akses bagi PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural sangat berpeluang.

Pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 8,98 persen. Pada tahun 2019 persentasenya kembali meningkat menjadi 9,29 persen, namun pada akhir tahun 2020 nilainya menurun mencapai 7,96 persen. Tahun 2021 meningkat kembali hingga 18,79 persen. Dan tahun 2022 capaiannya stagnan pada 18,79 persen.

Tabel 2.135.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                 | Tahun |      |      |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|
|                                                        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  |
| Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 8,98  | 9,29 | 7,96 | 18,79 | 18,79 |

Sumber : Parepare dalam angka tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penambahan, dari tahun 2018 proporsinya stagnan di 16 kursi, kemudian di tahun 2019 hingga 2021 bertambah menjadi 24 kursi. Tahun 2022 berkurang menjadi 20 kursi yang diduduki perempuan di DPRD.

Tabel 2.136.

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                         | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | 16    | 24   | 24   | 24   | 20   |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.3 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dalam hal ini ditinjau dari jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan swasta, menunjukkan persentase yang tinggi. Budaya patriarki masih menempatkan perempuan pada jenis-jenis pekerjaan dalam kategori marginal, seperti buruh perusahaan dan pelayan toko. Peluang kerja yang ditawarkan oleh perusahaan swasta lebih banyak terbuka untuk

laki-laki. Partisipasi perempuan di 118able118a swasta Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 persentase partisipasi perempuan di 118able118a swasta diatas 90an persen artinya 118able118 semua pekerja perempuan bekerja di 118able118a swasta. Namun tahun 2020 persentasenya menurun menjadi 78,79 persen. Tahun 2021 hingga 2022 berapa pada kondisi 81,21 persen.

Tabel 2.137.  
Partisipasi perempuan di lembaga swasta  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                  | Tahun  |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 90,52% | 90,71% | 78,79% | 81,21% | 81,21% |

Sumber: DP3A Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.4 Rasio KDRT

Penanganan kasus KDRT merupakan mandat SPM urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pelayanan terpadu ini menuntut jejaring kerja antar lembaga pemerintah yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPPKB, Kementerian Agama, Bapas dan Lapas, serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling psikologis.

Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga sebagaimana tercermin dalam tabel di bawah, nampak terjadi penurunan jumlah aduan kasus yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penanganan kasus kekerasan sehingga menjadi tantangan nyata di Kota Parepare yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu sesuai standar SPM dan peraturan perundangan lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak.

Dari tabel di berikut terlihat bahwa rasio KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2018 rasio KDRT sebesar 0,12 dan tahun 2019 kembali meningkat menjadi 0,13. Tren peningkatan rasio KDRT

tetap berlanjut hingga di akhir tahun 2020 menjadi 0,18 dan mengalami stagnansi di tahun 2021. Tahun 2022 menurun drastic ke 0,04.

Tabel 2.138.

## Rasio KDRT Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian     | Tahun |      |      |      |       |
|------------|-------|------|------|------|-------|
|            | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  |
| Rasio KDRT | 0,12  | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,045 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.2.5 persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur

Angkatan kerja dibawah umur di Kota Parepare dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan jumlah. Namun demikian, data dibawah memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja. Pada umumnya anak bekerja karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relative rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting maknanya dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan karena sebagian besar pekerja di bawah umur terlibat pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Kota Parepare sebesar 0 persen, artinya selama pendataan tidak ada pekerja dibawah umur di Kota Parepare.

Tabel 2.139.

## Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

## Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                      | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.2.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 48,12 persen dan tahun 2019 mencapai 49,49,36. Tren peningkatan tersebut tetap berlanjut hingga

tahun 2020 dengan persentase sebesar 52,79 persen. Namun tahun 2021 hingga tahun 2022 penurunan angka menjadi 41,62 persen. Tahun 2022 Selengkap dapat dilihat pada 120able berikut:

Tabel 2.140.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                               | Tahun  |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 48,12% | 49,39% | 51,79% | 41,62% | 41,62% |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.7 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu telah adalah sebesar 100%. Hal ini berarti semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mendapat perhatian oleh Unit Pelayanan Terpadu.

Tabel 2.141.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                                                  | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.8 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di

Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai 100% yang menandakan bahwa korban kekerasan pada perempuan dan anak telah mendapatkan layanan kesehatan secara terpadu.

Tabel 2.142.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                                                                         | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.9 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai angka 100 persen, hal ini menandakan bahwa semua korban kekerasan memperoleh layanan rehabilitasi sosial.

Tabel 2.143.

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                                                                                | Tahun   |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 |
| Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.2.10 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mencapai 100%. Ini berarti korban kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mendapatkan perlindungan tabel sehingga menciptakan rasa keadilan bagi para korban.

Tabel 2.144.

Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                                                  | Tahun   |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
|                                                                                                                                         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 |
| Cakupan penegakan Hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Tahun 2023

2.1.3.1.2.2.11 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2018 hingga tahun 2022 telah mendapatkan perhatian dari Lembaga Bantuan Hukum, hal ini dibuktikan dengan angka cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Bantuan hukum telah mencapai 100% seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel 2.145.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                             | Tahun   |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
|                                                                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 |
| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.12 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 telah mencapai angka 100 persen, hal ini menandakan bahwa korban kekerasan pada perempuan dan anak yang dipulangkan telah mendapatkan penanganan yang baik dari lembaga-lembaga yang berkompeten atau unit pelayanan terpadu.

Tabel 2.146.

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                              | Tahun   |         |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
|                                                                     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 |
| Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.13 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Berdasarkan data di bawah ini, cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100 persen, hal ini menandakan semua korban kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Parepare mendapatkan reintegrasi sosial.

Tabel 2.147.

Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                      | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.14 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan



keadilan gender di bidang pendidikan di jenjang sekolah dasar. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Hingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir rasio tertinggi yaitu sebesar 100 di tahun 2022. Angka ini menandakan bahwa pada jenjang SD lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan.

Tabel 2.148.  
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                              | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | 0,98  | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 100  |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.15 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP berada di angka 1 dalam kurun lima tahun terakhir. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Angka ini menandakan bahwa pada jenjang SMP lebih banyak murid perempuan yang bersekolah dibandingkan dengan murid laki-laki. Tahun 2021 hingga 2022 stagnan pada capaian 1,11 persen untuk Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP di Parepare.

Tabel 2.149.  
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                               | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | 1,03  | 1,02 | 1,03 | 1,11 | 1,11 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.16 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan

keadilan gender di bidang pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 stagnan pada angka 1,8. Angka ini menandakan bahwa pada jenjang SMA lebih banyak murid perempuan yang bersekolah dibandingkan dengan murid laki-laki. Namun pada tahun 2021 sampai dengan 2022 menunjukkan penurunan angka ke 1,26.

Tabel 2.150.  
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                               | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | 1,8   | 1,8  | 1,8  | 1,26 | 1,26 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.2.17 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu berada pada angka 1,14 di tahun 2018 dan 1,13 persen di tahun 2019 hingga 2020. Angka ini menandakan bahwa pada jenjang SMA lebih banyak murid perempuan yang menempuh hingga ke perguruan tinggi dibandingkan dengan murid laki-laki. Namun tahun 2021 terjadi peningkatan hingga 2,05 untuk Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi. Tahun 2022, Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi menurun ke angka 1,13. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.151.  
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Uraian                                            | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi | 1,14  | 1,13 | 1,13 | 2,05 | 1,13 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.2.18 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun pada tahun 2018 sampai dengan 2022 telah mencapai angka 100 persen.

Tabel 2.152.

Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                        | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                               | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.2.19 Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian pada tahun 2018 relatif stabil dan stagnan di angka 40 persen dari tahun 2018 sampai dengan 2020, angka ini menandakan bahwa sebanyak 40 persen perempuan bekerja upahan di sektor non pertanian dan sisanya merupakan pekerja upahan laki-laki. Tahun 2021 hingga tahun 2022 meningkat ke 42,54 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.153.

Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                              | Tahun  |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian | 40,64% | 40,66% | 40,69% | 42,54% | 42,54% |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2023

### 2.1.3.1.2.3 Bidang Urusan Pangan

2.1.3.1.2.3.1 Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020 mengalami penurunan ketersediaan pangan menjadi 247,82 yang sebelumnya adalah 266,72.

Tabel 2.154.

## Ketersediaan Pangan Utama Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang/<br>Urusan         | Sat            | Tahun  |        |        |        |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                           |                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  |
| Ketersediaan Pangan Utama | Kg/thn /kapita | 235,02 | 266,72 | 247,82 | 248,13 | 253,2 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.3.2 Ketersediaan Energi Protein per kapita dan Penguatan Cadangan Pangan

Ketersediaan energi protein per kapita dan Penguatan cadangan pangan di Kota Parepare dinilai cukup baik hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada Tahun 2018-2022, ketersediaan energi protein per kapita selalu mencapai 100%.

Tabel 2.155.

## Ketersediaan Energi Protein Per Kapita dan Penguatan Cadangan Pangan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                              | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ketersediaan energi protein per kapita | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.3.3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 90% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 – 2021 meningkat menjadi 100%.

Tabel 2.156.

## Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                          |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | %      | 90    | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.4 Bidang Urusan Pertanahan

##### 2.1.3.1.2.4.1 Persentase objek lahan yang bersertifikat

Lahan Pemerintah Kota Parepare yang telah disertifikatkan mengalami fluktuasi, namun masih tergolong rendah. Tahun 2020 menjadi tahun dengan pencapaian tertinggi untuk lima tahun terakhir yaitu 2,340 persen.

Tabel 2.157.

Persentase objek lahan Milik Pemda yang bersertifikat  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang/Urusan                | Satuan | Tahun |       |       |      |      |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|                              |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| Persentase objek lahan Milik | %      | 1,013 | 0,161 | 2,340 | 0,34 | 0,25 |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Parepare Tahun 2023

### 2.1.3.1.2.5 Bidang Urusan Lingkungan Hidup

#### 2.1.3.1.2.5.1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel di bawah ini Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baru tersusun di tahun 2019.

Tabel 2.158.

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                        | Tahun     |      |      |      |      |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|
|                                  | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Tidak Ada | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.5.2 Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Belum adanya Integrasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kota pada tahun 2018 sesuai data berikut ini menandakan bahwa belum adanya rencana pembangunan yang mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Namun, di tahun 2019 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan berlanjut di tahun 2022.

Tabel 2.159.

Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                      | Tahun     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Tidak Ada | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.5.3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah sudah ada dari tahun 2017 dan terselenggara sampai akhir tahun 2022.

Tabel 2.160.

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                 | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.4 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Pengukuran Indeks kualitas air di Kota Parepare sebesar 92,06 persen di tahun 2018 kemudian kembali naik di tahun 2019 yakni sebesar 95,2 persen. Kemudian pada tahun 2020 indeks kualitas air sedikit membaik menjadi 96. Tahun 2021 meningkat lagi menjadi 96,85. Tahun 2022 berapa pada angka 96,4 persen.

Tabel 2.161.  
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                            | Tahun |      |      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|------|-------|------|
|                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 |
| Hasil pengukuran indeks kualitas air | 92,06 | 95,2 | 96   | 96,85 | 96,4 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.5 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Pengukuran Indeks kualitas udara dimaksudkan untuk menginformasikan kualitas udara suatu daerah. Di Kota Parepare di tahun 2018 sebesar 66,67. Kemudian tahun 2019 dan 2020 indeks kualitas udara meningkat menjadi 95. Tahun 2021 menurun ke angka 89,38 dan Kembali membaik di tahun 2022 yaitu 90.

Tabel 2.162.  
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                              | Tahun |      |      |       |      |
|----------------------------------------|-------|------|------|-------|------|
|                                        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 |
| Hasil pengukuran indeks kualitas udara | 66,67 | 95   | 95   | 89,38 | 90   |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.6 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami stagnan di angka 51,38 persen di tahun 2018 sampai tahun 2021. Meningkat di tahun 2022 mencapai 63,79 persen.

Tabel 2.163.  
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                      | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan | 51,38 | 51,38 | 51,38 | 51,38 | 63,79 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.5.7 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan data di bawah ini terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Parepare tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100 persen. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.164.

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                       | Sat. | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
|                                 |      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Pembinaan dan Pengawasan | %    | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.5.8 Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota

Berdasarkan data lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, belum ada fasilitas yang mendukung untuk Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kota Parepare. Di tahun 2021 hingga periode 2022, mulai di adakan Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Parepare.

Tabel 2.165.

Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                      | Tahun     |           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|                                                                                                | 2018      | 2019      | 2020      | 2021 | 2022 |
| Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.9 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2022 di Kota Parepare tidak ada tindakan fasilitasi pendampingan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Tabel 2.166.  
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.10 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional

Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kota Parepare belum ada verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional.

Tabel 2.167.

Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                            | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.11 Terverifikasi Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional

Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kota Parepare belum ada verifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional.

Tabel 2.168.

Terverifikasi Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                         | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023



## 2.1.3.1.2.5.12 Penetapan Hak Masyarakat Hutan Adat (MHA)

Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kota Parepare belum ada penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169.

## Penetapan Hak MHA Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator         | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------|-------|------|------|------|------|
|                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penetapan hak MHA | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.13 Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kota Parepare belum terfasilitas kegiatan yang menyangkut peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.170.

## Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                       | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                 | 2018  | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.14 Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana

Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kota Parepare belum terfasilitas kegiatan yang menyangkut penyediaan sarana prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat (MHA). Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.171.

## Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                 | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.15 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Dari data lima tahun terakhir terlihat bahwa setiap tahunnya telah dilaksanakan 1 kali pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang ada di Kota Parepare. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Tabel 2.172.  
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                         | Tahun          |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | 1<br>Pelatihan | 1<br>Pelatihan | 1<br>Pelatihan | 1<br>Pelatihan | 1<br>Pelatihan |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.16 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah kepada masyarakat luas bertujuan untuk mendorong peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berusaha meningkatkan daya dukung lingkungan. Di Kota Parepare pemberian lingkungan hidup sudah terlaksana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.173.  
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                            | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.5.17 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kota Parepare dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai angka 100 persen artinya semua pengaduan masyarakat telah terlayani dengan baik.

Tabel 2.174.

Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                                                                                                        | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota. | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.5.18 Timbulan Sampah yang Ditangani

Pada tahun 2019, timbulan sampah yang tertangani mencapai angka 100 persen. Sementara di tahun 2022 mencapai 99 persen untuk penanganannya.

Tabel 2.175.

Timbulan Sampah yang Ditangani Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                               | Tahun  |        |        |        |         |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021    |
| Volume timbulan sampah yang ditangani (m <sup>3</sup> ) | 195,74 | 197,97 | 219,97 | 215,45 | 138,18  |
| Total timbulan sampah (m <sup>3</sup> )                 | 215,31 | 217,76 | 219,97 | 222,12 | 141,003 |
| Timbulan sampah yang ditangani                          | 90,91% | 90,91% | 100%   | 97,00% | 99%     |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.19 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui prinsip 3R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* masih tergolong rendah meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan data yang tergambarkan pada tabel berikut ini tahun 2018 adalah 18 persen. Sementara untuk tahun 2019 mencapai 20 persen. Tahun 2021 meningkat menjadi 22 persen, tahun 2021 meningkat menjadi 24 persen. Hingga tahun 2022 meningkat 2 persen menjadi 26 persen. Berdasarkan data yang terlihat bahwa peningkatan kinerja dalam upaya pengurangan sampah melalui melalui 3R merupakan peningkatan konstan tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Tabel 2.176.

Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                           | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R | 18%   | 20%  | 22%  | 24%  | 26%  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.20 Persentase Cakupan Area Pelayanan

Luas area Kota Parepare adalah 99,33 km<sup>2</sup> dengan luas area pelayanan pengelolaan sampah sebesar 85,8 km<sup>2</sup> pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 luas area pengelolaan stagnan diluas 86,2 km<sup>2</sup> atau dengan cakupan mencapai 86,78 persen dari luas area Kota Parepare. Sementara itu, diakhir tahun 2020 luas area pelayanan seluas 88,4 km<sup>2</sup> atau dengan cakupan mencapai 89 persen dari luas area Kota Parepare dan merupakan persentase cakupan tertinggi dari data lima tahun terakhir. Di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 90 persen. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.177.

Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                         | Tahun  |        |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------|------|------|------|
|                                   | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase cakupan area pelayanan | 86,78% | 86,78% | 89%  | 91%  | 93%  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.21 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2018 mencapai 73 persen dengan jumlah sampah yang tertangani sebesar 52,49 ton. Meningkat menjadi 80 persen pada tahun 2019 merupakan capaian terbaik untuk periode 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang hanya mencapai 73 persen atau setara --- ton.

Tabel 2.178.  
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                | Tahun  |        |        |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase jumlah sampah yang tertangani | 73,00% | 80,00% | 75,00% | 74,00% | 73,00% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.22 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Parepare di tahun 2018 hingga 2022 umumnya capaiannya di angka 75 persen. Terkecuali di tahun 2021 yang menunjukkan angka 73 persen.

Tabel 2.179.  
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                     | Tahun  |        |        |       |       |
|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  |
| Operasionalisasi TPA/TPST/SPA | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 73,00 | 75,00 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.5.23 Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan

Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta untuk periode tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen.

Tabel 2.180.  
Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                       | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.5.24 Persentase Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang telah mencapai 100 persen pada kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Ini menandakan bahwa peran pelaku usaha dalam pengelolaan sampah bertumbuh sangat baik.

Tabel 2.181.

Persentase Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                 | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase pengelolaan sampah oleh swasta | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

##### 2.1.3.1.2.6.1 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2018 dan 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 99.640 jiwa dan 100.572 jiwa. Tahun 2020 hingga 2021 terus meningkat menjadi 101.938 dan 108.325 jiwa. Adapun Rasio penduduk ber KTP pada 2018 sebesar 0,96 meningkat ke 0,97, di tahun 2019 hingga 2022 adalah 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk yang wajib ber KTP telah memiliki KTP.

Tabel 2.182.

Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Uraian                                     | Tahun |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                            | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|    | Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk | 0,97  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Tahun 2023

##### 2.1.3.1.2.6.2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio Bayi Berakte kelahiran pada tahun 2018 sebesar 0,99 hingga tahun 2020. Dan berada pada angka 1 di tahun 2021 dan tahun 2022.

Tabel 2.183.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                       | Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|     | Rasio bayi berakte kelahiran | 0,99  | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.6.3 Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio Pasangan Berakte Nikah yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kurun waktu 2018 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi walaupun tidak signifikan. Yaitu di tahun 2018 (0,81) turun ke tahun 2019 (0,80) lalu kembali naik hingga tahun 2020 (0,82) dan turun lagi di tahun 2021 (0,81). Di tahun 2022, angkanya mencapai 0,74. Perubahan yang terjadi tidak memperlihatkan peningkatan atau penurunan yang tidak begitu drastic.

Tabel 2.184.

Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                       | Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Rasio pasangan berakte nikah | 0,81  | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,74 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.6.4 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Adanya Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi menandakan bahwa data-data kependudukan telah tercatat dengan baik. Serta dengan adanya database ini, data kependudukan akan lebih efektif digunakan dalam pemanfaatannya seperti misalnya dalam hal bantuan sosial agar tepat sasaran.

Tabel 2.185.

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi  
Kota Parepare tahun 2018-2022

| Indikator                                         | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.6.5 .Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sudah diterapkan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah penerbitan KTP ganda maupun pemalsuan KTP.

Tabel 2.186.

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                           | Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Penerapan KTP nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.6.6 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dalam kurun waktu 2018 hingga tahun 2022 mengalami tren yang sangat positif. Pada tahun 2018 cakupan penerbitan KTP sebesar 96,80 persen. Serta di tahun 2019 hingga tahun 2022 mencapai sebesar 100 persen untuk cakupan penerbitan KARTu Tanda Penduduk (KTP).

Tabel 2.187.

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                                        | Tahun  |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|     |                                               | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|     | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 97,04% | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.6.7 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2018 sebesar 98,62 persen dan tahun 2019 hingga 2022 capaiannya adalah 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.188.

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                            | Tahun  |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------|--------|------|------|------|------|
|     |                                   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|     | Cakupan penerbitan akta kelahiran | 98,62% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.7 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## 2.1.3.1.2.8.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik dari tahun 2018 hingga tahun 2022 di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare seluruhnya telah mencapai 100 persen.

Tabel 2.189.

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                   | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Kecamatan Bacukiki       | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2   | Kecamatan Bacukiki Barat | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |



| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                   |      |      |      | Tahun 2024-2026 |      |
|------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-----------------|------|
| 3                                              | Kecamatan Soreang | 100% | 100% | 100% | 100%            | 100% |
| 4                                              | Kecamatan Ujung   | 100% | 100% | 100% | 100%            | 100% |

Sumber: Data diolah, Data kecamatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dari data berikut terlihat bahwa jumlah rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di setiap kecamatan sebesar 0 persen. Hal ini disebabkan karena LPM berada di bawah pembinaan SKPD bersangkutan.

Tabel 2.190.  
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                   | Tahun |       |       |       |       |
|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1   | Kecamatan Bacukiki       | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2   | Kecamatan Bacukiki Barat | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3   | Kecamatan Soreang        | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4   | Kecamatan Ujung          | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Sumber: Data diolah, Data kecamatan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-Rata Kelompok Binaan PKK setiap tahunnya dari tahun 2018-2022 di 4 kecamatan tidak ada perubahan. Rincian masing-masing setiap kecamatan di periode tahun terakhir yaitu 26 persen pada Kecamatan Bacukiki, 7 persen pada Kecamatan Bacukiki Barat, 28 persen pada Kecamatan Soreang, dan 19 persen pada Kecamatan Ujung. Di tahun 2022, kecamatan ujung untuk kelompok binaan PKKnya berkurang disebabkan tidak aktifnya kelompok binaan terkait.

Tabel 2.191.  
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                   | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Kecamatan Bacukiki       | 26    | 26   | 26   | 26   | 26   |
| 2   | Kecamatan Bacukiki Barat | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 3   | Kecamatan Soreang        | 28    | 28   | 28   | 28   | 28   |
| 4   | Kecamatan Ujung          | 19    | 19   | 19   | 19   | 16   |

Sumber: Data diolah, Data kecamatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.8.4 Persentase PPK Aktif

Persentase PKK aktif di seluruh wilayah Kota Parepare sejak tahun 2018-2022 telah mencapai 100 persen, seperti data pada tabel yang terlihat berikut ini:

Tabel 2.192.  
Persentase PKK Aktif Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                   | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Kecamatan Bacukiki       | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2   | Kecamatan Bacukiki Barat | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3   | Kecamatan Soreang        | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4   | Kecamatan Ujung          | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Data diolah, Data kecamatan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.8.5 Persentase Posyandu Aktif

Persentase Posyandu aktif di seluruh wilayah Kota Parepare telah mencapai 100 persen, seperti data pada tabel yang terlihat berikut ini:

Tabel 2.193.  
Persentase Posyandu Aktif Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Uraian                   | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Kecamatan Bacukiki       | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2   | Kecamatan Bacukiki Barat | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3   | Kecamatan Soreang        | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4   | Kecamatan Ujung          | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Data diolah, Data kecamatan Kota Parepare Tahun 2023

### 2.1.3.1.2.8 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## 2.1.3.1.2.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Parepare dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Adanya kebijakan pemerintah untuk menekan LPP semakin nyata hasilnya di Kota Parepare. Laju pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2020 hingga 2021 yaitu 1,55 dan terendah berada pada tahun 2019 yaitu 1,12 sedangkan capaian tahun 2018 adalah 1,29. Tahun 2022 LPP Kota Parepare mencapai 1,26.

Tabel 2.194.

## Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                          | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 1,29  | 1,12 | 1,55 | 1,55 | 1,26 |

Sumber: Dinas PPKB Kota Parepare Tahun 2022

## 2.1.3.1.2.8.2 Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate atau angka kelahiran total merupakan indikator penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu daerah dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Total fertility rate di Kota Parepare dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sering berada diatas angka standar capaian ideal yaitu di atas 2,1. Dengan total fertility rate di atas 2,1 menandakan bahwa penduduk cenderung akan mengalami pertumbuhan. Selain itu, TFR diatas 2,1 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya dan TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah. Berikut data Total Fertility Rate (TFR) Kota Parepare lima tahun terakhir: tahun 2023 meningkat menjadi 2,35 persen.

Tabel 2.195.

## Total Fertility Rate (TFR) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian               | Tahun |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Total Fertility Rate | 2,40% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,35% |

Sumber: Dinas PPKB Kota Parepare Tahun 2022

## 2.1.3.1.2.8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB pada tahun 2018 sampai dengan 2021 jumlah perangkat daerah yang berperan sebesar 30 persen. Dan di tahun 2022 meningkat menjadi 40 persen yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB.

Tabel 2.196.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                        | Tahun |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |

Sumber: Dinas PPKB Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Dari tahun 2018 belum ada perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 sudah ada perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rencana induk pengendalian penduduk, namun hanya sebesar 10 persen dari total perangkat daerah yang ada. Tahun 2021 meningkat lagi menjadi 12 persen. Persentase perangkat daerah yang Menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk tahun 2022 mencapai 15,92 persen.

Tabel 2.197.

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                           | Tahun |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                  | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 12,00% | 15,92% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.8.5 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Dari tabel di bawah terlihat bahwa dari tahun 2018 belum adanya kebijakan baik itu peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Baru

pada tahun 2019 dan tahun 2021 sudah terdapat kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk yaitu 1 Perda.

Tabel 2.198.

Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                                         | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | 0     | 1    | 1    | 1    | 1    |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.8.6 Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 hanya sebanyak 1 sektor.

Tabel 2.199.

Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                            | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.8.7 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Di tahun 2018 merupakan awal tahun dilakukan Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang

melakukan Pendidikan kependudukan sebab di tahun 2017 belum ada kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan. Jumlahnya meningkat sangat signifikan di tahun 2019 yaitu sebanyak 30, yang sebelumnya hanya ada 2 di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 38 kerja sama pendidikan kependudukan, dan begitu pula 2021 hingga tahun 2022 yaitu 38.

Tabel 2.200.

Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                              | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | 2     | 30   | 38   | 38   | 38   |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.8 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Pembangunan berwawasan kependudukan dapat diperkuat melalui pelaksanaan pembangunan kependudukan melalui upaya pengendali kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk dalam lingkungan hidup. Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan data tahun 2018 sampai tahun 2020 rata-rata jumlah anak per keluarga hanya sebanyak 2, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan laju penduduk melalui program 2 anak lebih baik atau keluarga berencana. Tahun 2021 adanya peningkatan menjadi 3 untuk rata-rata jumlah anak per keluarga hingga tahun 2022.

Tabel 2.201.  
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                             | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2     | 2    | 2    | 3,52 | 3    |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.8.9 Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan fluktuasi, angka rasio akseptor KB tertinggi berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 67 persen dan terendah terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 63,40 persen. Namun demikian, secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi muda tentang pentingnya KB.

Tabel 2.202.  
Rasio Akseptor KB Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian            | Tahun  |        |       |      |       |
|-------------------|--------|--------|-------|------|-------|
|                   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021 | 2022  |
| Rasio akseptor KB | 63,40% | 63,97% | 66,30 | 67   | 62,97 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.10 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun berfluktuatif di kurun waktu 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 menurun menjadi 12.091 dan sedikit mengalami penambahan menjadi 12.356 pada tahun 2019. Kemudian diakhir tahun 2020 angka pemakaiannya sebesar 12.752. di tahun 2021 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 mengalami peningkatan drastic menjadi 13,022.

Tabel 2.203.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                              | Tahun  |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | 12.091 | 12.356 | 12.752 | 13,022 | 12,185 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.11 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) pada tahun 2018 yaitu mencapai 27,3. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2021 stagnan diangka 17,38, artinya dari 1000 penduduk terdapat sekitar 17 kelahiran dari perempuan usia kelompok umur 14-19 tahun. Tahun 2022 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) adalah 20. Selengkapnya pada table berikut ini:

Tabel 2.204.

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                          | Tahun |       |       |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | 27,3  | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 20   |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.8.12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun dalam kurun lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan. Dari 1,02 persen di tahun 2018 menurun menjadi 0,93 persen dan di tahun 2019 sampai dengan 2021 stagnan pada angka 0,39 persen. Cakupan Pasangan Usia



Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 tahun 2022 adalah 0,31 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.205.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                           | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | 0,93% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,31% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.8.13 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan, ini berarti tidak optimalnya pelayanan terhadap PUS yang ingin ber-KB. Capaian 14,03 persen di tahun 2018 dan merupakan cakupan tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Namun kembali terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi 10,64 persen dan di akhir tahun 2020 kembali meningkat menjadi 12,49 persen. Kemudian turun lagi di tahun 2021 yaitu 10,81 persen. Dan capaian di tahun 2022 meningkat ke angka 15,41 persen.

Tabel 2.206.

Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                              | Tahun  |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) | 14,03% | 10,64% | 12,49% | 10,81% | 15,41% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.14 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Tren peningkatan terus berlanjut dari tahun 2018 sampai diakhir tahun 2022 yaitu mencapai 36,08 persen diakhir periode 5 tahun terakhir.

Tabel 2.207.  
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                  | Tahun  |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 29,46% | 31,44% | 33,86% | 35,75% | 36,08% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.15 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dari tren penurunan berlanjut sampai tahun 2020 dengan 50,82 persen tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi. Tahun 2021 adalah tahun dengan capaian yang penurunan angkanya secara drastis dan signifikan hingga mencapai titik 5,82 persen. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi tahun 2022 adalah 49,09 persen.

Tabel 2.208.  
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                   | Tahun  |        |        |       |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                                                          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022   |
| Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | 63,40% | 63,97% | 50,82% | 5,82% | 48,09% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.8.16 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB pada rentan waktu dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,36 persen dan terendah pada akhir tahun 2020 dengan cakupan sebesar 62,19 persen yang disebabkan karena semakin berkurangnya anggota BKB yang ber-KB. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.209.  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                            | Tahun  |       |        |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
|                                                   | 2018   | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 69,12% | 80,5% | 62,19% | 83,36% | 81,67% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.17 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi dan cenderung menurun. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 84,28 persen dan cakupan terendah terjadi diakhir tahun 2020 dengan cakupan mencapai 56,58 persen yang disebabkan karena semakin berkurangnya anggota BKR yang ber-KB. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.210.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                            | Tahun  |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 73,11% | 76,50% | 56,58% | 84,28% | 83,80% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.18 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKL) ber-KB dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi dan cenderung menurun. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 78,12 persen dan cakupan terendah terjadi diakhir tahun 2020 dengan cakupan mencapai 51,42 persen yang disebabkan karena semakin berkurangnya anggota BKL yang ber-KB. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.211.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                            | Tahun  |        |        |      |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
|                                                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 | 2022   |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | 71,98% | 72,75% | 51,42% | 73%  | 78,12% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.19 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

PPKS adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan bagi permasalahan-permasalahan

yang ada di keluarga. Dari 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare, disetiap kecamatannya terdapat Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

Tabel 2.212.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                        | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                               | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.20 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Jumlah Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa cakupan terendah terjadi pada akhir periode tahun 2022 mencapai 855 persen dari tahun 2019 menjadi yang terbanyak yaitu 1.475 persen.

Tabel 2.213.

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                              | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | 1450  | 1475 | 950  | 950  | 855  |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.8.21 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

PLKB/PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/perkotaan ditingkatan Desa/ Kelurahan. PLKB mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan Program pembangunan lainnya ditingkat Desa/ Kelurahan.

Jumlah cakupan PKB/PLKB di Kota Parepare yang didayagunakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 setiap tahunnya mencapai 100 persen, dengan jumlah PKB dan PLKB sebanyak 22 orang sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada.

Tabel 2.214.

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                                                       | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.22 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

Jumlah cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri di tahun 2018 menjadi 80,65 persen dan tren penurunan berlanjut sampai akhir tahun 2020 dengan cakupan mencapai 57,23 persen, penurunan ini terjadi karena UPPKS yang kurang aktif ditindaklanjuti dan di non aktif secara total. Hal ini menandakan bahwa setiap tahunnya jumlah anggota UPPKS yang ber-KB mandiri semakin berkurang. Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 77 persen namun tidak lebih tinggi dari tahun 2017. Tahun 2022 PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri mencapai 72,44 persen.

Tabel 2.215.

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                             | Tahun  |        |        |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
|                                                                                                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 | 2022   |
| PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | 80,65% | 78,88% | 57,23% | 77%  | 72,44% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.23 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 stagnan di angka 100, hal ini menunjukkan bahwa di setiap kelurahan terdapat 1 petugas pembantu Pembina KB dari 22 kelurahan yang ada.

Tabel 2.216.

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan (UPPKS) Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                               | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.24 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Permintaan Masyarakat terhadap alat dan obat kontrasepsi di tahun 2018 sampai dengan 2019 belum sepenuhnya terpenuhi meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari data cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Peningkatan dan stagnan di tahun 2018 mencapai 70,00 persen, dan pada tahun 2019 mengalami sedikit penambahan menjadi 71,00 persen. Baru pada tahun 2020 hingga 2022 permintaan bisa terpenuhi secara penuh hingga cakupannya mencapai 100 persen.

Tabel 2.217.

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                             | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 70%   | 71%  | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.8.25 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan dari tahun 2018 samapi dengan tahun 2020 telah mencapai 100 persen yang sebelumnya hanya sebesar 70 persen di tahun 2017 dan 93 persen di tahun 2021. Tahun 2022 capaiannya menjadi 100 persen.

Tabel 2.218.

Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                                            | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | 100%  | 100% | 100% | 93%  | 100% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

2.1.3.1.2.8.26 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Jumlah Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 telah mencapai 100 persen disetiap tahunnya. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.219.

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                          | Tahun |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

2.1.3.1.2.8.27 Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Berdasarkan data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak ada kasus remaja di Kota Parepare yang terkena Infeksi Menular Seksual dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.220.  
Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                             | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase remaja yang terkena IMS | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.28 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Jumlah Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100 persen. 8 fungsi keluarga tersebut adalah fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi social budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Tabel 2.221.  
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                       | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.8.29 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Jumlah cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Dimana angka terendah berada di tahun 2018 capaiannya adalah 47,60 persen kemudian menurun di tahun 2019 yaitu sebesar 37,46 persen dan angka tertinggi berada di tahun 2020 dengan cakupan mencapai 100 persen. Tahun 2021 dan 2022 cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan



pembinaan tumbuh kembang anak adalah 62,37 persen dan 54,64 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.222.

Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                                      | Tahun  |        |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|
|                                                                                                                             | 2018   | 2019   | 2020 | 2021   | 2022   |
| Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 47,60% | 37,46% | 100% | 62,37% | 54,64% |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2023

Sebagai tambahan informasi untuk capaian untuk tahun 2020 bersumber dari data yang berdasarkan hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang bernilai 100 persen. Sedangkan untuk capaian di tahun 2021 yang mengalami penurunan hingga mencapai angka 62,37 persen diambil dari sumber data BKKBN melalui Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dalap) adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek tentang kegiatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program KKB di lapangan.

#### 2.1.3.1.2.8.30 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Berdasarkan tabel berikut rata-rata usia kawin pertama wanita di Kota Parepare berkisar di umur 20 tahunan. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dimana diatur bahwa batas minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Hingga tahun 2021 dan tahun 2022 berubah menjadi Rata-rata usia kawin pertama Wanita adalah 21.

Tabel 2.223.

Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                              | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rata-rata usia kawin pertama wanita | 21    | 20   | 20   | 21   | 21   |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.8.31 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Jumlah Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu dibawah 1 persen, dengan persentase tertinggi berada pada tahun 2020 mencapai 0,783 persen dan terendah berada pada tahun 2021 hanya 0,56 persen. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes adalah 0,54 pada tahun 2022. Untuk data lima tahun terakhir sesuai dengan table berikut ini:

Tabel 2.224.

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                                                                        | Tahun |       |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
|                                                                                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes | 0,636 | 0,643 | 0,783 | 0,56 | 0,54 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.9 Bidang Urusan Perhubungan

##### 2.1.3.1.2.9.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Dilihat dari perkembangan jumlah penumpang, selama lima tahun bersifat fluktuasi. Di tahun 2018 sebesar 2.969.027. Namun, kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 3.265.930. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 2.523.264. Beberapa hal yang menyebabkan berfluktuasinya jumlah arus angkutan umum di Kota Parepare dikarenakan adanya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi seperti roda empat. Tahun 2021 juga terjadi perubahan angka yang drastic yaitu 610.770, angka yang kurang dari sejuta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2022 menjadi 114.652.

Tabel 2.225.  
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                              | Tahun     |           |           |         |         |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021    | 2022    |
| Jumlah arus penumpang angkutan umum | 2.969.027 | 3.265.930 | 2.523.264 | 610.770 | 114.652 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.9.2 Rasio Ijin Trayek Angkutan Umum

Penyediaan fasilitas angkutan umum merupakan layanan yang penting dalam urusan perhubungan. Dalam rangka melegalisasi mobil angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang diperlukan ijin trayek yang dikeluarkan. Di Kota Parepare rasio ijin trayek angkutan umum khusus tahun 2018 tidak dilakukan pendataan. Rasio ijin trayek di tahun 2019 berada pada angka 0,00017 dan meningkat di tahun 2020 yakni 0,0005 dan tahun 2021 yakni 0,0001. Hingga periode akhir tahun 2022 mencapai angka 0. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.226.  
Rasio Ijin Trayek Angkutan Umum Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian            | Tahun |         |        |        |      |
|-------------------|-------|---------|--------|--------|------|
|                   | 2018  | 2019    | 2020   | 2021   | 2022 |
| Rasio ijin trayek | -     | 0,00017 | 0,0005 | 0,0001 | 0    |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.9.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang di impor baik yang dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Dari tabel tersebut, jumlah Uji KIR tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu 400, sedangkan terendah berada pada tahun 2019 dengan jumlah hanya 55 uji KIR. Data terakhir untuk tahun 2020 jumlahnya mencapai 180 uji KIR. Naik turunnya jumlah tersebut tergantung pada

jumlah kendaraan yang masuk di Kota Parepare atau semakin banyak jumlah kendaraan yang masuk maka jumlah uji KIR angkutan tersebut juga semakin tinggi. Tahun 2021 hanya mencapai 58 untuk Jumlah Uji KIR Angkutan Umum. Tahun 2022 jumlah uji KIR angkutan umum meningkat sangat signifikan hingga 878.

Tabel 2.227.

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                       | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah uji KIR angkutan umum | 400   | 55   | 180  | 58   | 878  |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis tidak mengalami perubahan, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 6 unit, peningkatan jumlah penumpang hanya terjadi dimusim liburan menjelang hari raya dan liburan sekolah, namun peningkatan jumlah penumpang masih dapat di terpenuhi dengan ketersediaan fasilitas Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis.

Tabel 2.228.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                   | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 6     | 6    | 6    | 6    | 6    |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.9.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Parepare tahun 2018 dan 2019 naik sangat signifikan berturut-turut menjadi 60 dan 70 persen. Kemudian pada tahun 2020 layanan angkutan mencapai 65 persen. Dan menurun di tahun 2021 yaitu 34 persen. Tahun 2022 persentase layanan Angkutan darat mencapai 36 persen.

Tabel 2.229.

Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                            | Tahun  |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase layanan angkutan darat | 60,00% | 70,00% | 65,00% | 34,00% | 36,00% |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.9.6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

KIR mobil wajib dilakukan karena sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan KIR diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 133/2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Apabila kendaraan angkutan tidak melakukan KIR atau tidak lolos KIR, maka sanksi akan diberikan berupa pencabutan izin aktivitas. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu mencapai 58 persen, sedangkan persentase terendah berada pada tahun 2018 dan 2019 yaitu masing-masing 27 persen. Hal ini mendakan masih banyak angkutan umum di Kota Parepare yang tidak memiliki KIR sebagai syarat teknis untuk beroperasi di jalan.

Tabel 2.230.  
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                   | Tahun  |        |        |        |      |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|                                          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
| Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | 27,00% | 27,00% | 30,00% | 47,00% | 58%  |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.9.7 Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu merupakan salah satu yang mempunyai pengaruh terhadap terciptanya tertib berlalu lintas. Pemasangan rambu-rambu di Kota Parepare tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu sebanyak 100 titik, tahun 2019 sebanyak 93 titik, tahun 2020 sebanyak 23 titik, tahun 2021 sebanyak 43 titik dan hingga tahun 2022 pemasangan rambu-rambu sebanyak 24 titik. Angka pemasangan semakin sedikit dikarenakan kuota untuk pemasangan telah terpenuhi sebelumnya.

Tabel 2.231.  
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                 | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------|-------|------|------|------|------|
|                        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pemasangan Rambu-rambu | 100   | 93   | 23   | 43   | 24   |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.9.8 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2018 adalah 0,061 dan menjadi 0,010 pada tahun 2019. Sedangkan pada akhir tahun 2020 rasionya berada diangka 0,008 kemudian 0,077 untuk tahun 2021. Tahun 2022 menjadi 0,014.

Nilai ini berarti 1 km jalan di Kota Parepare berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.232.  
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                   | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,061 | 0,010 | 0,008 | 0,077 | 0,014 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.9.9 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kota Parepare tahun 2021 jumlahnya hanya 1.383.813 merupakan angka terendah dari data lima tahun terakhir, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pengalihan kewenangan terminal tipe A. Namun, di rentan waktu 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah tertinggi berada diakhir tahun 2020 yaitu mencapai 3.592.532. Tahun 2022 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum meningkat adalah 1.995.924 dari jumlah tahun kemarin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.233.  
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                            | Tahun     |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                   | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | 2.375.222 | 2.823.583 | 3.592.523 | 1.383.813 | 1.995.924 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.9.10 Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun. Rentan waktu 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun turun di tahun berikutnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.234.

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Uraian                                                            | Tahun     |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun | 2.375.222 | 2.823.583 | 3.592.523 | 1.383.813 | 1.995.924 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.10 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

##### 2.1.3.1.2.10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat bertujuan untuk membentuk kelompok masyarakat secara mandiri dan kreatif dalam mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatka nilai tambah. Berdasarkan data lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan di Kota Parepare setiap tahunnya mencapai 100 persen.

Tabel 2.235.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                          |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | %      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Kominfo Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi

Berdasarkan data lima tahun terakhir, cakupan layanan telekomunikasi di Kota Parepare dari tahun 2018 hingga tahun 2021 stagnan di angka 79,08 persen setiap tahunnya. Terkecuali tahun 2022, capaiannya menjadi 87,15 persen. Hal ini mendandakan masih ada wilayah yang belum tercoverage dengan baik dari luas wilayah Kota Parepare, salah satu wilayah yang belum tercoverage yaitu Watang Bacukiki.

Tabel 2.236.

## Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                      | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Cakupan layanan telekomunikasi | %      | 79,08 | 79,08 | 79,08 | 79,08 | 87,15 |

Sumber: Dinas Kominfo Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.10.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami kenaikan sehingga berada di angka 72,98 persen dan 88,71 persen. Sedangkan tahun 2020 mencapai 91,94 persen dan 2021 mencapai 94,34 persen merupakan persentase tertinggi dari data lima tahun terakhir. Tahun 2022 bernilai 91,80 persen.

Tabel 2.237.

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                       | Satuan | Tahun  |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                 |        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | %      | 72,98% | 88,71% | 91,94% | 94,34% | 91,80% |

Sumber: Dinas Kominfo Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.10.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kota Parepare yaitu 81,06 di akhir tahun 2022 dari 2018 yang menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir yakni capaian tahun 2018 (50,48), tahun 2019 (60,12), tahun 2020 (65,53), tahun 2021



(78,17). Dimana akses internet sekarang ini sudah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat sebagai sarana konektivitas dan komunikasi, maupun dalam kecepatan mengakses informasi.

Tabel 2.238.  
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                   | Tahun |       |       |       |       |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 50,48 | 60,12 | 65,53 | 78,17 | 81,06 |

Sumber: Dinas Kominfo Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.10.5 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan pada tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan masyarakat terhadap teknologi terutama untuk mengakses komunikasi dan informasi yang dapat bermanfaat dalam mendukung upaya pembangunan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi cenderung berfluktuasi. Proporsi tertinggi berada tahun 2022 yaitu mencapai 30,81 persen dan proporsi terendah berada pada tahun 2018 yaitu hanya 14,53 persen.

Tabel 2.239.  
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                            | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | 14,53 | 28,59 | 16,43 | 16,46 | 30,81 |

Sumber: Dinas Infokom Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.11 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

##### 2.1.3.1.2.11.1 Koperasi Aktif Kabupaten/Kota

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua

tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Pada tahun 2018, tercatat ada 128 koperasi yang aktif menjalankan usahanya atau 58,18 persen dari 220 koperasi yang ada. Pada Tahun 2019, jumlah keseluruhan koperasi stagnan dengan 220 koperasi tapi jumlah koperasi yang aktif menjalankan usahanya berkurang menjadi 123 koperasi dengan persentase mencapai 55,16 persen. Tahun 2020 persentasenya mencapai 56,16 persen atau dari 219 koperasi yang ada hanya 123 koperasi yang aktif. Tahun 2021 capaian persentase koperasi aktif di Parepare adalah 56,36 dengan jumlah koperasi aktif yaitu 124 dari jumlah koperasi 220.

Persentase koperasi aktif dari tahun 2018 hingga 2022 peningkatan dan atau pengurangan berada pada angka 55 sampai 58. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.240.  
Persentase Koperasi Aktif di Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Bidang/Urusan             | Tahun |       |       |       |       |
|----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                           | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|    | persentase Koperasi Aktif | 58.18 | 55.91 | 56.16 | 56,36 | 56,56 |

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.11.2 Jumlah UKM Non BPR/LKM

Jumlah UMKM Non BPR/LKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 19.578 unit. Pada tahun 2019, tercatat jumlah UMK sebanyak 20.181 unit. Tahun 2020 tercatat jumlah UMKM non BPR/LKM mencapai 20.999 unit. Meningkat Kembali di tahun 2021 sebanyak 31.499 unit. Tahun 2022 Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM adalah 25.235 unit.

Tabel 2.241.  
Jumlah UKM Non BPR/LKM Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Uraian                           | Tahun  |        |        |        |        |
|----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 1  | Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM | 19.578 | 20.181 | 20.999 | 31.499 | 25.235 |

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.11.3 Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan tren peningkatan. Persentase usaha mikro terhadap usaha UMKM meningkat pada tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi stagnasi di 85,18 persen atau dari jumlah keseluruhan UMKM yaitu sebanyak 14.146 unit terdapat sekitar 12.050 usaha mikro dan kecil. Sedangkan pada tahun 2020 persentase usah mikro dan kecil mencapai 86,31 persen atau dari jumlah keseluruhan UMKM yaitu sebanyak 15.539 unit terdapat 11.450 usaha mikro dan kecil. Di tahun 2021 jumlah keseluruhan UMKM adalah 20.581 dengan jumlah usaha mikro dan kecil adalah 20.467 yang sama dengan capaian persentase untuk usaha mikro dan kecil di tahun 2021 adalah 99,44 persen. Hingga akhir tahun 2022 capaiannya menjadi 100 persen.

Tabel 2.242.  
Persentase Usaha Mikro Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                        | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|-----|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                  |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|     | Persentase usaha mikro dan kecil | %      | 85,18 | 85,18 | 86,31 | 99,44 | 100  |

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.12 Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal di daerah sangat terpengaruh oleh kebijakan penanaman modal secara nasional, berbagai aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang sesuai yang dapat dimasuki oleh investor. Ada dua hal yang menjadi kunci penanaman modal di Kota Parepare dan ini berlaku disemua wilayah di Indonesia yaitu upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor, bila hal ini sudah menjadi titik terang bagi kedua stakeholder tersebut, maka pembangunan kebijakan ekonomi dalam hal ini penanam modal dapat tercapai, dan indikator penilaian keberhasilan penanaman modal seperti daya serap tenaga kerja dan jumlah investasi dapat bertambah.

Beberapa kendala yang dapat memengaruhi Indikator Penanaman Modal di Kota Parepare, adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi kabupaten/kota se- Sulawesi Selatan,
- Pemerataan investasi yang kurang merata terindikasi dari naiknya disparitas antar wilayah dari indikator Gini Ratio
- Belum optimalnya promosi investasi, dan masih lambatnya realisasi investasi

Jumlah investor yang berinvestasi di Kota Parepare mengalami fluktuasi sepanjang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada 2018, jumlah investor berkurang menjadi 181 investor, namun nilai investasinya meningkat cukup tinggi yaitu Rp. 67,18 (milyard) menjadi Rp. 250,42 (milyard), dengan rasio daya serap tenaga kerja yang juga meningkat menjadi 3,34. Pada tahun 2019, jumlah investor meningkat tajam mencapai 409 investor dengan jumlah investasi Rp. 327,81 (milyard) yang berarti terdapat peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 77,39 (milyard). Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2019 mencapai 4,0. Sedangkan tahun 2020 jumlah investor menurun menjadi 138 sejalan dengan penurunan nilai investasi menjadi Rp. 173,27 (milyard) dengan rasio daya serap tenaga kerja mencapai 3,00.

Tabel 2.243.  
Indikator Penanaman Modal Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator                                                        | Tahun   |         |          |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
|    |                                                                  | 2018    | 2019    | 2020     | 2021    | 2022    |
| 1  | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                     | 181     | 409     | 138      | 239     | 893     |
| 2  | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyard Rp) | 250.419 | 327.808 | 173.271. | 174.818 | 920.764 |
| 3  | Rasio daya serap tenaga kerja                                    | 3,34    | 4,00    | 3,00     | 3,00    | 5,30    |
| 4  | Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)          | 36,66   | 30,00   | -47,14   | 0,89    | 426,70  |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2023

### 2.1.3.1.2.13 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

#### 2.1.3.1.2.13.1 Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif

Dari data lima tahun terakhir persentase jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Parepare setiap tahunnya mencapai 100 persen. Pada tahun 2018 jumlah organisasi pemuda sebanyak 103 dan

semuanya organisasi yang aktif dan mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2022 dan semuanya merupakan organisasi pemuda yang tergolong aktif.

Tabel 2.244.  
Persentase Jumlah organisasi pemuda yang aktif  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                      | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Jumlah organisasi pemuda yang aktif | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.13.2 Persentase Wirausaha Muda

Dari tahun 2018 di Kota Parepare tidak tersedia data terkait persentase wirausaha muda. Baru pada tahun 2019 tercatat dari 12.606 wirausaha yang ada terdapat 1.280 wirausaha kategori muda atau sekitar 10,2 persen. Sedangkan pada tahun 2020 persentasenya sedikit mengalami menurun menjadi 10,1 persen atau dari 12.606 seluruh wirausaha terdapat sekitar 1.297 wirausaha kategori muda. Tahun 2021 angka persentase wirausaha muda di Kota Parepare mencapai 7,77 persen dengan jumlah seluruh wirausaha sebesar 12.606 dan jumlah wirausaha muda sejumlah 979.

Tabel 2.245.  
Persentase Wirausaha Muda Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                 | Tahun |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase Wirausaha Muda | 0     | 10,2% | 10,1% | 7,77% | 7,15% |

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.1.2.13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga

Berdasarkan data lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cakupan pembinaan olahraga di Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan. Baru pada tahun 2018 cakupannya mencapai 62,07 persen dan angka ini stagnan sampai dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 cakupannya meningkat menjadi 68,97 persen atau dari 29 cabang olahraga yang terdaftar hanya 20 cabang olahraga yang dilakukan pembinaan. Cakupan pembinaan

olahraga Kota Parepare mencapai 68,97 persen di tahun 2021. Meningkatkan ke angka 33 persen di tahun 2022.

Tabel 2.246.

## Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                  | Tahun  |        |        |        |      |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|                            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
| Cakupan Pembinaan Olahraga | 62,07% | 62,07% | 68,97% | 68,97% | 33%  |

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.13.4 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat

Dari tahun 2018 data cakupan pelatih yang bersertifikat adalah 29. Tahun 2019 dari 16 pelatih yang ada, terdapat 13 pelatih yang bersertifikat atau 81,25 persen. Sedangkan pada tahun 2020 cakupan pelatih bersertifikat meningkat menjadi 92,31 persen atau dari 26 pelatih yang ada hanya terdapat 2 pelatih yang tidak memiliki sertifikat. Untuk tahun 2021 cakupan pelatihan yang bersertifikat untuk Kota Parepare sebesar 89,13 persen.

Tabel 2.247.

## Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                          | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                    |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat | persen | 29    | 81,25 | 92,31 | 89,13 | 93,66 |

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2022

## 2.1.3.1.2.13.5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Berdasarkan data cakupan terendah berada pada tahun 2018 yaitu mencapai 48,17 persen atau dari 301 atlet pelajar yang ada hanya sekitar 145 atlet pelajar yang dibina, sedangkan cakupan tertinggi berada pada tahun 2021 dengan cakupan mencapai 99,10 persen.

Tabel 2.248.

## Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                    | Satuan | Tahun  |        |        |        |      |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|                              |        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
| Cakupan Pembinaan Atlet Muda | persen | 48,17% | 53,79% | 62,28% | 99,10% | 231  |

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.13.6 Jumlah Atlet Yang Berprestasi

Pada tahun 2018 jumlah atlet yang berprestasi hanya 19 atlet dan merupakan terendah dari data lima tahun terakhir, sedangkan tertinggi

berada pada tahun 2022 dengan jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 77 atlet.

Tabel 2.249.

## Jumlah Atlet Yang Berprestasi Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                     | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                               | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Altel Yang Berprestasi | 19    | 36   | 26   | 54   | 77   |

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.13.7 Jumlah Prestasi Olahraga

Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan terbanyak berada pada tahun 2018 yaitu 3 cabang olahraga, sedangkan terendah berada pada tahun 2019 dengan hanya 2 cabang olahraga yang dimenangkan. Tahun 2021 melonjak dengan capaian jumlah prestasi olahraga sebanyak 52. Dan di tahun 2022 meningkat pesat ke angka 77 prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun.

Tabel 2.250.

## Jumlah Prestasi Olahraga Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|
|                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Prestasi Olahraga | 3     | 2    | 3    | 52   | 77   |

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.1.2.14 Bidang Urusan Statistik

Statistik Daerah Kota Parepare yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kota Parepare. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat provinsi untuk melihat perbandingan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.251.

Pencapaian indikator kinerja urusan Statistik  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                | Tahun |       |       |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
|     |                                                          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| 1.  | Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi | Tidak | Tidak | Tidak | Ada  | Ada  |
| 2.  | Buku Kota Parepare Dalam Angka                           | Ada   | Ada   | Ada   | Ada  | Ada  |

|    |                         |     |     |     |     |     |
|----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3. | Buku PDRB Kota Parepare | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
|----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.15 Bidang Urusan Persandian

Gambaran Kinerja Bidang Urusan Persandian selama lima tahun yaitu dari 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.252.

Kinerja Bidang Urusan Persandian Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                                                  | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                            |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | %      | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |

Sumber: Dinas Kominfo Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.16 Bidang Urusan Kebudayaan

##### 2.1.3.1.2.16.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Parepare cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dengan 1 (satu) kegiatan festival. Pada tahun 2019, meningkat menjadi 2 (dua) kegiatan festival. Sedangkan Pada Tahun 2020 jumlah festival seni dan budaya hanya 1 yang terselenggara, tahun 2021 pun demikian. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk menarik para wisatawan mancanegara agar berkunjung ke Parepare dan secara tidak langsung juga bisa menambah pendapatan asli daerah. Tahun 2022 terlaksana 2 festival seni dan budaya dalam satu tahun terakhir.

Tabel 2.253.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                | Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 1     | 2    | 1    | 1    | 2    |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023



#### 2.1.3.1.2.16.2 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki Kota Parepare pada tahun 2018 hingga tahun 2022, jumlah kepemilikan terhadap benda, situs dan kawasan terdapat 41 buah dan semuanya telah dilestarikan.

Tabel 2.254.

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                                | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan            | 41    | 41   | 41   | 41   | 41   |
| 2   | Total Benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah                      | 41    | 41   | 41   | 41   | 41   |
| 3   | Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.14.3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 41 karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi.

Tabel 2.255.

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi  
Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                                                 | Tahun |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|     | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 41    | 41   | 41   | 41   | 41   |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

**2.1.3.1.2.17 Bidang Urusan Perpustakaan****2.1.3.1.2.17.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun**

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahunnya, selama lima tahun terakhir selalu cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 2018 sebanyak 43.719 orang. Meningkat di tahun 2019 sebanyak 48.723 orang. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan menjadi hanya 9.943 orang pengunjung perpustakaan. Kemudian di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 19.169 orang. Tahun 2022 jumlah pengunjung perpustakaan adalah sebanyak 31.806 orang.

Tabel 2.256.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun  
Kota Parepare Tahun 2017-2021

| Indikator                                | Tahun  |        |       |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
|                                          | 2018   | 2019   | 2020  | 2021   | 2022   |
| Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 43.719 | 48.723 | 9.943 | 19,169 | 31.806 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Parepare Tahun 2023

**2.1.3.1.2.17.2 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

Berdasarkan data di bawah ini koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Jumlah koleksi buku sebanyak 34.221 di tahun 2018. 2019 menjadi 36.021 buku. Tahun 2020 jumlah koleksi buku meningkat ke 40.440 yang hingga di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 42.429 untuk Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah. Bertambah di tahun 2022 menjadi 43.929 koleksi.

Tabel 2.257.

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                         | Tahun  |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 34.221 | 36.021 | 40.440 | 42.429 | 43.929 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Parepare Tahun 2023

**2.1.3.1.2.17.3 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk**

Rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kota Parepare masih tergolong sangat rendah. Dimana rasio tertinggi yaitu 1,35 di tahun

2020. Sedangkan rasio terendah berada di tahun 2022 dengan rasio hanya 0,98 per 1000 penduduk.

Tabel 2.258.  
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                              | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio perpustakaan per satuan penduduk | 1,14  | 1,17 | 1,35 | 1,28 | 0,98 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.17.4 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dimana di tahun 2018 hanya sebanyak 140 orang pengunjung dan di tahun 2019 berjumlah 156 orang pengunjung. Di tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan hanya sebanyak 30 orang. Di tahun 2021 jumlah pengunjung Kembali meningkat menjadi 61 orang dan meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 87 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.259.  
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                      | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | 140   | 156  | 30   | 61   | 87   |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.17.5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Berdasarkan data pada tabel berikut, terlihat bahwa jumlah koleksi judul buku yang tersedia dipergustakaan daerah Kota Parepare di tahun 2018 judul koleksi buku perpustakaan adalah 11.435 judul buku. Di tahun 2019 meningkat menjadi 12.035 koleksi judul buku. Meningkat lagi tahun 2020 menjadi 12.859 koleksi. Tahun 2021 jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kota Parepare adalah 13.184 judul buku terus meningkat hingga tahun 2022 sebanyak 13.934 koleksi.

Tabel 2.260.  
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Indikator                              | Tahun  |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | 11.435 | 12.035 | 12.859 | 13.184 | 13.934 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.17.6 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kota Parepare terbilang masih sangat kurang. Tahun 2019 hingga 202 jumlahnya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat adalah sebanyak 2 orang. Di akhir tahun 2021 hingga 2022 jumlahnya meningkat menjadi 5 total dari Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat.

Tabel 2.261.

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                                                              | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | -     | 2    | 2    | 5    | 5    |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.18 Bidang Urusan Kearsipan

##### 2.1.3.1.2.18.1 Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku di Kota Parepare selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari 3,03 persen pada tahun 2018 kemudian pada tahun 2019 menjadi 14,71 persen sampai dengan 2020 meningkat lagi menjadi 17,65 persen. Tahun 2021 capaiannya sebesar 20,59 persen dan di tahun 2022 menjadi 36,36 persen. Hal ini menunjukkan kepedulian dan adanya peningkatan taat administrasi dalam hal penyimpanan dan pengelolaan arsip setiap perangkat daerah.

Tabel 2.262.

Pengelolaan arsip secara baku Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No. | Indikator                     | Tahun |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|     | Pengelolaan arsip secara baku | 3,03  | 14,71 | 17,65 | 20,59 | 36,36 |

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.18.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Upaya untuk meningkatkan pengelola kearsipan di Kota Parepare masih relatif kurang memadai. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah SDM untuk pengelolaan kearsipan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah SKPD di Kota Parepare. Sejak 3 tahun terakhir yaitu 2020 hingga tahun 2022 sebanyak 7 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Tabel 2.263.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                           | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 1     | 2    | 7    | 7    | 7    |

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.2 Urusan Layanan Pilihan

Layanan Pemerintahan Daerah urusan pilihan merupakan layanan urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik daerah sehingga ada dua layanan urusan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Parepare yaitu layanan bidang urusan Transmigrasi dan layanan Bidang urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.

##### 2.1.3.2.1 Bidang Urusan Pariwisata

Kunjungan wisata di Kota Parepare di tahun 2018 berada diangka 99,83 persen hingga di tahun 2019 capaiannya melebihi 100 persen. Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan ke angka 5,14 persen yang disebabkan terjadinya pandemic covid-19 yang melarang masyarakat melakukan aktifitas di luar rumah/membatasi mobilitas dan kegiatan yang berkumpul.

Kinerja Bidang Urusan Pariwisata dapat dilihat dari besarnya PAD yang di peroleh dari sector pariwisata. Besarnya jumlah PAD yang diterima dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat. Jumlah PAD yang diterima di tahun 2018 sebesar 4 M dan meningkat di tahun 2019 sehingga menjadikan jumlah PAD yang di terima sebesar Rp. 6,9 Milyar. Peningkatkan yang

begitu pesat dikarenakan pemerintah kota menjadikan sector pariwisata salah satu prioritas pembangunan di Kota Parepare. Di tahun 2022 menjadi 8M. Gambaran kinerja bidang urusan pariwisata selama lima tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.264.  
Gambaran Kinerja Bidang Urusan Pariwisata  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator                         | Tahun  |          |       |       |       |
|----|-----------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|
|    |                                   | 2018   | 2019     | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Kunjungan wisata                  | 99.83% | 100.17 % | 5.14% | 1183  | 1016  |
| 2  | Lama kunjungan Wisata (hari)      | 2.8    | 1.85     | 1.6   | 1.99  | 3,05  |
| 3  | PAD sektor pariwisata (Milyar Rp) | 4,308  | 6,992    | 6,804 | 6,546 | 8,880 |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2023

### 2.1.3.2.2 Bidang Urusan Pertanian

#### 2.1.3.2.2.1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2018 yang sebesar 1,06 persen dalam berkontribusi terhadap PDRB, tahun 2019 sebesar 0,59 persen. Di tahun 2020 hanya sebesar 0,01 persen. Tahun 2021 meningkat menjadi 1,31 persen dan ditahun 2022 hanya sebesar 0,99 persen.

Tabel 2.265.  
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang Urusan                                        | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                      |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | %      | 1,06  | 0,59 | 0,01 | 1,31 | 0,99 |

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.2.2.2 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sector pertanian (palawija) terhadap PDRB di Kota Parepare dari tahun 2018 kontribusi pertanian sebesar 5,90 persen terhadap PDRB. Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu 30,91 persen, sedangkan diakhir tahun 2020 mengalami penurunan signifikan dengan kontribusi hanya 1,11 persen dari total PDRB dan tahun 2021

angka 15,19 persen. Tahun 2022 mencapai peningkatan hingga 36,77 dan merupakan nilai kontribusi sector pertanian terhadap PDRB dan tertinggi dari data lima tahun terakhir.

Tabel 2.266.  
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang Urusan                                        | Satuan | Tahun |       |      |       |       |
|------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                                      |        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  |
| Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | %      | 5,90  | 30,91 | 1,11 | 15,19 | 36,77 |

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.2.2.3 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kota Parepare mengalami capaian yang cukup baik di tahun 2022 dimana kontribusi sector perkebunan (tanaman keras) mencapai 5,61 persen terhadap PDRB dan merupakan angka tertinggi di 5 tahun terakhir.

Tabel 2.267.  
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang Urusan                                              | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                            |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | %      | 0,08  | 1,00 | 0,01 | 0,15 | 5,61 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.2.2.4 Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Besarnya kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB dari tahun 2018 hingga 2019 yaitu sebesar 46,37. Tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan capaian yang masing-masing yaitu 53,17 dan 32,61 persen untuk Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB. Namun terjadi penurunan ditahun 2022 menjadi 28,35 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.268.  
Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang Urusan                                     | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                   |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB | %      | 46,37 | 46,37 | 53,17 | 32,61 | 28,35 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.2.2.5 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal per Hektar

Data tabel di bawah menunjukkan angka produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Angka produktivitas ini bisa saja di pengaruhi oleh iklim yang terjadi. Berikut adalah data produktivitas padi atau bahan pangan lainnya:

Tabel 2.269.

Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang Urusan                                                       | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|                                                                     |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | %      | 5,50  | 5,50 | 3,46 | 5,59 | 5,93 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.2.2.6 Cakupan Bina Kelompok Petani

Jumlah cakupan bina kelompok petani di tahun 2018 kembali turun menjadi 27,27 persen dan stagnan di tahun 2019 yang pada tahun 2020 cakupun kembali turun hanya mencapai 16,33 persen, dan makin menurun di tahun 2021 yaitu 4,93 hal ini menunjukkan bahwa masih sangat sedikit kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari pemda. Tahun 2022 meningkat drastic menjadi 41,96 persen.

Tabel 2.270.

Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Bidang Urusan                | Satuan | Tahun |       |       |      |       |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|
|                              |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  |
| Cakupan bina kelompok petani | %      | 27,27 | 27,27 | 16,33 | 7,69 | 41,96 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2023

### 2.1.3.2.3 Bidang Urusan Kehutanan

#### 2.1.3.2.3.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Luas total hutan dan lahan kritis di Kota Parepare tahun tahun 2018, rehabilitasi hutan dan lahan kritis berkurang signifikan menjadi 18,18%. Tahun 2019, luas hutan dan lahan kritis masih sama dengan tahun sebelumnya, tapi luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi meningkat menjadi 40 Ha atau 24,24%. Data terakhir tahun 2020 total



hutan dan lahan kritis seluas 165 Ha dan yang direhabilitasi hanya 50 Ha atau rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 30,00 persen. Tahun 2021 untuk urusan kehutanan, telah dialihkan ke urusan kementerian sehingga data tahun 2021 yang terkait urusan kehutanan sudah tidak dikelola oleh pemerintah kota. Tahun 2022, dinas lingkungan hidup sudah tidak mengelolah data kehutanan sebab tidak menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup.

Tabel 2.271.

## Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Bidang                                          | Sat | Tahun |       |       |       |      |
|----|-------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|
|    |                                                 |     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| 1  | Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi | Ha  | 30    | 40    | 50    | 50    | -    |
| 2  | Luas total hutan dan lahan kritis               | Ha  | 165   | 165   | 165   | 165   | -    |
|    | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis             | %   | 18,18 | 24,24 | 30,00 | 30,00 | -    |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.2.3.2 Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan kawasan hutan disebabkan karena masih adanya masyarakat yang melakukan perambahan hutan misalnya dengan melakukan penebangan pohon-pohon di hutan tanpa meminta izin kepada pihak yang terkait. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 luas kerusakan kawasan hutan stagnan diangka 8 Ha atau 0,32 persen dari 2.499 Ha kawasan hutan yang ada. Tahun 2021 mengalami pengurangan pada luas kerusakan kawasan hutan yang menunjukkan angka 7,96 atau sama dengan 0,28 persen. Tahun 2022, Untuk setiap indikator urusan kehutanan telah tidak dikelola oleh pemerintah kota, yang kemudian urusan kehutan di kota parepare telah dialihkan ke kementerian.

Tabel 2.272.

## Kerusakan Kawasan Hutan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Indikator                    | Sat | Tahun |       |       |      |      |
|----|------------------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|
|    |                              |     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| 1  | Luas kerusakan kawasan hutan | Ha  | 8     | 8     | 8     | 7.96 | -    |
| 2  | Luas kawasan hutan           | Ha  | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.50 | -    |

|   |                         |   |      |      |      |      |   |
|---|-------------------------|---|------|------|------|------|---|
| 3 | Kerusakan Kawasan Hutan | % | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0.28 | - |
|---|-------------------------|---|------|------|------|------|---|

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa kerusakan hutan di Kota Parepare cenderung mengalami penurunan disetiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Hal ini karena berbagai program dan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali yang ditangani oleh pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Parepare dan Pemerhati Lingkungan Lainnya.

#### 2.1.3.2.3.3 Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Berdasarkan data lima tahun terakhir, terlihat bahwa rasio luas Kawasan lindung dari tahun 2017 hingga tahun 2020 relatif stagnan di angka kisaran 67 persen. Yang kemudian tahun 2021 data urusan kehutan sudah tidak diterbitkan oleh pemerintah kota. Tahun 2022 data sudah bukan kewenangan dinas lingkungan hidup Kota Parepare dalam mengelolah data terkait.

Tabel 2.273.

Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                | Satuan | Tahun   |         |         |         |      |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
|                          |        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022 |
| Luas kawasan lindung     | Ha     | 2.050   | 2.050   | 2.050   | 2.050   | -    |
| Total luas Kawasan Hutan | Ha     | 3.036,4 | 3.036,4 | 3.036,4 | 3.036,4 | -    |
| Rasio luas kawasan       | Jumlah | 0,67    | 0,67    | 0,67    | 0,67    | -    |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.2.4 Bidang Urusan Perdagangan

##### 2.1.3.2.4.1 Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih merupakan nilai total barang dan jasa yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja perdagangan di suatu daerah. Ekspor bersih menunjukkan selisih antara ekspor dan impor, jika

nilainya positif maka terjadi surplus dalam perdagangan sedangkan jika nilainya negative maka terjadi deficit dalam perdagangan. Ekspor bersih perdagangan Kota Parepare mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atau dalam kurun waktu lima tahun. Namun berada pada angka total yang minus. Ini menandakan perdagangan tingkat regional belum bisa memenuhi keseluruhan permintaan di Kota Parepare.

Tabel 2.274.  
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                 | Tahun     |           |           |           |      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|                           | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022 |
| Nilai Ekpor               | 3.045.735 | 3.391.796 | 3.884.592 | 4.185.554 | -    |
| Nilai Impor               | 3.411.560 | 3.796.883 | 4.256.959 | 4.935.780 | -    |
| Ekspor bersih perdagangan | (365.824) | (405.086) | (372.367) | (750.226) | 0    |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare Tahun 2022

#### 2.1.3.2.4.2 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal menunjukkan kecendrungan penurunan. Tahun 2018 sampai tahun 2019 menjadi 11,90 persen. Pada tahun 2020 hanya 11,99 persen kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemda dari keseluruhan pedagang/usaha informal. Tahun 2021 meningkat menjadi 12,3 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Dan meningkat menjadi 22,5 di tahun 2022.

Tabel 2.275.  
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal  
Kota Parepare tahun 2018-2022

| Indikator                                     | Tahun |       |       |      |      |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
|                                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
| Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 12,70 | 11,20 | 11,99 | 12,3 | 22,5 |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.2.5 Bidang Urusan Perindustrian

Cakupan bina kelompok pengrajin digunakan untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pengrajin mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pengrajin. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan

pemda paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu hanya 0,83 persen yang mendapat bantuan, sedangkan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 21,41 persen pengrajin yang mendapatkan bantuan dari pemda, hal ini menandakan bahwa masih banyak pengrajin yang masih perlu mendapatkan bantuan binaan dari pemda.

Tabel 2.276.

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kota Parepare tahun 2018-2022

| Indikator                       | Tahun |       |       |      |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
|                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  |
| Cakupan bina kelompok pengrajin | 0,83  | 13,19 | 10,38 | 6,50 | 21,41 |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Parepare Tahun 2023

### 2.1.3.2.6 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

#### 2.1.3.2.6.1 Produksi Perikanan

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi perikanan di Kota Parepare terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan produksi ikan selalu berhasil melampaui target. Produksi ikan tertinggi berada pada tahun 2021 dengan produksi ikan mencapai 132,75 ton.

Produksi perikanan didukung dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dimana untuk produksi perikanan tangkap pada pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap sedangkan perikanan budidaya pada peningkatan produksi. Capaian kinerja produksi perikanan dapat melampaui target karena tingginya produksi Rumput Laut selain itu juga dukungan prasarana, pengawasan dan konservasi sumber daya ikan serta peningkatan dan pembinaan mutu produksi perikanan.

Tabel 2.277.

Produksi Perikanan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator          | Sat. | Tahun  |        |        |        |        |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    |      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Produksi perikanan | Ton  | 131,12 | 131,12 | 132,66 | 132,75 | 132,28 |

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.2.6.2 Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Kota Parepare pada tahun 2018 menjadi 94,11 persen, dimana jumlah konsumsi ikan hanya 3.294 kg dari target yang ditetapkan 3.500 kg. Pada tahun 2019, jumlah konsumsi ikan meningkat

menjadi 3.317 kg dari target yang ditetapkan 3.500 kg, sehingga konsumsi ikan meningkat menjadi 94,77 persen. Sedangkan pada tahun 2020 konsumsi ikan mengalami penurunan signifikan mencapai 59,71 persen dengan jumlah konsumsi ikan hanya 2.090 kg dari target daerah sebesar 3.500 kg. di tahun 2021 konsumsi ikan Kota Parepare adalah 89,43 persen dengan jumlah konsumsi ikan sebesar 3.193 Kg sedang target daerah sebesar 3.571 Kg. Konsumsi ikan di tahun 2022 menjadi 89,00 persen.

Tabel 2.278.

## Konsumsi Ikan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator     | Sat. | Tahun |       |       |       |       |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Konsumsi Ikan | %    | 94,11 | 94,77 | 59,71 | 89,43 | 89,00 |

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.2.6.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 cakupan bina kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda sebesar 12,19 persen dan meningkat di tahun 2019 sebesar 18,80 persen. Meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 20,87 persen. Namun di tahun 2021 terjadi penurunan angka ke 12,5 persen bina kelompok yang mendapatkan bantuan pemda. Tahun 2022 kembali mulai meningkat lagi ke angka 15,82 persen.

Tabel 2.279.

## Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator                     | Sat | Tahun |       |       |      |       |
|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
|                               |     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  |
| Cakupan Bina Kelompok Nelayan | %   | 12,19 | 18,80 | 20,87 | 12,5 | 15,82 |

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.3.2.6.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan dianalogikan dengan produksi perikanan tangkap dilaut, dimana kelompok ini kontribusinya di Kota Parepare sebesar 79,71 persen tahun 2018, menurun menjadi 55,07 persen tahun 2019 dan meningkat kembali menjadi 75,41 persen tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 59,74. Setiap tahunnya, kontribusi

terbesar produksi ikan di Kota Parepare bersumber dari produksi perikanan kelompok nelayan. Dan tahun 2022 sebesar 61,65 persen produksi perikanan yang menjadi kontribusi hasil kelompok nelayan.

Tabel 2.280.  
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator          | Sat. | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    |      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Produksi perikanan | %    | 79,71 | 55,07 | 75,41 | 59,74 | 61,65 |

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan & Perikanan Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.3.1.2.6.5 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual, nilai tukar nelayan pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, nilai tukar nelayan tetap stabil dan tinggi. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 nilai tukar nelayan selalu diatas 100, hal ini berarti bahwa indeks yang diterima nelayan lebih besar dari indeks yang dibayar nelayan. Namun pada tahun 2020 nilai tukar nelayan sebesar 99,46, artinya indeks yang diterima tidak sama besar dengan indeks yang dibayar oleh nelayan. Tahun 2021 dan 2022 Nilai tukar nelayan kembali naik ke angka 104.

Tabel 2.281.  
Nilai Tukar Nelayan Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator           | Sat. | Tahun  |        |       |        |        |
|---------------------|------|--------|--------|-------|--------|--------|
|                     |      | 2018   | 2019   | 2020  | 2021   | 2022   |
| Nilai tukar nelayan | Jml  | 104,67 | 104,67 | 99,46 | 104,18 | 104,19 |

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan & Perikanan Kota Parepare Tahun 2023

### 2.1.3.3 Unsur Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### 2.1.3.3.1 Unsur Perencanaan Pembangunan

2.1.3.3.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah  
Ditetapkan dengan Perda

Pemerintah Kota Parepare telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Tabel 2.282.

## Dokumen Perencanaan RPJPD Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2023

#### 2.1.3.3.1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada

Pemerintah Kota Parepare telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023.

Tabel 2.283.

## Dokumen Perencanaan RPJMD Kota Parepare 2018-2023

| Indikator                                                                | Tahun |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2023

#### 2.1.3.3.1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada

Pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Parepare setiap tahunnya.

Tabel 2.284.

## Dokumen Perencanaan RKPD Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                 | Tahun |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                                           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2023

#### 2.1.3.3.1.4 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare yang tertuang pada setiap dokumen perencanaan tetap berpedoman pada dokumen RTRW yang telah diperdakan. Yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031.

Tabel 2.285.

Dokumen Perencanaan RTRW Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                   | Tahun |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2023

#### 2.1.3.3.1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Pemerintah Kota Parepare sangat menjaga terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran daerah. Penyusunan RKPD selalu berpedoman pada RPJMD, sehingga seluruh program yang tertuang dalam RKPD juga terdapat dalam RPJMD. Demikian pula seluruh program yang dianggarkan dalam APBD tertuang juga dalam RKPD, dimana RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Tabel 2.286.

Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 2018-2022

| No               | Indikator                                         | Tahun |       |       |       |       |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |                                                   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| RPJMD dalam RKPD |                                                   |       |       |       |       |       |
| 1                | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 98,08 | 99,53 | 97,85 | 97,70 | 50,29 |
| RKPD dalam APBD  |                                                   |       |       |       |       |       |
| 2                | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD  | 96,45 | 99,53 | 98,11 | 100   | 100   |

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2023

#### 2.1.3.3.1.6 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Untuk mengetahui kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW yaitu dengan membandingkan kesesuaian program/kegiatan



pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dengan dokumen RTRW.

Tabel 2.287.

**Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW 2018-2022**

| <b>Indikator</b>                           | <b>Tahun</b> |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                            | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | 95,00        | 99,97       | 99,89       | 99,89       | 100         |

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2023

**2.1.3.3.2 Unsur Keuangan**

Berdasarkan data lima tahun terakhir, hanya di tahun 2018 pemerintah Kota Parepare meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan di tahun-tahun lainnya hingga tahun 2022 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah.

Persentase SiLPA terhadap APBD pada tahun 2018, persentase SiLPA adalah 2,77 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 5,58 persen. Sedangkan pada tahun 2020, persentase SiLPA terhadap APBD berkurang menjadi 4,62 persen. Capaian tahun 2021 sebesar 1,97 menjadi 1,85 ditahun 2022.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan maka alokasi APBD untuk Bidang Pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah, sedangkan untuk urusan kesehatan minimal 10%. Pada tahun 2018, urusan pendidikan memperoleh alokasi anggaran 23,06 persen sedangkan urusan kesehatan mencapai 8,99 persen. Untuk tahun 2019, urusan pendidikan memperoleh anggaran 4,16 dari total belanja daerah, sedangkan urusan kesehatan memperoleh 26,29 persen. Untuk tahun 2020, alokasi belanja daerah pada urusan Pendidikan mencapai 5,04 persen, sedangkan alokasi pada urusan kesehatan mencapai 24,16 persen. Di tahun 2021 persentase belanja Pendidikan adalah 21,41 sedangkan belanja untuk kesehatan sebesar 27,43. Tahun 2022, belanja urusan Pendidikan menjadi 20,28 persen sedang belanja urusan Kesehatan mencapai angka 29,49 persen.

Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Belanja Langsung selalu lebih tinggi dibanding Belanja Tidak Langsung. Tahun

2018, alokasi belanja langsung mencapai 53,16 persen sedangkan Belanja Tidak Langsung hanya 42,65 persen. Untuk tahun 2019, alokasi Belanja Langsung meningkat menjadi 59,89 persen sedangkan Belanja Tidak Langsung hanya 33,44 persen. Untuk tahun 2020 alokasi Belanja Langsung mencapai 55,63 persen dan Belanja Tidak Langsung mencapai 38,85 persen. Tahun 2021 perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai perbandingan yakni 64,53 persen untuk belanja langsung dan 35,47 persen untuk belanja tidak langsung.

Adapun penetapan APBD Kota Parepare dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu tepat waktu, yaitu ditetapkan sebelum tahun anggaran satu tahun sebelumnya berakhir dan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD dilakukan pada akhir Bulan Desember.

Tabel 2.288.  
Kinerja Bidang Urusan Keuangan 2018-2022

| No | Indikator                                                          | Tahun                 |                       |                       |                       |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                                    | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
| 1  | Opini BPK terhadap laporan keuangan                                | WDP                   | WTP                   | WTP                   | WTP                   | WTP                   |
| 2  | Persentase SILPA terhadap APBD                                     | 2,77                  | 5,58                  | 4,62                  | 1,97                  | 1,85                  |
| 3  | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana                  | 1,77                  | 0,00                  | 1,05                  | 2,37                  | 2,34                  |
| 4  | Persentase belanja pendidikan (20 %)                               | 23,06                 | 4,16                  | 5,04                  | 20,41                 | 20,28                 |
| 5  | Persentase belanja kesehatan (10 %)                                | 8,99                  | 26,29                 | 24,16                 | 27,43                 | 29,49                 |
| 6  | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | 53,16%<br>:<br>42,65% | 59,89%<br>:<br>33,44% | 55,63%<br>:<br>38,85% | 62,39%<br>:<br>35,33% | 59,79%<br>:<br>41,15% |
| 7  | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa                                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00                  |
| 8  | Penetapan APBD                                                     | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 2023

#### 2.1.3.3.3 Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan data lima tahun terakhir, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah 45 jam pelajaran (JP) dengan total jam pelajaran minimal 20 JP setiap tahunnya, melihat angka

realisasi tahun 2018 hingga tahun 2020 yang mencapai 45 JP. Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan untuk angka rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP). Tahun 2022, 27 JP.

Sedangkan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,69 persen. Namun pada tahun 2019 kembali menurun pada angka 1,42 persen. Sedangkan pada tahun 2020 persentasenya kembali meningkat mencapai 3,24 persen. Tahun 2021 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 0,66 di Kota Parepare. Tahun 2022, meningkat ke angka 2,72.

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural juga berfluktuasi. Pejabat yang mengikuti diklat struktural sebesar 0,34 ditahun 2018. Tahun 2019, jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat struktural meningkat signifikan menjadi 8,89 persen. Sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun secara signifikan yaitu hanya 0,74 persen pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural. Di tahun 2021 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menjadi 0,68.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah cenderung stagnan. Pada tahun 2018 adalah 34 jabatan pimpinan tinggi, jumlah ini stagnan sampai dengan tahun 2020. Tahun 2021 terjadi penambahan menjadi 35.

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah 1.598 jabatan administrasi di instansi pemerintah dan jumlah jabatan ini berkurang menjadi 1.398 untuk tahun 2021.

Adapun jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah cenderung mengalami penurunan. Jumlah 2.093 jabatan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 2.123 jabatan dan berkurang kembali pada tahun 2019 menjadi 2.054 jabatan. Sedangkan pada tahun 2020 tersisa hanya 1.975 jabatan fungsional tertentu dan 1.398 untuk tahun 2021 dan merupakan jumlah terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambaran Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan selama lima tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.289.

Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan  
2018-2022

| No | Indikator                                                                       | Tahun |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP)                | 45    | 45    | 45    | 27    | 27    |
| 2  | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                   | 3,69  | 1,42  | 3,14  | 0,66  | 2,72  |
| 3  | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 0,44  | 8,89  | 0,74  | 0,68  | 0     |
| 4  | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                         | 34    | 34    | 34    | 35    | 35    |
| 5  | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah                            | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.398 | 1.335 |
| 6  | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah            | 2.123 | 2.054 | 1.975 | 2.228 | 2.246 |

Sumber : BKPSDM Kota Parepare 2023

#### 2.1.3.3.4 Penelitian dan Pengembangan

Aktifitas penelitian dan pengembangan merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik, terutama pada tahapan menemukenali masalah kebijakan yang merupakan tahap awal ketika pemerintah daerah menyusun program/kegiatan kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah diharapkan berbasis bukti melalui penelitian maupun pengembangan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan jumlah kelitbangan yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare yang diimplementasikan dalam RKPD Kota Parepare setiap tahunnya. Implementasi rencana kelitbangan dari tahun 2018 hingga 2022 pada RKPD masih tetap konsisten sesuai dengan yang termuat dalam RPJMD.

Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan semakin meningkat dimana persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2018 hingga 2022 yang tiap tahunnya mencapai 100 persen pada penerapan kebijakan inovasi di Kota Parepare. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah mengarah ke pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).

Dalam penerapan inovasi, pengembangan inovasi lingkup Pemerintah Kota Parepare dimulai pada tahun 2016, dimana Bapak Walikota Parepare memiliki kebijakan mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun inovasi, dan hingga tahun 2022 telah dilakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah dalam penerapan.

Upaya memotivasi SKPD/unit kerja untuk melaksanakan inovasi pada unit kerjanya masing-masing. Semua perangkat daerah telah memunculkan inovasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh unit kerjanya, namun belum keseluruhan inovasi yang dimunculkan diterapkan dan berjalan dengan dengan baik. Namun dengan kebijakan Walikota dan Wakil Walikota untuk mendukung dan mendorong pengembangan inovasi lingkup Pemerintah Kota Parepare memberi semangat kepada SKPD/Unit Kerja untuk terus berinovasi.

Pencapaian kinerja kegiatan kelitbangan Kota Parepare dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.290.

## Kinerja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan 2018–2022

| No | Indikator                                                                    | Tahun |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                                              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Persentase implementasi rencana kelitbangan                                  | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2  | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                                     | 10    | 20   | 20   | 25   | 25   |
| 3  | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4  | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah                       | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2023

**2.1.3.3.5 Unsur Pengawasan**

Persentase tindak lanjut temuan sepanjang tahun 2018 adalah 79,39 persen dan menurun menjadi 59,55 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 persentase tindak lanjut menjadi 61,34 persen. Dan tahun 2021 sebesar 50,53 hingga tahun 2022 mencapai 51,00 persen untuk tindak lanjut temuan.

Persentase pelanggaran pegawai pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,35 persen. Pada tahun 2019, persentase pelanggaran pegawai turun menjadi hanya 0,21 persen dan pada tahun 2020 persentase kembali meningkat menjadi 0,85 persen. Dan tahun 2021 menjadi 0,41.

Sedangkan jumlah temuan BPK dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2018 jumlah temuan mencapai 18. Tiap tahunnya berkurang menjadi 16 di tahun 2019, 12 temuan di tahun 2020, dan 9 temuan di tahun 2022.

Gambaran Kinerja Bidang Urusan Pengawasan selama lima tahun yaitu 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.291.  
Kinerja Bidang Urusan Pengawasan 2018-2022

| No | Indikator                       | Tahun |       |       |       |       |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Persentase tindak lanjut temuan | 79,39 | 59,55 | 61,34 | 50,53 | 51,00 |
| 2  | Persentase pelanggaran pegawai  | 1,35  | 0,21  | 0,85  | 0,41  | 0,44  |
| 3  | Jumlah temuan BPK               | 18    | 16    | 12    | 13    | 9     |

Sumber : Inspektorat Kota Parepare, 2023

**2.1.3.3.6 Unsur Sekretariat Dewan**

Gambaran Kinerja Sekretariat Dewan selama lima tahun yaitu 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.292.  
Kinerja Sekretariat Dewan 2018-2022

| No | Indikator                                                                     | Tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                                               | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                                                                                                                                                                     |     |     |     | Tahun 2024-2026 |     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 2                                              | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD | Ada | Ada | Ada | Ada             | Ada |
| 3                                              | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD                | Ada | Ada | Ada | Ada             | Ada |

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi dalam suatu daerah. Aspek daya saing ini terdiri atas kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, atau infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia. Indikator variable daerah terdiri dari:

##### 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

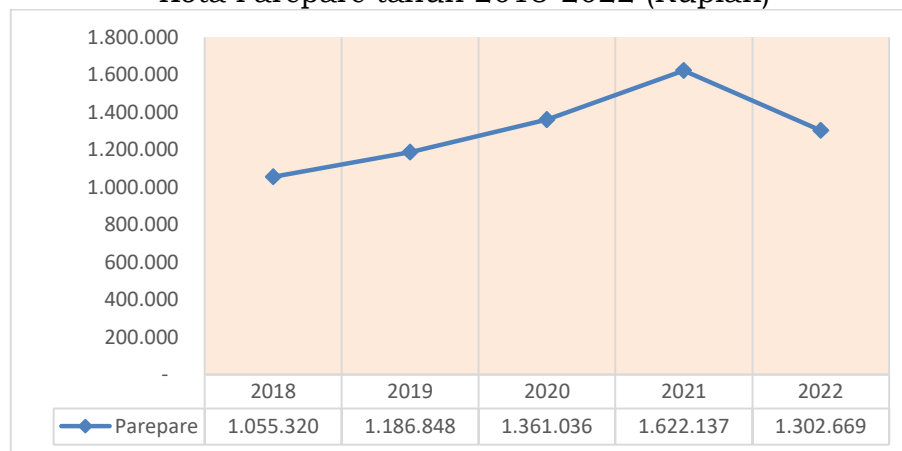
Kemampuan ekonomi daerah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah itu sendiri untuk mempertahankan dan menarik pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

###### 2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa menggambarkan tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin menggambarkan bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Parepare pada periode 2018-2022, konsumsi rumah tangga per kapita Kota Parepare tahun 2018 menjadi adalah Rp. 1.055.320. Tahun 2019, peningkatan konsumsi rumah tangga perkapita menjadi Rp. 1.186.848. Sedangkan tahun 2020 masih terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga hingga mencapai Rp. 1.361.000. hingga tahun 2021 Konsumsi per kapita untuk Kota Parepare mencapai Rp. 1.622.137. Untuk tahun 2022, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita berkurang menjadi Rp. 1.302.669

Grafik 2.27  
Konsumsi Rumah Tangga per kapita  
Kota Parepare tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu komponen pengeluaran Rumah Tangga adalah pengeluaran Rumah Tangga non makanan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan selain makanan. Masyarakat Kota Parepare sendiri dalam periode 2018-2022 menunjukkan kecenderungan konsumsi non makanan sebagai berikut:



Grafik 2.28

Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita Kota Parepare tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

Persentase konsumsi non pangan rumah tangga per kapita di Kota Parepare tahun 2018, adalah 53,89 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Tahun 2019 menurun menjadi 52,29 persen. Data terakhir pada tahun 2020 menunjukkan persentase konsumsi non pangan rumah tangga per kapita yang kembali meningkat menjadi 55,98 persen dari total pengeluaran rumah tangga perkapita. Kemudian di tahun 2021 persentase konsumsi non pangan rumah tangga yang termasuk diantaranya perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka komoditas dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; komoditas tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; keperluan pesta dan upacara dengan total kontribusi mencapai angka 58,08 persen. Tahun 2022, persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita mencapai angka 54,67 persen.

#### 2.1.4.1.3 Produktivitas Total Daerah

Secara teknis produktivitas merupakan rasio antara keluaran (output) dan masukan (input), dalam mengukur produktivitas total daerah merupakan rasio antara total nilai produksi suatu daerah (PDRB) terhadap Angkatan Kerja yang ada di daerah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2018, produktivitas daerah meningkat menjadi 99,38 juta/angkatan kerja, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 105,83 juta/angkatan kerja. Tahun 2020 tingkat produktivitas daerah sedikit menurun menjadi 100,69 juta/angkatan kerja. Tahun 2021. Produktivitas Total Daerah Kota Parepare meningkat ke angka 104,61 juta/Angkatan kerja. Hingga tahun 2022, angka produktivitas total daerah mencapai 120,91 juta/Angkatan kerja.

Tabel 2.293.

## Produktivitas Total Daerah Kota Parepare 2018-2022

| No. | Indikator            | 2018      | 2019      | 2020      | 2021     | 2022     |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1.  | Nilai PDRB           | 6.602,518 | 7.230,400 | 7.323,650 | 7.825,98 | 8.697,28 |
| 2.  | Angkatan Kerja       | 66.435    | 68.321    | 72.732    | 74.806   | 71.929   |
| 3.  | Produktivitas Daerah | 99,38     | 105,83    | 100,69    | 104,61   | 120,91   |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

## 2.1.4.1.4 Indikator Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator berupa rasio dari jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB suatu daerah tersebut. Untuk Kota Parepare nilai ekspor dan impor Kota Parepare hanya tercatat hingga tahun 2018. **Tahun 2019 hingga tahun periode akhir 2022, BPS sudah tidak mengeluarkan hitungan Nilai Ekspor-Impor** dan hanya menghitung Net Ekspor antar daerah dan nilai PDRB.

Hingga tahun 2021, Net Ekspor antar daerah bernilai minus Rp. 365.824 juta di tahun 2018 berkurang hingga ditahun akhir periode tahun 2022 bernilai minus Rp. 229.169 juta. Untuk nilai PDRB dari tahun ke tahun dari tahun 2018 yang berjumlah Rp. 4.639.404,86 juta hingga tahun 2022 mejadi Rp. 5.468,43 satuan miliar.

Berdasarkan data Net Ekspor terhadap PDRB (konstan), nilai Net Ekspor antar daerah dan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.294.

## Indikator Keterbukaan Ekonomi Kota Parepare 2018-2022

| Indikator               | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Net Ekspor antar daerah | (365.824) | (402.273) | (370.145) | (301.992) | (229.169) |
| PDRB (Milyard Rp)       | 4.639     | 4.948     | 4.944     | 5.162     | 5.468     |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

Dari data di atas terlihat bahwa Kota Parepare sepanjang Tahun 2018, nilai ekspor sebesar Rp. 3.045.735 (juta) sedangkan nilai impor sebesar Rp. 3.411.560 (juta). **Tahun 2019 hingga tahun periode akhir 2022, BPS sudah tidak mengeluarkan hitungan Nilai Ekspor-Impor** dan hanya menghitung Net Ekspor antar daerah dan nilai PDRB.

#### 2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 2.1.4.2.1 Jenis dan Jumlah Bank dan cabang

Salah satu indikator daya saing daerah Kota Parepare adalah banyaknya lembaga keuangan yang berada di Kota Parepare. Dalam kurun waktu 2018-2022 jumlah bank setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yakni 14 buah.

Tabel 2.295.  
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Jenis Bank                   | Sat  | Tahun |      |      |      |      |
|----|------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
|    |                              |      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Bank Milik Pemerintah        | Buah | 5     | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 2  | Bank Milik Swasta Nasional   | Buah | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 3  | Bank Milik Swasta Asing      | Buah | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 4  | Bank Milik Pemerintah Daerah | Buah | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5  | Jenis dan Jumlah Bank        | Buah | 14    | 14   | 14   | 14   | 14   |

Sumber : *Bagian Ekonomi Kota Parepare Tahun 2023*

##### 2.1.4.2.2 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Posisi Kota Parepare yang strategis menjadikan Kota Parepare sebagai tempat transit bagi arus penumpang yang hendak melakukan perjalanan wisata maupun perjalanan biasa, baik menggunakan jalur laut maupun darat. Sebagai akibatnya, tingkat hunian terhadap kamar hotel maupun permintaan terhadap pelayanan jasa akomodasi lainnya dan juga pelayanan restoran semakin meningkat.

Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya di Kota Parepare pada tahun 2018 sampai tahun 2022 terdapat 36 hotel dimana Hotel Bintang satu 2 (dua) buah dan non bintang sebanyak 34 buah.

Tabel 2.296.  
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel  
Kota Parepare Tahun 2018-2022

| No | Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel | Sat  | Tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
|    |                                           |      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Hotel Bintang Satu                        | buah | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 2  | Hotel Non Bintang                         | buah | 34    | 34   | 34   | 34   | 34   |
|    | Total                                     | buah | 36    | 36   | 36   | 36   | 36   |

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel kota parepare tahun 2018-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Oleh karena diperlukan tindak lanjut untuk kembali meningkatkan jenis, kelas dan jumlah penginapan, mengingat Kota Parepare merupakan tempat yang strategis sebagai tempat transit bagi para pendatang.

### 2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

#### 2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Faktor keamanan di suatu daerah merupakan salah faktor untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang cukup baik. Di Kota Parepare nampaknya masih banyak ditemukan angka kriminalitas yang tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keinginan investor untuk menanamkan modalnya. Dalam hal kriminalitas, di Kota Parepare tercatat tahun 2019 menunjukkan peningkatan angka kriminalitas yang tertangani sebesar 41,01 jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 21,44. Tahun 2020 menurun menjadi 32,35 kemudian meningkat lagi menjadi 34,20 di tahun 2021. Tahun 2022 menurun walau tidka signifikan menjadi 34,17.

Tabel 2.297.  
Angka Kriminalitas Kota Parepare 2018-2021

| Indikator                          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Angka Kriminalitas yang tertangani | 21,44 | 41,01 | 32,35 | 34,20 | 34,17 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

Tingkat kriminalitas di Kota Parepare terlihat dari banyaknya narapidana pada Lembaga Perasyarakatan Kelas II B dimana pada tahun 2019, jumlah narapidana laki-laki 786 orang dan perempuan 76

orang. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah narapidana di narapidana pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II B, dimana jumlah narapidana laki-laki meningkat menjadi 796 orang dan narapidana perempuan berkurang menjadi 57 orang. Tahun 2021 Jumlah Narapidana Menurut Jenis Kelamin di Kota Parepare meningkat pesat hingga mencapai angka 1023 orang dengan komposisi 937 orang laki-laki dan 86 orang perempuan. Hingga tahun 2022 jumlah narapidana laki-laki dan perempuan di Kota Parepare berada pada angka 890 laki-laki dan 62 perempuan.

Tabel 2.298.  
Jumlah Narapidana Menurut Jenis Kelamin di Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan |
|-------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2018  | 749       | 72        | 821                   |
| 2019  | 786       | 76        | 862                   |
| 2020  | 796       | 57        | 826                   |
| 2021  | 937       | 86        | 1023                  |
| 2022  | 890       | 62        | 952                   |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.4.3.2 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Selama Tahun 2018-2022, semua Jenis Pajak Daerah di Kota Parepare dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sedangkan untuk Retribusi Daerah dikelola oleh beberapa SKPD terkait. Data mengenai jumlah dan macam Pajak dan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.299.  
Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Tahun 2018-2022

| No | Jenis                          | Sat   | Tahun |      |      |      |      |
|----|--------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
|    |                                |       | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | - Pajak Daerah                 | Jenis | 9     | 9    | 9    | 9    | 9    |
| 2  | - Retribusi Jasa Umum          | Jenis | 9     | 9    | 9    | 9    | 9    |
| 3  | - Retribusi Jasa Usaha         | Jenis | 6     | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 4  | - Retribusi Perizinan Tertentu | Jenis | 6     | 6    | 6    | 2    | 2    |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, semua jenis Pajak daerah dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, dimana selama kurun waktu Tahun 2018-2022 ada sebanyak 9 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Tambang

Galian C (pada Tahun 2012 berubah nama/nomenklatur menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009). Tahun 2021 untuk Pajak Daerah diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Retribusi Perizinan Tertentu hingga di tahun 2021 berkurang menjadi 2 jenis retribusi diantaranya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

#### 2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

##### 2.1.4.4.1 Kualitas Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan. Kualitas angkatan kerja sangat erat hubungannya dengan kemajuan suatu daerah, karena angkatan kerja yang berkualitas akan membuka peluang untuk dapat diterima pada berbagai lapangan kerja, angkatan kerja yang berkualitas tentunya memiliki produktivitas yang tinggi. Kualitas angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki, berikut ini disajikan gambaran kualitas angkatan kerja Kota Parepare menurut pendidikan yang ditamatkan:

Tabel 2.300.

Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan Kota Parepare 2018-2022

| NO. | PENDIDIKAN<br>DITAMATKAN | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.  | Sekolah Dasar            | 15514 | 12692 | 15389 | 15878 | 24415  |
| 2.  | Sekolah Menengah Pertama | 11687 | 10045 | 10579 | 9765  | 17959  |
| 3.  | Sekolah Menengah Atas    | 25912 | 25192 | 28058 | 29965 | 43113  |
| 4.  | Universitas              | 13322 | 18517 | 18346 | 19198 | 27577  |
|     | JUMLAH                   | 66435 | 66446 | 72372 | 74806 | 113064 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

#### 2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk Kota Pare dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.301.

Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Parepare Tahun 2018-2022

| Indikator            | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  |
|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| Rasio Ketergantungan | 49,14 | 49,05 | 46,18 | 114  | 44,91 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2023

#### 2.1.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bertujuan untuk memberikan gambaran *impact dan outcome* pencapaian penyelenggaraan pemerintahan di Kota Parepare selama lima tahun yaitu dari tahun 2018-2022 dan dijabarkan dalam 2 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel  
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah  
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
 Kota Parepare Tahun 2018-2022

| NO                       | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan      | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                          |                                                          |             | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |                                                          |             |                 |            |            |            |            |
| 1                        | Pertumbuhan Ekonomi                                      | %           | 5,58            | 6,65       | -0,08      | 4,41       | 5,93       |
| 2                        | Laju Inflasi                                             | %           | 1,96            | 2,45       | 1,61       | 2,91       | 6,66       |
| 3                        | PDRB Per Kapita (Juta Rp)                                | Juta Rp     | 45,94           | 49,80      | 49,92      | 51,18      | 56,16      |
| 4                        | Indeks Gini                                              | Angka       | 0,382           | 0,350      | 0,373      | 0,381      | 0,379      |
| 7                        | Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan             | %           | 94,41           | 94,74      | 94,56      | 94,60      | 94,59      |
|                          | Persentase Penduduk Miskin                               | %           | 5,59            | 5,26       | 5,44       | 5,40       | 5,41       |
| 10                       | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                         | %           | 77,19           | 77,62      | 77,86      | 78,21      | 78,54      |
| 11                       | Angka Melek Huruf (AMH)                                  | Angka       | 97,75           | 100        | 97,66      | 97,75      | 98,42      |
|                          | Harapan Lama Sekolah                                     | Tahun       |                 |            |            | 14,51      | 14,52      |
| 12                       | Angka Rata-rata Lama Sekolah                             | Tahun       | 10,09           | 10,30      | 10,45      | 10,65      | 10,66      |
| 13                       | Angka usia harapan hidup                                 | Tahun       | 70,88           | 71,18      | 71,28      | 71,31      | 71,57      |
|                          | Paritas Daya Beli                                        | Juta Rp     |                 |            |            | 13,79      | 14,03      |
| 14                       | Persentase balita gizi buruk                             | %           | 0,04            | 1,00       | 0,33       | 0,10       | 0,12       |
| 15                       | Prevalensi Balita Gizi Kurang                            | %           | 0,44            | 1,86       | 1,31       | 1,94       | 4,93       |
| 17                       | Angka Partisipasi Angkatan Kerja                         | Angka       | 63,02           | 62,00      | 62,36      | 66,94      | 63,61      |
| 18                       | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                       | Angka       | 63,93           | 62,80      | 63,40      | 66,94      | 63,61      |
| 19                       | Tingkat Pengangguran Terbuka                             | Angka       | 6,36            | 6,17       | 7,14       | 6,72       | 5,59       |
| 20                       | Rasio Penduduk yang Bekerja                              | Angka       | 93,19           | 93,65      | 92,86      | 93,28      | 94,40      |
| 25                       | Indeks Kepuasan Masyarakat                               | Angka       | 75,75           | 77,30      | 77,00      | 76,75      | 79,76      |
| 26                       | Persentase PAD terhadap pendapatan                       | %           | 15,76           | 14,27      | 16,27      | 16,69      | 16,66      |
| 27                       | Opini BPK                                                | Hasil Opini | WTP             | WDP        | WTP        | WTP        | WTP        |



|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO                      | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah           | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |                                                     |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |                                                                    |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021                                          | Tahun 2022                                          |
| 28                      | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                          | Angka  | 85,00           | 85,00      | 90,00      | 90,00                                               | 88,5                                                |
| 29                      | Penguatan Cadangan Pangan                                          | Angka  | 30,00           | 40,00      | -          | 100                                                 | 100                                                 |
| 31                      | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB               | %      | 1,06            | 0,59       | 0,01       | 1,31                                                | 0,99                                                |
| 38                      | Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB                       | %      | 0,33            | 0,3        | 0,3        | 0,28                                                | 0,26                                                |
| 41                      | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB                        | %      | 16              | 16,09      | 15,52      | 15,97                                               | 16,67                                               |
| 42                      | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB                           | %      | 2,25            | 2,09       | 2,03       | 2,06                                                | 2,09                                                |
| 43                      | Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri     | %      | 79,9            | 75,18      | 74,7       | *BPS sudah tidak menerbitkan data kategori tersebut | *BPS sudah tidak menerbitkan data kategori tersebut |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH |                                                                    |        |                 |            |            |                                                     |                                                     |
| 1                       | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita                       | Rupiah | 1.055.320       | 1.186.848  | 1.361.000  | 1.622.137                                           | 1.302.669                                           |
| 3                       | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita               | %      | 53,89           | 52,29      | 55,98      | 55,08                                               | 54,67                                               |
| 4                       | Produktivitas total daerah                                         | Angka  | 99,38           | 105,83     | 100,69     | 104,61                                              | 120,91                                              |
| 6                       | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi) | Angka  | 0,98            | 0,99       | 1,1        | 1,14                                                | BPS sudah tidak menerbitkan data terkait            |
|                         | Bank Milik Pemerintah                                              | Buah   | 5               | 5          | 5          | 5                                                   | 5                                                   |
|                         | Bank Milik Swasta Nasional                                         | Buah   | 7               | 7          | 7          | 7                                                   | 7                                                   |
|                         | Bank Milik Swasta Asing                                            | Buah   | 1               | 1          | 1          | 1                                                   | 1                                                   |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO                          | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah      | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                             |                                                               |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|                             | Bank Milik Pemerintah Daerah                                  | Buah   | 1               | 1          | 1          | 1          | 1          |
|                             | Jenis dan Jumlah Bank                                         | Buah   | 14              | 14         | 14         | 14         | 14         |
|                             | Hotel Bintang Satu                                            | buah   | 2               | 2          | 2          | 2          | 2          |
|                             | Hotel Non Bintang                                             | buah   | 34              | 34         | 34         | 34         | 34         |
| 9                           | Angka kriminalitas yang tertangani                            | Angka  | 21,44           | 41,01      | 32,35      | 34,20      | 34,17      |
|                             | Jumlah Narapidana Menurut Jenis Kelamin (laki-laki+perempuan) |        | 821             | 862        | 826        | 1023       | 952        |
|                             | - laki-laki                                                   |        | 749             | 786        | 796        | 937        | 890        |
|                             | - perempuan                                                   |        | 72              | 76         | 57         | 86         | 62         |
|                             | <b>Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>               |        |                 |            |            |            |            |
|                             | - pajak daerah                                                |        | 9               | 9          | 9          | 9          | 9          |
|                             | - retribusi umum                                              |        | 9               | 9          | 9          | 9          | 9          |
|                             | -retribusi jasa usaha                                         |        | 6               | 6          | 6          | 6          | 6          |
|                             | - retribusi perizinan tertentu                                |        | 6               | 6          | 6          | 2          | 2          |
| 10                          | Rasio ketergantungan                                          | Angka  | 49,14           | 49,05      | 46,18      | 114        | 44,91      |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b> |                                                               |        |                 |            |            |            |            |
|                             | <b>LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b>                             |        |                 |            |            |            |            |
| <b>I</b>                    | <b>PENDIDIKAN</b>                                             |        |                 |            |            |            |            |
| 1,1                         | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                              | %      | 40,96           | 52,14      | 41,97      | 36,66      | 42,01      |
| <b>1,2</b>                  | <b>Angka Partisipasi Kasar</b>                                |        |                 |            |            |            |            |
|                             | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A                   |        | 99,55           | 107,33     | 106,92     | 92,77      | 94,48      |
|                             | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B                 |        | 92,41           | 79,68      | 81,32      | 96,70      | 87,96      |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO         | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|            |                                                          |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|            | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C         |        | 72,21           | 90,86      | 92,07      | 114,99     | 115,25     |
| 1,3        | Angka Pendidikan yang ditamatkan                         | %      | 1,69            | 1,75       | 2,00       | 2,00       | 1,00       |
| <b>1,4</b> | <b>Angka Partisipasi Murni</b>                           |        |                 |            |            |            |            |
| 1.4.1      | Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A              | %      | 88,97           | 94,66      | 99,38      | 82,70      | 93,45      |
| 1.4.2      | Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B            | %      | 71,99           | 78,60      | 62,73      | 65,74      | 87,33      |
| 1.4.3      | Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C         | %      | 57,40           | 62,35      | 63,47      | 85,50      | 121,17     |
| <b>1,5</b> | <b>Angka Partisipasi Sekolah</b>                         |        |                 |            |            |            |            |
| 1.5.1      | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A            | %      | 889,67          | 822,31     | 801,09     | 927,72     | 934,51     |
| 1.5.2      | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B          | %      | 830,59          | 785,97     | 627,28     | 967,07     | 873,36     |
| 1.5.3      | Angka Partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C       | %      | 968,94          | 1.267,59   | 1.074,67   | 1149,93    | 1211,73    |
| <b>1,6</b> | <b>Angka Putus Sekolah :</b>                             |        |                 |            |            |            |            |
| 1.6.1      | Angka putus sekolah (APS) SD/MI                          | %      | 0,10            | 0,03       | 0,07       | 0,12       | 0,12       |
| 1.6.2      | Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs                        | %      | 1,01            | 0,16       | 0,24       | 0,29       | 0,04       |
| 1.6.3      | Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/ MA                    | %      | 0,25            | 0,21       | 0,18       | 0,23       | 0,09       |
| <b>1,7</b> | <b>Angka Kelulusan :</b>                                 |        |                 |            |            |            |            |
| 1.7.1      | Angka kelulusan (AL) SD/MI                               | %      | 100             | 100        | 100        | 94,57      | 96,87      |
| 1.7.2      | Angka kelulusan (AL) SMP/MTs                             | %      | 100             | 100        | 100        | 97,02      | 93,70      |
| 1.7.3      | Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA                          | %      | 100             | 100        | 100        | 109,70     | 107,98     |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO    | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                              | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                       |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1,8   | <b>Angka Melanjutkan (AM) :</b>                                                       |        |                 |            |            |            |            |
| 1.8.1 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                                          | %      | 138,01          | 108,46     | 105,89     | 97,53      | 96,70      |
| 1.8.2 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                                     | %      | 103,74          | 99,78      | 90,86      | 126,99     | 125,93     |
| 1,9   | Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik                                        | %      | 75,60           | 65,13      | 91,26      | 92,38      | 93,50      |
| 1.9.1 | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik                       | %      | 81,70           | 62,53      | 99,44      | 90,63      | 91,29      |
| 1.9.2 | Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar                    | %      | 52,39           | 51,94      | 53,34      | 53,71      | 51,51      |
| 1,10  | Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama | Angka  | 37,04           | 48,37      | 31,58      | 27,62      | 37,92      |
| 1,11  | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah         |        | 37,04           | 48,37      | 31,58      | 27,62      | 37,92      |
| 1,12  | Rasio Guru/murid sekolah pendidikan dasar                                             | Angka  | 608,57          | 613,94     | 854,15     | 518,25     | 809,22     |
| 1,13  | Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah                                         | Angka  | 810,11          | 793,94     | 1178,52    | 594,92     | 894,93     |
| 1,14  | Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Dasar                                 | Angka  | 60,86           | 61,39      | 82,22      | 44,50      | 45,25      |
| 1,15  | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah                     | Angka  | 810,11          | 793,94     | 1178,52    | 480,08     | 416,71     |

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah             | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1,16 | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar        | %      | 109,70          | 91,62      | 96,26      | 86,97      | 82,05      |
| 1,17 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 1,18 | Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)     | %      | 97,78           | 97,53      | 97,15      | 97,81      | 98,17      |
| 1,19 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                               | %      | 73,19           | 96,49      | 45,26      | 95,63      | 77,79      |
|      |                                                                      |        |                 |            |            |            |            |
| II   | KESEHATAN                                                            |        |                 |            |            |            |            |
| 2,1  | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                   | Orang  | 10,24           | 1,10       | 2,11       | 7,23       | 9,76       |
| 2,2  | Angka kelangsungan hidup bayi                                        | Orang  | 990             | 999        | 995        | 981        | 977        |
| 2,3  | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup                       | Orang  | 0,73            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2,4  | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup                     | Angka  | 7,68            | 6,61       | 1,69       | 5,33       | 8,49       |
| 2,5  | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup                       | Angka  | 146,31          | 146,79     | 73,39      | 228,31     | 212,31     |
| 2,6  | Rasio posyandu per satuan balita                                     | Angka  | 15,36           | 9,06       | 8,46       | 8,71       | 61,3       |
| 2,7  | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk               | Angka  | 0,22            | 0,25       | 0,29       | 0,26       | 0,29       |
| 2,8  | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk                                | Angka  | 0,03            | 0,03       | 0,03       | 0,03       | 0,03       |
| 2,9  | Rasio dokter per satuan penduduk                                     | Angka  | 1,00            | 0,90       | 1,10       | 1,60       | 4,50       |
| 2,10 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                               | Angka  | 7,38            | 6,72       | 9,13       | 9,9        | 1,02       |
| 2,11 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                          | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                           | Satuan                | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                    |                       | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 2,12 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan                                            | %                     | 95,04           | 94,51      | 76,60      | 86,50      | 87         |
| 2,13 | Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)                                                                   | %                     | 100             | 100        | 90,91      | 100        | 100        |
| 2,14 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                                                                                       | %                     | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,15 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | %                     | 71,20           | 72,85      | 70,90      | 70,70      | 60         |
| 2,16 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                                                               | %                     | 116,66          | 110,69     | 128,48     | 101,30     | 100        |
| 2,17 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk                                                                                            | Per 100.000 Penduduk  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,01       | 0,01       |
| 2,18 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani                                                                                            | %                     | 100,00          | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100        |
| 2,19 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                                                                         | %                     | 14,66           | 82,67      | 47,42      | 44,53      | 70,42      |
| 2,20 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                                                             | per 100.000 penduduk) | 1533,64         | 309,96     | 194,77     | 183,46     | 290,09     |
| 2,21 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                                                        | per 100.000 penduduk  | 8,35            | 12,39      | 9,90       | 6,44       | 3,65       |
| 2.22 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                                                              | %                     | 14,66           | 82,67      | 47,42      | 44,53      | 87         |
| 2,23 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                                                             | %                     | 79,88           | 87,63      | 28,47      | 90,17      | 87         |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                          | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                   |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 2,24 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                            | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,25 | Penderita diare yang ditangani                                                                    | %      | 30,39           | 31,64      | 100        | 100        | 100        |
| 2,26 | Angka kejadian Malaria                                                                            | Kasus  | 15,48           | 9,44       | 13,20      | 11         | 10         |
| 2,27 | Tingkat kematian akibat malaria                                                                   | %      | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2,28 | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida                                     | %      | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2,29 | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat                | %      | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2,30 | Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi                                                       | %      | 0,1970          | 0,2900     | 0,2244     | 0,20       | 0,35       |
| 2,31 | Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir                                     | %      | 75,00           | 74,99      | 74,55      | 74,70      | 75         |
| 2,32 | Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS | %      | 35,00           | 34,90      | 39,53      | 42         | 50         |
| 2,33 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin                                      | %      | 21              | 28         | 18         | 100        | 100        |
| 2,34 | Cakupan kunjungan bayi                                                                            | %      | 114,15          | 100        | 99,11      | 100        | 90         |
| 2,35 | Cakupan puskesmas                                                                                 | %      | 150             | 150        | 200        | 200        | 200        |
| 2,36 | Cakupan pembantu puskesmas                                                                        | %      | 136,36          | 136,36     | 136,36     | 95,45      | 95,45      |
| 2,37 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                                                                    | %      | 90,26           | 86,63      | 68,15      | 76,76      | 65,8       |
| 2,38 | Cakupan pelayanan nifas                                                                           | %      | 96,79           | 94,51      | 75,44      | 82,73      | 69,7       |
| 2,39 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                                 | %      | 68,54           | 56,20      | 56,28      | 100        | 90         |
| 2,40 | Cakupan pelayanan anak balita                                                                     | %      | 99,18           | 99,05      | 59,63      | 75,74      | 100        |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO    | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                   | Satuan  | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                            |         | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 2,41  | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin         | %       | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,42  | Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat                                      | %       | 99,98           | 99,97      | 25,50      | 26,2       | 100        |
| 2,43  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin                                        | %       | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,44  | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)         | %       | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,45  | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam     | %       | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|       |                                                                                            |         |                 |            |            |            |            |
| III   | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                                   |         |                 |            |            |            |            |
| 3,1   | <b>Pekerjaan Umum:</b>                                                                     |         |                 |            |            |            |            |
| 3.1.1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                         | %       | 57,65           | 60,45      | 62,5       | 78,65      | 83,17      |
| 3.1.2 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                 | Km/Jiwa | 2,12            | 2,1        | 1,75       | 1,76       | 1,9        |
| 3.1.4 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam )                               | %       | 57,65           | 60,45      | 62,5       | 78,65      | 83,17      |
| 3.1.5 | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | %       | 16,79           | 17,46      | 18,79      | 18,79      | 18,9       |



| NO     | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                           | Satuan    | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|        |                                                                                                    |           | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 3.1.6  | persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar                 | %         | 38              | 38         | 38         | 38         | 38         |
| 3.1.7  | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                                                               | %         | 90,68           | 90         | 93,35      | 93,76      | 88,81      |
| 3.1.8  | Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar                                              | %         | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3.1.9  | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat                       | %         | 85              | 86,46      | 86,87      | 87,10      | 104,29     |
| 3.1.10 | Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun                                                            | %         | 92,5            | 92,5       | 93         | 94,25      | 94,69      |
| 3.1.11 | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor           | %         | 47,9            | 47,9       | 52,5       | 80,00      | 80         |
| 3.1.12 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                                    | %         | 89,5            | 90,46      | 91,78      | 94,74      | 95,07      |
| 3.1.13 | Rasio Jaringan Irigasi                                                                             | M/Ha      | 17,27           | 17,27      | 26,84      | 26,84      | 26,84      |
| 3.1.14 | Persentase penduduk berakses air minum                                                             | %         | 84,29           | 87,56      | 96,87      | 97,90      | 97,97      |
| 3.1.15 | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan | %         | 92,50           | 93,50      | 97,14      | 98,17      | 98,22      |
| 3.1.16 | Persentase areal kawasan kumuh                                                                     | %         | 22,48           | 12,65      | 12,65      | 12,54      | -          |
| 3.1.17 | Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan                                              | %         | 13              | 13,50      | 14,50      | 14,51      | -          |
| 3.1.19 | Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk                                                            | Unit/Jiwa | 1,41            | 1,55       | 1,60       | 1,62       | -          |
| 3,2    | Penataan Ruang:                                                                                    |           |                 |            |            |            |            |

| NO        | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                     | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                              |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 3.2.3     | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan                                                                                  | %      | 47,9            | 50,7       | 70,88      | 74,18      | 59,66      |
| 3.2.4     | Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya                                                                                      | %      | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3.2.5     | Rasio Luas Kawasan Tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan |        | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.3.6     | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                                       | %      | 95              | 99,97      | 99,98      | 99,98      | 99,86      |
|           |                                                                                                                              |        |                 |            |            |            |            |
| <b>IV</b> | <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                               |        |                 |            |            |            |            |
| 4,1       | Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                       | %      | 0,253           | 0,253      | 0,220      | 0,230      | 0,24       |
| 4,2       | Rasio permukiman layak huni                                                                                                  | %      | 1.027           | 1.024      | 0,685      | 0,768      | 0,768      |
| 4,3       | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni                                                                                        | %      | 97,00           | 97,11      | 93,89      | 95,81      | 96,53      |
| 4,4       | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau                                                                             | %      | 53,47           | 55,01      | 40,07      | 85,18      | 82,70      |
| 4,6       | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh                                                                                        | %      | 10.043          | 1,71       | 3,63       | 0,02       | 2,68       |
| 4,7       | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan                                                                      | %      | 0,633           | 11.659     | 8,91       | 0,28       | 4,71       |
| 4,8       | Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan                                                                                        | %      | 3,33            | 2,82       | 15,78      | 7,29       | 12,72      |
| 4,9       | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU                                                              | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|           |                                                                                                                              |        |                 |            |            |            |            |
| <b>V</b>  | <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                                                             |        |                 |            |            |            |            |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO        | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                             | Satuan              | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                      |                     | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 5,1       | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                                                                                     | Per 10.000 penduduk | 0,88            | 2,06       | 2,01       | 25,09      | 32         |
| 5,2       | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)                                                                         | %                   | 91,04           | 92,94      | 98,20      | 100        | 100        |
| 5,3       | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota                                                                                                   | %                   | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 5,4       | Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)                                                 | %                   | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 5,5       | Persentase Penegakan PERDA                                                                                                                           | %                   | 92,16           | 93,87      | 96,33      | 99,2       | 100        |
|           |                                                                                                                                                      |                     |                 |            |            |            |            |
| <b>VI</b> | <b>SOSIAL</b>                                                                                                                                        |                     |                 |            |            |            |            |
| 6,1       | Pesentase PMKS Memperoleh Bantuan Sosial (%)                                                                                                         | %                   | 56,82           | 68,88      | 82,75      | 85,23      | 114,33     |
| 6,2       | Persentase PMKS yang Tertangani                                                                                                                      | %                   | 79,18           | 75,59      | 65,79      | 63,81      | 114,33     |
| 6,3       | Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar                                                                 | %                   | 79,18           | 75,59      | 65,79      | 63,81      | 116,63     |
| 6,4       | Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya | %                   | 11,00           | 11,00      | 11,00      | 11,00      | -          |
| 6,5       | Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial                                                                 | %                   | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO       | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                     |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 6,6      | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial | %      | 11,00           | 11,00      | 11,00      | 11,00      | 11         |
| 6,7      | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat                                                  | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 6,8      | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap                               | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 6,9      | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                  | %      | 31,22           | 20,09      | 31,32      | 32,1       | 32,1       |
|          |                                                                                                                                     |        |                 |            |            |            |            |
|          | <b>LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR</b>                                                                                               |        |                 |            |            |            |            |
| <b>I</b> | <b>TENAGA KERJA</b>                                                                                                                 |        |                 |            |            |            |            |
| 1,1      | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja                                                                                                    | %      | 27,48           | 16,81      | 15,18      | 21,00      | 13,00      |
| 1,2      | Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)                                                                      | %      | 71,43           | 88,89      | 88,89      | 90,91      | 61,50      |
| 1,3      | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan                                                                               | %      | 82,73           | 92,15      | 74,65      | 83,17      | 83,35      |
| 1,5      | Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK                                                                        | %      | 88,07           | 89,24      | 91,36      | 97,50      | 97,64      |
| 1,6      | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah                                                               | %      | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                      | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                               |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1,9  | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi                                                                                                           | %      | 86,47           | 87,53      | 62,34      | 78,05      | 79,82      |
| 1,10 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat                                                                                                           | %      | 78,69           | 89,77      | 85,71      | 77,33      | 79,78      |
| 1,12 | Rasio Lulusan S1/S2/S3                                                                                                                                                        | %      | 10,08           | 17,28      | 7,59       | 24,52      | 26,83      |
|      |                                                                                                                                                                               |        |                 |            |            |            |            |
| II   | <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                                                                                                           |        |                 |            |            |            |            |
| 2,1  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                                                                                                        | %      | 8,98            | 9,29       | 7,96       | 18,79      | 18,79      |
| 2,2  | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD                                                                                                                                | %      | 16              | 24         | 24         | 24         | 20         |
| 2,3  | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                                                                                                                                       | %      | 90,52           | 90,71      | 78,79      | 81,21      | 81,21      |
| 2,4  | Rasio KDRT                                                                                                                                                                    | %      | 0,12            | 0,13       | 0,18       | 0,18       | 0,045      |
| 2,5  | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur                                                                                                                                   | %      | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2,6  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                                                                                                                          | %      | 48,12           | 49,39      | 51,79      | 41,62      | 41,62      |
| 2,7  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,8  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                              | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                       |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 2,9  | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                               | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                                    | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                   | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                           | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2,14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                                                                                   | %      | 0,98            | 0,97       | 0,98       | 0,98       | 100        |
| 2,15 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                                                                                                                  | %      | 1,03            | 1,02       | 1,03       | 1.117      | 1.117      |
| 2,16 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA                                                                                                                                  | %      | 1,8             | 1,8        | 1,8        | 1.267      | 1.267      |
| 2,17 | Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi                                                                                                                     | %      | 1,14            | 1,13       | 1,13       | 2,05       | 1,13       |
|      |                                                                                                                                                                       |        |                 |            |            |            |            |
| 2,18 | Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 tahun                                                                                         | %      | 1,00            | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
| 2,19 | Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian                                                                                                   | %      | 40,64           | 40,66      | 40,69      | 42,54      | 42,54      |
|      |                                                                                                                                                                       |        |                 |            |            |            |            |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO         | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah             | Satuan        | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|            |                                                                      |               | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| <b>III</b> | <b>PANGAN</b>                                                        |               |                 |            |            |            |            |
| 3,1        | Ketersediaan pangan utama                                            | %             | 235,02          | 266,72     | 247,82     | 248,13     | 253,2      |
| 3,2        | Ketersediaan energi dan protein perkapita                            | %             | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 3          | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan | %             | 90              | 100        | 100        | 100        | 100        |
|            |                                                                      |               |                 |            |            |            |            |
| <b>IV</b>  | <b>PERTANAHAN</b>                                                    |               |                 |            |            |            |            |
|            | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi     |               | 1               | 1          | 1          | 5          | 3          |
|            | Persentase objek lahan Milik Pemda yang bersertifikat                | %             | 1.013           | 0,161      | 2.340      | 0,34       | 0,25       |
|            |                                                                      |               |                 |            |            |            |            |
| <b>V</b>   | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>                                              |               |                 |            |            |            |            |
| 5,26       | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota                                     | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada       | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 5,27       | Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota       | Ada/Tidak Ad  | Tidak Ada       | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 5,28       | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi            | Ada/Tidak Ad  | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 5,29       | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air                                 | %             | 92,06           | 95,2       | 96         | 96,85      | 96,4       |
| 5,30       | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara                               | %             | 66,67           | 95         | 95         | 89,85      | 90         |
|            |                                                                      |               |                 |            |            |            |            |
| 5,31       | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan                       | %             | 51,38           | 51,38      | 51,38      | 51,38      | 63,79      |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                             | Satuan        | Capaian Kinerja |             |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                      |               | Tahun 2018      | Tahun 2019  | Tahun 2020  | Tahun 2021  | Tahun 2022  |
| 5,32 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannyat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | %             | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 5,33 | Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota                                                                                                     | Ada/Tidak Ada | Tidak ada       | Tidak ada   | Tidak ada   | Ada         | Ada         |
| 5,34 | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA                                                                                                                                                                             | %             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Tidak Ada   |
| 5,36 | Terverifikasi Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional                                                                                                                                                    | %             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Tidak Ada   |
| 5,37 | Penetapan Hak MHA                                                                                                                                                                                                    | %             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Tidak Ada   |
| 5,38 | Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan                                                                                                                                                      | %             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Tidak Ada   |
| 5,39 | Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana                                                                                                                                                                            | %             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Tidak Ada   |
| 5,40 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat                                                                                                                                                                    | Angka         | 1 Pelatihan     | 1 Pelatihan | 1 Pelatihan | 1 Pelatihan | 1 Pelatihan |
| 5,41 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                 | Ada/Tidak Ada | Ada             | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         |
| 5,42 | Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota                                       | Kasus         | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |



|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO        | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                  | Satuan        | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                           |               | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 5,43      | Timbulan Sampah yang Ditangani                                                            | %             | 90,91           | 100        | 97         | 98         | 99         |
| 5,44      | Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya Melalui 3R                                     | %             | 18              | 20         | 22         | 24         | 26         |
| 5,45      | Persentase Cakupan Area Pelayanan                                                         | %             | 86,78           | 86,78      | 89,00      | 91         | 93         |
| 5,46      | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani                                                  | %             | 73,00           | 80,00      | 75,00      | 74         | 73         |
| 5,47      | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota                                           | %             | 75,00           | 75,00      | 75,00      | 73,00      | 75         |
| 5,48      | Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan                           | %             | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 5,49      | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | %             | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|           |                                                                                           |               |                 |            |            |            |            |
| <b>VI</b> | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                     |               |                 |            |            |            |            |
| 6,1       | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk                                                | Angka         | 0,97            | 0,99       | 0,99       | 0,99       | 0,99       |
| 6,2       | Rasio bayi berakte kelahiran                                                              | Angka         | 0,99            | 0,99       | 0,99       | 1,00       | 1,00       |
| 6,3       | Rasio pasangan berakte nikah                                                              | Angka         | 0,81            | 0,80       | 0,82       | 0,81       | 0,74       |
| 6,4       | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi                                         | Ada/Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 6,5       | Penerapan KTP Nasional berbais NIK                                                        | Sudah/Belum   | Sudah           | Sudah      | Sudah      | Sudah      | Sudah      |
| 6,6       | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                                             | %             | 97, 04          | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 6,7       | Cakupan penerbitan akta kelahiran                                                         | %             | 98,62           | 100        | 100        | 100        | 100        |

| NO  | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah               | Satuan | Capaian Kinerja |             |             |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                        |        | Tahun 2018      | Tahun 2019  | Tahun 2020  | Tahun 2021  | Tahun 2022  |
|     |                                                                        |        |                 |             |             |             |             |
| VII | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                       |        |                 |             |             |             |             |
| 7,1 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik       | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | Kecamatan Bacukiki                                                     | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | Kecamatan Bacukiki Barat                                               | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | Kecamatan Soreang                                                      | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | Kecamatan Ujung                                                        | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 7,2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | %      | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | Kecamatan Bacukiki                                                     |        | 0 Kelompok      | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  |
|     | Kecamatan Bacukiki Barat                                               |        | 0 Kelompok      | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  |
|     | Kecamatan Soreang                                                      |        | 0 Kelompok      | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  |
|     | Kecamatan Ujung                                                        |        | 0 Kelompok      | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  | 0 Kelompok  |
| 7,3 | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK                                   |        |                 |             |             |             |             |
|     | Kecamatan Bacukiki                                                     |        | 26 Kelompok     | 26 Kelompok | 26 Kelompok | 26 Kelompok | 26 Kelompok |
|     | Kecamatan Bacukiki Barat                                               |        | 7 Kelompok      | 7 Kelompok  | 7 Kelompok  | 7 Kelompok  | 7 Kelompok  |
|     | Kecamatan Soreang                                                      |        | 28 Kelompok     | 28 Kelompok | 28 Kelompok | 28 Kelompok | 28 Kelompok |
|     | Kecamatan Ujung                                                        |        | 19 Kelompok     | 19 Kelompok | 19 Kelompok | 19 Kelompok | 16 Kelompok |
| 7,6 | Persentase PKK Aktif                                                   | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | Kecamatan Bacukiki                                                     | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | Kecamatan Bacukiki Barat                                               | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | Kecamatan Soreang                                                      | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | Kecamatan Ujung                                                        | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 7,7 | Persentase Posyandu Aktif                                              | %      | 100             | 100         | 100         | 100         | 100         |

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                            | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                     |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|      | Kecamatan Bacukiki                                                                                                                                  | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | Kecamatan Bacukiki Barat                                                                                                                            | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | Kecamatan Soreang                                                                                                                                   | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | Kecamatan Ujung                                                                                                                                     | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      |                                                                                                                                                     |        |                 |            |            |            |            |
| VIII | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                                                                                 |        |                 |            |            |            |            |
| 8,1  | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)                                                                                                                     | %      | 1,29            | 1,12       | 1,55       | 1,55       | 1,26       |
| 8,2  | Total Fertility Rate (TFR)                                                                                                                          | %      | 2,40            | 2,19       | 2,19       | 2,19       | 2,35       |
| 8,3  | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB                                           | %      | 30,00           | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 40,00      |
| 8,4  | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                                      | %      | 0,00            | 6,06       | 6,06       | 12,00      | 15,92      |
| 8,5  | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                      | Jumlah | 0               | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 8,6  | Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan | Jumlah | 1               | 1          | 1          | 1          | 5          |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                            | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                     |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 8,7  | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan |        | 2               | 30         | 38         | 38         | 38         |
| 8,8  | Rata-rata jumlah anak per keluarga                                                                                  | Angka  | 2               | 2          | 2          | 3,52       | 3          |
| 8,9  | Ratio Akseptor KB                                                                                                   | %      | 63,40           | 63,97      | 66,30      | 67         | 62,97      |
| 8,10 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49                                                 | Angka  | 12,091          | 12,356     | 12,752     | 13,022     | 12,185     |
| 8,11 | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15 19 Tahun (ASFR 15–19)                     | Angka  | 27,3            | 17,38      | 17,38      | 17,38      | 20         |
| 8,12 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)                                                | %      | 0,93            | 0,39       | 0,39       | 0,39       | 0,31       |
| 8,13 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                          | %      | 14,03           | 10,64      | 12,49      | 10,81      | 15,41      |
| 8,14 | persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                             | %      | 29,46           | 31,44      | 33,86      | 35,75      | 36,08      |
| 8,15 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                            | %      | 63,40           | 63,97      | 50,82      | 50,82      | 48,09      |
| 8,16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                   | %      | 69,12           | 80,50      | 62,19      | 83,36      | 81,67      |
| 8,17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                   | %      | 73,11           | 76,50      | 56,58      | 84,28      | 83,80      |
| 8,18 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                   | %      | 72              | 73         | 51         | 73         | 78,12      |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                        | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                 |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 8,19 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan                                                                                                   | %      | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8,20 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                                             | %      | 1450            | 1475       | 950        | 950        | 855        |
| 8,21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk                    | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 8,22 | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri                                                      | %      | 81              | 79         | 57         | 77         | 72,44      |
| 8,23 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                                            | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 8,24 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                              | %      | 70              | 71         | 100        | 100        | 100        |
| 8,25 | persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | %      | 100             | 100        | 100        | 93         | 100        |
| 8,26 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                                                                 | %      | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 8,27 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)                                                                                                    | %      | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO        | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                    | Satuan           | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                             |                  | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 8,28      | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                       | %                | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 8,29      | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | %                | 47,60           | 37,46      | 100        | 62,37      | 54,64      |
| 8,30      | Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                         | Tahun            | 21              | 20         | 20         | 21         | 21         |
| 8,31      | Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes               | %                | 0,636           | 0,643      | 0,783      | 0,56       | 0,54       |
|           |                                                                                                                             |                  |                 |            |            |            |            |
| <b>IX</b> | <b>PERHUBUNGAN</b>                                                                                                          |                  |                 |            |            |            |            |
| 9,1       | Jumlah arus penumpang angkutan umum                                                                                         | Juta Orang       | 2.969.027       | 3.265.930  | 2.523.264  | 610.770    | 114,652    |
| 9,2       | Rasio Ijin Trayek                                                                                                           | Angka            | -               | 0,00017    | 0,0005     | 0,0001     | 0          |
| 9,3       | Jumlah uji kir angkutan umum                                                                                                | Jumlah pengujian | 400             | 55         | 180        | 58         | 878        |
| 9,4       | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                                                                                    | Jumlah Pelabuhan | 6 = 3/0/3       | 6 = 3/0/3  | 6 = 3/0/3  | 6 = 3/0/3  | 6          |
| 9,5       | Persentase layanan angkutan darat                                                                                           | %                | 60,00           | 70,00      | 65,00      | 34,00      | 36         |
| 9,6       | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                                                                                    | %                | 27              | 27         | 30         | 47         | 58         |
| 9,7       | Pemasangan Rambu- rambu                                                                                                     | %                | 100             | 93         | 23         | 43         | 24         |
| 9,8       | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan                                                                                    | Km/Kendaraan     | 0,061           | 0,0102     | 0,0083     | 0,0775     | 0,0148     |
| 9,9       | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum                                                                           | Ton              | 2.375.222       | 2.823.583  | 3.592.523  | 1.383.813  | 1.995.924  |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO         | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                 | Satuan    | Capaian Kinerja |                 |                 |                 |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                          |           | Tahun 2018      | Tahun 2019      | Tahun 2020      | Tahun 2021      | Tahun 2022      |
| 9,10       | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun                           | Ton       | 2.375.222       | 2.823.583       | 3.592.523       | 1.383.813       | 1.995.924       |
|            |                                                                                          |           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>X</b>   | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                        |           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10,1       | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | %         | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 10,2       | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                                           | %         | 79,08           | 79,08           | 79,08           | 79,08           | 87,15           |
| 10,3       | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon                                          | %         | 72,98           | 88,71           | 91,94           | 94,34           | 91,8            |
| 10,4       | Proporsi rumah tangga dengan akses internet                                              | %         | 50,48           | 60,12           | 65,53           | 78,17           | 81,06           |
| 10,5       | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi                                     | %         | 14,53           | 28,59           | 16,43           | 16,46           | 30,81           |
|            |                                                                                          |           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>XI</b>  | <b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>                                               |           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11,1       | Persentase koperasi aktif                                                                | %         | 58,18           | 55,91           | 56,16           | 56,36           | 56,56           |
| 11,2       | Persentase UKM non BPR/LMK aktif                                                         | Unit      | 19,578          | 20,181          | 21              | 31              | 25              |
| 11,4       | Persentase Usaha Mikro dan Kecil                                                         | %         | 85,18           | 85,18           | 86,32           | 99,45           | 100             |
|            |                                                                                          |           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>XII</b> | <b>PENANAMAN MODAL</b>                                                                   |           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12,1       | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)                                             | Proyek    | 181             | 409             | 138             | 239             | 893             |
| 12,2       | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)                                      | Milyar Rp | 250.419.695.675 | 327.808.252.544 | 173.271.179.428 | 174.818.305.412 | 920.764.678.693 |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO          | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                   | Satuan        | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|             |                                                                                            |               | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 12,3        | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja                                                              | Orang/Proyek  | 3,34            | 4,00       | 3,00       | 3,00       | 5,30       |
| 12,4        | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)                                    | Milyar Rp     | 36,66           | 30,00      | -47,14     | 0,89       | 426,70     |
|             |                                                                                            |               |                 |            |            |            |            |
| <b>xiii</b> | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>                                                            |               |                 |            |            |            |            |
| 13,1        | persentase organisasi pemuda yang aktif                                                    | %             | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 13,2        | persentase wirausaha muda                                                                  | %             | 0               | 10,2       | 10,1       | 7,77       | 7,15       |
|             | Jumlah Wirausaha Muda                                                                      |               | N/A             | 1,28       | 1,297      | 979        | 1,375      |
| 13,3        | Cakupan pembinaan olahraga                                                                 | %             | 62,07           | 62,07      | 68,97      | 68,97      | 33         |
| 13,4        | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                                                        | %             | 29              | 81,25      | 92,31      | 89,13      | 93,66      |
| 13,5        | Cakupan pembinaan atlet muda                                                               | %             | 48,17           | 53,79      | 62,28      | 99,10      | 231        |
| 13,6        | Jumlah atlet berprestasi                                                                   | Atlet         | 19              | 36         | 26         | 54         | 77         |
| 13,7        | Jumlah prestasi olahraga                                                                   | Medali        | 3               | 2          | 3          | 52         | 77         |
|             |                                                                                            |               |                 |            |            |            |            |
| <b>xiv</b>  | <b>STATISTIK</b>                                                                           |               |                 |            |            |            |            |
| 14,1        | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                                    | Ada/Tidak Ada | Tidak           | Tidak      | Tidak      | Ada        | Ada        |
| 14,2        | Buku "kabupaten dalam angka"                                                               | Ada/Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 14,3        | Buku "PDRB"                                                                                | Ada/Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
|             | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah |               | 87,88           | 87,88      | 87,88      | 87,88      | 87,88      |
|             |                                                                                            |               |                 |            |            |            |            |
| <b>xv</b>   | <b>PERSANDIAN</b>                                                                          |               |                 |            |            |            |            |



|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO           | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                   | Satuan    | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                                                                                            |           | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 15,1         | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | %         | 87,88           | 87,88      | 87,88      | 87,88      | 87,88      |
|              |                                                                                            |           |                 |            |            |            |            |
| <b>XVI</b>   | <b>KEBUDAYAAN</b>                                                                          |           |                 |            |            |            |            |
| 16,1         | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                   | Kali      | 1               | 2          | 1          | 1          | 2          |
| 16,2         | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                    | Buah      | 41              | 41         | 41         | 41         | 41         |
| 16,3         | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                  | Buah      | 41              | 41         | 41         | 41         | 41         |
|              |                                                                                            |           |                 |            |            |            |            |
| <b>XVII</b>  | <b>PERPUSTAKAAN</b>                                                                        |           |                 |            |            |            |            |
| 17,1         | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                                                   | Orang     | 43,719          | 48,723     | 9,943      | 19,169     | 31,806     |
| 17,2         | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                                          | Exp       | 34,221          | 36,021     | 40,440     | 42,429     | 43,929     |
| 17,3         | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                                                      | Unit/Jiwa | 1,14            | 1,17       | 1,35       | 1,28       | 0,98       |
| 17,4         | Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun                                             | Orang     | 140             | 156        | 30         | 61         | 87         |
| 17,5         | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                                     | Exp       | 11,435          | 12,035     | 12,859     | 13,184     | 13,934     |
| 17,6         | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat                     | Orang     | -               | 2          | 2          | 5          | 5          |
|              |                                                                                            |           |                 |            |            |            |            |
| <b>XVIII</b> | <b>KEARSIPAN</b>                                                                           |           |                 |            |            |            |            |
| 18,1         | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku                               | %         | 3,03            | 14,71      | 17,65      | 20,59      | 36,36      |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO         | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah            | Satuan | Capaian Kinerja |               |               |               |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                     |        | Tahun 2018      | Tahun 2019    | Tahun 2020    | Tahun 2021    | Tahun 2022           |
| 18,2       | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                 | Orang  | 1               | 2             | 7             | 7             | 7                    |
|            |                                                                     |        |                 |               |               |               |                      |
|            | <b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>                                       |        |                 |               |               |               |                      |
| <b>I</b>   | <b>PARIWISATA</b>                                                   |        |                 |               |               |               |                      |
| 1,1        | Kunjungan wisata                                                    | %      | 99,83           | 100,17        | 5,14          | 1183          | 1016                 |
| 1,2        | Lama kunjungan Wisata                                               | Hari   | 2,8             | 1,85          | 1,6           | 1,99          | 3,05                 |
| 1,3        | PAD sektor pariwisata (juta Rupiah)                                 | Rupiah | 4.308.399.697   | 6.991.692.757 | 6.804.096.854 | 6.545.917.904 | 8.879.650.847        |
|            |                                                                     |        |                 |               |               |               |                      |
|            |                                                                     |        |                 |               |               |               |                      |
| <b>II</b>  | <b>PERTANIAN</b>                                                    |        |                 |               |               |               |                      |
| 2,1        | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB                | %      | 1,06            | 0,59          | 0,01          | 1,31          | 0,99                 |
| 2,2        | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB                | %      | 5,90            | 30,91         | 1,11          | 15,19         | 36,77                |
| 2,3        | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB          | %      | 0,08            | 1,00          | 0,01          | 0,15          | 5,61                 |
| 2,4        | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB                   | %      | 46,37           | 46,37         | 53,17         | 32,61         | 28,35                |
| 2,5        | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Ton    | 5,50            | 5,50          | 3,46          | 5,59          | 5,93                 |
| 2,6        | Cakupan bina kelompok petani                                        | %      | 27,27           | 27,27         | 16,33         | 7,69          | 41,96                |
| <b>III</b> | <b>KEHUTANAN</b>                                                    |        |                 |               |               |               |                      |
| 3,1        | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis                                 | %      | 18,18           | 24,24         | 30,00         | 30,07         | Bukan kewenangan DLH |

| NO          | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                     | Satuan        | Capaian Kinerja |            |            |            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|
|             |                                                                                                              |               | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022           |
| 3,2         | Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                      | %             | 0,32            | 0,32       | 0,32       | 0,32       | Bukan kewenangan DLH |
| 3,3         | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | %             | 0,67            | 0,67       | 0,67       | 0,67       | Bukan kewenangan DLH |
|             |                                                                                                              |               |                 |            |            |            |                      |
|             |                                                                                                              |               |                 |            |            |            |                      |
| <b>V</b>    | <b>PERDAGANGAN</b>                                                                                           |               |                 |            |            |            |                      |
| 5,1         | Ekspor bersih perdagangan                                                                                    | Milyar Rupiah | -365,824        | -405,086   | -372,367   | -750,226   | 0                    |
| 5,2         | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal                                                                | %             | 12,70           | 11,20      | 11,99      | 12,3       | 22,5                 |
| <b>VI</b>   | <b>PERINDUSTRIAN</b>                                                                                         |               |                 |            |            |            |                      |
| 6,1         | Cakupan bina kelompok pengrajin                                                                              | %             | 0,83            | 13,19      | 10,38      | 6,50       | 21,41                |
|             |                                                                                                              |               |                 |            |            |            |                      |
| <b>VIII</b> | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                |               |                 |            |            |            |                      |
| 8,1         | Produksi perikanan                                                                                           | %             | 131,12          | 131,12     | 132,66     | 132,75     | 132,28               |
| 82          | Konsumsi ikan                                                                                                | %             | 94,11           | 94,77      | 59,71      | 89,43      | 89,00                |
| 8,3         | Cakupan bina kelompok nelayan                                                                                | %             | 12,19           | 18,80      | 20,87      | 12,5       | 15,82                |
| 8,4         | Produksi perikanan kelompok nelayan                                                                          | %             | 79,71           | 55,07      | 75,41      | 59,74      | 61,65                |
| 8,7         | Nilai tukar nelayan                                                                                          | %             | 104,67          | 104,67     | 99,46      | 104,18     | 104,19               |
|             |                                                                                                              |               |                 |            |            |            |                      |
|             | <b>PENUNJANG URUSAN</b>                                                                                      |               |                 |            |            |            |                      |
| <b>I</b>    | <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>                                                                               |               |                 |            |            |            |                      |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO        | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                           | Satuan        | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                    |               | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1,1       | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada/Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 1,2       | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 1,3       | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada/Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 1,4       | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Ada/Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 1,5       | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                  | %             | 98,08           | 99,53      | 97,85      | 97,70      | 50,29      |
| 1,6       | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD                                   | %             | 96,45           | 99,53      | 98,11      | 100        | 100        |
| 1,7       | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW                                         | %             | 95,00           | 99,97      | 99,89      | 99,89      | 100        |
|           |                                                                                    |               |                 |            |            |            |            |
| <b>II</b> | <b>KEUANGAN</b>                                                                    |               |                 |            |            |            |            |
| 2,1       | Opini BPK terhadap laporan keuangan                                                | Hasil Opini   | WDP             | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        |
| 2,3       | Persentase SILPA terhadap APBD                                                     | %             | 2,77            | 5,58       | 4,62       | 1,97       | 1,85       |
| 2,4       | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana                                  | %             | 1,77            | 0,00       | 1,05       | 2,37       | 2,34       |
| 2,5       | Persentase belanja pendidikan (20 %)                                               | %             | 23,06           | 4,16       | 5,04       | 20,41      | 20,28      |
| 2,6       | Persentase belanja kesehatan (10 %)                                                | %             | 8,99            | 26,29      | 24,16      | 27,43      | 29,49      |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO  | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                        | Satuan                            | Capaian Kinerja |                 |                 |                 |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                 |                                   | Tahun 2018      | Tahun 2019      | Tahun 2020      | Tahun 2021      | Tahun 2022      |
| 2,7 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung              | Rasio                             | 53,16% : 42,65% | 59,89% : 33,44% | 55,63% : 38,85% | 62.39% : 35.33% | 59.79% : 41.15% |
| 2,8 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa                                              | %                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2,9 | Penetapan APBD                                                                  | Tepat Waktu/<br>Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu     | Tepat Waktu     | Tepat Waktu     | Tepat Waktu     | Tepat Waktu     |
|     |                                                                                 |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| III | <b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                               |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3,1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP)                | Jp/Tahun                          | 45              | 45              | 45              | 27              | 27              |
| 3,2 | persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                   | %                                 | 3,69            | 1,42            | 3,14            | 0,66            | 2,72            |
| 3,3 | persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | %                                 | 0,44            | 8,89            | 0,74            | 0,68            | 0               |
| 3,4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                         | Jabatan                           | 34              | 34              | 34              | 35              | 35              |
| 3,5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah                            | Jabatan                           | 1,598           | 1,598           | 1,598           | 1,398           | 1,335           |
| 3,6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah            | Orang                             | 2,123           | 2,054           | 1,975           | 2,228           | 2,246           |
|     |                                                                                 |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| IV  | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                              |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4,1 | persentase implementasi rencana kelitbangan                                     | %                                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 4,2 | persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                                        | %                                 | 10              | 20              | 20              | 25              | 25              |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| NO        | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                    | Satuan         | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|           | Penerapan SIDA :                                                                                                                                                                                                            | %              | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 4,3       | persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                                                                                                                                                | %              | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |            |            |            |            |
| <b>V</b>  | <b>PENGAWASAN</b>                                                                                                                                                                                                           |                |                 |            |            |            |            |
| 5,1       | Persentase tindak lanjut temuan                                                                                                                                                                                             | %              | 79,39           | 59,55      | 61,34      | 50,53      | 51,00      |
| 5,2       | persentase pelanggaran pegawai                                                                                                                                                                                              | %              | 1,35            | 0,21       | 0,85       | 0,41       | 0,44       |
| 5,3       | Jumlah temuan BPK                                                                                                                                                                                                           | Kasus          | 18              | 16         | 12         | 13         | 9          |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |            |            |            |            |
| <b>VI</b> | <b>SEKRETARIAT DEWAN</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                 |            |            |            |            |
| 6,1       | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota                                                                                                                                  | Ada/ Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 6,2       | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/ Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
| 6,3       | Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD                                                       | Ada/ Tidak Ada | Ada             | Ada        | Ada        | Ada        | Ada        |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |            |            |            |            |

| NO   | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                     | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                              |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| VII  | SEKRETARIAT DAERAH KOTA                                                      |        |                 |            |            |            |            |
|      | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran                                |        | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan                                  |        | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | Persentase Peningkatan pelayanan adminitrasi kepegawaian                     |        | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | Cakupan fasilitasi penataan standarisasi tatalaksana lingkup Pemkot Parepare |        | 33              | 33         | 33         | 33         | 33         |
|      | Cakupan Pembinaan Sakip                                                      |        | 33              | 33         | 33         | 33         | 33         |
|      | Persentase Penyelenggaraan Keprotokoleran                                    |        | 100             | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      |                                                                              |        |                 |            |            |            |            |
| VIII | KEBANGSANAAN DAN POLITIK                                                     |        |                 |            |            |            |            |
|      | Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan          | %      |                 | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | Persentase masyarakat yang mendapat pendidikan politik                       | %      |                 | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | Persentase cakupan organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi   | %      |                 | 100        | 100        | 100        | 100        |
|      | persentase penurunan penyalahgunaan narkoba                                  | %      |                 | 20         | 20         | 20         | 20         |
|      | persentase wilayah Kota Parepare berpotensi konflik agama yang ditangani     | %      |                 | 100        | 100        | 100        | 100        |

| NO | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah             | Satuan | Capaian Kinerja |            |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                      |        | Tahun 2018      | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|    | persentase penurunan jumlah potensi konflik di lingkungan masyarakat | %      |                 | 100        | 100        | 100        | 100        |
|    | persentase angka kriminalitas per 10.000 penduduk                    |        |                 | 41,01      | 32,35      | 34,2       | 34,17      |



2.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- 2.2.1. Bidang Urusan Pendidikan
- 2.2.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.302.  
Pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                      | Target Nasional | Capaian SPM |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                |                 | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini | 100%            | 65,27%      | 65,78% | 78,14% | 64,75% | 79,69% |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

Persentase warga negara usia 5-6 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini di Kota Parepare belum mencapai 100%. Dengan capaian angka 65,27% pada tahun 2018. Tahun 2019, meningkat kembali menjadi 65,78%. Pada tahun 2020 persentasenya mengalami peningkatan menjadi 78,14%. Tahun 2021 angka persentase menunjukkan nilai sebesar 64,75 persen, terjadi penurunan nilai yang salahsatu penyebab penurunannya adalah orangtua yang tidka mendaftarkan anaknya ke sekolah sebagai akibat pandemic Covid-19. Tahun 2022 mengikat menjadi 79,69%.

2.2.1.2 Pendidikan Dasar

Persentase warga negara usia 7-15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar di Kota Parepare cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami penurunan masing-masing 97,38% dan 93,32%. Sedangkan pada tahun 2020 persentasenya kembali turun menjadi 85,94%. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 92,64 persen. Data rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional merupakan pengganti ujian nasional yang penilaiannya dimulai pada tahun 2020 sehingga untuk data tahun sebelumnya belum terdapat data capaian. Di tahun 2021 capaian rata-rata hasil assesmen nasional adalah 1,61.

Tabel 2.303.  
Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                             | Target Nasional                         | Capaian SPM |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                       |                                         | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase warga negara usia 7 -15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar | 100%                                    | 97,38%      | 93,32% | 85,94% | 92,64% | 99,12% |
| Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional   | Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya | N/A         | N/A    | N/A    | 1,61   | 3,77   |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.1.3 Pendidikan Kesenjangan

Persentase warga negara usia 7-18 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan di Kota Parepare belum mencapai target nasional. Capaian sebesar 64,28% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kembali meningkat menjadi 68,79%. Pada tahun 2020 persentase kembali turun menjadi 61,21%. Tahun 2021 meningkat signifikan menjadi 81,71 persen. Data Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional yang penilaiannya dimulai pada tahun 2020 sehingga untuk data tahun sebelumnya belum terdapat data capaian. Hingga tahun 2021 belum dilakukan assesmen.

Tabel 2.304.  
Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                                                                       | Target Nasional                         | Capaian SPM |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                 |                                         | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase warga negara usia 7-18 tahun untuk menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam, Pendidikan kesetaraan | 100%                                    | 64,28%      | 68,79% | 61,21% | 81,71% | 96,56% |
| Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen nasional                                                             | Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya | N/A         | N/A    | N/A    | N/A    |        |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2. Bidang Urusan Kesehatan  
2.2.2.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, hal ini terlihat dari presentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 mencapai 90,26%, kemudian berkurang pada tahun 2019 menjadi 84,77%. Sedangkan Pada Tahun 2020 kembali turun menjadi 68,16%, persentase yang jauh dari target nasional yaitu 100%. Tahun 2021 persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan meningkat hingga angka 87,62 persen dari capaian tahun sebelumnya yang hanya 68,16 persen.

Tabel 2.305.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-----------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|           |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|                                                         |      |        |        |        |        |       |
|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 90,26% | 84,77% | 68,16% | 87,62% | 97,07 |
|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Untuk Pelayanan kesehatan Ibu bersalin, tahun 2018, meningkat menjadi 94,59% dan tahun 2019 berkurang menjadi 89,78%. Sedangkan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 76,60%, angka yang cukup tinggi ini masih dibawah standar nasional yang menargetkan 100%. Tahun 2021, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 86,50 persen untuk pelayanan ibu bersalin.

Tabel 2.306.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                  | Target Nasional | Capaian SPM |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                            |                 | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%            | 94,59%      | 89,78% | 76,60% | 86,50% | 87,35% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi, namun masih di bawah target nasional yaitu 100%. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 99,52% dan tahun 2019 menjadi 92,81%. Pada tahun 2020 persentasenya kembali turun menjadi 81,28%. Tahun 2021 untuk persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 90,66 merupakan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun dasar 2017 yang hanya mencapai 59,67 persen.

Tabel 2.307.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                     | Target Nasional | Capaian SPM |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                               |                 | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%            | 99,52%      | 92,81% | 81,28% | 90,66% | 91,53% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.4. Pelayanan Kesehatan Balita

Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah tahun 2018 mencapai 50,15%, dan kemudian berkurang pada tahun 2019 menjadi 37,76%. Sedangkan pada tahun 2020 capaian SPM meningkat menjadi 59,64%. Angka ini masih jauh dari target nasional yang mengharapkan capaian 100%. Yang kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 79,58 persen.

Tabel 2.308.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                            | Target Nasional | Capaian SPM |        |        |        |      |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|------|
|                                                      |                 | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
| Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%            | 50,15%      | 37,76% | 59,64% | 79,58% | 100% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan cenderung mengalami penurunan. selama 2 (dua) tahun berturut-turut berkurang 16,74% pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 12,74%. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 4,85%. Tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan yang hingga mencapai angka 97,94 persen untuk persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.309.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                        | Target Nasional | Capaian SPM |        |       |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
|                                                                                  |                 | 2018        | 2019   | 2020  | 2021   | 2022   |
| Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%            | 16,74%      | 12,74% | 4,85% | 97,94% | 61,79% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan pada 2018 meningkat menjadi 6,98% dan pada tahun 2019 mencapai 10,20%. Untuk tahun 2020 persentase capaian di angka 4,13%. Angka ini masih sangat jauh tertinggal dari target yang ditetapkan dalam SDG’s. Yang terjadi di tahun 2021, capaian Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan menunjukkan stagnansi pada angka 4,13 persen.

Tabel 2.310.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                 | Target Nasional | Capaian SPM |        |       |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------|-------|--------|
|                                                                           |                 | 2018        | 2019   | 2020  | 2021  | 2022   |
| Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%            | 6,98%       | 10,20% | 4,13% | 4,13% | 24,32% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, meskipun masih di bawah target nasional yaitu

100%. Capaian tahun 2018 meningkat menjadi 42,31%, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 83,0% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 persentase kembali meningkat menjadi 98,29%, persentase yang hampir mencapai target nasional. Tahun 2021 terjadi penurunan pada angka 82,28 persen.

Tabel 2.311.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                              | Target Nasional | Capaian SPM |      |        |        |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|--------|--------|------|
|                                                                        |                 | 2018        | 2019 | 2020   | 2021   | 2022 |
| Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%            | 42,31%      | 83%  | 98,29% | 82,28% | 100% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan di Kota Parepare masih jauh dari target yang ditetapkan secara nasional, yaitu 100%. Tahun 2018 menjadi 15,76%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12,55%. Sedangkan pada tahun 2020 persentase meningkat menjadi 17,42%, persentase yang masih sangat jauh dari target nasional. Tahun 2021 adalah tahun dengan awal pencapaian 100 persen untuk pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di Kota Parepare. Peningkatan yang sangat drastic dan signifikan.

Tabel 2.312.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                       | Target Nasional | Capaian SPM |        |        |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|------|--------|
|                                                                                 |                 | 2018        | 2019   | 2020   | 2021 | 2022   |
| Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 %           | 15,76%      | 12,55% | 17,42% | 100% | 22,06% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan berfluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 98,45%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 60,12%. Pada tahun 2020 persentase capaian meningkat signifikan menjadi 113,40% dan melampaui target nasional. Tahun 2021, terjadi penurunan namun berada pada angka yang baik yaitu 100 persen untuk

capaian Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.313.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                              | Target Nasional | Capaian SPM |        |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|---------|------|------|
|                                                                                        |                 | 2018        | 2019   | 2020    | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 %           | 98,45%      | 60,12% | 113,40% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan pada tahun 2018 menjadi 82,87%. Pada tahun 2019 sempat mencapai target nasional yaitu 100%, namun pada tahun 2020 persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatannya turun menjadi 98,53%. Dan tahun 2021 menjadi 100 persen.

Tabel 2.314.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                   | Target Nasional | Capaian SPM |      |        |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|--------|------|--------|
|                                                                             |                 | 2018        | 2019 | 2020   | 2021 | 2022   |
| Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 100%            | 82,87%      | 100% | 98,53% | 100% | 67,23% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sepanjang Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Tahun 2018 meningkat menjadi 81,05% dan tahun 2019 meningkat kembali menjadi 103,20% melampaui target nasional (diatas 100%) yang berarti terdapat penderita dari laur daerah yang juga dilayani di Kota Parepare. Tahun 2020 persentase Capaian telah mencapai target nasional yaitu 100%. Di tahun 2021 menjadi 99,93 persen untuk capaian pelayanan kesehatan pada orang yang terduga tuberkulosis di Parepare.

Tabel 2.315.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-----------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|           |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |



|                                                                                 |      |        |         |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|--------|--------|
| Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 81,05% | 103,20% | 100% | 99,93% | 79,72% |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|--------|--------|

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.2.12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan sangat rendah. Tahun 2018 menjadi 9,09%, dan berkurang pada tahun 2019 menjadi 7,64%, kemudian pada tahun 2020 persentase capaian meningkat secara signifikan menjadi 85,55%. Tahun 2021, meningkat ke angka 100 persen dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Tabel 2.316.

Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                                                                | Target Nasional | Capaian SPM |       |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|--------|------|------|
|                                                                                                                                          |                 | 2018        | 2019  | 2020   | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%            | 9,09%       | 7,64% | 85,55% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

2.2.3.1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum untuk itu Pemerintah Kota Parepare menempatkan pemenuhan air bersih bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan. Jumlah penduduk Kota Parepare pada tahun 2018 mencapai 143.710 jiwa dan 118.841 jiwa diantaranya dapat mengakses air bersih sehingga capaiannya meningkat menjadi 82,70%. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 90,15% penduduk dapat mengakses air bersih. Sedangkan pada tahun 2020 persentase capaian meningkat menjadi 97,17%. Di Tahun 2021 menjadi 96,79 persen.

Tabel 2.317.

Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Kota Parepare 2018-2022

| Indikator | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-----------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|           |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|                                                                               |      |       |       |       |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | 82,70 | 90,15 | 97,17 | 96,79 | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|

Sumber : Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

2.2.3.2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik  
Tabel 2.318.

Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                           | Target Nasional | Capaian SPM |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                     |                 | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 100%            | 85,74%      | 86,04% | 90,68% | 84,75% | 94,01% |

Sumber : Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2023

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun meningkat pada tahun 2018 menjadi 85,74%. Pada tahun 2019, pengolahan air limbah domestik telah mencakup 86,04%. Pada tahun 2020 persentase capaian meningkat menjadi 90,68%. Untuk tahun 2021, menurun menjadi 84,75 persen.

2.2.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

2.2.4.1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota

Pemerintah Kota Parepare telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni bagi seluruh warga masyarakat yang menjadi korban bencana. Sepanjang Tahun Pemerintah Kota Parepare telah menyediakan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat korban bencana sehingga capaiannya 100%. Namun, tahun 2021, capaian kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana menurun ke 95,28 persen.

Tabel 2.319.  
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban  
Bencana Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                 | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|--------|--------|
|                                                           |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021   | 2022   |
| Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana | 100%            | 100%        | 100% | 100% | 95,28% | 94,62% |

Sumber : Dinas Perkintan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.4.2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dalam kurun waktu Tahun 2018-2021, tidak ada program pemerintah daerah yang menyebabkan warga masyarakat harus direlokasi. Hingga tahun 2022, capaiannya menjadi 100 persen.

Tabel 2.320.  
Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi  
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah



Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                                                                                 | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100%            | -           | -    | -    | -    | 100  |

Sumber : Dinas Perkintan Kota Parepare Tahun 2023

2.2.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

2.2.5.1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seluruh warga wajib memperoleh layanan dari pemerintah daerah akibat penegakan hukum perda dan perkada, sehingga capaian Tahun 2018-2022 adalah 100%.

Tabel 2.321.

Pelayanan Dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                     | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                               |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | 100%            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Satpol PP Kota Parepare Tahun 2023

2.2.5.2 Pelayanan informasi rawan bencana

Pemerintah Kota Parepare telah memberikan layanan informasi rawan bencana bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana, sehingga capaiannya 100%. Pemebrian layanan informasi rawan bencana dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media serta informasi langsung kepada masyarakat.

Tabel 2.322.

Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                               | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                         |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100%            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : BPBD Kota Parepare Tahun 2023

2.2.5.3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dengan masifnya pelaksanaan sosialisasi dan pemberian informasi yang dilakukan dalam mitigasu bencana kepa masyarakat dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, maka Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 100%.

Tabel 2.323.  
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                     | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                               |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100%            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : BPBD Kota Parepare Tahun 2023

2.2.5.4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sepanjang Tahun 2018-2020, pemerintah daerah telah melakukan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kepada semua kejadian bencana, sehingga capaiannya adalah 100% sebagaimana target nasional. Namun ditahun berikutnya pada periode tahun 2021 capaian persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana menurun menjadi 95,83 persen. Di tahun 2022, warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menjadi 100 persen.

Tabel 2.324.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|--------|------|
|                                                                                          |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021   | 2022 |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100%            | 100%        | 100% | 100% | 95,83% | 100% |

Sumber : BPBD Kota Parepare Tahun 2023

2.2.5.5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pada tahun 2018, meningkat menjadi 306 kasus dan tahun 2019 berkurang menjadi 290 kasus kebakaran, yang semuanya mendapatkan layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran. Hingga tahun 2021, Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran mencapai 100 persen.

Tabel 2.325.  
Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                  | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                            |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 100%            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023

2.2.6 Bidang Urusan Sosial

2.2.6.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sepanjang tahun 2018 hanya mencapai 91,67%. Peningkatan ini berlanjut tersus hingga tahun 2019-2022 yang mencapai target nasional yaitu 100%.

Tabel 2.326.  
Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                       | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                                 |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100%            | 91,67%      | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

2.2.6.2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti

Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2019-2022 persentase capaian stagnan diangka 100%.

Tabel 2.327.  
Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti  
Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                  | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                            |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100%            | 18,92%      | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

2.2.6.3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti

Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti juga mengalami peningkatan dari Tahun 2019-2022 capaian sudah mecapai target nasional yaitu mencapai 100%.

Tabel 2.328.  
Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                      | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                                |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100%            | 86,52%      | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

2.2.6.4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar dalam 5 (lima) tahun

terakhir. Pada tahun 2019 hingga 2022 persentasi telah berada pada capaian target nasional yaitu 100%.

Tabel 2.329.  
Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                                            | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100%            | 72,73%      | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

2.2.6.5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota

Pemerintah Kota Parepare telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat yang mengalami korban bencana alam. Sepanjang Tahun 2018-2022, Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial mencapai 100% setiap tahunnya, yang berarti semua wagra masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dsri Pemerintah Kota Parepare.

Tabel 2.330.  
Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kota Parepare 2018-2022

| Indikator                                                                                       | Target Nasional | Capaian SPM |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                                 |                 | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 100%            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023

Tabel 2.331. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Parepare  
Tahun 2018-2022

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                          | 1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN                                                                                                                               |                                         |                           |       |       |       |        |       | Interpretasi   |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|----------------|
|     |                                                | Indikator                                                                                                                                                 | Target Nasional Tahun 2022              | Target SPM RPJMD Thn 2022 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  |                |
| 1   | Pendidikan Dasar                               | Persentase warga negara usia 7 -15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar                                                                     | 100                                     | 100                       | 97,38 | 93,32 | 85,94 | 92,64  | 99,12 | Belum Tercapai |
|     |                                                | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional                                                                       | Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya | N/A                       |       |       |       | 1,61   | 3,77  |                |
| 2   | Pendidikan Kesetaraan                          | Persentase warga negara usia 7 -18 tahun yang belum yang menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | 100                                     | 100                       | 64,28 | 68,79 | 61,21 | 81,71  | 96,56 | Belum Tercapai |
|     |                                                | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional                                                                       | Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya |                           |       |       |       | N/A    |       |                |
| 3   | Pendidikan Anak Usia Dini                      | Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan PAUD                                                                      | 100                                     | 100                       | 65,27 | 65,78 | 78,14 | 64,75  | 79,69 | Belum Tercapai |
|     |                                                |                                                                                                                                                           |                                         |                           |       |       |       |        |       |                |
| No. | Jenis Pelayanan Dasar                          | 2. BIDANG URUSAN KESEHATAN                                                                                                                                |                                         |                           |       |       |       |        |       | Interpretasi   |
|     |                                                | Indikator                                                                                                                                                 | Target Nasional Tahun 2022              | Target SPM RPJMD Thn 2022 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  |                |
| 1   | Pelayanan kesehatan ibu hamil                  | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                   | 100                                     | 100                       | 90,26 | 84,77 | 68,16 | 87,62  | 97,07 | Belum Tercapai |
| 2   | Pelayanan kesehatan ibu bersalin               | Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                | 100                                     | 100                       | 94,59 | 89,78 | 76,6  | 86,50  | 87,35 | Belum Tercapai |
| 3   | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                             | 100                                     | 100                       | 99,52 | 92,81 | 81,28 | 90,66  | 91,53 | Belum Tercapai |
| 4   | Pelayanan kesehatan balita                     | Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                      | 100                                     | 100                       | 50,15 | 37,76 | 59,64 | 79,58  | 100   | Tercapai       |
| 5   | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                          | 100                                     | 100                       | 16,74 | 12,74 | 4,85  | 97,94  | 61,79 | Belum Tercapai |
| 6   | Pelayanan kesehatan pada usia produktif        | Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                 | 100                                     | 100                       | 6,98  | 10,2  | 4,13  | 4,13   | 24,32 | Belum Tercapai |
| 7   | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut           | Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                    | 100                                     | 100                       | 42,31 | 83    | 98,29 | 82,28  | 100   | Tercapai       |
| 8   | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi       | Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan                                                     | 100                                     | 100                       | 15,76 | 12,55 | 17,42 | 100,00 | 22,06 | Belum Tercapai |
| 9   | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke tas yang mendapatkan Layanan kesehatan                                               | 100                                     | 100                       | 98,45 | 60,12 | 113,4 | 100,00 | 100   | Tercapai       |

|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                          |            |       |       |        |       |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|----------------|
| 10  | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                                                             | Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                                   | 100                        | 100                      | 82,87      | 100   | 98,53 | 100,00 | 67,23 | Belum Tercapai |
| 11  | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                                                                   | Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                           | 100                        | 100                      | 81,05      | 103,2 | 100   | 99,93  | 79,72 | Belum Tercapai |
| 12  | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan                  | 100                        | 100                      | 9,09       | 7,64  | 85,55 | 100,00 | 100   | Tercapai       |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                          |            |       |       |        |       |                |
| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                            | 3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM                                                                                                                           |                            |                          |            |       |       |        |       |                |
|     |                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                 | Target Nasional Tahun 2022 | Target SPM RPJMD th 2022 | Capain SPM |       |       |        |       | Interpretasi   |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                          | 2018       | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  |                |
| 1   | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                                                 | Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                                             | 100                        | 100                      | 82,7       | 90,15 | 97,17 | 96,79  | 100   | Tercapai       |
| 2   | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik                                                                             | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                       | 100                        | 100                      | 85,74      | 86,04 | 90,68 | 84,75  | 94,01 | Belum Tercapai |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                          |            |       |       |        |       |                |
| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                            | 4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT                                                                                                                         |                            |                          |            |       |       |        |       |                |
|     |                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                 | Target Nasional Tahun 2022 | Target SPM RPJMD th 2022 | Capain SPM |       |       |        |       | Interpretasi   |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                          | 2018       | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  |                |
| 1   | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                                             | Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana                                                                                                 | 100                        | 100                      | 100        | 100   | 100   | 95,28  | 94,62 | Belum Tercapai |
| 2   | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah                      | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100                        | 100                      | N/A        | N/A   | N/A   | 0      | 100   | Tercapai       |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                          |            |       |       |        |       |                |
| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                            | 5.BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                 |                            |                          |            |       |       |        |       |                |
|     |                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                 | Target Nasional Tahun 2022 | Target SPM RPJMD th 2022 | Capain SPM |       |       |        |       | Interpretasi   |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                          | 2018       | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  |                |
| 1   | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                        | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada                                                             | 100                        | 100                      | 100        | 100   | 100   | 100    | 100   | Tercapai       |
| 2   | Pelayanan informasi rawan bencana                                                                                                | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                   | 100                        | 100                      | 100        | 100   | 100   | 100    | 100   | Tercapai       |

|     |                                                                                         |                                                                                                                                                              |                            |                          |            |      |      |       |      |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|------|------|-------|------|--------------|
| 3   | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                | 100                        | 100                      | 100        | 100  | 100  | 100   | 100  | Tercapai     |
| 4   | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                      | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                     | 100                        | 100                      | 100        | 100  | 100  | 95,83 | 100  | Tercapai     |
| 5   | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                    | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran                                                                   | 100                        | 100                      | 100        | 100  | 100  | 100   | 100  | Tercapai     |
|     |                                                                                         |                                                                                                                                                              |                            |                          |            |      |      |       |      |              |
| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                                   | 6. BIDANG URUSAN SOSIAL                                                                                                                                      |                            |                          |            |      |      |       |      |              |
|     |                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                    | Target Nasional Tahun 2022 | Target SPM RPJMD th 2022 | Capain SPM |      |      |       |      | Interpretasi |
|     |                                                                                         |                                                                                                                                                              |                            |                          | 2018       | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 |              |
| 1   | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                                              | 100                        | 100                      | 91,67      | 100  | 100  | 100   | 100  | Tercapai     |
| 2   | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                  | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                                                                   | 100                        | 100                      | 18,92      | 100  | 100  | 100   | 100  | Tercapai     |
| 3   | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                           | Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti                                                               | 100                        | 100                      | 86,52      | 100  | 100  | 100   | 100  | Tercapai     |
| 4   | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti  | Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial dasar tuna sosial di luar panti                                          | 100                        | 100                      | 72,73      | 100  | 100  | 100   | 100  | Tercapai     |
| 5   | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana | 100                        | 100                      | 100        | 100  | 100  | 100   | 100  | Tercapai     |



### 2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesenjangan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan Yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat kota. Target-target SDGs ditingkat kota telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator terukur serta indikasi dukungan



pembiayaannya. Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare sejumlah 17 tujuan dengan sejumlah 58 indikator Tipe A (Indikator SDGs/TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target), 55 indikator tipe B (Indikator SDGs/TPB yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target) dan 87 indikator tipe C (Indikator SDGs/TPB yang belum dilaksanakan dan tidak ada data) serta capaian indikator terbanyak pada pilar sosial.

Capaian target indikator 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2018-2022 disajikan pada table berikut:

Capaian Indikator SDG’s Kota Parepare  
Tahun 2018 -2022

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 |                                                                                                                                 |                    |        |       |       |       |                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|
| NO.                                              | TUJUAN / INDIKATOR                                                                                                              | CAPAIAN TPB / SDGs |        |       |       |       | OPD<br>PENANGGU<br>NG JAWAB             |
|                                                  |                                                                                                                                 | 2018               | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  |                                         |
|                                                  | Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun                                                                  |                    |        |       |       |       |                                         |
| 1,1                                              | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.                     | 5,59               | 5,26   | 5,44  | 5,66  | 5,41  | Dinas Sosial                            |
| 1,2                                              | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.                                                               | 100%               | 100%   | 86    | 84,40 | 85,00 | Dinas Kesehatan                         |
| 1,3                                              | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.                                                                 | 83%                | 88%    | -     | 84,54 | 97,64 | Dinas Tenaga Kerja                      |
| 1,4                                              | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.                          | 26,39%             | 23,33% | 100   | 108   | 484   | Dinas Sosial                            |
| 1,5                                              | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.                                          | 1276               | 1190   | 3218  | 4395  | 4441  | Dinas Sosial                            |
| 1,6                                              | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.                   | 92,35              | 94,23  | 76,66 | 95    | 95    | Dinas Kesehatan                         |
| 1,7                                              | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.                                                         | 100                | 114,6  | 85    | 100   | 100   | Dinas Kesehatan                         |
| 1,8                                              | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | 12928              | 13002  | 66,30 | 75    | 77    | Dinas Kesehatan                         |
| 1,9                                              | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.                          | 90,5               | 92,5   | 97,14 | 97,9  | 92,26 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1,1                                              | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.                                  | 81,5               | 87     | 93    | 93,76 | 88,81 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare                                                                               |                                                                                                                                   |               |             |             |         | Tahun 2024-2026 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--------------------------------------|
| 1,11                                                                                                                         | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.                                                                                   | 99,01         | 85,87       | 86,77       | 82,69   | 93,45           | Dinas Pendidikan                     |
| 1,12                                                                                                                         | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.                                                                                 | 71,99         | 79,23       | 76,46       | 65,74   | 87,33           | Dinas Pendidikan                     |
| 1,13                                                                                                                         | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.                                                            | 100           | 100         | 99,91       | 100     | 100             | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 1,14                                                                                                                         | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                                    | 0,00249       | 0,00676     | 0,04552     | 0,00805 | 0,00805         | Badan Penanggulangan Bencana daerah  |
| 1,23                                                                                                                         | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | 0,04          | 0,05        | 0,05        | -       | -               | Dinas Sosial                         |
| Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan |                                                                                                                                   |               |             |             |         |                 |                                      |
| 2,1                                                                                                                          | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).                                                       | -             | -           | 0,0411      | 5,95    | 3,92            | Dinas 'Ketahanan Pangan              |
| 2,2                                                                                                                          | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.                                                                        | 0,04          | 0,04        | 0,1938      | 12,20   | 13,7            | Dinas Kesehatan                      |
| 2,5                                                                                                                          | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.                                              | blm ada data  | 35,7 %      | 33,11       | 14,72   | 13,7            | Dinas Kesehatan                      |
| 2,6                                                                                                                          | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.                                               | blm ada data  | 35,7 %      | 35,5        | 19,84   | 13,9            | Dinas Kesehatan                      |
| 2,7                                                                                                                          | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.                            | 3,66 %        | 8,6 %       | 0,2209      | 4,72    | 5               | Dinas Kesehatan                      |
| 2,8                                                                                                                          | Prevalensi anemia pada ibu hamil.                                                                                                 | 20,69 %       | 13,42 %     | 6,4         | 8,60    | 9               | Dinas Kesehatan                      |
| 2,9                                                                                                                          | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.                                                          | 49,54 %       | 67,15 %     | 59,73       | 54,44   | 60              | Dinas Kesehatan                      |
| 2,1                                                                                                                          | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.              | 90            | 90          | 86          | 88      | 88              | Dinas 'Ketahanan Pangan              |
| 2,11                                                                                                                         | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).                                  | 0             | 0           | 0,6361      | -       | -               | Dinas Tenaga Kerja                   |
| Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia                          |                                                                                                                                   |               |             |             |         |                 |                                      |
| 3,1                                                                                                                          | Angka Kematian Ibu (AKI).                                                                                                         | 146/100.000KH | 4/100000 KH | 84,46 Kasus | 6       | 5               | Dinas Kesehatan                      |
| 3,2                                                                                                                          | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.      | 96            | 95          | 76,6        | 98      | 98              | Dinas Kesehatan                      |
| 3,3                                                                                                                          | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.                     | 95            | 98          | 76,6        | 98      | 98              | Dinas Kesehatan                      |
| 3,4                                                                                                                          | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.                                                                            | 11            | 4           | 0           | 0       | 0               | Dinas Kesehatan                      |
| 3,5                                                                                                                          | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.                                                                           | 8             | 18          | 6,61        | 5       | 8               | Dinas Kesehatan                      |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |                                 |        | Tahun 2024-2026 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 3,6                                                                                                                                | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.                                                                                                                                       | 14                                | 11                                | 2,11                            | 7      | 8               | Dinas Kesehatan  |
| 3,7                                                                                                                                | persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi.                                                                                                           | 96                                | 98                                |                                 | 100    | 100             | Dinas Kesehatan  |
| 3,8                                                                                                                                | Prevalensi HIV pada populasi dewasa.                                                                                                                                                      | < 0,04                            | < 0,04                            | 0,225                           | <0,05  | <0,05           | Dinas Kesehatan  |
| 3,9                                                                                                                                | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.                                                                                                                                          | 214                               | 242                               | 195                             | 416,59 | 290             | Dinas Kesehatan  |
| 3,1                                                                                                                                | Kejadian Malaria per 1000 orang.                                                                                                                                                          | 0,07                              | 0,16                              | 0,13                            | 0,07   | 0,07            | Dinas Kesehatan  |
| 3,11                                                                                                                               | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.                                                                                                                                    | 1                                 | 1                                 | 1                               | -      | -               | Dinas Kesehatan  |
| 3,12                                                                                                                               | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.                                                                                                          | 70                                | 75                                | 75                              | -      | -               | Dinas Kesehatan  |
| 3,13                                                                                                                               | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).                                                                                  | Kusta 14 kasus filariasis 0 kasus | kusta 17 kasus filariasis 0 kasus | Kusta 4 kasus flariasis 0 kasus | 6      | 6               | Dinas Kesehatan  |
| 3,16                                                                                                                               | persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.                                                                                                                                          | 20,85                             | 19,68                             | 20,5                            | 5,17   | 20              | Dinas Kesehatan  |
| 3,2                                                                                                                                | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.                                                                                                 | 6                                 | 6                                 | 8                               | 8      | 8               | Dinas Kesehatan  |
| 3,23                                                                                                                               | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.                              | 85,00                             | 90,00                             | 66,30                           | 67     | 62,97           | Dinas PPKB       |
| 3,24                                                                                                                               | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.                                                     | 65,46                             | 64,36                             | 0,1275                          | 75     | 77              | Dinas Kesehatan  |
| 3,25                                                                                                                               | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.                                                                                                                    | 18,45                             | 21,971                            | 4319                            | 35,35  | 36.076          | Dinas PPKB       |
| 3,27                                                                                                                               | Total Fertility Rate (TFR).                                                                                                                                                               | 2,23                              | 2,23                              | 2,19                            | 2,19   | 2,35            | Dinas PPKB       |
| 3,3                                                                                                                                | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).                                                                                                                                                 | 100%                              | 100%                              | 86                              | 84,4   | 85              | Dinas Kesehatan  |
| Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |                                 |        |                 |                  |
| 4,1                                                                                                                                | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | 100                               | 100                               | -                               | 90     | 92              | Dinas Pendidikan |
| 4,2                                                                                                                                | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.                                                                                                                                                 | 97,96                             | 100                               | 97                              | 34,73  | 34,73           | Dinas Pendidikan |
| 4,3                                                                                                                                | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.                                                                                                                                               | 100                               | 100                               | 27                              | 41,66  | 41,66           | Dinas Pendidikan |
| 4,4                                                                                                                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.                                                                                                                                           | 99,55                             | 95,44                             | 92                              | 92,77  | 94,48           | Dinas Pendidikan |
| 4,5                                                                                                                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.                                                                                                                                         | 92,41                             | 100,56                            | 96                              | 96,7   | 87,96           | Dinas Pendidikan |
| 4,6                                                                                                                                | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                                           | 13,40                             | 14,20                             | 14,50                           | 10,5   | 15,25           | Dinas Pendidikan |
| 4,7                                                                                                                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).                                                                                                                           | 43,77                             | 45,14                             | 39,90                           | 92,77  | 92,85           | Dinas Pendidikan |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Tahun 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4,9                                                                     | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.                                                                                                                       | Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ se deraja=93 .69 ; (2) SMP/MTs /sederajat = 77.36 ; (3) SMA/SMK /MA/ seder ajat 52.25 ; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Pergurua n Tinggi tidak ada datanya | Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ se deraja=92 .7 ; (2) SMP/MTs /sederajat = 78.57; (3) SMA/SMK /MA/ seder ajat 59.43; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Pergurua n Tinggi tidak ada datanya | 0,8162 | Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ se deraja= <b>82,70</b> ; (2) SMP/MTs /sederajat = <b>65,74</b> ; (3) SMA/SMK /MA/ seder ajat <b>85,50</b> ; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Pergurua n Tinggi tidak ada datanya | Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ se deraja= <b>93,45</b> ; (2) SMP/MTs /sederajat = <b>87,33</b> ; (3) SMA/SMK /MA/ seder ajat = <b>121,17</b> ; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Pergurua n Tinggi tidak ada datanya | Dinas Pendidikan                              |
| 4,1                                                                     | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,75                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,66  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dinas Pendidikan                              |
| 4,11                                                                    | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                           | 100    | 99,80                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,81                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dinas Pendidikan                              |
| 4,12                                                                    | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). | 90                                                                                                                                                                                                                                                               | 92                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pendidikan                              |
| 4,13                                                                    | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52,44                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,91                                                                                                                                                                                                                                                         | -      | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pendidikan                              |
| Tujuan 5 : Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 5,1                                                                     | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                             | 9      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,2                                                                     | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.                                                                                                                                                               | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0018 | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,3                                                                     | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,08                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0026 | 0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare                                                |                                                                                                                                                             |       |       |         |        | Tahun 2024-2026 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 5,4                                                                                           | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh <b>orang lain selain pasangan</b> dalam 12 bulan terakhir. | 0,03  | 0,02  | 0,00039 | -      | -               | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,5                                                                                           | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.                                                                          | 96,5  | 96    | 100     | 100    | 100             | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,6                                                                                           | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.                      | 0,51  | 0,5   | 0,0063  | 0,37   | 0,037           | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,7                                                                                           | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.                                                                                          | 27    | 26    | 21      | 21     | 21              | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,8                                                                                           | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).                                                                         | 29,3  | 29,1  | 0,0063  | 17,38  | 17,38           | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,9                                                                                           | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.                                                    | 16    | 20    | 24      | 24     | 20              | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,1                                                                                           | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.                                                                                                        | 12    | 9     | 0,4     | 37     | 37              | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,11                                                                                          | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.      | 89,9  | 88    | 0,2994  | -      | -               | pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak |
| 5,12                                                                                          | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).                                                                                       | 8,87  | 10,86 | 12,49   | -      | -               | Dinas PPKB                                    |
| 5,13                                                                                          | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.                                                                      | 97,65 | 98,50 | 100     | 98     | 98,5            | Dinas PPKB                                    |
| 5,14                                                                                          | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam                                                                                                   | 83,45 | 86,61 | 91,94   | 94,34  | 81,28           | Dinas Komunikasi dan Informatika              |
| Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan |                                                                                                                                                             |       |       |         |        |                 |                                               |
| 6,1                                                                                           | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.                                                                        | 82,70 | 90,15 | 97,14   | 97,9   | 92,26           | pekerjaan umum dan penataan ruang             |
| 6,2                                                                                           | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.                              | 320   | 440   | 440     | 349,91 | 349,91          | pekerjaan umum dan penataan ruang             |
| 6,3                                                                                           | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.                                                                      | 90    | 92,5  | 97,14   | 97,9   | 92,26           | pekerjaan umum dan penataan ruang             |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare                                                                                                                      |                                                                                                        |        |         |        |        | Tahun 2024-2026 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------|
| 6,4                                                                                                                                                                 | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.                            | 82,70  | 85,15   | 89,19  | 90     | 90              | Dinas Kesehatan                   |
| 6,5                                                                                                                                                                 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.                           | 100    | 100     | 93     | 93,76  | 88,81           | pekerjaan umum dan penataan ruang |
| 6,6                                                                                                                                                                 | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).                     | 18     | 22      | 22     | 22     | 22              | Dinas Kesehatan                   |
| 6,7                                                                                                                                                                 | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).         | 18     | 22      | 22     | 22     | 22              | Dinas Kesehatan                   |
| 6,8                                                                                                                                                                 | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.                           | 1949   | 2000    | -      | -      | -               | pekerjaan umum dan penataan ruang |
| Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua |                                                                                                        |        |         |        |        |                 |                                   |
| 8,1                                                                                                                                                                 | Laju pertumbuhan PDB per kapita.                                                                       | 7,15   | 8,4     | 0,23   | 2,25   | 9,74            | BPS                               |
| 8,2                                                                                                                                                                 | PDB per kapita.                                                                                        | 45,94  | 49,80   | 49,92  | 51,18  | 56,16           | BPS                               |
| 8,3                                                                                                                                                                 | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.                      | 3022   | 3022    | 22503  | 22503  | 38044           | tenaga kerja                      |
| 8,4                                                                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja formal.                                                                        | 54599  | 54599   | -      | 69,13  | 56,03           | tenaga kerja                      |
| 8,5                                                                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.                                                     | 5,53   | 5,53    | 5,78   | 5,78   | 43,97           | tenaga kerja                      |
| 8,6                                                                                                                                                                 | Upah rata-rata per jam pekerja.                                                                        | 75     | 10      | 17,5   | 25,126 | 25,126          | tenaga kerja                      |
| 8,7                                                                                                                                                                 | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.                              | 6,81   | 6,48    | 6,41   | 6,72   | 5,60            | tenaga kerja                      |
| 8,8                                                                                                                                                                 | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | 67,88  | 67,88   | 41,42  | 41,42  | -               | tenaga kerja                      |
| 8,9                                                                                                                                                                 | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.                                                           | 6,21   | 6,25    | -1,02  | 6,33   | -               | pariwisata                        |
| 8,1                                                                                                                                                                 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.                                                                  | 780    | 770,494 | 52,657 | 839016 | 928517          | pariwisata                        |
| Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi                                          |                                                                                                        |        |         |        |        |                 |                                   |
| 9,1                                                                                                                                                                 | Panjang jalur kereta api.                                                                              | 0      | 0       | 0      | 0      | 0               | perhubungan                       |
| 9,2                                                                                                                                                                 | Jumlah dermaga penyeberangan.                                                                          | 3/0/3  | 3/0/3   | 3/0/3  | 3/0/3  | 3/0/3           | perhubungan                       |
| 9,3                                                                                                                                                                 | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.                                                 | 2550   | 2550    | 4883   | 36,01  | 36,18           | Dinas Perdagangan                 |
| 9,4                                                                                                                                                                 | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.                             | 99,05% | 98,93%  | 59,23  | 58,93  | 58,93           | perindustrian                     |
| 9,5                                                                                                                                                                 | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband                                                      | 95     | 95      | 67,36  | 100    | 91,8            | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 9,6                                                                                                                                                                 | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam                                              | 74,45  | 78,90   | 91,94  | 94,34  | 81,28           | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 9,7                                                                                                                                                                 | Proporsi individu yang menggunakan internet                                                            | 74,45  | 78,90   | 85,52  | 78,17  | 81,06           | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara                                                                                                           |                                                                                                        |        |         |        |        |                 |                                   |
| 10,1                                                                                                                                                                | Koefisien Gini.                                                                                        | 0,382  | 0,350   | 0,373  | 0,381  | 0,379           | BPS                               |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |             |             |             |         | Tahun 2024-2026 |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 10,2                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.                   | 5,59        | 5,26        | 5,44        | 5,66    | 5,41            | Dinas sosial                                               |
| 10,3                                                                                                                                                                                                                                        | Indeks Kebebasan Sipil.                                                                                                       | 85          | 87          | -           | -       | -               | sosial                                                     |
| 10,4                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Tidak ada   | Tidak ada   | -           | -       | -               | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat |
| 11,1                                                                                                                                                                                                                                        | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.                                          | 64,65       | 66,67       | 40,07       | 85,18   | 82,70           | perumahan rakyat dan kawasan permukiman                    |
| 11,2                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.                                                                                      | -           | -           | -           | -       | -               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    |
| 11,3                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                                 | 0,00249     | 0,00676     | 0,001138    | 0,00805 | 0,0002          | Badan Penanggulangan Bencana daerah                        |
| 11,4                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                                                              | 364.746.656 | 768.009.165 | 121.706.345 | 4       | 4               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |
| 11,5                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase sampah perkotaan yang tertangani                                                                                   | 90,91       | 91,54       | 75          | 74      | 73              | Dinas Lingkungan Hidup                                     |
| 11,6                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah kecamatan hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.                | Ada         | Ada         | Ada         | -       | -               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    |
| 11,7                                                                                                                                                                                                                                        | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.                                                             | Ada         | Ada         | Ada         | 1       | 1               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |
| Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |             |             |             |         |                 |                                                            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.                                                                                     | 11          | 13          | 22          | 24      | 26              | lingkungan hidup                                           |
| Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |             |             |             |         |                 |                                                            |
| 13,1                                                                                                                                                                                                                                        | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.                                                | Ada         | ada         | -           | 0       | 1               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |
| 13,2                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                                 | 0,00249     | 0,00676     | 0,01138     | 0,00805 | 0,0002          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |
| Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati |                                                                                                                               |             |             |             |         |                 |                                                            |
| 15                                                                                                                                                                                                                                          | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.                                                                       | 30,7        | 30,7        | -           | -       | -               | kehutanan                                                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                          | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. (%)                                           | 18,18       | 24,24       | -           | 0,005   | 0,01            | lingkungan hidup                                           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                          | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.        | Ada         | Ada         | Ada         | Ada     | Ada             | lingkungan hidup                                           |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   | Tahun 2024-2026 |   |                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|---|------------------------------------------------------------|
|                                                | Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan |   |   |   |                 |   |                                                            |
| 16,1                                           | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 2 | 2               | 1 | ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat |

Sumber : Bappeda Kota Parepare (Data diolah)



2.4 Kerja Sama Daerah Tahun 2022

Untuk gambaran pelaksanaan kerja sama antar daerah maupun kerja sama daerah dengan swasta. Berikut adalah daftar kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dengan beberapa baik daerah lain maupun swasta.

Tabel  
Data Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
(Sinergi) Kota Parepare Tahun 2022

| N O | MITRA KERJA SAMA                                        | URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN | JUDUL DOKUMEN PERJANJIAN                  | JENIS DOKUMEN PERJANJIAN | TANGGAL PENETAPAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Pendidikan                              | Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak | Nota Kesepakatan         | 21 Januari 2022   | 5 (Lima) Tahun           |

DATA KERJASAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN KOTA PAREPARE TAHUN 2022

| No | MITRA KERJA SAMA                               | URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN | JUDUL DOKUMEN PERJANJIAN                                                                                                                                                                                     | JENIS DOKUMEN PERJANJIAN | TANGGAL PENETAPAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | Pemerintahan Kabupaten Barru                   | Kerjasama di bidang perdagangan         | Pelayanan Tera, Tera Ulang                                                                                                                                                                                   | Perjanjian Bersama       | 27 January 2022   | 3 (Tiga)Tahun            |
| 2  | Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan | Kerjasama di bidang ekonomi             | Pengendalian Inflasi Antar Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan                                                                                                                                               | Kesepakatan Bersama      | 11 October 2022   | 1 (Satu) Tahun           |
| 3  | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan    | Kerjasama di bidang Kesehatan           | Bantuan Dana Sharing Bagi Peserta Program Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan Integrasi ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang di Daftarkan dan di bayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah | Kesepakatan Bersama      | 01 December 2022  | 5 (Lima) Tahun           |
| 4  | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan    | Kerjasama di bidang Kesehatan           | Bantuan Dana Sharing Bagi Peserta Program Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan Integrasi ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang                                                              | Perjanjian Kerja Sama    | 01 December 2022  | 5 (Lima) Tahun           |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |  |  |                                                              |  |  | Tahun 2024-2026 |
|------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
|                                                |  |  | di Daftarkan dan di bayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah |  |  |                 |

DATA KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA KOTA PAREPARE TAHUN 2022

| N O | MITRA KERJA SAMA                          | URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN | JUDUL DOKUMEN PERJANJIAN                                                                                              | JENIS DOKUMEN PERJANJIAN | TANGGAL PENETAPAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | Pertanahan Kota Parepare                  | Pertanahan                              | 1. Pensertipikatan Tanah Aset, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Pembaharuan Zona Nilai Tanah di Kota Parepare | Perjanjian Kerjasama     | 5 Januari 2022    | 2 (Dua) Tahun            |
| 2   | Pertanahan Kota Parepare                  | Pertanahan                              | 2. Pembangunan Basis Data Pertanahan, Penanganan Masalah Pertanahan dan Akses Reforma Agraria di Kota Parepare        | Perjanjian Kerjasama     | 5 Januari 2022    | 2 (Dua) Tahun            |
| 3   | CV. Teknik Akurasi                        | Perdagangan                             | 3. Operasional Pemakaian Standar Ukuran                                                                               | Perjanjian Kerjasama     | 10 Januari 2022   | 5 (Lima) Tahun           |
| 4   | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare | Kesehatan                               | 4. Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare                                     | Perjanjian Kerjasama     | 25 Februari 2022  | 2 (Dua) Tahun            |
| 5   | Pengadilan Negeri Parepare                | Hukum                                   | 5. Pelayanan Bantuan Hukum yang Mudah di Akses Bagi Masyarakat Kota Parepare                                          | Nota Kesepakatan         | 21 Maret 2022     | 3 (Tiga) Tahun           |
| 6   | Pengadilan Negeri Parepare                | Hukum                                   | 6. Pelayanan Bantuan Hukum Bebas Biaya Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Parepare                                   | Rencana Kerja            | 21 Maret 2022     | 3 (Tiga) Tahun           |
| 7   | Universitas Muslim Indonesia              | Pendidikan                              | 7. Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat                                          | Kesepakatan Bersama      | 24 Maret 2022     | 5 (Lima) Tahun           |
| 8   | Perum Bulog Cabang Parepare               | Sosial                                  | 8. Program Bantuan Sosial Beras                                                                                       | Perjanjian Kerjasama     | 21 April 2022     | 1(Satu) Tahun            |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                                                                 |                   |                                                                                                                  |                      | Tahun 2024-2026 |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|                                                |                                                                                 |                   | sejahtera Kota Parepare Tahun Anggaran 2022                                                                      |                      |                 |                |
| 9                                              | Perum Bulog Cabang Parepare                                                     | Sosial            | 9. Program Bantuan Sosial Beras sejahtera untuk Masyarakat Eks Penderita Kusta Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 | Perjanjian Kerjasama | 21 April 2022   | 1 (Satu) Tahun |
| 10                                             | Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare                  | Kesehatan         | 10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan                                   | Perjanjian Kerjasama | 26 April 2022   | 1 (Satu) Tahun |
| 11                                             | Universita Negeri Makassar                                                      | Pendidikan        | 11. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah                          | Kesepakatan Bersama  | 14 Mei 2022     | 5 (Lima) Tahun |
| 12                                             | Universita Negeri Makassar                                                      | Pendidikan        | 12. Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat                                        | Perjanjian Kerjasama | 14 Mei 2022     | 3 (Tiga) Tahun |
| 13                                             | Universita Negeri Makassar                                                      | Pendidikan        | 13. Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat                                        | Perjanjian Kerjasama | 14 Mei 2022     | 3 (Tiga) Tahun |
| 14                                             | Kepolisian Resor Kota Parepare                                                  | Pelayanan terpadu | 14. Penyelenggaraan Pelayanan Kepolisian dalam Mal Pelayanan Publik                                              | Perjanjian Kerjasama | 21 Juni 2022    | 2 (dua) Tahun  |
| 15                                             | PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Parepare | Pelayanan terpadu | 15. Penyelenggaraan Pelayanan Perbankan dalam Pelayanan Publik                                                   | Perjanjian Kerjasama | 21 Juni 2022    | 2 (dua) Tahun  |
| 16                                             | Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare.                 | Pelayanan terpadu | 16. Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pelayanan Publik                                    | Perjanjian Kerjasama | 21 Juni 2022    | 2 (Dua) Tahun  |
| 17                                             | Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar.           | Pelayanan terpadu | 17. Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam                                               | Perjanjian Kerjasama | 21 Juni 2022    | 2 (Dua) Tahun  |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                                                            |                   |                                                                                                             |                      | Tahun 2024-2026   |                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                                            |                   | Pelayanan Publik                                                                                            |                      |                   |                                                 |
| 18                                             | Kantor Kementerian Agama Kota Parepare                                     | Pelayanan terpadu | 18. Penyelenggaraan Pelayanan Keagamaan dalam Pelayanan Publik                                              | Perjanjian Kerjasama | 21 Juni 2022      | 2 (Dua) Tahun                                   |
| 19                                             | Kantor pertanahan Kota Parepare                                            | Pelayanan terpadu | 19. Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan dalam Pelayanan Publik                                             | Perjanjian Kerjasama | 21 Juni 2022      | 2 (Dua) Tahun                                   |
| 20                                             | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare                                      | Pelayanan terpadu | 20. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian dalam Pelayanan Publik                                           | Perjanjian Kerjasama | 21 Juni 2022      | 2 (Dua) Tahun                                   |
| 21                                             | Yayasan Lembaga Pengkajian Pnegembangan Ekonomi & Masyarakat Kota Parepare | Program Inklusi   | 21. Pelaksanaan Program Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (Inklusi) di Kota Parepare | Kesepakatan Bersama  | 11 Juli 2022      | 5 (Lima) Tahun                                  |
| 22                                             | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar         | Jaminan sosial    | 22. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare           | Kesepakatan Bersama  | 11 Juli 2022      | 5 (Lima) Tahun                                  |
| 23                                             | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Parepare         | Jaminan sosial    | 23. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Parepare  | Perjanjian Kerjasama | 11 Juli 2022      | 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal 1 bulan Juli |
| 24                                             | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Parepare         | Jaminan sosial    | 24. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Guru Mengaji di Kota Parepare                                   | Perjanjian Kerjasama | 11 Juli 2022      | 6 (Enam) bulan sejak tanggal 1 bulan Juli       |
| 25                                             | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare               | Jaminan sosial    | 25. Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | Perjanjian Kerjasama | 1 Agustus 2022    | 5 (lima) bulan sejak tanggal 1 bulan Agustus    |
| 26                                             | Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia                                | Pendidikan        | 26. Peningkatan dan                                                                                         | Perjanjian Kerjasama | 12 September 2022 | 5 (lima) Tahun                                  |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                                                                      |            |                                                                                                                 |                       | Tahun 2024-2026  |                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                      |            | Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kota Parepare                                     |                       |                  |                                                                               |
| 27                                             | Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare                                                  | Pemilu     | 27. Pembentukan Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan                                                           | Kesepakatan Bersama   | 7 Oktober 2022   | sejak tanggal di tandatangan (7 Oktober 2022) sampai dengan 31 Desember 2022. |
| 28                                             | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Parepare                  | Kesehatan  | 28. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Parepare dalam rangka Universal Health Coverage | Rencana Kerja         | 15 Desember 2022 | 1 (Satu) Tahun sejak tanggal 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.             |
| 29                                             | PT. Bank Pembangunan Daerah 264system264i Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Parepare | Keuangan   | 31. Penggunaan Aplikasi 264system Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah Kota Parepare                            | Perjanjian Kerja Sama | 20 Desember 2022 | 3 (Tiga) Tahun                                                                |
| 30                                             | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya                                         | Pendidikan | 32. Kerja sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat                            | Kesepakatan Bersama   | 29 Desember 2022 | 5 (Lima) Tahun                                                                |

Sumber: Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun 2023

2.5 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota Parepare Tahun 2022

Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota untuk menggambarkan rencana pembangunan infrastruktur di daerah bersangkutan yang merupakan bagian dari PSN, Perpres percepatan pembangunan, dan/atau merupakan bagian rencana kebijakan provinsi di kabupaten/kota yang harus disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah. Berikut adalah tabel rencana pembangunan infrastruktur tahun 2024-2026.

Tabel  
Rencana Pembangunan Infrastruktur  
Kota Parepare

| Sumber Anggaran | Jenis Infrastruktur |                                                                               | Volume | Tahun | Keterangan                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APBN            | Pasar               | Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan | 1 unit | 2021  | Pembangunan Pasar Rakyat Lakessi II dengan luas bangunan 426 m2 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021 yang berlokasi di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang     |
|                 |                     | Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan | 1 unit | 2022  | Pembangunan Pasar Wekke’e dengan luas bangunan 643,5 m2 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022 s.d. 31 Desember 2022, yang berlokasi di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki |
|                 | Sanitasi            | Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK                               |        | 2023  | Berlokasi Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat                                                                                                                                         |
|                 | Air Minum           | Perluasan SPAM JP                                                             |        | 2023  |                                                                                                                                                                                              |
|                 | Jembatan            | Rehabilitasi Jembatan                                                         |        | 2023  |                                                                                                                                                                                              |
|                 |                     | Penggantian Jembatan                                                          |        | 2024  | Perencanaan Teknis dan Dokumen Lingkungan Penggantian                                                                                                                                        |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |          |                                 |  |      | Tahun 2024-2026                           |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------|
|                                                |          |                                 |  |      | Jembatan Tahun 2024                       |
| APBD<br>PROVINSI                               | Jembatan | Pembangunan Jembatan Kembar     |  | 2022 | Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2022      |
|                                                | Jalan    | Pemeliharaan/ Pembangunan Jalan |  |      | Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2021-2022 |

### 2.6 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Untuk gambaran BUMD yang berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, berikut adalah tabel yang memperlihatkan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan publik Kota Parepare Tahun 2022.

Tabel  
BUMN yang Mendukung Kinerja Pelayanan Publik Daerah  
Tahun 2022

| Nama Bumd | Jenis Dan Bentuk Dukungan                                              | Volume | Keterangan Dengan Prioritas Daerah                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDAM      | Layanan Pengelolah Air Bersih; dan Penyedia Air Minum di Kota Parepare |        | Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Dasar dan Peningkatan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Menuju Pelayanan Prima dan profesional serta Berkeadilan |
|           |                                                                        |        | Memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta mengotimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat                                          |

### **BAB III**

## **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan Pasal 1, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam perumusan tujuan, sasaran serta target kinerja yang akan dicapai. Sehingga dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026 perlu dilakukan analisis kinerja keuangan daerah yang tertuang pada APBD Tahun 2018-2022.

Analisis kinerja keuangan masa lalu tahun 2018-2022 dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa yang lalu, yang meliputi analisis tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selain itu, juga dianalisis neraca daerah yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya pada periode sebelumnya. Dari analisis kinerja beberapa tahun kebelakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan serta dengan melihat pertumbuhan data ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain.



### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan faktor yang penting dalam mengukur kemampuan keuangan daerah melaksanakan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pendapatan merupakan proses yang penting dalam penentuan alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai belanja program/kegiatan Pemerintah Kota Parepare.

Pengelolaan keuangan daerah Tahun 2018-2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dan pengelolaan keuangan Tahun 2021-2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam penyajian kinerja APBD 2018-2022 telah disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Kinerja APBD Kota Parepare Tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan realisasi pendapatan yang berfluktuatif, realisasi pendapatan melebihi 90 persen dicapai pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 melampaui 100 persen. Realisasi komponen belanja tahun 2018 hingga tahun 2021 tidak mencapai target, dengan penyerapan anggaran rata-rata 90,41 persen. Realisasi komponen penerimaan

pembiayaan tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan realisasi penerimaan 100 persen, sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan tahun 2018 sampai tahun 2020 dan tahun 2022 mencapai 100 persen dan tahun 2021 tidak tercapai. Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Parepare Tahun 2018-2022 (Rp Milyar)

| Tahun                         | Anggaran | Realisasi | Persen | Bertambah/<br>Berkurang<br>(Rp Milyar) |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------------------------------|
| <b>Pendapatan Daerah</b>      |          |           |        |                                        |
| 2018                          | 871,54   | 822,93    | 94,42  | -48,61                                 |
| 2019                          | 1,015,05 | 966,45    | 95,21  | -48,61                                 |
| 2020                          | 808,28   | 834,23    | 103,21 | 25,95                                  |
| 2021                          | 976,03   | 860,80    | 88,19  | -115,24                                |
| 2022                          | 1.000,57 | 906,54    | 90,52  | -94,87                                 |
| <b>Belanja Daerah</b>         |          |           |        |                                        |
| 2018                          | 864,31   | 790,23    | 91,43  | -74,08                                 |
| 2019                          | 1,029,8  | 923,32    | 89,65  | -106,56                                |
| 2020                          | 858,22   | 842,98    | 98,22  | -15,24                                 |
| 2021                          | 1,009,21 | 881,42    | 87,34  | -127,78                                |
| 2022                          | 1.010,33 | 904,43    | 89,45  | -106,61                                |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>  |          |           |        |                                        |
| 2018                          | 0,79     | 0,79      | 100,00 | -                                      |
| 2019                          | 22,84    | 22,84     | 100,00 | -                                      |
| 2020                          | 57,96    | 57,96     | 100,00 | -                                      |
| 2021                          | 41,19    | 41,19     | 100,00 | -                                      |
| 2022                          | 17,79    | 17,80     | 100,00 | -                                      |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b> |          |           |        |                                        |
| 2018                          | 8,02     | 8,02      | 100,00 | -                                      |
| 2019                          | 8,02     | 8,02      | 100,00 | -                                      |
| 2020                          | 8,02     | 8,02      | 100,00 | -                                      |
| 2021                          | 8,02     | 2,77      | 34,50  | -5,25                                  |
| 2022                          | 17,80    | 2,77      | 100,00 | -                                      |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (data diolah)

### **3.1.1.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang inovatif.

Analisis pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah kedepannya.

Kinerja Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan pendapatan sebesar minus 0,21 persen. Pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan positif yang tajam. Namun pada tahun 2020 kinerja pendapatan daerah mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negative 13,68 hal ini akibat dampak pandemi covid-19. Namun seiring dengan perbaikan perekonomian Kota Parepare pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik meningkat 3,18 persen pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 5,22 persen pada tahun 2022.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki kinerja cukup baik, dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar 6,69 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rata-rata

pertumbuhan 8,85 persen, kemudian Lain-lain PAD yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan 7,78 persen dan Pajak Daerah sebesar 3,93 persen, sedangkan Retribusi Daerah mengalami penurunan dengan rata-rata minus 6,21 persen.

Komponen Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 3,41 persen pertahun pada periode tahun 2018-2022. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat pertumbuhannya sangat kecil, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,67 persen pertahun. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan rata-rata 54,42 persen pertahunnya, pertumbuhan terbesar pada tahun 2019 karena adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk untuk pembangunan rumah sakit regional.

Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,08 persen yang berasal dari pendapatan hibah. Pendapatan hibah mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021.

Realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Parepare Tahun 2018-2022 sebagaimana tertuang pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2022  
(Rp Milyar)

| Kode Rekening     | Uraian                                                   | Tahun 2018    | Tahun 2019    | Tahun 2020    | Tahun 2021    | Tahun 2022*   | Rata-rata Pertumbuhan |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>4.</b>         | <b><u>PENDAPATAN DAERAH</u></b>                          | <b>822,93</b> | <b>966,45</b> | <b>834,23</b> | <b>860,80</b> | <b>906.54</b> | <b>3.04</b>           |
| <b>4.1.</b>       | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                      | <b>134,34</b> | <b>137,89</b> | <b>161,23</b> | <b>162,94</b> | <b>173.76</b> | <b>6.69</b>           |
| <b>4.1.01.</b>    | Pajak Daerah                                             | 30,35         | 33,92         | 32,60         | 36,29         | 38.82         | 6.21                  |
| <b>4.1.02.</b>    | Retribusi Daerah                                         | 7,63          | 7,49          | 5,87          | 5,71          | 7.15          | -0.79                 |
| <b>4.1.03.</b>    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan        | 6,47          | 6,94          | 8,67          | 9,12          | 8.94          | 8.85                  |
| <b>4.1.04.</b>    | Lain-lain PAD yang Sah                                   | 89,89         | 89,54         | 114,09        | 111,81        | 118.62        | 7.78                  |
| <b>4.2.</b>       | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                               | <b>669,55</b> | <b>809,08</b> | <b>609,59</b> | <b>678,94</b> | <b>720.19</b> | <b>3.41</b>           |
| <b>4.2.01.</b>    | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>              | <b>624,86</b> | <b>674,70</b> | <b>556,22</b> | <b>624,01</b> | <b>624.43</b> | <b>0.67</b>           |
| <b>4.2.01.01.</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                  | <b>599,61</b> | <b>645,72</b> | <b>555,22</b> | <b>568,64</b> | <b>603.71</b> | <b>0.56</b>           |
| 4.2.01.01.01.     | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                 | <b>12,99</b>  | 9,28          | 17,76         | 25,52         | 27.22         | 28.30                 |
| 4.2.01.01.02.     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)               | 454,75        | 474,98        | 437,82        | 429,88        | 428.80        | -1.36                 |
| 4.2.01.01.03.     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik     | 70,62         | 100,54        | 41,84         | 54,11         | 82.99         | 16.67                 |
| 4.2.01.01.04.     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 56,91         | 56,30         | 57,79         | 59,13         | 64.70         | 3.33                  |
|                   | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                  | 4,34          | 4,61          | -             | -             | -             | 0.00                  |
| 4.2.01.02.        | Dana Insentif Daerah (DID)                               | 25,25         | 28,98         | 1,00          | 55,37         | 20.71         | 1,323.16              |
| 4.2.01.02.01.     | DID                                                      | 25,25         | 28,98         | 1,00          | 55,37         | 20.71         | 1,323.16              |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| Kode Rekening     | Uraian                                                                           | Tahun 2018   | Tahun 2019    | Tahun 2020   | Tahun 2021   | Tahun 2022*  | Rata-rata Pertumbuhan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>4.2.02.</b>    | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>                                          | <b>44,69</b> | <b>134,38</b> | <b>53,37</b> | <b>54,93</b> | <b>95.76</b> | <b>54.42</b>          |
| <b>4.2.02.01.</b> | <b>Pendapatan Bagi Hasil</b>                                                     | <b>38,29</b> | <b>52,82</b>  | <b>46,30</b> | <b>40,04</b> | <b>61.82</b> | <b>16.62</b>          |
| 4.2.02.01.01.     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                                      | 38,29        | 52,82         | 46,30        | 40,04        | 61.82        | 16.62                 |
| <b>4.2.02.02.</b> | <b>Bantuan Keuangan</b>                                                          | <b>6,39</b>  | <b>81,57</b>  | <b>7,07</b>  | <b>14,89</b> | <b>33.95</b> | <b>330.70</b>         |
| 4.2.02.02.01.     | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi                                   | -            | -             | -            | 9,83         | 28.83        | 193.42                |
| 4.2.02.02.02.     | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi                                 | 6,39         | 81,57         | 7,07         | 5,07         | 5.12         | 264.21                |
| <b>4.3.</b>       | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                      | <b>19,04</b> | <b>19,47</b>  | <b>63,41</b> | <b>18,92</b> | <b>12.59</b> | <b>31.08</b>          |
| <b>4.3.01.</b>    | <b>Pendapatan Hibah</b>                                                          | <b>1,34</b>  | <b>1,16</b>   | <b>44,59</b> | <b>0,25</b>  | <b>12.59</b> | <b>2,141.26</b>       |
| <b>4.3.01.01.</b> | <b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>                                    | <b>1,34</b>  | <b>1,16</b>   | <b>44,59</b> | <b>0,24</b>  | <b>12.59</b> | <b>2,193.43</b>       |
| 4.3.01.01.01.     | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                           | 1,34         | 1,16          | 44,59        | 0,24         | 12.59        | 2,193.43              |
| 4.3.01.03.        | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri                | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0,01         | -            | -100.00               |
| 4.3.01.03.01.     | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri                | -            | -             | -            | 0,01         | -            | -100.00               |
| <b>4.3.03.</b>    | <b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b> | <b>17,69</b> | <b>18,31</b>  | <b>18,82</b> | <b>18,67</b> |              | <b>-23.64</b>         |
| <b>4.3.03.01.</b> | <b>Lain-lain Pendapatan</b>                                                      | <b>17,69</b> | <b>18,31</b>  | <b>18,82</b> | <b>18,67</b> | -            | <b>-23.64</b>         |
| 4.3.03.01.01.     | Pendapatan Hibah Dana BOS                                                        | 17,69        | 18,31         | 18,82        | 18,67        | -            | -23.64                |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

\* *anaudited*

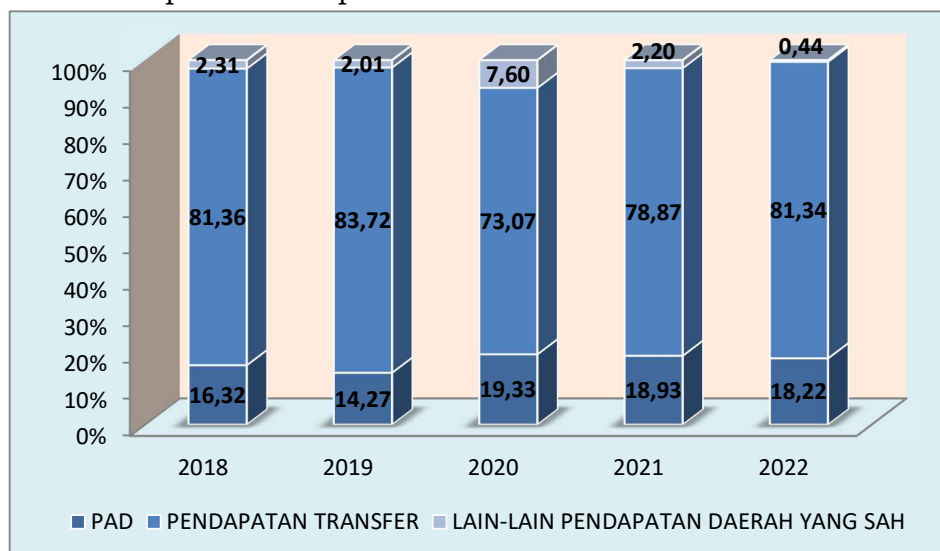
Grafik 3.1. Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

Secara keseluruhan, dengan mengamati ketiga jenis sumber pendapatan daerah Kota Parepare masih digerakkan oleh pendanaan dari pemerintah pusat melalui pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 79,31 persen pertahun, PAD dengan kontribusi masih 17,09 persen dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,10 persen.

Grafik 3.2 Proporsi Pendapatan daerah Menurut Jenis Penerimaan



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

### **3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah terdiri atas empat sumber penerimaan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari PAD mengindikasikan semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah yang berarti pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

Berdasarkan sumber penerimaan, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD perlu terus ditingkatkan sebagai upaya mendorong kemandirian fiskal Kota Parepare.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 rata-rata pertumbuhan PAD Kota Parepare sebesar 4,04 persen pertahun, ini menandakan pemerintah daerah Kota Parepare telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Rata-rata pertumbuhan sumber PAD terbesar adalah pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,85 persen pertahun, pajak daerah rata-rata sebesar 6,21 persen pertahun, kemudian lain-lain PAD yang sah sebesar 7,78 persen pertahun, dan untuk retribusi daerah cenderung menurun dengan penurunan rata-rata minus 0,79 persen pertahun.

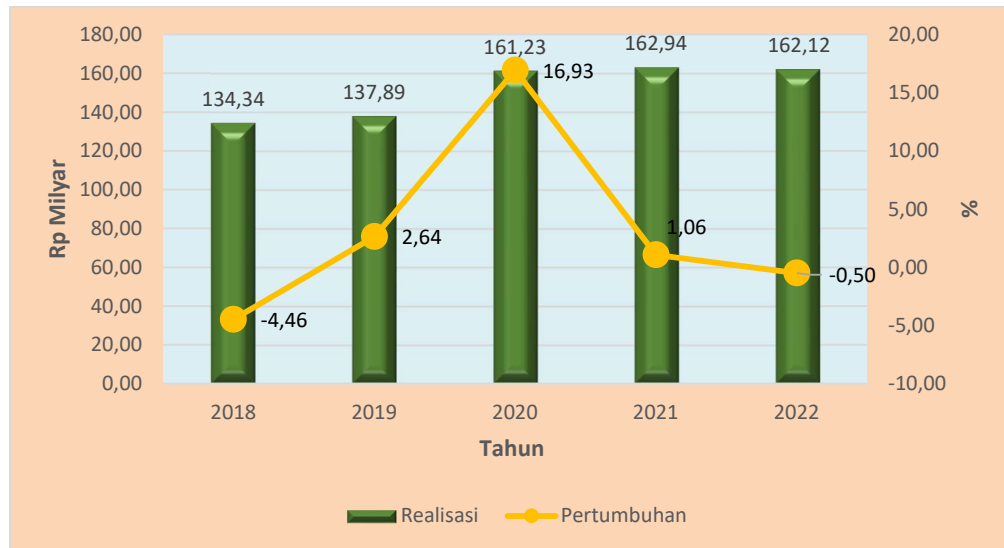
Realisasi PAD pada tahun 2018 yaitu pada realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 89,9 milyar namun menurun sedikit menjadi Rp 89,5 milyar pada tahun 2019, namun menanjak naik menjadi Rp 111,8 milyar pada tahun 2021. Pada pajak daerah cenderung meningkat tiap tahunnya, hal ini merupakan wujud dari pengembangan aktifitas ekonomi di Kota Parepare. Pada tahun 2018 pajak daerah sebesar Rp 30,3 milyar, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 33,9 milyar, namun menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 32,6 milyar dan tahun 2021 meningkat menjadi 36,3 milyar. Penerimaan lain pembentuk PAD yang berasal dari retribusi daerah tidak stabil dan cenderung menurun.



Selama periode tahun 2018-2022 kinerja retribusi daerah tertinggi pada tahun 2018.

Penerimaan PAD paling stabil dan terus meningkat pada periode tahun 2018-2022 adalah pada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan ini berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Lembaga Keuangan.

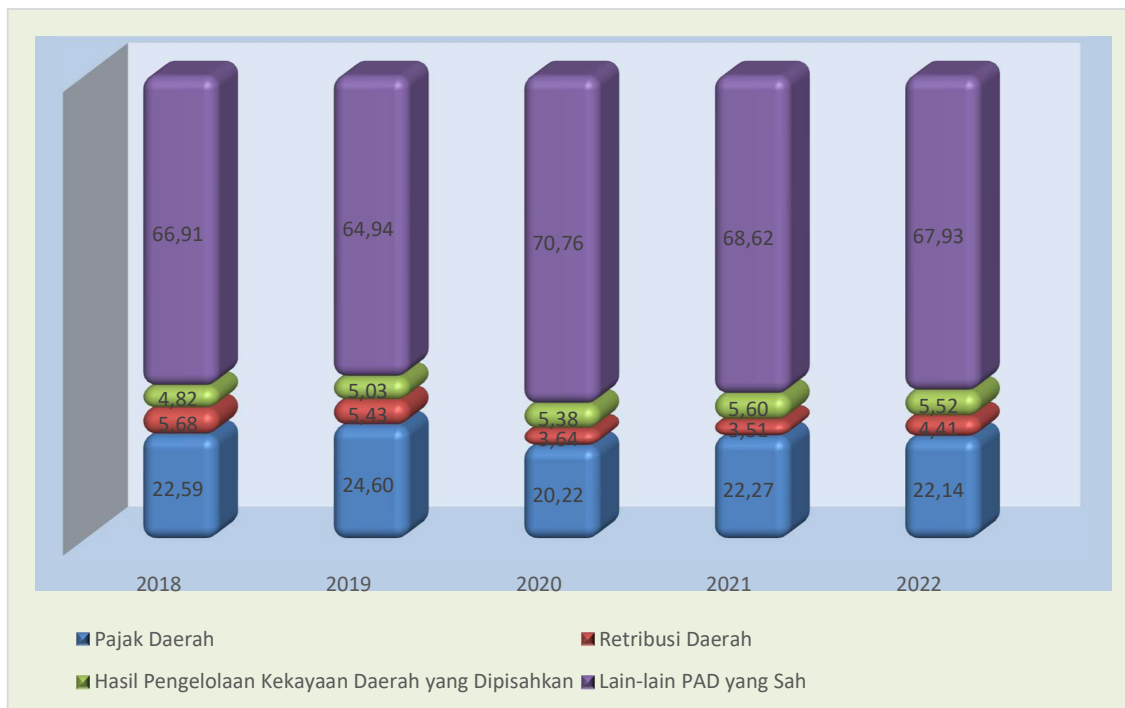
Grafik 3.3 Realisasi dan Pertumbuhan PAD



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

Dari keempat jenis sumber PAD, Lain-lain PAD yang sah merupakan sumber pembentuk PAD terbesar pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022, kemudian yang kedua pajak daerah, ketiga hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan terakhir retribusi daerah dengan rata-rata per tahun masing-masing 67,97 persen, 22,17 persen, 5,20 persen dan 4,46 persen per tahun.

Grafik 3.4 Proporsi PAD menurut Jenis Penerimaan



### 3.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang berasal dari pemerintah yang terdiri dari dana perimbangan dan pendapatan transfer antar daerah.

#### Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar-daerah. Pertumbuhan pendapatan transfer Kota Parepare pada kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pendapatan tertinggi pada kurun waktu tersebut yaitu di tahun 2019 sebesar Rp 809,08 milyar, ditahun 2020 menurun menjadi Rp 609,59 milyar, tahun 2021 meningkat menjadi Rp 678,94 milyar dan meningkat menjadi Rp 723,88 milyar di tahun 2022.

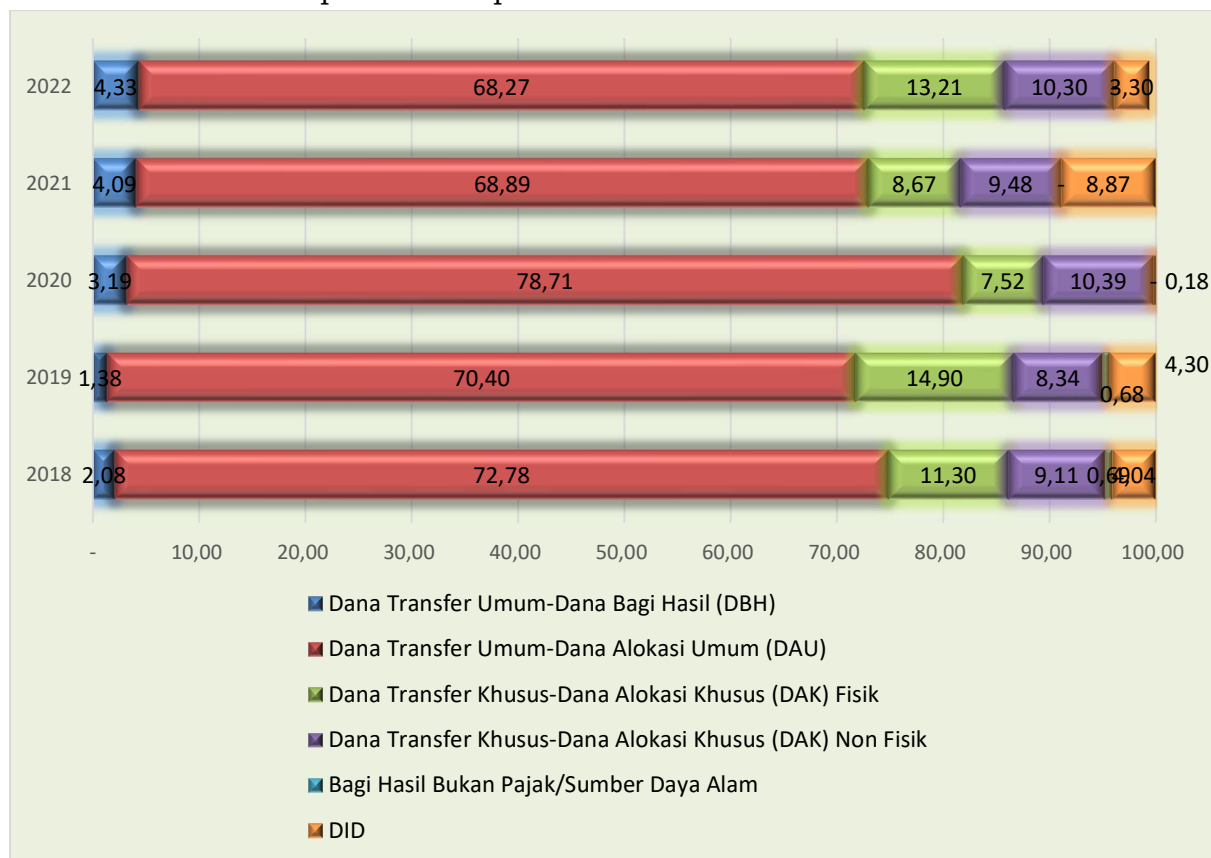
Grafik 3.5 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

Pendapatan transfer pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kota Parepare terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Insentif Daerah. Proporsi pendapatan transfer Pemerintah Pusat masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pertumbuhan cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan pada kurun waktu 2018-2023 sebesar minus 1,36 persen. Proporsi tertinggi selanjutnya adalah pada Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dengan pertumbuhan rata-rata 16,67 persen, kemudian DAK non fisik dengan pertumbuhan rata-rata 3,33 persen, kemudian DBH dengan pertumbuhan rata-rata 28,30 persen.

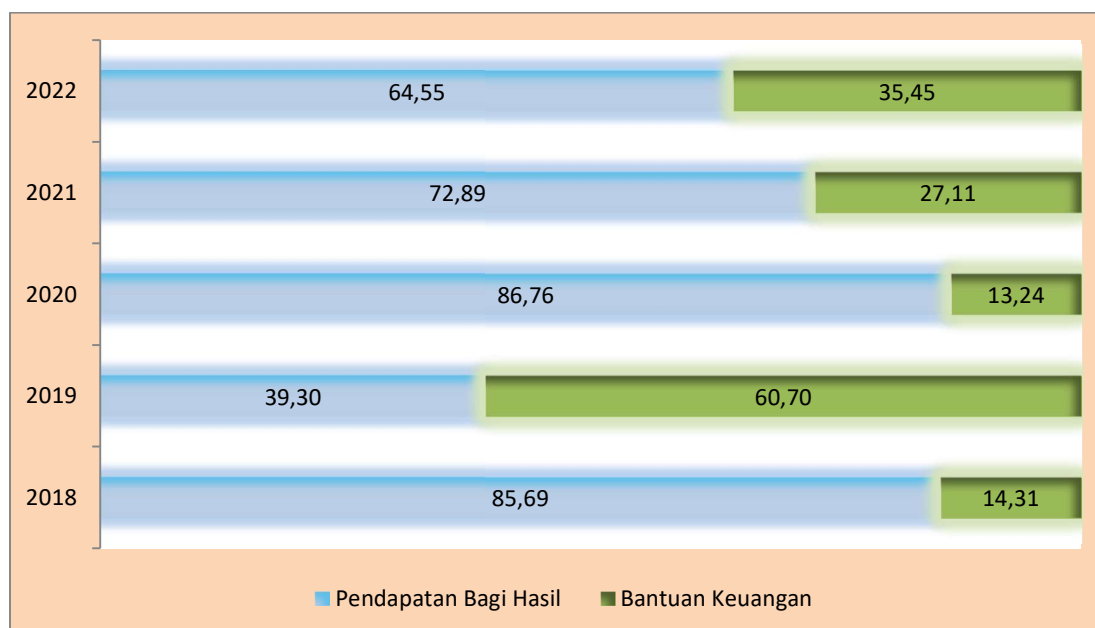
Grafik 3.6 Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

Pendapatan transfer antar-daerah untuk Pemerintah Kota Parepare terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Dalam kurun waktu 2018-2022, proporsi pendapatan transfer antar daerah terbesar pada pendapatan bagi hasil pajak, kecuali pada tahun 2019 proporsi terbesar adalah pada bantuan keuangan, karena adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan Rumah Sakit Regional.

Grafik 3.7 Proporsi Pendapatan Transfer Antar Daerah



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

#### 3.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan yang ditetapkan untuk

Pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Rata-rata pertumbuhan pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah berfluktuatif, namun cenderung menurun atau tergantung pada kebijakan dari Pemerintah Pusat, namun peningkatannya dalam kurun waktu tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 31,08 persen pertahunnya.

Meskipun proporsi Lain-lain pendapatan yang sah sangat kecil dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya namun masih mempunyai peluang untuk berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Realisasi dan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Parepare Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik 3.8

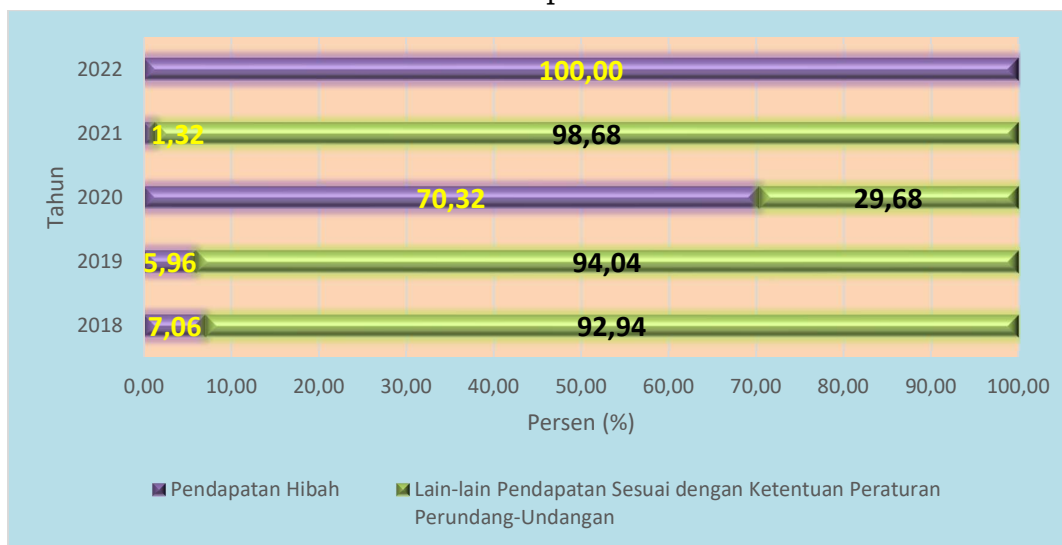
Grafik 3.8 Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

Tahun 2018-2022 proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah berfluktuatif, namun secara rata-rata kurun waktu tersebut kontribusi terbesar pada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dari kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, pajak rokok. Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada Grafik 3.9.

Grafik 3.9. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Parepare



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

**3.1.1.2 Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi belanja daerah Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 berfluktuasi seiring dengan kondisi penerimaan pendapatan daerah. Realisasi belanja daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 790,23 milyar lebih, dan pada tahun 2019 realisasi belanja daerah mengalami ekspansi menjadi Rp 923,31 Milyar lebih, menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 842,98, pada tahun 2021 sebesar Rp 881,42 Milyar, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp 903,74 milyar lebih.

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare****Tahun 2024-2026**

Tabel 3.3 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Parepare Periode Tahun 2018-2022 (Rp Milyar)

| Kode Rekening | Uraian                                     | Tahun 2018    | Tahun 2019    | Tahun 2020    | Tahun 2021    | Tahun 2022*   | Rata-rata Pertumbuhan |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>5.</b>     | <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>790,23</b> | <b>923,32</b> | <b>842,98</b> | <b>881,42</b> | <b>904.43</b> | <b>3.81</b>           |
| <b>5.1.</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>660,04</b> | <b>678,93</b> | <b>673,49</b> | <b>686,08</b> | <b>701.03</b> | <b>1.50</b>           |
| 5.1.01.       | Belanja Pegawai                            | 301,16        | 317,19        | 315,19        | 312,63        | 337.00        | 2.92                  |
| 5.1.02.       | Belanja Barang dan Jasa                    | 309,26        | 324,45        | 330,72        | 366,98        | 353.80        | 3.52                  |
| 5.1.03.       | Belanja Bunga                              | 1,99          | 1,95          | 1,61          | 1,02          | 0.77          | -20.31                |
| 5.1.05.       | Belanja Hibah                              | 45,39         | 32,81         | 23,11         | 5,15          | 7.52          | -22.23                |
| 5.1.06.       | Belanja Bantuan Sosial                     | -             | 2,53          | 2,85          | 0,30          | 1.78          | 139.06                |
|               | Belanja Subsidi                            | 2,23          | -             | -             | -             | -             | 0.00                  |
| <b>5.2.</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>129,18</b> | <b>243,48</b> | <b>165,58</b> | <b>190,35</b> | <b>199.01</b> | <b>19.00</b>          |
| 5.2.01.       | Belanja Modal Tanah                        | 7,50          | 7,24          | 0,68          | 2,09          | 0.67          | 11.52                 |
| 5.2.02.       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 50,28         | 80,34         | 78,24         | 33,75         | 56.76         | 17.13                 |
| 5.2.03.       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 34,82         | 116,45        | 39,90         | 94,51         | 56.54         | 66.35                 |
| 5.2.04.       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 32,77         | 35,11         | 44,45         | 59,79         | 85.00         | 27.58                 |
| 5.2.05.       | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 3,82          | 4,34          | 2,31          | 0,22          | 0.10          | -43.81                |
| <b>5.3.</b>   | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>0,21</b>   | <b>0,08</b>   | <b>3,06</b>   | <b>4,99</b>   | <b>4.31</b>   | <b>957.44</b>         |
| 5.3.01.       | Belanja Tidak Terduga                      | 0,21          | 0,08          | 3,06          | 4,99          | 4.31          | 957.44                |
| <b>5.4.</b>   | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>0,81</b>   | <b>0,82</b>   | <b>0,86</b>   | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           |
| 5.4.02.       | Belanja Bantuan Keuangan                   | 0,81          | 0,82          | 0,86          | 0             | 0.00          | 0.00                  |

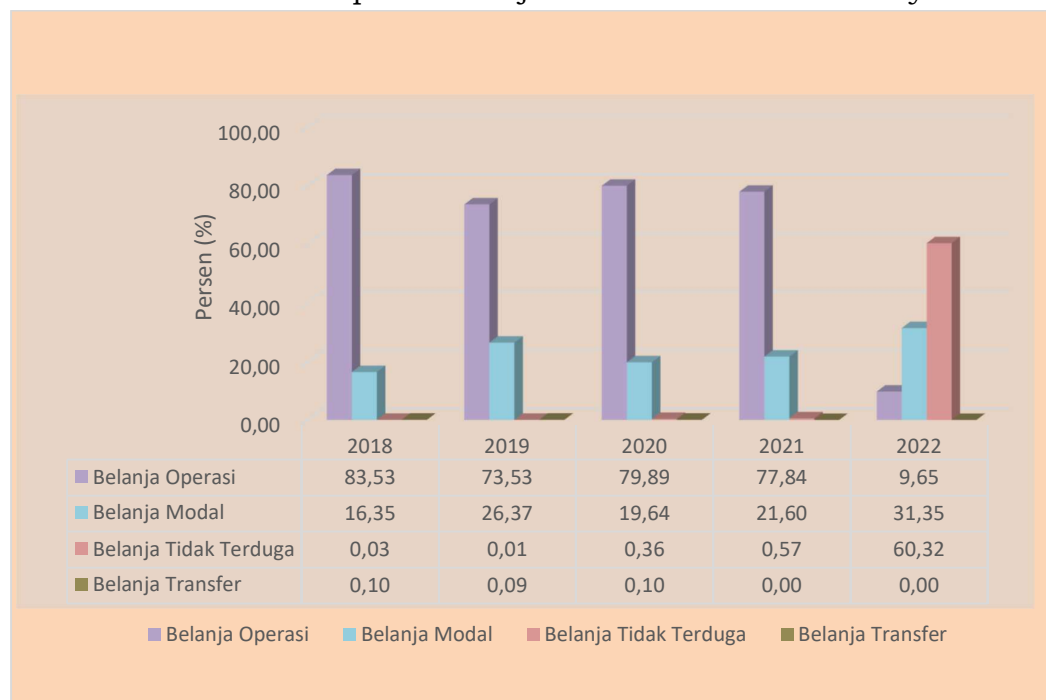
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

\* *anaudited*



Dengan mengamati besaran belanja Operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dapat disimpulkan bahwa proporsi belanja operasi memperoleh alokasi belanja terbesar. Selama periode tahun 2018-2022 proporsi terbesar dari total belanja daerah yaitu belanja operasi dan yang terendah adalah belanja transfer. Rata-rata proporsi belanja daerah berdasarkan jenisnya selama periode tahun 2018-2022 yaitu 76,57 persen untuk belanja operasi, belanja modal sebesar 23,15 persen, belanja tidak terduga 0,20 persen, dan belanja transfer sebesar 0,08 persen.

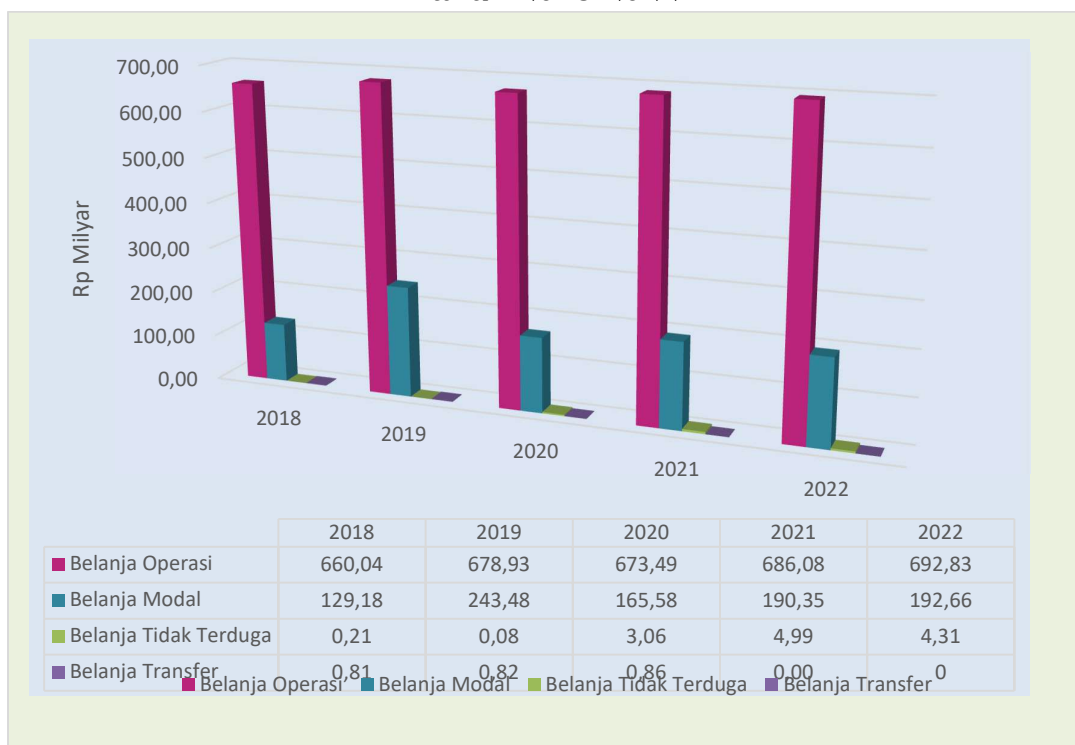
Grafik 3.10 Proporsi Belanja Daerah Menurut Jenisnya



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

Selama periode 2018-2022, perkembangan belanja daerah menurut komponen belanja secara grafik dapat dilihat pada Grafik 3.10 . Selama lima tahun terakhir, belanja daerah menurut komponen belanja, baik belanja operasi, Belanja modal, belanja tak terduga maupun belanja transfer mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Grafik 3.11 Perkembangan Belanja Daerah Kota Parepare  
Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

#### 3.1.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Tahun 2018 realisasi belanja operasi sebesar Rp 660,04 Milyar dan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 700,41 Milyar atau mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,50 persen pertahunnya. Proporsi belanja operasi terbesar pada periode 2018-2022 pada belanja barang dan jasa dengan rata-rata proporsi sebesar 51,01 persen dan belanja pegawai dengan rata-rata proporsi sebesar 46,57 persen.

Rata-rata komponen belanja operasi yang mengalami pertumbuhan yang negatif dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 yaitu belanja bunga sebesar -20,31 persen pertahunnya, belanja hibah sebesar -22,23 persen pertahun, sedangkan komponen belanja operasi yang mengalami pertumbuhan yang positif yaitu belanja pegawai yang mengalami rata-

rata pertumbuhan sebesar 2,92 persen, belanja barang dan jasa 3,52 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 139,06 persen.

#### **3.1.1.2.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi belanja modal selama periode Tahun 2018-2022 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2018 realisasi belanja modal sebesar Rp 129,18 Milyar, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp 243,48 Milyar, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 165,58 Milyar dan meningkat menjadi Rp 190,35 Milyar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp 199,01 milyar pada tahun 2022.

Komponen belanja modal terdiri dari belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; serta belanja modal aset tetap lainnya. Hampir seluruh komponen belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif selama periode waktu tahun 2018-2022, hanya komponen belanja modal aset tetap dan lainnya yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -43,78 persen, sedangkan komponen belanja lainnya bertumbuh positif yaitu belanja modal tanah dengan pertumbuhan sebesar 11,52 persen pertahun, belanja modal peralatan dan mesin bertumbuh sebesar 17,13 persen, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi bertumbuh pula sebesar 66,35 persen dan 27,58 persen.

#### **3.1.1.2.3 Belanja Tak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga merupakan salah satu komponen belanja yang paling sedikit proporsinya yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 0,21 Milyar, dan yang paling terkecil nilainya pada tahun 2019 sebesar Rp 0,08 Milyar, tahun 2020 sebesar Rp 3,06

persen, dan yang terbesar nilainya pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 4,99 Milyar, dan tahun 2022 sebesar Rp 4,31 Milyar.

Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga cukup besar walaupun ada beberapa tahun dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2018 sampai 2019 belanja tak terduga mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu negative 63,03 persen dan -62,35 persen, pada tahun berikutnya pertumbuhan belanja tak terduga mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup besar yaitu 3842,40 persen pada tahun 2020 disebabkan karena ada belanja dalam penanganan pandemi covid-19 dan meningkat 63,32 persen pada tahun 2021 dan mengalami penurunan ditahun 2022 yaitu negative 13,59 persen.

#### **3.1.1.2.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer juga merupakan salah komponen belanja yang paling sedikit proporsinya pada total belanja daerah selama periode waktu tahun 2018-2022, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 0,81 Milyar, tahun 2019 sebesar Rp 0,82 Milyar dan tahun 2020 sebesar Rp 0,86 Milyar, namun pada tahun 2021 dan 2022 belanja transfer yang berupa belanja bantuan keuangan tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

#### **3.1.1.3 Pembiayaan Daerah**

Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan daerah didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang, sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Realisasi dan Rata-rata Pembiayaan Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2022 (Rp Milyar)

| Kode Rekening | Uraian                                                       | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022* | Rata-rata Pertumbuhan |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| 6.            | PEMBIAYAAN DAERAH                                            | (7,23)     | 14,83      | 49,94      | 38,42      | 15.03       | -38.04                |
| 6.1.          | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                        | 0,79       | 22,84      | 57,96      | 41,19      | 17.80       | 718.22                |
| 6.1.01.       | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 0,79       | 22,84      | 57,96      | 41,19      | 17.80       | 718.22                |
| 6.1.01.05.    | Penghematan Belanja                                          | 0,79       | 22,84      | 57,96      | 41,19      | 17.80       | 718.22                |
| 6.1.01.05.02. | Penghematan Belanja-Belanja Modal                            | 0,79       | 22,84      | 57,96      | 41,19      | 17.80       | 718.22                |
| 6.2.          | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                       | 8,02       | 8,02       | 8,02       | 2,77       | 2.77        | -16.37                |
| 6.2.02.       | Penyertaan Modal Daerah                                      | 5,25       | 5,25       | 5,25       | -          | -           | -33.33                |
| 6.2.02.02.    | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 5,25       | 5,25       | 5,25       | -          | -           | -33.33                |
| 6.2.02.02.01. | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                            | 5,25       | 5,25       | 5,25       | -          | -           | -33.33                |
| 6.2.03.       | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo              | 2,77       | 2,77       | 2,77       | 2,77       | 2.77        | 0.00                  |
| 6.2.03.01.    | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat             | 2,77       | 2,77       | 2,77       | 2,77       | 2.77        | 0.00                  |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare****Tahun 2024-2026**

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>                                                                                   | <b>Tahun 2018</b> | <b>Tahun 2019</b> | <b>Tahun 2020</b> | <b>Tahun 2021</b> | <b>Tahun 2022*</b> | <b>Rata-rata Pertumbuhan</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 6.2.03.01.02.        | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 2,77              | 2,77              | 2,77              | 2,77              | 2<br>.77           | 0.00                         |
|                      | PEMBIAYAAN NETTO                                                                                | (7,23)            | 14,83             | 49,94             | 38,42             | 15.03              |                              |
|                      | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)                                                          | 26,47             | 57,96             | 41,19             | 17,80             | 16.99              |                              |

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023**\* anaudited*

Realisasi Pembiayaan Daerah selama Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebesar negatif 7,23 Milyar lebih, realisasi negatif pembiayaan dikarenakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan yang telah direncanakan, namun pada tahun 2019 realisasi pembiayaan lebih meningkat sebesar Rp 14,83 Milyar lebih, pada tahun 2020 Rp 49,94 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 38.42 Milyar. Perkembangan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi ditunjukkan pada grafik di bawah. Penyebab dari fluktuasi penerimaan pembiayaan ditentukan oleh kebijakan penganggaran yang ditempuh. Penerimaan pembiayaan cenderung meningkat karena terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang meningkat dan ketika terdapat kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan pinjaman untuk mendanai defisit anggaran. Demikian halnya dengan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh kebijakan terkait dengan pencairan dana cadangan dan atau pembayaran bunga pinjaman sebagai konsekuensi dari pinjaman daerah.

Grafik 3.12 Realisasi Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018-2021



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Kota Parepare Tahun 2018-2021 disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini :



Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2021 (Rp Milyar)

| No.         | Uraian                                    | Tahun 2018      | Tahun 2019      | Tahun 2020      | Tahun 2021      | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ASET</b>                               | <b>2,004,21</b> | <b>2,192,07</b> | <b>2,172,13</b> | <b>2,249,32</b> | <b>4,00</b>                     |
| <b>1.1.</b> | <b>ASET LANCAR</b>                        | <b>74,36</b>    | <b>119,82</b>   | <b>79,50</b>    | <b>89,77</b>    | <b>7,78</b>                     |
| 1.1.1.      | Kas di Kas Daerah                         | 22,62           | 57,18           | 34,18           | 0,16            | (4,68)                          |
| 1.1.2.      | Kas di Bendahara Pengeluaran              | 0,11            | 0,02            | 0,01            | 0,36            | 871,71                          |
| 1.1.3.      | Kas di Bendahara Penerimaan               | 0,07            | -               | 0,01            | -               | (33,33)                         |
|             | Kas di BLUD                               | 0,15            | 0,31            | 5,67            | 16,62           | 129,54                          |
|             | Kas di Bendahara Kapitasi JKN             | -               | -               | 0,28            | 0,01            |                                 |
|             | Kas Dana Bos                              | -               | -               | 1,04            | 0,64            |                                 |
|             | Kas Lainnya                               | 0,06            | 0,47            | -               | 0,04            |                                 |
|             | Setara Kas                                | -               | -               | -               | -               |                                 |
|             | Investasi Jangka Pendek                   | -               | -               | -               | -               |                                 |
|             | Piutang Pajak                             | 12,99           | 20,98           | 20,93           | 8,65            | 0,89                            |
|             | Penyisihan Piutang Pajak                  | (3,76)          | (4,03)          | -               | -               |                                 |
|             | Piutang Pjak Netto                        | 9,22            | 16,95           | -               | -               |                                 |
|             | Piutang Retribusi                         | 0,07            | 0,08            | 0,07            | 0,07            | 0,58                            |
|             | Penyisihan Piutang Retribusi              | (0,05)          | (0,06)          | -               | -               |                                 |
|             | Piutang Retribusi Netto                   | 0,02            | 0,02            | -               | -               |                                 |
|             | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah            | 28,43           | 29,71           | 6,14            | 22,39           | (38,18)                         |
|             | Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | (0,44)          | (0,81)          | -               | -               |                                 |
|             | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto      | 27,99           | 28,89           | -               | -               |                                 |
|             | Piutang Transfer Antar Daerah             | -               | -               | -               | 23,27           |                                 |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| No.         | Uraian                        | Tahun 2018      | Tahun 2019      | Tahun 2020      | Tahun 2021     | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
|             | Penyisihan Piutang            | (4,26)          | (4,90)          | (4,45)          | (5,04)         | 6,08                            |
|             | Belanja Dibayar Dimuka        | 0,0003          | 3,53            | 0,009           | 2,9            | 395.548,23                      |
|             | Piutang Lainnya               | 0,002           | 0,0016          | 0,0116          | 0,0055         | 11,16                           |
|             | Penyisihan Pitang Lainnya     | (0,0016)        | (0,0016)        | 0,00            | 0,00           |                                 |
|             | Piutang Lainnya Netto         | -               | 0,00            | 0,00            | 0,00           |                                 |
|             | Persediaan                    | 14,18           | 12,45           | 15,59           | 19,67          | 11,36                           |
|             | <b>Jumlah Aset Lancar</b>     | <b>74,36</b>    | <b>119,82</b>   | <b>79,50</b>    | <b>89,77</b>   | <b>7,78</b>                     |
|             |                               |                 |                 |                 |                |                                 |
| <b>1.2.</b> | <b>ASET TETAP</b>             | <b>1.793,69</b> | <b>1.945,41</b> | <b>1.935,71</b> | <b>2008,32</b> | 3,90                            |
| 1.2.1.      | Tanah                         | 563,28          | 572,03          | 566,87          | 581,33         | 1,06                            |
| 1.2.2.      | Peralatan dan Mesin           | 475,11          | 572,60          | 640,58          | 634,84         | 10,08                           |
| 1.2.3.      | Gedung dan Bangunan           | 695,75          | 774,53          | 921,78          | 969,56         | 10,83                           |
| 1.2.4.      | Jalan, Irigasi, dan Jaringan  | 961,74          | 931,59          | 984,76          | 1014,07        | 1,75                            |
| 1.2.5.      | Aset Tetap Lainnya            | 20,79           | 22,48           | 24,49           | 26,74          | 8,50                            |
| 1.2.6.      | Konstruksi dalam Pengerjaan   | 76,98           | 150,24          | 13,42           | 87,73          | (123,57)                        |
| 1.2.7.      | Akumulasi Penyusutan          | (999,95)        | (1.078,06)      | (1.216,20)      | (1305,95)      | 8,85                            |
|             | <b>Jumlah Aset Tetap</b>      | <b>1.793,69</b> | <b>1.945,41</b> | <b>1.935,71</b> | <b>2008,32</b> | 3,90                            |
|             |                               |                 |                 |                 |                |                                 |
| <b>1.3.</b> | <b>ASET LAINNYA</b>           | <b>57,18</b>    | <b>41,72</b>    | <b>67,17</b>    | <b>59,67</b>   | (0,10)                          |
| 1.3.1.      | Tagihan Penjualan Angsuran    | -               | -               | -               | -              |                                 |
|             | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 24,36           | 24,36           | 24,36           | 24,36          | -                               |
|             | Aset Tidak Berwujud           | 1,09            | 1,85            | 2,18            | 2,18           | 28,56                           |
|             | Amortisasi Aset Tak Berwujud  | (0,65)          | (0,82)          | (1,12)          | (1,48)         | 28,23                           |
|             | Aset Tak Berwujud Netto       | 0,43            | 1,04            | 1,06            | 0,70           | 35,49                           |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| No.         | Uraian                                    | Tahun 2018      | Tahun 2019      | Tahun 2020      | Tahun 2021     | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
|             | Aset Lain-lain                            | 32,38           | 16,32           | 41,75           | 34,62          | (1,93)                          |
|             | Amortisasi Aset Tak Berwujud              | -               | -               | -               | -              |                                 |
|             | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                | <b>57,18</b>    | <b>41,72</b>    | <b>67,17</b>    | <b>61,85</b>   | 0,98                            |
|             |                                           |                 |                 |                 |                |                                 |
|             | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>           | <b>78,98</b>    | <b>85,11</b>    | <b>89,75</b>    | <b>91,56</b>   | 4,98                            |
|             | Investasi Non Permanen Lainnya            | 1,31            | 1,29            | 1,29            | 1,28           | (0,82)                          |
|             | Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya | (1,31)          | (1,29)          | (1,29)          | (1,28)         | (0,82)                          |
|             | <b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>      | -               | -               | -               | -              |                                 |
|             |                                           |                 |                 |                 |                |                                 |
|             | Investasi Permanen                        | 78,98           | 85,11           | 89,75           | 91,56          | 4,98                            |
|             | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah        | 78,98           | 85,11           | 89,75           | 91,56          | 4,98                            |
|             | Investasi Permanen Lainnya                | -               | -               | -               | -              |                                 |
|             | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>          | <b>78,98</b>    | <b>85,11</b>    | <b>89,75</b>    | <b>91,56</b>   | 4,98                            |
|             | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>    | <b>78,98</b>    | <b>85,11</b>    | <b>89,75</b>    | <b>91,56</b>   | 4,98                            |
|             |                                           |                 |                 |                 |                |                                 |
|             | <b>JUMLAH ASET DAERAH</b>                 | <b>2.004,21</b> | <b>2.192,07</b> | <b>2.172,13</b> | <b>2249,32</b> | 4,00                            |
|             |                                           | -               | -               | -               | -              |                                 |
| <b>2</b>    | <b>KEWAJIBAN</b>                          | <b>59,73</b>    | <b>67,51</b>    | <b>39,57</b>    | <b>59,26</b>   | (2,61)                          |
| <b>2.1.</b> | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>            | <b>43,13</b>    | <b>53,68</b>    | <b>28,50</b>    | <b>50,97</b>   | 4,98                            |
| 2.1.1.      | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)      | 0,10            | 0,02            | 0,02            | 0,04           | 332,77                          |
| 2.1.2.      | Utang Bunga                               | 0,78            | 0,67            | 0,56            | 0,44           | (18,21)                         |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| No.         | Uraian                                 | Tahun 2018      | Tahun 2019      | Tahun 2020      | Tahun 2021     | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
|             | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang     | 2,77            | 2,77            | 2,77            | 2,77           |                                 |
|             | Pendapatan Diterima Dimuka             | 0,46            | 0,52            | 0,44            | 0,52           | 4,01                            |
|             | Utang Belanja                          | 39,02           | 49,70           | 24,73           | 47,20          | 5,74                            |
|             | Utang Jangka Pendek Lainnya            | -               | 0,00            | 0,00            | 0,00           |                                 |
|             | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  | <b>43,13</b>    | <b>53,68</b>    | <b>28,50</b>    | <b>50,97</b>   | 4,98                            |
|             |                                        |                 |                 |                 |                |                                 |
|             | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG               | 16,60           | 13,83           | 11,06           | 8,30           | (22,22)                         |
|             | Utang Jangka Panjang Lainnya           | 16,60           | 13,83           | 11,06           | 8,30           | (22,22)                         |
|             | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> | <b>16,60</b>    | <b>13,83</b>    | <b>11,06</b>    | <b>8,30</b>    | (22,22)                         |
|             | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                | <b>59,73</b>    | <b>67,51</b>    | <b>39,57</b>    | <b>59,26</b>   | (2,61)                          |
|             |                                        |                 |                 |                 |                |                                 |
| <b>3</b>    | <b>EKUITAS DANA</b>                    | <b>1.944,48</b> | <b>2.124,56</b> | <b>2.132,56</b> | <b>2190,06</b> | 4,11                            |
| <b>3.1.</b> | <b>EKUITAS DANA LANCAR</b>             | -               | -               | -               | -              |                                 |
| 3.1.1.      | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | -               | -               | -               | -              |                                 |
| 3.1.2.      | Pendapatan yang Ditangguhkan           | -               | -               | -               | -              |                                 |
| 3.1.3.      | Cadangan Piutang                       | -               | -               | -               | -              |                                 |
| 3.1.4.      | Cadangan Persediaan                    | -               | -               | -               | -              |                                 |
|             | <b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>      | -               | -               | -               | -              |                                 |
|             |                                        |                 |                 |                 |                |                                 |
| <b>3.2.</b> | <b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>          | -               | -               | -               | -              |                                 |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**

Tahun 2024-2026

| No.    | Uraian                                        | Tahun 2018      | Tahun 2019      | Tahun 2020      | Tahun 2021     | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 3.2.1. | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | -               | -               | -               | -              |                                 |
| 3.2.2. | Diinvestasikan dalam Aset Tetap               | -               | -               | -               | -              |                                 |
| 3.2.3. | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya             | -               | -               | -               | -              |                                 |
|        | <b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>          | -               | -               | -               | -              |                                 |
|        |                                               |                 |                 |                 |                |                                 |
|        | <b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>                    | <b>1.944,48</b> | <b>2.124,56</b> | <b>2.132,56</b> | <b>2190,06</b> | <b>4,11</b>                     |
|        |                                               |                 |                 |                 |                |                                 |
|        | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>      | <b>2.004,21</b> | <b>2.192,07</b> | <b>2.172,13</b> | <b>2249,32</b> | <b>4,00</b>                     |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

### 3.1.2.1 Aset

Pada tahun 2018 total aset Rp 2.004,21 Trilyun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 2.249,32 Trilyun disebabkan karena adanya penambahan Belanja Modal di SKPD. Peningkatan aset dari penambahan belanja modal setiap tahun baik pengadaan tanah, gedung, jaringan, dan irigasi dari tahun ketahun mengalami penambahan walaupun di dalam neraca tersebut tetap terjadi pengurangan atau penyusutan setiap tahun namun tidak berpengaruh signifikan. Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2018-2021, Kota Parepare mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,00 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset lancar dengan rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 7,78 persen dan aset tetap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen pertahun, sementara aset lainnya hanya mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,01 persen.

### 3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban yang disajikan di Neraca pada tahun 2018 s.d. 2021 mengalami pencatatan secara fluktuatif, utang jangka panjang selalu mengalami penurunan karena tetap dibayar setiap tahun, utang tersebut adalah pasar lakessi.

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kota Parepare selama periode 2018-2021 mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -2.61 persen setiap tahunnya. Kewajiban jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,98 persen pertahun. Kewajiban jangka panjang mengalami pertumbuhan

negative dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -22,22 persen pertahun yang hanya didapatkan dari komponen utang jangka panjang lainnya.

### 3.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan Bersih pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah. Ekuitas dana tahun 2018 sebesar Rp 1.944,48 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 2.124,5 triliun, pada tahun 2020 menjadi Rp 2.132,5 Triliun lebih, dan tahun 2021 meningkat sebesar Rp 2.190 Triliun.

Berdasarkan neraca daerah Pemerintah Kota Parepare Tahun 2018-2021 tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (*Leverage*), dan Rasio Aktivitas.

#### a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Didalam Komponen Rasio Likuiditas ini ada 2 (dua) komponen rasio yang dihitung yaitu Rasio Lancar dengan formula aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek dan Rasio Quick dengan formula adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel 3.6 di bawah dapat diketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Kota Parepare berada rata-rata berada diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Parepare dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.

Tabel 3.6  
Rasio Lancar Kota Parepare Tahun 2018-2020

| Tahun | Aset Lancar (Rp)   | Kewajiban Jangka Pendek (Rp) | Rasio Lancar |
|-------|--------------------|------------------------------|--------------|
| 2018  | 74,359,196,152.57  | 43,134,651,138.71            | 1,72         |
| 2019  | 119,824,057,392.97 | 53,679,109,231.61            | 2,23         |
| 2020  | 79,497,290,446.29  | 28,503,772,463.43            | 2,79         |
| 2021  | 89,769,663,153.33  | 50,965,473,010.09            | 1,76         |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

Rasio cair yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.7, rasio cair Pemerintah Kota Parepare capaiannya lebih, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.7  
Rasio Quick Kota Parepare Tahun 2018-2020

| Tahun | Aset Lancar (Rp)   | Persediaan (Rp)   | Kewajiban Jangka Pendek (Rp) | Rasio Quick |
|-------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| 2018  | 74,359,196,152.57  | 14,177,728,486.75 | 43,134,651,138.71            | 1.40        |
| 2019  | 119,824,057,392.97 | 12,449,272,873.88 | 53,679,109,231.61            | 2.00        |
| 2020  | 79.497.290.446,28  | 15.594.744.951,54 | 28.503.772.463,43            | 2.24        |
| 2021  | 89,769,663,153.33  | 19,666,913,667.86 | 50,965,473,010.09            | 1.38        |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)



## b. Rasio Solvabilitas

Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Adapun rasio yang digunakan untuk menghitung Rasio Solvabilitas ini adalah Rasio Total Hutang terhadap total Aset yang secara langsung membandingkan Total Kewajiban (Kewajiban Jangka Pendak dan Kewajiban Jangka Panjang) dibagi dengan Total Asset dan Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas dengan membandingkan Total kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Rasio total kewajiban terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh kewajiba/utang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh utang terhadap aktiva Pemerintah Kota Parepare yang paling besar yaitu 0,03 persen pada tahun 2018, paling rendah sebesar 0,02 persen pada tahun 2020 dan 0,03 persen pada tahun 2021. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

Tabel 3.8  
Rasio Total kewajiban dengan Aset

| Tahun | Total Kewajiban (Rp) | Total Aset (Rp)      | Rasio |
|-------|----------------------|----------------------|-------|
| 2018  | 59,729,793,323.98    | 2,004,213,755,320.63 | 0.03  |
| 2019  | 67,508,394,386.07    | 2,192,071,051,830.02 | 0.03  |
| 2020  | 39.567.200.587,15    | 2.172.128.990.606,18 | 0,02  |
| 2021  | 59,263,044,103.07    | 2,249,324,696,756.63 | 0,03  |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

Rasio Utang terhadap asset 4 (empat) tahun mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2018 sebesar 0,03 dan pada Tahun 2021 menurun menjadi 0,3 ini menandakan total asset masih lebih banyak dari kewajiban Pemerintah Kota Parepare.

Tabel 3.9  
Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas

| Tahun | Total Kewajiban   | Ekuitas Dana         | Rasio Hutang Terhadap Ekuitas |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2018  | 59,729,793,323.98 | 1,944,483,961,996.65 | 0.03                          |
| 2019  | 67,508,394,386.07 | 2,124,562,657,443.95 | 0.03                          |
| 2020  | 39.567.200.587,15 | 2.132.561.790.019,03 | 0,02                          |
| 2021  | 59,263,044,103.07 | 2,190,061,652,653.56 | 0,03                          |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, menunjukkan rasio total utang terhadap ekuitas dari 0,03 tahun 2018 dan hingga tahun 2021 sebesar 0,03, dan pada range waktu itu tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan, yang berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil. Peningkatan rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Parepare untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya masih terkategori sangat baik, karena pendanaan utang untuk membiayai aktivitas pemerintah masih sangat kecil.

#### c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa lama tingkat perputaran piutang dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Kota Parepare untuk terkonversi menjadi kas untuk mendukung pelayanan publik. Rasio Aktivitas selama 4 (empat) tahun terakhir tahun 2018-2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Rasio Aktivitas Kota Parepare Tahun 2018-2021

| Uraian                    | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rata-rata Umur Piutang    | 1-5 Tahun  | 1-5 Tahun  | 1-5 Tahun  | 1-5 Tahun  |
| Rata-rata Umur Persediaan | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, menunjukkan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Parepare dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebesar 1-5 tahun. Rata-rata umur persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya instansi mengontrol modal yang ada pada persediaan. Rata-rata umur persediaan menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

#### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan belanja aparatur Pemerintah Kota Parepare tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung berfluktuasi. Tahun 2018 proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran sebesar 37,73 persen, dan tahun 2019 menurun menjadi 34,06 persen, tahun 2020 mengalami peningkatan dengan proporsi sebesar 37,04 persen dan kembali menurun di tahun 2021 sebesar 35,36 persen, namun meningkat menjadi 40,01 pada tahun 2022\*. Namun proporsi belanja aparatur rata-rata dibawah 40 persen, ini menandakan bahwa 60 persen anggaran digunakan dengan mengutamakan pembangunan untuk kebutuhan public, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik serta keadilan ekonomi masyarakat.

Tabel 3.11 Analisis Proporasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

| Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp Milyar) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeu-aran) / (Rp Milyar) | Prosentase (%) |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2018   | 301,15                                                       | 798,24                                                             | 37,73          |
| 2019   | 317,19                                                       | 931,33                                                             | 34,06          |
| 2020   | 315,19                                                       | 850,99                                                             | 37,04          |
| 2021   | 312,62                                                       | 884,19                                                             | 35,36          |
| 2022*  | 333,97                                                       | 695,60                                                             | 40,01          |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang.

Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk memanfaatkan surplus tersebut dalam aktivitas pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan aktivitas penerimaan pembiayaan daerah.

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran. Surplus/defisit riil anggaran Pemerintah Kota Parepare yang disajikan pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa Kota Parepare mengalami surplus anggaran pada tahun 2018 dan 2019 dan sementara pada tahun 2020, 2021 dan 2022 anggaran Kota Parepare mengalami defisit.

Tabel 3.12 Defisit Riil Anggaran

| No  | Uraian                                                            | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 1   | Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Rp)                             | 822.93 | 966.45 | 834.23 | 860.80 | 905.70 |
|     | <i>Dikurangi ralisasi:</i>                                        |        |        |        |        |        |
| 2   | Belanja Daerah (Juta Rp)                                          | 790.23 | 923.32 | 842.98 | 881.42 | 903.74 |
| 3   | Pengeluaran Pembiayaan (Juta Rp)                                  | 8.02   | 8.02   | 8.02   | 2.77   | 2.77   |
| A   | Defisit Riil                                                      | 24.7   | 35.1   | (16.8) | (23.4) | (0.8)  |
|     | Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :                    |        |        |        |        |        |
|     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 0.79   | 22.84  | 57.96  | 41.19  | 17.80  |
|     | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      |        |        |        |        |        |
| B   | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah                      | 0.79   | 22.84  | 57.96  | 41.19  | 17.80  |
| A+B | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan                     | 25.47  | 57.96  | 41.19  | 17.80  | 16.99  |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2023

Kemampuan Pemerintah Kota Parepare untuk menutup deficit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup deficit riil pada tabel 3.12.

Dari tabel 3.12 terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022 Kota Parepare mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/deficit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relative besar. Kondisi tersebut menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Parepare masih cukup kuat membiayai belanja operasi dan belanja modal.

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024-2026.

Adapun langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi semua sumber-sumber penerimaan dan ke pos-pos mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebelum melakukan perhitungan kapasitas riil keuangan pemerintah Kota Parepare, maka terlebih dahulu akan dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah beserta rinciannya, belanja daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta proyeksi asumsi makro ekonomi social daerah yang mendasarinya serta asumsi kebijakan fiskal daerah.

### **3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal**

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan proyeksi keuangan daerah, yaitu: (1) perkembangan ekonomi makro dan sosial daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi; dan (2) Kebijakan bidang Keuangan Negara/Daerah. Kedua asumsi ini merupakan dasar untuk menetapkan besaran proyeksi keuangan daerah baik dari pendapatan maupun sisi belanja daerah.

Kinerja perekonomian Kota Parepare dengan melihat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 5,93 dan diperkirakan akan bertumbuh pada tahun 2023 di kisaran 6,15. Dan pada tahun 2024-2026 dengan asumsi tidak terjadinya musibah yang menglobal diharapkan perekonomian bisa bertumbuh lebih baik.

Terdapat dua sumber utama yang diharapkan dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu: (i) sisi produksi PDRB, dan (ii) sisi permintaan. Pada sisi produksi sektor-sektor PDRB yang diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi adalah konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan sektor real estate. Ketiga sektor tersebut memberikan share terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Parepare. Selain ketiga sektor tersebut, masih terdapat beberapa sumber alternatif pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan juga sektor jasa keuangan serta sektor transportasi dan pergudangan. Jasa informasi dan

komunikasi yang mana pada tahun 2020 bertumbuh cukup besar karena permintaan penggunaan internet dan kedepan sektor ini masih tetap menjadi prospek seiring dengan kemajuan penggunaan teknologi.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal domestic bruto merupakan sektor-sektor yang diharapkan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam tiga tahun mendatang. Peran sektor rumah tangga terhadap konsumsi barang dan jasa rata-rata diatas dari 50 persen terhadap total PDRB dan sektor swasta (investasi) rata-rata 40 persen dan sektor pemerintah sekitar 15 persen. Ketiga sektor tersebut diprediksikan tetap sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh Pemerintah Kota Parepare, maka pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.13  
Asumsi Data Ekonomi, Sosial dan Fiskal Kota Parepare Tahun 2024 - 2026

| Uraian                                           | 2024   | 2025   | 2026   |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%)                          | 6,50   | 6,86   | 7,00   |
| Inflasi (%)                                      | 3,0    | 3,0    | 3,0    |
| Tingkat Pengangguran (%)                         | 4,92   | 4,56   | 4,21   |
| Tingkat Kemiskinan (%)                           | 5,18   | 5,07   | 4,96   |
| PAD (Rp Milyar)                                  | 181,12 | 184,74 | 185,82 |
| Pendapatan transfer pemerintah pusat (Rp milyar) | 652,28 | 657,51 | 658,57 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp Milyar) | 5,00   | 5,00   | 5,00   |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

### 3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

Dalam melakukan perhitungan kapasitas riil keuangan Pemerintah Kota Parepare, maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah beserta rinciannya, belanja daerah,

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta proyeksi asumsi makro ekonomi social daerah yang mendasarinya serta asumsi kebijakan fiskal daerah.

#### **3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Tahun 2024-2026**

Dalam rencana jangka lima tahun ini, visi kemandirian khususnya di bidang keuangan daerah menjadi salah satu bagian penting. Peningkatan peran kapasitas fiskal dalam mendanai kebutuhan belanja diarahkan untuk melebihi kontribusi dari dana perimbangan DAU dan DAK. PAD diharapkan mampu berkontribusi maksimal terhadap total pendapatan daerah, dan mampu mendanai lebih dari kemampuan maksimal atau diatas dari kemampuan fiskal.

Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah, dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang mendasari rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi dan social yang telah diuraikan sebelumnya, maka pendapatan daerah Kota Parepare yang ditargetkan dalam dokumen RPD periode 2024-2026 mengalami peningkatan. Penetapan target pendapatan daerah berada pada posisi moderat melalui penyesuaian perkembangan perekonomian nasional, provinsi, dan Kota Parepare.

Pada tahun 2024, total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp934 milyar kemudian meningkat menjadi Rp945 milyar di tahun 2025, dan Rp949 milyar di tahun 2026. Penyumbang terbesar dari pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat baik dalam bentuk dana perimbangan maupun dan dana insentif daerah. Selanjutnya sumber terbesar kedua adalah berasal dari PAD. Untuk mencapai target Pendapatan daerah yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 didasarkan atas berbagai strategi-strategi yang ditempuh oleh pemerintah Kota Parepare baik yang terkait dengan PAD, Transfer pemerintah, dan maupun Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.



Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2022-2026 (Rp Milyar)

| Kode Rekening     | Uraian                                               | Realisasi Tahun 2022* | Perkiraan Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4.</b>         | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                             | <b>905.70</b>         | <b>907,61</b>        | <b>970,00</b>       | <b>980,63</b>       | <b>988,91</b>       |
| <b>4.1.</b>       | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                  | <b>172.92</b>         | <b>179,16</b>        | <b>193,22</b>       | <b>199,61</b>       | <b>203,99</b>       |
| <b>4.1.01.</b>    | Pajak Daerah                                         | 38.33                 | 40,27                | 44,29               | 45,17               | 46,08               |
| <b>4.1.02.</b>    | Retribusi Daerah                                     | 7.02                  | 9,12                 | 10,00               | 10,20               | 10,71               |
| <b>4.1.03.</b>    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan    | 8.94                  | 10,00                | 10,50               | 10,71               | 11,00               |
| <b>4.1.04.</b>    | Lain-lain PAD yang Sah                               | 118.62                | 119,78               | 128,43              | 133,52              | 136,19              |
| <b>4.2.</b>       | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                           | <b>720.19</b>         | <b>723,45</b>        | <b>772,77</b>       | <b>776,02</b>       | <b>779,92</b>       |
| <b>4.2.01.</b>    | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>          | <b>624.43</b>         | <b>608,55</b>        | <b>656,67</b>       | <b>660,91</b>       | <b>664,60</b>       |
| <b>4.2.01.01.</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                              | <b>603.71</b>         | <b>608,55</b>        | <b>628,40</b>       | <b>632,65</b>       | <b>636,34</b>       |
| 4.2.01.01.01.     | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)             | 27.22                 | 11,44                | 14,87               | 15,16               | 14,70               |
| 4.2.01.01.02.     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)           | 428.80                | 445,72               | 456,85              | 460,35              | 464,96              |
| 4.2.01.01.03.     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 82.99                 | 68,71                | 73,16               | 73,16               | 73,16               |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**

Tahun 2024-2026

| Kode Rekening     | Uraian                                                          | Realisasi Tahun 2022* | Perkiraan Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.01.01.04.     | Dana Transfer Khusus-<br>Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>Non Fisik | 64.70                 | 82,68                | 83,51               | 83,51               | 83,51               |
|                   | Bagi Hasil Bukan<br>Pajak/Sumber Daya Alam                      | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |
| 4.2.01.02.        | <b>Dana Insentif Daerah<br/>(DID)</b>                           | <b>20.71</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28,26</b>        | <b>28,26</b>        | <b>28,26</b>        |
| 4.2.01.02.01.     | DID                                                             | 20.71                 | 0,00                 | 28,26               | 28,26               | 28,26               |
| <b>4.2.02.</b>    | <b>Pendapatan Transfer<br/>Antar Daerah</b>                     | <b>95.76</b>          | <b>114,89</b>        | <b>115,1</b>        | <b>115,1</b>        | <b>115,3</b>        |
| <b>4.2.02.01.</b> | <b>Pendapatan Bagi Hasil</b>                                    | <b>61.82</b>          | <b>107,01</b>        | <b>107,22</b>       | <b>107,22</b>       | <b>107,44</b>       |
| 4.2.02.01.01.     | Pendapatan Bagi Hasil<br>Pajak                                  | 61.82                 | 107,01               | 107,22              | 107,22              | 107,44              |
| <b>4.2.02.02.</b> | <b>Bantuan Keuangan</b>                                         | <b>33.95</b>          | <b>7,88</b>          | <b>7,88</b>         | <b>7,88</b>         | <b>7,88</b>         |
| 4.2.02.02.01.     | Bantuan Keuangan Umum<br>dari Pemerintah Provinsi               | 28.83                 | -                    | -                   | -                   | -                   |
| 4.2.02.02.02.     | Bantuan Keuangan<br>Khusus dari Pemerintah<br>Provinsi          | 5.12                  | 7,88                 | 7,88                | 7,88                | 7,88                |
| <b>4.3.</b>       | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN<br/>DAERAH YANG SAH</b>                 | <b>12.59</b>          | <b>5,00</b>          | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>         |
| <b>4.3.01.</b>    | <b>Pendapatan Hibah</b>                                         | <b>12.59</b>          | <b>5,00</b>          | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>         |
| <b>4.3.01.01.</b> | <b>Pendapatan Hibah dari<br/>Pemerintah Pusat</b>               | <b>12.59</b>          | <b>5,00</b>          | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>         |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**

Tahun 2024-2026

| Kode Rekening     | Uraian                                                                           | Realisasi Tahun 2022* | Perkiraan Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.3.01.01.01.     | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                                           | 12.59                 | 5,00                 | -                   | -                   | -                   |
| 4.3.01.03.        | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri                | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |
| 4.3.01.03.01.     | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri                | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>4.3.03.</b>    | <b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b> | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>4.3.03.01.</b> | <b>Lain-lain Pendapatan</b>                                                      | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |
| 4.3.03.01.01.     | Pendapatan Hibah Dana BOS                                                        | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

\* unaudited

## 3.3.1.2 Proyeksi Belanja Tahun 2024-2026

Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2022-2026 (Rp Milyar)

| Kode Rekening  | Uraian                            | Realisasi Tahun 2022* | Perkiraan Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5.</b>      | <b>BELANJA DAERAH</b>             | <b>903.74</b>         | <b>924,59</b>        | <b>966,98</b>       | <b>977,62</b>       | <b>985,90</b>       |
| <b>5.1.</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>700.41</b>         | <b>764,60</b>        | <b>820,36</b>       | <b>816,11</b>       | <b>822,85</b>       |
| <b>5.1.01.</b> | Belanja Pegawai                   | 337.00                | 369,93               | 379,17              | 391,34              | 397,88              |
| <b>5.1.02.</b> | Belanja Barang dan Jasa           | 353.35                | 386,68               | 392,99              | 415,27              | 409,30              |
| <b>5.1.03.</b> | Belanja Bunga                     | 0.77                  | 1,50                 | 1,50                | 1,50                | 1,50                |
| <b>5.1.05.</b> | Belanja Hibah                     | 7.52                  | 6,16                 | 45,00               | 5,00                | 8,00                |
| <b>5.1.06.</b> | Belanja Bantuan Sosial            | 1.78                  | 0,33                 | 1,7                 | 3,00                | 6,16                |
|                | Belanja Subsidi                   | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>5.2.</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>199.01</b>         | <b>154,00</b>        | <b>142,12</b>       | <b>157,51</b>       | <b>159,04</b>       |
| <b>5.2.01.</b> | Belanja Modal Tanah               | 0.67                  | 3,55                 | 2,50                | 5,00                | 5,00                |
| <b>5.2.02.</b> | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 56.76                 | 25,57                | 25,00               | 25,00               | 25,12               |
| <b>5.2.03.</b> | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 56.54                 | 30,60                | 25,62               | 38,51               | 39,47               |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                            |                       | Tahun 2024-2026      |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kode Rekening                                  | Uraian                                     | Realisasi Tahun 2022* | Perkiraan Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | Proyeksi Tahun 2026 |
| 5.2.04.                                        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 84.93                 | 88,34                | 85,00               | 85,00               | 85,44               |
| 5.2.05.                                        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 0.10                  | 5,94                 | 4,00                | 4,00                | 4,00                |
| 5.3.                                           | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>4.31</b>           | <b>6,00</b>          | <b>6,00</b>         | <b>6,00</b>         | <b>5,00</b>         |
| 5.3.01.                                        | Belanja Tidak Terduga                      | 4.31                  | 6,00                 | 6,00                | 6,00                | 5,00                |
| 5.4.                                           | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |
| 5.4.02.                                        | Belanja Bantuan Keuangan                   | -                     | -                    | -                   | -                   | -                   |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

\* *anaudited*

## 3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026

Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2026

| Kode Rekening | Uraian                                                              | Realisasi Tahun 2022* | Perkiraan Tahun 2023 | Tahun 2024    | Tahun 2025    | Tahun 2026    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.            | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                            | <b>9,78</b>           | <b>16,98</b>         | <b>(3,01)</b> | <b>(3,01)</b> | <b>(3,01)</b> |
| 6.1.          | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                        | <b>17,80</b>          | <b>25,00</b>         | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   |
| 6.1.01.       | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                    | 17,80                 | 25,00                | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| 6.1.01.05.    | Penghematan Belanja                                                 | 17,80                 | 25,00                | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| 6.1.01.05.02. | Penghematan Belanja-Belanja Modal                                   | 17,80                 | 25,00                | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| 6.2.          | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                       | <b>8,02</b>           | <b>8,02</b>          | <b>8,01</b>   | <b>8,01</b>   | <b>8,01</b>   |
| 6.2.02.       | <b>Penyertaan Modal Daerah</b>                                      | <b>5,25</b>           | <b>5,25</b>          | <b>5,25</b>   | <b>5,25</b>   | <b>5,25</b>   |
| 6.2.02.02.    | <b>Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b> | <b>5,25</b>           | <b>5,25</b>          | <b>5,25</b>   | <b>5,25</b>   | <b>5,25</b>   |
| 6.2.02.02.01. | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                                   | 5,25                  | 5,25                 | 5,25          | 5,25          | 5,25          |
| 6.2.03.       | <b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>              | <b>2,77</b>           | <b>2,77</b>          | <b>2,77</b>   | <b>2,77</b>   | <b>2,77</b>   |
| 6.2.03.01.    | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat                    | 2,77                  | 2,77                 | 2,77          | 2,77          | 2,77          |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |                                                                                                 |                       |                      | Tahun 2024-2026 |               |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Kode Rekening                                  | Uraian                                                                                          | Realisasi Tahun 2022* | Perkiraan Tahun 2023 | Tahun 2024      | Tahun 2025    | Tahun 2026    |
| 6.2.03.01.02.                                  | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 2,77                  | 2,77                 | 2,77            | 2,77          | 2,77          |
|                                                | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                                         | <b>9,78</b>           | <b>16,98</b>         | <b>(3,01)</b>   | <b>(3,01)</b> | <b>(3,01)</b> |
|                                                | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>                                                   | -                     | -                    | -               | -             | -             |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

\* *anaudited*

### 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam dokumen RPD, kerangka pendanaan dihitung hanya pada tiga tahun periode RPD yaitu tahun 2024-2026.

Selama periode tiga tahun kedepan, setelah memperhitungkan seluruh komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dan perkiraan perolehan pendapatan daerah, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 sebagaimana pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai  
Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Parepare  
Tahun 2024-2026

| Uraian                                                                        | Proyeksi (Rp Milyar) |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|
|                                                                               | 2024                 | 2025   | 2026   |
| Pendapatan                                                                    | 970,00               | 980,63 | 988,91 |
| Pencairan Dana Cadangan                                                       | -                    | -      | -      |
| Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran                                          | -                    | -      | -      |
| Total Penerimaan                                                              | 970,00               | 980,63 | 988,91 |
| Dikurangi :                                                                   |                      |        |        |
| Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama | 379,17               | 391,34 | 397,88 |
| Kapasitas riil kemampuan keuangan                                             | 590,83               | 589,29 | 591,03 |

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2023 (Data diolah)

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan



alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

- a. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas I yang pengalokasian anggarannya untuk program yang berkaitan dengan dengan belanja wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, serta pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal), yang terdiri dari belanja fungsi pendidikan, kesehatan, belanja infrastruktur, dan pemenuhan indikator SPM.
- b. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas II yang pengalokasian anggarannya dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan yang terdiri atas (1). Terwujudnya pemerataan pendidikan disegala tingkatan, serta tersedianya tenaga-tenaga berkapasitas S2 dan S3 dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada semua sektor pembangunan; (2) Berkembangnya masyarakat yang sehat, terbangunnya kemandirian masyarakat untuk memelihara kesehatan sendiri, tersedianya tenaga kesehatan berkualifikasi; (3). Berkembangnya sistem ekonomi dengan usaha inti agrobisnis dan agro-industri yang mampu melayani kebutuhan lokal, nasional dan interna-sional, serta beroperasinya pusat-pusat industri dan jasa layanan ekonomi berskala nasional dan internasional; (4). Terwujudnya koperasi dan UMKM mandiri, serta berkembangnya layanan informasi dan *e-marketing*; (5). Berkembangnya pusat-pusat pengembangan keagamaan yang berbasis pada tumbuhnya masyarakat yang berakhlak, etis, dan moderat, yang mengedepankan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, serta berkembangnya Parepare sebagai pusat pengkajian Islam secara regional, nasional dan internasional serta pembinaan agama lainnya; (6). Terbangunnya kehidupan manusia yang berkomitmen lingkungan, termanaftkannya seluruh potensi sumberdaya secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat, tercapainya *green space* 40% dari luas

daerah, terpeliharanya potensi lingkungan dan sumberdaya sebagai penunjang kehidupan, serta tertatanya ruang aglomerasi kota.

- c. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas III yang pengalokasian anggarannya untuk program yang berkaitan dengan program urusan penunjang.

### **Kebijakan Pendapatan**

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam wilayah Kota Parepare. Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah, dana perimbangan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah sebagaimana diproyeksikan maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, kemampuan umum dan kemampuan masyarakat.
2. Menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah melalui peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada wajib pajak.
3. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
4. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui kemudahan Perizinan dan Non Perizinan.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pada bidang pendapatan daerah dengan SKPD penghasil pendapatan dan Pemerintah Pusat.
6. Efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
7. Pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiscus.

**Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 hingga 2026, diarahkan untuk :

1. Pengelolaan belanja daerah disesuaikan dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung pencapaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

**Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang.

Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar dari pada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk memanfaatkan surplus tersebut dalam aktivitas pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan aktivitas penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal daerah serta pembayaran pokok utang

**BAB IV****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 45 dan 46 menjelaskan tentang Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kemudian Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, yang dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Data dan fakta yang dipaparkan pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah menunjukkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan pada periode perencanaan sebelumnya dan menjadi bagian dari permasalahan pembangunan daerah yang akan diselesaikan pada pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah diasumsi memiliki nilai prioritas jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD. Identifikasi masalah pembangunan dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok yang dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah adalah penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dapat dipecahkan melalui arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya pertumbuhan indeks pembangunan manusia;
2. Persentase penduduk miskin masih tinggi;
3. Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi;
4. Melambatnya pertumbuhan ekonomi;
5. Lambatnya pertumbuhan PDRB per kapita;
6. Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat;
7. Menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi;
8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Untuk permasalahan pembangunan daerah di atas lebih lanjut diuraikan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar masalahnya, sebagai berikut :

**4.1.1. Rendahnya Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia**

Manusia merupakan tujuan akhir dari suatu pembangunan. Dalam konteks lebih luas, pembangunan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kondisi ekonomi saja. Namun, lebih ditekankan pada manusia sebagai obyek pembangunan. Pembangunan manusia lebih difokuskan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kebebasan untuk memilih. Dengan kata lain, pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan alternatif pilihan yang lebih banyak bagi manusia. Terdapat tiga pondasi dalam pembangunan manusia yaitu memiliki umur panjang, hidup secara sehat, memiliki pengetahuan serta memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak. Dengan tercapainya tiga pondasi tersebut, maka terdapat kesempatan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Pertumbuhan IPM per tahun digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Perkembangan IPM Kota Parepare selama periode 2016-2022 memperlihatkan tren peningkatan. Data tahun 2016, IPM Kota Parepare sebesar 76,48 berada pada peringkat kedua teratas di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dengan IPM sebesar 80,53. Meskipun IPM Kota Parepare selalu meningkat dari tahun ke tahun namun sejak tahun 2017 hingga 2022 peringkat IPM Kota Parepare menurun ke posisi ketiga setelah Kota Makassar dan Kota Palopo. Pada tahun 2017, IPM Kota Parepare (76,68) lebih rendah dari Kota Makassar (81,13) dan Kota Palopo

(76,71). Hingga tahun 2022 IPM Kota Parepare (78,54) selalu berada di posisi ketiga setelah Kota Makassar (83,12) dan Kota Palopo (78,91).

Meskipun IPM Kota Parepare selalu meningkat namun tidak dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Kota Parepare mengalami perlambatan dimana pertumbuhan IPM pada tahun 2021 sebesar 0,45 persen tumbuh melambat di tahun 2022 sebesar 0,42 persen. Dan meskipun IPM Kota Parepare berada pada peringkat 3 teratas di Sulawesi Selatan namun pertumbuhan IPM Kota Parepare masih tergolong lambat dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata pertumbuhan IPM selama tahun 2017-2022, dimana rata-rata pertumbuhan IPM Kota Parepare berada pada peringkat terakhir diantara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (0,44 persen/tahun).

Penyebab rendahnya pertumbuhan IPM Kota Parepare adalah rata-rata lama sekolah dan rendahnya harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kota Parepare tahun 2022 hanya 10,66 tahun, dengan kata lain bahwa lamanya anak bersekolah hanya sampai kelas X (kelas 1 SMA). Sedangkan harapan lama sekolah tahun 2022 hanya 14,52 tahun, artinya secara rata-rata anak yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah hanya sampai Diploma II. Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah dan rendahnya harapan sekolah adalah kecenderungan anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih kurang serta angka putus sekolah yang masih tinggi, dimana masih ada sebanyak 200 anak yang tidak bersekolah pada tahun 2022. Selain itu tingginya angka pernikahan anak juga berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah. Angka pernikahan anak di Kota Parepare mencapai 98 orang pada tahun 2022.

#### **4.1.2. Meningkatnya Persentase Penduduk Miskin**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat atau seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan Kota Parepare selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kota Parepare sebesar 5,44 (7,96 ribu jiwa) dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,40 (7,93 ribu jiwa) yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 5,41 (8,01 ribu jiwa). Garis kemiskinan Kota Parepare tahun 2022 sebesar Rp 402.126/orang/bulan.

Di antara jumlah penduduk miskin tersebut, terdapat penduduk yang tergolong miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Garis kemiskinan ekstrem Kota Parepare tahun 2022 sebesar Rp 302.287/orang/bulan, dan persentase jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Parepare adalah sebesar 0,33 persen.

Penyebab masih tingginya penduduk miskin di Kota Parepare adalah karena kurang optimalnya penanggulangan masyarakat pra sejahtera. Dalam upaya penanganan kemiskinan dibutuhkan adanya keterlibatan multipihak dan koordinasi lintas sektor. Namun penanggulangan masyarakat pra sejahtera masih kurang optimal dilakukan karena kurang mandirinya masyarakat yang menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran hingga penanganan kemiskinan yang tidak terintegrasi.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai 0% pada tahun 2024, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan



secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

#### **4.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka yang Masih Relatif Tinggi**

Tingkat pengangguran terbuka Kota Parepare selama periode 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Selama periode tersebut TPT Kota Parepare selalu lebih tinggi daripada TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, bahkan TPT Kota Parepare selalu masuk dalam 5 besar Kab/Kota yang memiliki TPT tertinggi di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022 TPT Kota Parepare (5,60) hanya lebih rendah daripada Kota Makassar (11,82) dan Kota Palopo (8,20). Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Parepare dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan TPT menurut pendidikan, penganggur dari tamatan Perguruan Tinggi selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2020 (7,82 persen) hingga tahun 2022 (14,59 persen), sedangkan penganggur dari tamatan SD ke bawah selalu menurun dari tahun 2020 (5,85 persen) hingga tahun 2022 (1,94 persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Parepare didominasi oleh penganggur terdidik.

Tingginya tingkat pengangguran di Kota Parepare disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja dengan akar masalah kurangnya informasi pasar kerja dan terbatasnya penyuluhan serta bimbingan bagi pencari kerja. Kedua, rendahnya upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja, dengan akar masalah pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan belum optimal dilaksanakan, terbatasnya jumlah pelatihan kerja yang dilaksanakan, terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja, belum sinerginya kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan minimnya pemberdayaan serta pendampingan bagi wirausaha baru. Permasalahannya lainnya adalah belum optimalnya pencegahan dan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan akar masalah yaitu adanya keterbatasan jumlah mediator ketenagakerjaan dan terbatasnya data dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Peran koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan omzet tenaga kerja koperasi dan UMKM di Kota Parepare juga masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya koperasi di Kota Parepare yang belum mematuhi regulasi perkoperasi karena pembinaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan di Kota Parepare masih belum optimal.

#### **4.1.4. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu cara untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. PDRB merupakan nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi, tapi lebih menekankan pada keberadaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.

Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dalam kurun waktu enam tahun menunjukkan tren berfluktuatif. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare mengalami percepatan, sedangkan pada tahun 2018, tumbuh lebih lambat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,58 persen dan pada tahun 2019 pertumbuhan mengalami percepatan sebesar 6,65 persen dari tahun sebelumnya. Dan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare mengalami pertumbuhan negatif -0,08 persen. Pertumbuhan negatif ini pertama kalinya dikarenakan dampak Covid-19, dimana seluruh dunia termasuk Parepare merasakan dampaknya. Tahun 2021 pertumbuhan mengalami perbaikan ekonomi, yaitu sebesar 4,41. Terakhir pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi

Kota Parepare mengalami peningkatan menjadi 5,93 persen, bahkan pertumbuhan ekonomi Kota Parepare lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan (5,09 persen) dan Nasional (5,31 persen). Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2022 meningkat namun belum cukup inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi beberapa permasalahan daerah seperti kemiskinan dan pengangguran.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh belum optimalnya aktivitas perekonomian masyarakat dengan akar masalah belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor potensial (diantaranya lapangan usaha transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran) serta penciptaan dan pengembangan sumber-sumber ekonomi baru belum optimal. Penyebab lain melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare adalah jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UKM belum optimal. Belum optimalnya jaringan pemasaran ini disebabkan oleh masih rendahnya penguasaan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UKM, dan juga karena masih lemahnya informasi data produk dan sistem informasi pasar Koperasi dan UKM.

#### **4.1.5. Lambatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita**

PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dalam waktu tertentu. Meningkatnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik yang bersifat mendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan.

Selama kurun waktu enam tahun terakhir, PDRB per kapita Kota Parepare selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun PDRB per kapita Kota Parepare masih selalu lebih rendah daripada PDRB per kapita Sulawesi Selatan dan Nasional. Peningkatan PDRB per kapita Kota Parepare tidak disertai dengan tren peningkatan pertumbuhan

PDRB per kapita itu sendiri. Pada tahun 2018 PDRB per kapita sebesar 45,94 juta rupiah dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 6,83 persen. Di tahun 2019, PDRB per kapita meningkat menjadi 49,8 juta rupiah dan mengalami pertumbuhan sebesar 8,39 persen. Tahun 2020 pertumbuhan PDRB per kapita mengalami perlambatan dikarenakan dampak Covid-19, dimana pertumbuhannya hanya sebesar 0,24 persen dengan nilai 49,92 juta rupiah. Tahun 2021 PDRB per kapita mulai naik menjadi 51,18 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 2,52 persen. Dan pada tahun 2022, PDRB per kapita Kota Parepare mengalami peningkatan yaitu sebesar 56,16 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,73 persen. Meskipun pertumbuhan PDRB per kapita Kota Parepare tahun 2022 namun rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita selama tahun 2018-2022 masih tergolong lambat yaitu sebesar 6,93 persen per tahun dan belum cukup inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi beberapa permasalahan daerah seperti kemiskinan dan pengangguran.

Lambatnya pertumbuhan PDRB perkapita disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya kontribusi lapangan usaha potensial dengan akar permasalahan yaitu belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sektor ekonomi potensial dan faktor-faktor produksi di Kota Parepare. Penyebab lain dari lambatanya pertumbuhan PDRB perkapita Kota Parepare adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber-sumber ekonomi baru. Hal ini disebabkan oleh tingkat produksi barang dan jasa daerah yang rendah, tingkat upah relatif rendah dan adanya peningkatan jumlah penduduk.

#### **4.1.6. Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**

Rasio Gini atau Koefisien Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan pembangunan. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Gini Ratio Kota Parepare dari tahun 2017 hingga 2022 berkisar di angka 0,3 dan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun Gini Ratio Kota Parepare tahun 2022 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Gini Ratio Kota Parepare tahun 2021 turun dari 0,381 menjadi 0,379 pada tahun 2022. Dengan melihat nilai PDRB per kapita Kota Parepare yang mengalami peningkatan dari 51,18 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 56,16 juta rupiah pada tahun 2022 dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 9,73 persen, sedangkan Gini Ratio menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Parepare masih tergolong ketimpangan moderat. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan masih belum merata dan lebih dinikmati oleh segelintir penduduk saja. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif perlu menjadi fokus utama Pemerintah Kota Parepare kedepannya.

Ketimpangan pendapatan masyarakat ini disebabkan oleh tingginya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk, ketimpangan kontribusi antar sektor lapangan usaha dan ketimpangan produktivitas lapangan usaha masyarakat masih tinggi (dominasi sektor perdagangan).

#### **4.1.7. Menurunnya Daya Beli Masyarakat Akibat Inflasi**

Salah satu komponen penting untuk menilai perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pola konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besaran konsumsi masyarakat, salah satunya adalah inflasi.

Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan barang dan jasa yang tidak terkendali. Selama kurun

waktu 3 tahun terakhir, inflasi di Kota Parepare mengalami kenaikan. Inflasi Kota Parepare tahun 2020 sebesar 1,61 persen naik menjadi 4,09 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, inflasi Kota Parepare naik menjadi 6,66 persen. Inflasi gabungan lima kota di Sulawesi Selatan (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo) tahun 2022 sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 114,14. Inflasi tertinggi terjadi di Parepare sebesar 6,66 persen dengan IHK sebesar 115,98 dan inflasi terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 dengan IHK sebesar 113,51.

Kenaikan inflasi ini akan menyebabkan turunnya nilai riil dari pendapatan sehingga melemahkan daya beli masyarakat yang dapat menyebabkan menurunnya konsumsi masyarakat. Inflasi di Kota Parepare terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 10,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,95 persen; kelompok transportasi sebesar 13,63 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 13,66 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,32 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

#### **4.1.8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Para pakar berpendapat bahwa desentralisasi dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain karena desentralisasi membuka ruang partisipasi yang lebih

luas bagi masyarakat sipil dalam memantau kebijakan pemerintah. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah (otda), sebagian besar kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan ke pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan otda jika dipraktikkan dengan benar dapat menjadi katalis bagi terbentuknya sistem tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Secara lebih spesifik adalah terbentuknya sistem pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum, penghapusan birokrasi yang menyulitkan, serta pemberantasan KKN.

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di Kota Parepare sejatinya telah berjalan cukup baik, ditandai dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang membaik dari kategori CC dengan nilai 55,96 pada tahun 2019 menjadi kategori B pada tahun 2022. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan atau akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Parepare juga membaik ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP sebesar 58,13 dengan predikat CC menjadi predikat B pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Parepare sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan untuk bisa mengoptimalkan penyelenggaraan kinerja instansi pemerintahan.

Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja instansi pemerintahan daerah disebabkan oleh masih rendahnya etos kerja, belum optimalnya inovasi pelayanan publik dan masih rendahnya keunggulan kompetitif

dan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kemampuan merespon aspirasi masyarakat.

**Tabel IV.1.**

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Parepare**

| No | Indikator                    | Masalah Pokok                                          | Masalah                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia   | Masih rendahnya pertumbuhan IPM Kota Parepare          | 1. Rendahnya rata-rata lama sekolah.<br>2. Rendahnya harapan lama sekolah. | 1. Angka Putus sekolah masih tinggi.<br>2. Tingginya angka pernikahan anak<br>3. Kecenderungan melanjutkan pendidikan tinggi masih rendah.                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Tingkat Kemiskinan           | Persentase penduduk miskin masih tinggi                | Kurang optimalnya penanggulangan pra sejahtera                             | 1. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial<br>2. Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.<br>3. Penanganan kemiskinan tidak terintegrasi.                                                                                                                                                                            |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi | Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja                        | 1. Kurangnya informasi pasar kerja.<br>2. Terbatasnya penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja.                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                              |                                                        | Rendahnya upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja                      | 1. Belum optimalnya pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan.<br>2. Terbatasnya jumlah pelatihan kerja yang dilakukan<br>3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja.<br>4. Belum sinerginya kegiatan penumbuhan kewirausahaan.<br>5. Minimnya pemberdayaan dan pendampingan bagi wirausaha baru. |



|   |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                                                                                                          | Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan jumlah mediator ketenagakerjaan.</li> <li>2. Terbatasnya data dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.</li> </ol>                                                                                                                                                      |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | Melambatnya pertumbuhan ekonomi                                                                          | Belum optimalnya aktivitas perekonomian masyarakat                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor potensial antaranya Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum dan Lapangan usaha lapangan usah perdagangan besar dan eceran.</li> <li>2. Penciptaan dan pengembangan sumber-sumber ekonomi baru belum optimal.</li> </ol> |
|   |                     |                                                                                                          | Jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UKM belum optimal.                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya penguasaan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UKM.</li> <li>2. Lemahnya informasi data produk dan sistem informasi pasar koperasi dan UKM.</li> </ol>                                                                                                                                    |
|   |                     | Masih rendahnya peran koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan omzet tenaga kerja koperasi dan UMKM | Banyaknya koperasi yang belum mematuhi regulasi perkoperasian                                                                                                                   | Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | PDRB Per Kapita     | Lambatnya pertumbuhan PDRB Perkapita                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kontribusi lapangan usaha potensial.</li> <li>2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber ekonomi baru.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sektor ekonomi potensial di kota parepare dan faktor-faktor produksi.</li> <li>2. Rendahnya tingkat produksi barang dan jasa daerah.</li> <li>3. Tingkat upah relatif rendah.</li> </ol>                                                                                |

|   |             |                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             |                                                   |                                                                         | 4. Meningkatnya jumlah penduduk.                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Indeks Gini | Masih tingginya ketimpangan pendapatan Masyarakat | Distribusi pendapatan antar masyarakat belum merata                     | 1. Tingginya kesenjangan pendapatan antar golongan pendudu<br>2. Ketimpangan distribusi antar sektor lapangan usaha.<br>3. Ketimpangan produktivitas lapangan usaha masyarakat masih tinggi.                                                       |
| 7 | Inflasi     | Menurunnya daya beli masyarakat                   | Tingginya tingkat inflasi                                               | 1. Kebijakan kenaikan tarif PDAM<br>2. Kebijakan uang kuliah tunggal (UKT)                                                                                                                                                                         |
| 8 | Nilai Sakip | Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan         | Rendahnya kualitas penyelenggaraan kinerja instansi pemerintahan daerah | 1. Masih rendahnya etos kerja.<br>2. Belum optimalnya inovasi pelayanan publik.<br>3. Masih rendahnya keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kemampuan merespon aspirasi masyarakat. |

#### **4.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib meliputi 24 urusan, urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 urusan dan urusan wajib yang berkaitan dengan non pelayanan dasar sebanyak 18 urusan.

Berdasarkan Gambaran Umum Kondisi Daerah, maka identifikasi permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Kota Parepare dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **4.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib dengan pelayanan dasar sebanyak enam urusan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. PENDIDIKAN**

- a. Masih banyak sekolah pada jenjang TK belum memiliki SK ijin Operasional, sehingga tidak terdata dalam Dapodik.
- b. Masih adanya siswa yang tidak memenuhi usia sekolah pada jenjang SD yang semestinya masih bersekolah pada jenjang PAUD.

- c. Masih adanya siswa baru yang masuk pada jenjang SD/MI berusia dibawah 7 tahun.
- d. Masih adanya siswa baru yang masuk pada jenjang SMP/MTs berusia dibawah 13 tahun.
- e. Masih adanya siswa baru yang masuk pada jenjang SMA/MA berusia dibawah 16 tahun.
- f. Masih adanya orangtua yang bukan penduduk Parepare tidak mendaftarkan anaknya menempuh jenjang pendidikan sesuai usianya.
- g. Banyaknya siswa yang berhenti bersekolah karena tuntutan ekonomi (bekerja membantu orangtua) dan masih ada siswa yang bukan penduduk Parepare berhenti bersekolah pada jenjang tertentu karena mengikuti orangtua pindah daerah.
- h. Masih adanya siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya di semua jenjang yang tidak mengikuti ujian, dikarena adanya mutasi siswa dan putus sekolah.
- i. Masih adanya orangtua yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting, pengaruh lingkungan, masalah ekonomi yang menyebabkan anak membantu orangtua mencari nafkah.
- j. Belum terpenuhinya kebutuhan guru jenjang pendidikan dasar.

## **2. KESEHATAN**

- a. Kurangnya upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- b. Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
- c. Masih kurangnya frekuensi pelaksanaan edukasi pada masyarakat berisiko.
- d. Belum ada puskesmas mampu poned.
- e. Belum adanya regulasi yang mengatur persalinan di pelayanan kesehatan.
- f. Belum semua puskesmas menerapkan Poli MTBS.

- g. Surveilans migrasi yang tidak berjalan efektif dan kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam penanggulangan malaria kasus impor.
- h. Makin berkembangnya sumber penularan HIV yang berasal dari berbagai faktor risiko.
- i. Kurangnya kunjungan ibu hamil, ibu nifas dan anak balita ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- j. Masih adanya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan pertama di usia kehamilan lebih dari 12 minggu.

### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Masih adanya area persawahan terdampak banjir yang belum tertangani.
- b. Masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.
- c. Masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk.
- d. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m).
- e. Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.
- f. Masih rendahnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak.
- g. Masih rendahnya pengelolaan lumpur tinja secara aman.
- h. Masih terdapat Pengolahan air limbah domestik yg tidak layak.

### 4. PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Masih banyaknya rumah dengan status tanah masih sewa atau numpang.
- b. Masih adanya MBR yang menempati rumah tidak layak huni.
- c. Bertambahnya lokasi rawan kumuh.
- d. Rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penangan kawasan kumuh.

e. Masih adanya rumah tidak layak huni yang termasuk di kawasan perkotaan.

f. Masih kurangnya sarana dan prasarana fasilitas umum.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Kurangnya jumlah dan kapasitas PPNS.

b. Masih rendahnya layanan informasi rawan bencana.

c. Masih lambatnya pelayanan penanganan penanggulangan kebakaran.

d. Kurang terlibatnya aparaturnya instansi terkait dalam pelaksanaan dan penyuluhan K3.

6. SOSIAL

a. Masih adanya beberapa panti yang tidak beroperasi lagi serta izinnya yang sudah kadaluarsa.

b. Kurangnya pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial dalam pengentasan PMKS.

c. Belum adanya pelayanan dan pemberdayaan melalui KUBE di dalam panti sosial.

d. Kurangnya pelayanan untuk bantuan sosial/logistik bagi korban bencana.

e. Kurangnya penyandang cacat dan lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan sosial.

**4.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :**

Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib dengan bukan pelayanan dasar yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. TENAGA KERJA

a. Kurangnya lowongan pekerjaan sehingga mempengaruhi jumlah penempatan yang ada.

b. Kurangnya koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

- c. Belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang perselisihan buruh dengan pengusaha.
  - d. Kurangnya peningkatan paket pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan uji kompetensi.
  - e. Kurangnya peningkatan paket pelatihan berbasis masyarakat untuk menambah keterampilan.
  - f. Kurangnya peningkatan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan skala usaha menjadi usaha menengah.
  - g. Kurangnya lulusan untuk mengambil AK.I sehingga capaian lulusan yang mengambil kartu pencari kerja masih rendah.
  - h. Masih rendahnya pengelolaan informasi pasar kerja.
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- a. Masih kurangnya perempuan yang menduduki kursi di DPRD.
  - b. Belum terbentuknya UPTD PPPA.
  - c. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
  - d. Belum optimalnya penerapan komponen prasyarat PUG.
3. PANGAN
- a. Sarana dan prasarana pengawasan keamanan pangan tidak mencukupi.
  - b. Kurangnya ketersediaan pangan tingkat rumah tangga
  - c. Masih lemahnya kelembagaan pangan untuk menjaga ketersediaan pangan, inflasi pangan, krisis dan kerawanan pangan
4. PERTANAHAN
- a. Kurangnya sumber daya manusia dalam proses kegiatan pensertifikatan pada lingkup Dinas Perkimtan.
  - b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ganti rugi untuk pembebasan lahan.

**5. LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Masih adanya kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mempengaruhi indeks kualitas udara, seperti: pembakaran sampah, pembukaan lahan serta penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi.
- b. Masih rendahnya pengawasan, koordinasi serta penegakan hukum lingkungan.
- c. Masih adanya beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkau armada persampahan.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta SDM pengelola TPA sehingga mempengaruhi nilai yang diperoleh.

**6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- a. Masih adanya penduduk lanjut usia, ODGJ dan memiliki penyakit kronis yang belum terjangkau pelayanan perekaman KTP elektronik
- b. Penerbitan status perkawinan belum tercatat bagi pasangan nikah siri tidak dapat dilakukan.
- c. Adanya gangguan dari jaringan SIAK terpusat.
- d. Masih adanya penduduk pasif yang memiliki data NIK ganda di tempat lain.
- e. Stok blangko KTP elektronik yang di cetak dan di distribusikan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri ke Provinsi dan Kab/Kota sering menipis/tidak mencukupi.
- f. Adanya pemalsuan dokumen pencatatan perkawinan nikah sirih dari pemuka agama.

**7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- a. Adanya kelompok binaan PKK di Tingkat Kelurahan yang sudah tidak aktif salah satunya adalah Kelompok Dasawisma.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana posyandu.

**8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- a. Masih adanya pasangan usia subur yang ingin mempunyai anak lebih dari 2.



- b. Banyaknya jumlah DO (Drop Out/ Putus pakai KB).
- c. Belum terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) karena lokasi faskes saling berdekatan.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang usia pernikahan anak yang menyebabkan banyaknya pernikahan dibawah umur.

#### 9. PERHUBUNGAN

- a. Masih banyaknya angkutan umum yang berusia diatas 15 tahun dan adanya perubahan regulasi tentang izin trayek.
- b. Berubahnya sistem perpanjangan Kir dari manual ke sistem aplikasi Blu-e (Bukti Lulus Uji Elektronik).
- c. Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak dibarengi dengan peningkatan panjang dan lebar jalan.

#### 10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Belum terlaksananya pelatihan citizen jurnalistik bagi anggota Kelompok Informasi Masyarakat.
- b. Kurangnya kemampuan anggota KIM dalam mengikuti tren penggunaan medsos saat ini.
- c. Terbatasnya daya dukung infrastruktur pasif telekomunikasi (menara telekomunikasi dan jaringan kabel fiber optik).
- d. Masih adanya daerah yang blank spot dan yang mengalami perlambatan akses jaringan telekomunikasi seluler.
- e. Masih tingginya tarif dan terbatasnya layanan akses internet dari provider.
- f. Tidak meratanya tingkat kebutuhan masyarakat untuk penggunaan komputer pribadi, dan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan smartphone.

#### 11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- a. Kurangnya peningkatan pemahaman pengurus koperasi terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi sehingga tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- b. Kurangnya keterbukaan akses data LKM dan LKM Non BPR.

**12. PENANAMAN MODAL**

- a. Adanya keterbatasan lahan.
- b. Kurangnya promosi investasi.
- c. Belum adanya perusahaan manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja.

**13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

- a. Adanya keterbatasan bantuan permodalan khusus untuk pelaku wirausaha pemuda oleh pemerintah dan perbankan.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelatih.

**14. STATISTIK**

- a. Kurangnya pemahaman operator Satu Data di SKPD akibat adanya pergantian operator setiap tahunnya.
- b. Lambatnya proses penginputan data pada aplikasi Satu Data.
- c. Adanya kesulitan mendapatkan data terupdate dan realtime dari Produsen data (SKPD)
- d. Adanya keterlambatan SKPD terkait dalam memberikan data yang dibutuhkan.

**15. PERSANDIAN**

- a. Masih terbatasnya peralatan persandian.
- b. Kurangnya SDM yang berkualifikasi sandi.

**16. PERPUSTAKAAN**

- a. Minimnya volume ruang baca.
- b. Kurangnya promosi minat baca.
- c. Kurangnya pustakawan yang kompeten dan bersertifikat.

**17. KEARSIPAN**

- a. Kurangnya perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku.
- b. Kurangnya peningkatan SDM tenaga pengelola kearsipan.

**4.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat Pilihan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PARIWISATA
  - a. Kurang terbukanya pihak hotel terkait data kunjungan tamu.
  - b. Belum optimalnya pengelolaan tempat/destinasi wisata.
  - c. Kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata.
2. PERTANIAN
  - a. Kurangnya kapasitas SDM petani dan penyuluh.
  - b. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian seperti pupuk, benih, dan sarana pengairan.
3. PERDAGANGAN
  - a. Tidak terdapat komoditi ekspor yang melalui Kota Parepare.
  - b. Belum maksimalnya pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal.
  - c. Belum memadainya sarana distribusi perdagangan.
  - d. Masih rendahnya pengawasan dan penyuluhan metrologi legal.
4. PERINDUSTRIAN
  - a. Belum optimalnya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kota.
  - b. Belum optimalnya pengendalian izin usaha industri.
  - c. Belum optimalnya layanan informasi industri.
5. KELAUTAN DAN PERIKANAN
  - a. Rendahnya penguasaan teknologi dan informasi perikanan.
  - b. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya makan ikan.
  - c. Kurangnya infrastruktur dalam pendistribusian ikan yang berkualitas ke konsumen dan ketika ikan melimpah maka harga akan turun.
  - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

#### 4.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
  - a. PNS yang telah selesai melanjutkan pendidikan formal tidak melaporkan ke BKPSDMD.
  - b. Jabatan administrasi berkurang akibat adanya penyederhanaan birokrasi dimana dilakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
  - c. Masih kurangnya pejabat fungsional yang mengikuti diklat sesuai jabatan yang diemban.
2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
  - a. Hasil inovasi yang belum termanfaatkan.
  - b. Penerapan hasil kelitbangan yang belum termanfaatkan.
3. PENGAWASAN
  - a. Lemahnya pengendalian internal SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan.
  - b. Kurangnya sosialisasi terkait pelanggaran pegawai.
  - c. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK.
4. SEKRETARIAT DAERAH
  - a. Adanya beberapa indikator penilaian di Sekretariat Daerah yang perlu disempurnakan.
  - b. Belum optimalnya beberapa kriteria penilaian pelayanan publik di Sekretariat Daerah.

#### 4.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu

strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 3 tahun.

#### **4.3.1. Isu Strategis Internasional/Global**

##### **4.3.1.1. Perang Rusia-Ukraina**

Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menuai berbagai dampak global. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan menurunnya ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan berbahan dasar gandum. Keterbatasan transfer energi dari Rusia ke benua Eropa memberikan dampak pada meningkatnya biaya produksi barang-barang dari Eropa utamanya produk teknologi tinggi. Selain itu, dampak berikutnya adalah risiko perlambatan ekonomi global akibat lonjakan inflasi. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut akan direspon dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi tersebut mencuat dan menjadi ancaman perekonomian global di tahun 2023 dan akan berefek setidaknya hingga 2 tahun berikutnya.

Dalam hubungan perdagangan Rusia-Indonesia, impor terbesar Indonesia dari Rusia yaitu ingot besi baja (bahan baku baja) sebesar 486 ribu ton dengan nilai USD 326 juta sepanjang tahun 2021. Impor itu menjadi yang terbesar dan berikutnya adalah pupuk buatan sebesar 974,32 ribu ton dengan nilai USD 326,03 juta. Walaupun pada tahun 2021 neraca perdagangan Rusia-Indonesia meningkat, namun di tahun 2023 antisipasi terhadap ketidakstabilan perekonomian global perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya pada bidang pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan.

#### **4.3.1.2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Secara konseptual, SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan

pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan selama 15 tahun ke depan (2016-2030). Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDGs ini terdiri atas 17 tujuan, 169 target, yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sektor swasta dan lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya, pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan secara eksplisit mengenai pentingnya mengintegrasikan SDG's ke dalam dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDGs benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian SDGs harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

#### **4.3.1.3. Perubahan Iklim**

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya

musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP)* -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka Pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan *The Asia Foundation* dan Pilar Nusantara Sulawesi Selatan dengan menerapkan konsep transfer anggaran berbasis ekologi. Transfer anggaran berbasis ekologi merupakan konsep desentralisasi fiskal untuk menyelaraskan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan kerja sama adalah melembagakan



pembangunan berbasis ekologi di Kelurahan melalui kebijakan Pagu Indikatif Wilayah.

#### 4.3.1.4. Transformasi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui *financial technology (fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui *e-commerce*, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan *start up e-commerce* dan *marketplace* yang memudahkan konsumen untuk berbelanja.

Perkembangan *e-commerce* sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha UMKM menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia termasuk di Kota Parepare. Jumlah UMKM di Kota Parepare tahun 2022 sebanyak 15.004. Penggunaan aplikasi digital untuk pemasaran produk oleh para pelaku usaha masih kurang dimanfaatkan. Pengembangan pemasaran produk UMKM akan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

#### **4.3.2. Isu Strategis Nasional**

##### **4.3.2.1. Bonus Demografi**

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Selain itu, perubahan struktur umur penduduk yang cepat juga membawa implikasi terhadap penduduk yang menua (*ageing population*) yang tidak produktif. Perubahan struktur umur penduduk tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan perhatian pada pembangunan manusia berdasarkan siklus hidup.

Piramida penduduk Kota Parepare terkategori sebagai tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Piramida tipe ekspansif menggambarkan bahwa Kota

Parepare mendapatkan bonus demografi. Pada Tahun 2022, *dependency ratio* Kota Parepare sebesar 45,13 persen.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

#### **4.3.2.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100%.

Untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Parepare Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pendidikan;
  - a. Pendidikan Dasar dengan capaian kinerja 99,12%
  - b. Pendidikan Kesetaraan dengan capaian kinerja 96,56%
  - c. Pendidikan Anak Usia Dini dengan capaian kinerja 79,69%
2. Kesehatan;
  - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan capaian kinerja 97,07%
  - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan capaian kinerja 87,35%
  - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan capaian kinerja 91,53%
  - d. Pelayanan Kesehatan Balita dengan capaian kinerja 100%
  - e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dengan capaian kinerja 61,79%
  - f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dengan capaian kinerja 24,32%
  - g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dengan capaian kinerja 100%
  - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan capaian kinerja 22,06%

- i. Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus dengan capaian kinerja 100%
  - j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dengan capaian kinerja 67,23%
  - k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan capaian kinerja 79,72%
  - l. Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) dengan capaian kinerja 100%
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan capaian kinerja 100%
  - b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan capaian kinerja 94,01%
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota dengan capaian kinerja 94,62%
  - b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota dengan capaian kinerja 100%
5. Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja 100%
  - b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan capaian kinerja 100%
  - c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan capaian kinerja 100%
  - d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan capaian kinerja 100%
  - e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan capaian kinerja 100%

#### 6. Sosial.

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti dengan capaian kinerja 100%
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dengan capaian kinerja 100%
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan capaian kinerja 100%
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dengan capaian kinerja 100%
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Setelah Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota dengan capaian kinerja 100%

#### 4.3.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah :

##### 4.3.3.1 Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continously*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan

akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Rumah sakit regional telah dibangun pada masa RPJMD 2018-2023 agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan.

Selanjutnya masih dibutuhkan operasional dan pengembangan rumah sakit regional tersebut dengan dukungan SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas.

#### **4.3.3.2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

#### **4.3.3.3 Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Kegiatan Perekonomian**

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana Indeks layanan infrastruktur tahun 2021 sebesar 79,44 jaringan jalan dalam mantap pada tahun 2021 baru mencapai 70,01% dari panjang jalan 2.009,35 km. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Di Sulawesi Selatan persentase jalan provinsi dalam kondisi baik adalah 38,98% dikarenakan masih banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Dengan demikian diperlukan adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat agar dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

#### **4.3.3.4 Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan**

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah 59,66 juta rupiah



meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 55,68 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan karena tingkat rasio ketimpangan masih berada pada angka 0,377. Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 8,53 % pada tahun 2021.

#### **4.3.3.5 Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas**

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2018, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,78 Juta, atau 49% dari total warga Sulawesi Selatan, sementara untuk tahun 2021 terjadi peningkatan angka usia produktif menjadi 6,2 juta jiwa atau 52% dari total penduduk. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun demikian dari segi kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan IPM, Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berada di angka 72,24 atau masih berada di peringkat 11 nasional. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah 8,46 tahun yang berarti rata-rata lama sekolah hanya sampai kelas VIII atau kelas 2 SMP.

#### **4.3.3.6 Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)**

Sumberdaya alam yang terkandung di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan

pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

1. Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
2. Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.
3. Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
4. Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (*debottlenecking*).
5. Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha.

Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

#### **4.3.3.7 Sulawesi Selatan sebagai poros maritim**

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km<sup>2</sup> diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.

Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia.

Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

Kawasan pesisir Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi dan merupakan usaha padat karya. Tercatat lebih kurang 33.576 pengelola rumput laut atau 102.873 anggota rumah tangga di Sulawesi Selatan atau 39% dari seluruh anggota rumah tangga di Indonesia yang mengusahakan rumput laut. Potensi ini perlu didukung pemerintah dengan memperpanjang rantai nilai rumput laut untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak.

#### **4.3.4. Isu- Isu Strategis Kota Parepare**

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh permasalahan dan isu-isu baik yang bersifat global maupun regional, maka hal hal yang menjadi isu strategis di Kota Parepare adalah sebagai berikut :

##### **4.3.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan**

Perkembangan jumlah penduduk pada daerah perkotaan yang disertai dengan peningkatan arus urbanisasi membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan beserta fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara alamiah seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti kebutuhan untuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas pelayanan umum. Dari fenomena tersebut menuntut pula pembangunan sarana dan prasarana di daerah perkotaan sebagai pengejawantahan menjaga kelangsungan hidup masyarakat di daerah perkotaan dalam rangka menuju kota berkelanjutan (*sustainable city*).

Kota Parepare yang menunjukkan perkembangan pesat dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan mengakibatkan laju urbanisasi masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu pertumbuhan permukiman akan ikut berkembang yang dapat menciptakan permukiman dan lingkungan yang tidak layak atau kumuh. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lingkungan permukiman kumuh merupakan permasalahan permukiman yang sangat kompleks karena pada lingkungan permukiman kumuh ini tidak hanya kondisi fisik lingkungan yang buruk akan tetapi juga menyangkut permasalahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggal pada permukiman tersebut. Permukiman kumuh menjadi permasalahan yang sangat kompleks di daerah perkotaan termasuk di Kota Parepare. Luasan kumuh awal Kota Parepare tahun 2020 adalah seluas 392,46 ha. Total capaian pengurangan kumuh selama periode 2020-2021 seluas 126,15 ha dan sisa luas kumuh akhir yang perlu ditangani kedepannya seluas 266,31 ha. Tentunya hal ini masih menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menyusun strategi dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh di Kota Parepare, baik dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman

dari segi perumahan serta lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni maupun pendampingan sosial dan ekonomi guna keberlanjutan masyarakat di permukiman kumuh.

Selain permukiman kumuh, permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan pengelolaan perkotaan erat kaitannya dengan layanan sanitasi bagi masyarakat. Menjamin ketersediaan pelayanan sanitasi dan air untuk semua merupakan target SDG's 2030. Salah satu contoh permasalahan sanitasi yang paling banyak terjadi dan berhubungan langsung dengan masyarakat adalah air limbah domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Air limbah tentunya merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena berpotensi mencemari lingkungan yang selanjutnya bisa berdampak buruk bagi makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kondisi sanitasi kota diperlukan adanya sistem pengelolaan air limbah (SPAL). Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kota Parepare pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan peningkatan fungsi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah ada.

Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan perkotaan adalah penyediaan air minum karena merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan rumah tangga merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen kuat dalam pemenuhan ketersediaan air bersih dan air minum yang layak dengan kualitas yang sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan

disiapkannya pendanaan penyertaan modal ke PDAM Parepare untuk membangun sarana dan prasarana air bersih dengan membangun sistem jaringan perpipaan yang lebih baik, pembangunan reservoir dan penjernihan sumber air tanah dalam yang sudah dikaji dan diteliti kapasitas air bakunya. Untuk program jangka panjang Pemerintah Kota Parepare beserta Pemerintah Kabupaten sekitar yang didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berupaya untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui Sistem Pengelolaan Air Minum Skala Regional (SPAM Regional) Ajatappareng yang akan dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang, dan Pemerintah Kabupaten Sidrap.

Secara umum sistem pusat dan skala pelayanan di Kota Parepare terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi; pusat industri manufaktur dan pergudangan, pusat perdagangan, pusat pelayanan transportasi laut, pusat pelayanan transportasi darat, pusat pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan serta pusat pelayanan olahraga. Sebagai pusat industri manufaktur dan pergudangan serta pusat perdagangan, Kota Parepare memiliki potensi untuk mengembangkan kawasan industri dan pergudangan yang dapat menghimpun hasil-hasil pertanian/ perkebunan/ perikanan dan hasil bumi lain dari daerah sekitar. Sebagai pusat pelayanan transportasi laut, Kota Parepare didukung dengan keberadaan Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Cappa Galung yang melayani lalu lintas pelayaran di Selat Makassar dan pendukung kegiatan perdagangan antar pulau, bahkan ekspor. Sebagai pusat pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Parepare telah membangun RS Regional Hasri Ainun Habibie yang menjadi rumah sakit rujukan bagi daerah sekitar dengan konsep *medical tourism*. Sebagai pusat pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota Parepare telah membangun Institut BJ. Habibie yang berbasis sains dan teknologi. Dan sebagai pusat pelayanan olahraga, Pemerintah Kota Parepare telah membangun Stadion Gelora BJ. Habibie yang dapat menjadi markas bagi PSM Makassar. Potensi Kota

Kota Parepare sebagai Pusat Kegiatan Wilayah bagi daerah sekitarnya perlu ditunjang oleh pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung dalam rangka keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana transportasi. Sarana dan prasarana tersebut menjadi pendorong bagi berputarnya roda perdagangan dan industri. Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi darat mempunyai arti yang sangat penting, mengingat fungsinya untuk memperlancar arus barang dan orang dari satu tempat ketempat lain dan arus barang dari sumber-sumber produksi ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu, kegunaan jembatan dan jalan raya antara lain memperlancar pertumbuhan perekonomian sebuah bangsa; pemerataan perekonomian; kelancaran lalu lintas; pertumbuhan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) daerah dan sebagainya. Adanya jembatan atau jalan raya juga memiliki fungsi sebagai penghubung; keamanan sebuah bangsa dapat lebih merata; pertukaran budaya antar daerah dan mempercepat aktivitas masyarakat di wilayahnya.

Salah satu akses utama jalur Trans Sulawesi di Parepare adalah Jembatan Sumpang Minangae, namun jembatan tersebut dinilai sudah sangat tidak memadai. Hal ini menimbulkan kemacetan dan berdampak pada ketidaknyamanan pengguna infrastruktur jalan dan jembatan pada umumnya. Pembangunan jembatan kembar sebagai alternatif jembatan Sumpang Minangae yang mulai dibangun sejak tahun 2022 diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemacetan tersebut. Untuk lebih memudahkan akses dari daerah lain diperlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi lainnya seperti pembangunan jalan dan pembangunan rel kereta api. Jalan merupakan faktor utama yang mendukung mobilitas atau pergerakan dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, oleh karena itu sudah sebaiknya dilakukan penyediaan jalan yang baik. Jalan tersebut harus terus dipelihara dan ditingkatkan agar perkembangan ekonomi, wilayah dan perpindahan orang serta barang dapat dilayani dengan baik. Pemeliharaan dan peningkatan jalan tersebut



memerlukan program penanganan yang tepat sehingga dana pemeliharaan dan peningkatan dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Pembangunan rel kereta api juga dapat mendukung percepatan pembangunan suatu daerah. Pemerintah telah lama merencanakan pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi Makassar-Parepare. Proyek yang dibangun dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha ini diharapkan akan mampu mendorong konektivitas nasional. Proyek Strategis Nasional Kereta Api Makassar-Parepare yang mulai dikerjakan sejak tahun 2014 lalu akhirnya mulai terwujud di Sulawesi Selatan. Tahun 2022, rute sepanjang 84 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Barru sudah dioperasikan secara terbatas. Pada tahap selanjutnya, proyek pembangunan kereta api ini akan dilanjutkan untuk rute dari Mandai menuju Makassar serta dari Barru menuju Parepare. Dengan adanya sarana dan prasarana transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan arus lalu lintas barang dan penumpang yang mampu meningkatkan perekonomian serta daya saing daerah.

#### **4.3.4.2 Peningkatan Promosi dan Layanan untuk Kesehatan dan Pendidikan**

Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan ditujukan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Parepare yang berkualitas yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia, pemerataan dan keadilan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, semakin meningkatnya akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terkait erat dengan segala aspek kehidupan. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah dan indeks kesehatan yang dapat dilihat dari angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup Kota Parepare selama rentang lima tahun

terakhir (2018-2022) menunjukkan tren peningkatan, dimana AHH Kota Parepare Tahun 2018 sebesar 71,27 tahun meningkat menjadi 71,57 tahun pada tahun 2022. Peningkatan AHH ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan Kota Parepare selama 5 tahun terakhir.

Peningkatan layanan kesehatan menjadi tugas pemerintah Kota Parepare untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup sehat. Caranya dengan memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk semua anggota masyarakat yang kian bertambah. Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan adanya sosialisasi dan promosi di bidang kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga serta lingkungannya secara mandiri dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Permasalahan pelayanan dasar bidang kesehatan yang dijelaskan sebelumnya, seperti keterlambatan pasien dalam memeriksakan diri secara dini ke pelayanan kesehatan dan adanya tambahan penyakit komplikasi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penularan DBD, makin berkembangnya sumber penularan HIV yang berasal dari berbagai faktor risiko, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penularan HIV/AIDS yang menimbulkan stigma dan diskriminasi pada ODHA, penanganan stunting dan sebagainya menunjukkan bahwa sosialisasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat masih belum berjalan efektif dan perlu untuk ditingkatkan.

Persoalan stunting masih menjadi isu nasional dimana pemerintah telah menetapkan target untuk menurunkan angka stunting minimal menjadi 14 persen pada tahun 2024. Salah satu penyebab stunting adalah adanya perkawinan anak..

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya tidak hanya bagi anak, keluarga, tapi juga negara, di antaranya yaitu stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya. Angka pernikahan anak di Kota Parepare mencapai 98 orang pada tahun 2022, dan ini menjadi salah satu akar masalah dari rendahnya pertumbuhan IPM di Kota Parepare. Oleh sebab itu perlu adanya strategi dalam pencegahan perkawinan anak untuk mencegah stunting. Pencegahan dan penanganan stunting juga merupakan wujud dari pemenuhan hak dasar anak, yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, dan partisipasi. Jika seluruh pihak memperkuat sinergi dan bergerak bersama, maka penyelesaian masalah tersebut bukanlah hal yang mustahil. Untuk itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi untuk mencegah stunting sekaligus dapat memenuhi beberapa hak anak. Pemerintah Kota Parepare dalam memenuhi hak anak melibatkan peran anak melalui Forum Anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menggali permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi anak untuk pembangunan Kota Parepare kedepannya.

Selain kesehatan, pendidikan memegang peranan penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan di Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Parepare dalam lima tahun terakhir (2018-2022). Rata-rata lama sekolah di Kota Parepare tahun 2018 sebesar 10,45 tahun meningkat di tahun 2022 menjadi 10,66 tahun, dengan kata lain bahwa lamanya anak bersekolah sampai kelas X (kelas 1 SMA). Meskipun terjadi peningkatan, nyatanya rata-rata anak belum bisa menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan menengah atas. Berberapa permasalahan pelayanan dasar bidang pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya masih perlu menjadi

perhatian pemerintah daerah dalam menangani anak putus/tidak sekolah, seperti banyaknya siswa yang tidak bersekolah dan berhenti/putus bersekolah karena tuntutan ekonomi dan masih adanya orangtua yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting, pengaruh lingkungan, masalah ekonomi yang menyebabkan anak membantu orangtua mencari nafkah.

Sedangkan harapan lama sekolah di Kota Parepare tahun 2018 sebesar 14,50 tahun dan meningkat di tahun 2022 menjadi 14,52 tahun, artinya secara rata-rata anak yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah hanya sampai Diploma II. Sebagai pusat pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota Parepare telah membangun Institut BJ. Habibie yang berbasis sains dan teknologi. Dengan adanya perguruan tinggi tersebut, diharapkan dapat memudahkan akses pendidikan bagi pelajar baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah Kota Parepare untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain penanganan anak usia sekolah, hal lain yang harus diperhatikan adalah terkait pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi pemberian layanan pendidikan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi.

#### **4.3.4.3 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja dan UMKM serta Penguatan Cadangan Pangan;**

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Tujuan pemberdayaan

masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Di Kota Parepare, tingkat kemiskinan selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kota Parepare sebesar 5,44 (7,96 ribu jiwa) dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,40 (7,93 ribu jiwa) yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 5,41 (8,01 ribu jiwa). Meningkatnya tingkat kemiskinan di Kota Parepare disebabkan oleh kurang optimalnya penanggulangan masyarakat pra sejahtera serta kurang mandiri masyarakat yang menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Pemerintah telah menargetkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Parepare. Dalam mendukung target pemerintah tersebut, beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan pemberian bantuan usaha serta pelatihan kewirausahaan dan pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka mendorong kesejahteraan mereka. Dalam upaya penanganan kemiskinan dibutuhkan adanya keterlibatan multipihak dan koordinasi lintas sektor. Dengan partisipasi masyarakat secara aktif diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin dapat berjalan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan hal terpenting bagi perekonomian nasional, yang sebagai bentuk keberpihakan yang kuat dari kelompok-kelompok usaha rakyat, harus menjaga peluang, perlindungan, dan pengembangan yang paling penting sebanyak mungkin. Selain itu, UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, serta berperan dalam menghasilkan pemerataan dan pendapatan bagi masyarakat. Dalam rangka membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19 agar dapat bangkit kembali, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM. Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi acuan Pemerintah Kota Parepare, untuk menjadikan Wajah terdepan di Sulawesi Selatan menumbuhkembangkan UMKM di Kota Parepare. Sebagai upaya mendorong pemberdayaan di Kota Parepare, pemerintah kota menawarkan Kawasan Kuliner Religius sebagai ikon baru. Dengan hadirnya kawasan tersebut, dapat membuka dan mendongkrak peluang perekonomian baru.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah yang berperan sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan akan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah, oleh karena itu ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintah. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan.

Pengelolaan cadangan pangan dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi krisis pangan dan stabilisasi harga serta antisipasi bencana alam. Kerawanan bencana alam secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dari sisi produksi pangan, bencana alam seperti banjir dan kekeringan akan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang akan mempengaruhi

ketersediaannya untuk dikonsumsi. Dari sisi distribusi, bencana alam dapat merusak prasarana dan sarana transportasi, serta sarana logistik pangan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pasokan pangan ke lokasi bencana terganggu. Keadaan ini akan mengakibatkan hambatan akses fisik bagi masyarakat korban bencana. Disamping itu, bencana alam juga mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda bagi masyarakat korban bencana, yang pada gilirannya akan menurunkan akses ekonomi terhadap bahan pangan karena menurunnya daya beli para korban bencana. Dalam konteks inilah cadangan pangan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi dampak dari bencana alam terhadap kerawanan pangan bagi para korban bencana.

Penguatan cadangan pangan juga dilakukan dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat rawan pangan. Kondisi kemiskinan masyarakat memperkuat justifikasi bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan pangan guna meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pangan, utamanya akses terhadap pangan pokok. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah (pada semua tingkatan), cadangan pangan swasta dan cadangan pangan masyarakat agar pengelolaan cadangan pangan menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, baik kerawanan pangan yang bersifat transien (dampak bencana dan gejolak harga), maupun kerawanan pangan kronis (dampak kemiskinan).

#### **4.3.4.4 Kerjasama Daerah dan Pengembangan Investasi**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerja sama dengan daerah lain atau kerja sama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergitas dan saling menguntungkan. Kerja sama daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan

pelayanan umum. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kota Parepare telah banyak melaksanakan kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga non pemerintah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama daerah Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan pihak ketiga untuk tahun 2020-2022 sebanyak 70 kerja sama yang terdiri dari 17 dokumen kerja sama pada tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 18 kerja sama dan pada 2022 sebanyak 35 kerja sama. Banyak alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kerjasama, namun intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pembangunan regional, investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan agar menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Investasi dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan teknologi dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena terbukanya lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga ekonomi regional meningkat.

Pemerintah Kota Parepare tengah merancang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu yang menjadi sasaran adalah optimalisasi Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) dan revitalisasi Terminal Peti Kemas Cappa Ujung. Tidak hanya itu, banyaknya lokasi wisata seperti Anjungan Cempae, Tonrangeng River Side, Monumen Cinta Habibie-Ainun, sampai Stadion Gelora BJ Habibie menjadikan Kota Parepare sebagai kota tujuan bagi wisatawan dari luar daerah. Dengan adanya hal tersebut diharapkan



dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare juga menyorot sektor jasa dan kuliner sebagai tumpuan investasi. Kedua sektor tersebut dianggap strategis dalam mendorong perekonomian.

Untuk menarik investor perlu adanya kemudahan dan kejelasan prosedur penanaman modal serta rasa aman bagi para investor. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan beragam terobosan kebijakan yang telah ditempuh pemerintah dalam memastikan meningkatnya investasi, seperti Online Single Submission (OSS) dipastikan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah. Disamping itu, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, diharapkan akan terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Kota Parepare, ditengah keterbatasan APBD menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **4.3.4.5 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**

Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya bersifat global, disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu, dampaknya juga bersifat global, dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim yang ditandai dengan berubahnya temperatur, presipitasi dan kenaikan air laut yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, pertanian, hutan, area pesisir, sumber daya air, spesies dan area alami, permintaan energi, transportasi dan lain-lain menghendaki solusi yang bersifat global, namun dalam bentuk aksi lokal

di seluruh dunia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya dalam mengantisipasi dan meminimalisasi dampak perubahan iklim.

Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak perubahan iklim maka Pemerintah Kota Parepare melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041, dimana dalam regulasi tersebut pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan/ mengedepankan aspek mitigasi bencana.

Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada titik lokasi yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh Pemerintah Kota Parepare, oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, dan pemerintah kabupaten tetangga sebagai hinterland Kota Parepare.

Wilayah Kota Parepare didominasi oleh perbukitan dan dataran rendah. Bencana yang terjadi di wilayah Kota Parepare umumnya dipengaruhi oleh bencana hidrometeorologis seperti bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, cuaca ekstrim, dan abrasi pantai. Bencana hidrometeorologis dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena curah hujan tinggi, pendangkalan daerah aliran sungai, penggundulan hutan, alih fungsi lahan, dan terbatasnya daerah resapan air. Keseluruhan potensi bencana ini menjadikan pemerintah harus meningkatkan ketahanan bencana sekaligus meningkatkan kualitas penanggulangan dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana

merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerja sama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama daerah wilayah Ajatappareng dalam merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penanganan bencana khususnya banjir, mulai dari sisi kebijakan sektor, kebijakan wilayah, dan juga pembagian kewenangan untuk target jangka menengah dan jangka panjang, memetakan daerah-daerah yang terdampak bencana dan punya potensi terkena bencana di aliran sungai, sinkronisasi program tata ruang, sampai dengan pembiayaannya.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana dibutuhkan strategi yang matang dan terencana dengan baik. Tindakan untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan konsep penanganan banjir yang terintegrasi dengan adanya keterpaduan pendekatan dari hulu ke hilir, serta pendekatan struktural dan non struktural menjadi suatu sistem pengendalian banjir sehingga dibutuhkan sebuah rencana induk sistem pengendalian banjir dan drainase perkotaan.

Selain itu, dalam upaya mitigasi banjir dibutuhkan program normalisasi dan revitalisasi di Sungai Karajae dan Sungai Jawi-Jawi melalui pengerukan sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta penghijauan dan reboisasi. Pengerukan sungai dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai sumber air, pengendali banjir, mengoptimalkan fungsi sungai saat menghadapi air yang meningkat pada musim hujan, serta memperbaiki sempadan sungai. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pembangunan talud, bronjong, *sheetpile* dan dam pengendali (*check dam*) diperlukan untuk mengendalikan dan menahan debit air. Penghijauan dan reboisasi khususnya tanaman dan pepohonan yang berakar serabut, serta memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk lahan hijau juga sangat dibutuhkan untuk menyerap air.

Dalam rangka adaptasi dan mitigasi bencana banjir di Kota Parepare, dibutuhkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peran BPBD sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tahapan penyelenggaraan bencana meliputi pencegahan bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD berperan untuk melakukan perencanaan atau melakukan suatu upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, melakukan serangkaian kegiatan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana serta melakukan perbaikan pasca terjadinya suatu bencana. Selain itu dibutuhkan sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana.

Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Parepare sebagai kota ramah lingkungan dan ramah sumber daya alam. Tentunya dimulai dengan hal-hal kecil seperti mengembangkan serta merawat ruang terbuka hijau, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak berlebihan dalam menggunakan sampah plastik.

Permasalahan persampahan menjadi salah satu aspek dalam isu strategis Kota Parepare. Masalah persampahan disebabkan karena tingginya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan jumlah timbulan sampah juga bertambah. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan persampahan, seperti petugas sampah, truk sampah, motor sampah, dll. Pengelolaan sampah rumah tangga juga telah diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa pengurangan sampah rumah tangga dilakukan melalui pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Adapun penanganan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Tujuan dari Pemerintah Kota Parepare menggunakan strategi tersebut agar masyarakat ketika hendak membuang sampah lebih memperhatikan yang dapat didaur ulang, digunakan kembali dan mana sampah yang sudah harus dibuang ke TPA. Pemerintah Kota Parepare juga mewajibkan kepada setiap kelurahan di Kota Parepare untuk memiliki bank sampahnya sendiri sebagai tempat pengelolaan sampah, namun pemanfaatan bank-bank sampah masih kurang optimal dalam menangani permasalahan persampahan di Kota Parepare.

#### **4.3.4.6 Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Digital**

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan diperoleh kinerja yang baik. Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik selalu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (Participation), Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), Transparansi (Transparency), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (Consensus), Kesetaraan (Equity), Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), dan Visi Strategis (Strategic Vision).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, perlu didorong oleh penggunaan teknologi yang dapat memudahkan penyelenggaraan pemerintahan. E-Government merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan implementasi layanan e-government dengan menggunakan teknologi informasi. Peningkatan pelayanan publik juga sedang dilaksanakan oleh e-government. E-Government adalah akses informasi dan layanan pemerintah kepada warga, mitra bisnis, karyawan, instansi lain, dan instansi pemerintah dengan menggunakan teknologi pemerintah, terutama aplikasi internet berbasis web dan untuk meningkatkan penyampaian. E-government memiliki potensi untuk membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat umum dengan membuat interaksi dengan warga lebih lancar, lebih mudah dan lebih efisien. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan e-government menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk memfasilitasi pembentukan layanan publik.

Kota Parepare sebagaimana yang dirasakan oleh daerah lain di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/e-Govt. Belum optimalnya dukungan kebijakan serta tidak sinerginya antara kemampuan Sumber Daya Manusia dan pembangunan infrastruktur menjadi kendala terhambatnya implementasi SPBE/e-Govt. Implementasi perencanaan pengembangan SPBE/e-Govt yang berjalan lambat, hal ini akibat pada minimnya alokasi anggaran yang mendukung pengembangan SPBE/e-Govt di Kota Parepare. Selain alokasi anggaran, pelayanan publik harus didukung dengan SDM-SDM unggul yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan masyarakat telah sangat berubah dimana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan.

Negara harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat lebih inovatif, kreatif, produktif serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen dan inovasi dalam pemberian layanan publik sangat diperlukan dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital melayani menuju pemerintahan digital masa depan.

### 5.3. Cascading Kinerja

*Cascading* Kinerja merupakan penjabaran dan penyelarasan tujuan dan sasaran strategis serta target kinerjanya secara vertikal dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Penerapan *Cascading* Kinerja dalam suatu pemerintahan daerah bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan tujuan sasaran kinerja setiap perangkat daerah sehingga dapat berkontribusi secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. *Cascading* Kinerja Pemerintah Kota Parepare dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.2  
*Cascading Kinerja RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026*

| No  | Tujuan dan Sasaran                     | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                        | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| I   | Tujuan I :                             |                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|     | Meningkatkan Daya Saing Masyarakat     | Indeks Pembangunan Manusia           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| I.1 | Sasaran I :                            | Indeks Pendidikan                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|     | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Indeks Kesehatan                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|     |                                        | Pengeluaran Perkapita                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|     |                                        |                                      | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (SD/SMP)<br>Angka partisipasi Murni (SD-SMP)<br>Angka Pendidikan di Tamatkan<br>Angka Putus Sekolah (SD/SMP)<br>Angka Kelulusan SD/Mi,SMP/MTs<br>Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP/Paket A/Paket B<br>Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS<br>Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA<br>Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik<br>Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |



| No     | Tujuan dan Sasaran                  | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                                         | Indikator Kinerja Program                                                                                             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| I.1.2  |                                     |                                      | Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan                                      | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV                                                                                | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |
| I.1.3  |                                     |                                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat     | Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP                                                | Dinas Kesehatan, RSUD. A. Makkasau dan RS HAH      |
| I.1.4  |                                     |                                      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                     | Rasio dokter per satuan penduduk                                                                                      | Dinas Kesehatan, RSUD. A. Makkasau dan RS HAH      |
|        |                                     |                                      |                                                                                 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                                                                                | Dinas Kesehatan                                    |
| I.1.5  |                                     |                                      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                     | Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat | Dinas Kesehatan                                    |
| I.1.6  |                                     |                                      | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                | Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                           | Dinas Kesehatan, RSUD. A. Makkasau dan RS HAH      |
| I.1.7  |                                     |                                      | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting             | Koefisien Harga Antar Waktu                                                                                           | Dinas Perdagangan                                  |
| I.1.8  |                                     |                                      | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Tingkat Ketersediaan Pangan                                                                                           | Dinas Ketahanan Pangan                             |
| I.1.9  |                                     |                                      | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein                                                                               | Dinas Ketahanan Pangan                             |
| I.1.10 |                                     |                                      | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Tingkat Penanganan Rawan Pangan                                                                                       | Dinas Ketahanan Pangan                             |
|        |                                     |                                      |                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |
| I.2    | Sasaran 2 :                         |                                      |                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |
|        | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indeks Pemberdayaan Gender           |                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |
| I.2.1  |                                     |                                      | Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan         | Persentase perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| I.2.2  |                                     |                                      | Program Perlindungan Perempuan                                                  | Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| No     | Tujuan dan Sasaran                                                                             | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                  | Indikator Kinerja Program                                                                                                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                                                                                |                                      |                                          | dalam unit pelayanan terpadu                                                                                              |                                                    |
| I.2.3  |                                                                                                |                                      | Program Peningkatan Kualitas Keluarga    | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                                                                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| I.2.4  |                                                                                                |                                      | Program Pengelolaan Data Gender Dan Anak | persentase tersedianya data profil gender dan anak                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| I.2.5  |                                                                                                |                                      | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)         | Persentase tercapainya pemenuhan Hak Anak                                                                                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| I.2.6  |                                                                                                |                                      | Program Perlindungan Khusus Anak         | Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|        |                                                                                                |                                      |                                          |                                                                                                                           |                                                    |
|        |                                                                                                |                                      |                                          |                                                                                                                           |                                                    |
| II     | Tujuan II :                                                                                    | PDRB Per kapita                      |                                          |                                                                                                                           |                                                    |
|        | Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat | Inflasi                              |                                          |                                                                                                                           |                                                    |
|        |                                                                                                | Indeks Gini (Gini Ratio)             |                                          |                                                                                                                           |                                                    |
| II.1.  | Sasaran 3 :                                                                                    |                                      |                                          |                                                                                                                           |                                                    |
|        | Meningkatnya Produktivitas Daerah                                                              | Pertumbuhan Ekonomi                  |                                          |                                                                                                                           |                                                    |
| II.1.1 |                                                                                                |                                      | Program Penyelenggaraan Jalan            | Proporsi jalan dalam kondisi baik                                                                                         | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang           |
|        |                                                                                                |                                      |                                          | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                                                |                                                    |
|        |                                                                                                |                                      |                                          | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)                                 |                                                    |
|        |                                                                                                |                                      |                                          | Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar                                        |                                                    |
|        |                                                                                                |                                      |                                          | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                                                        |                                                    |

| No      | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                          | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                                                                                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab         |
|---------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                    |                                      |                                                                  | Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| II.1.2  |                    |                                      | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                             | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                         | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  |
| II.1.3  |                    |                                      | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | Persentase irigasi dalam kondisi baik<br>Rasio jaringan irigasi<br>cakupan layanan irigasi terhadap daerah irigasi (DI)<br>Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan lonsor<br>Persentase bencana lonsor dan abrasi pada titik rawan bencana | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  |
| II.1.4  |                    |                                      | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan                                                                                                                                                                                                                                         | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  |
| II.1.5  |                    |                                      | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                      | Pemenuhan fasilitas perkotaan<br>Persentase capaian fasilitas perkotaan                                                                                                                                                                                                            | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  |
| II.1.6  |                    |                                      | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat<br>Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun                                                                                                                                                                   | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  |
| II.1.7  |                    |                                      | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan<br>cakupan layanan air bersih                                                                                                                                                   | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  |
| II.1.8  |                    |                                      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                            | Capaian Target Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan   |
| II.1.9  |                    |                                      | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                           | Capaian Target Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                                                                      | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan   |
| II.1.10 |                    |                                      | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                 | Capaian Produksi Pengolahan hasil Perikanan                                                                                                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan   |
| II.1.11 |                    |                                      | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata              | Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata                                                                                                                                                                                                                             | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| No      | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                                                            | Indikator Kinerja Program                                                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|---------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| II.1.12 |                    |                                      | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | Persentase Durasi Lama kunjungan wisata                                                      | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
| II.1.13 |                    |                                      | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif                                  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
| II.1.14 |                    |                                      | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase Pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan Pelatihan                                | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
| II.1.15 |                    |                                      | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               | Capaian Target Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                  | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan                |
| II.1.16 |                    |                                      | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            | Target Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian                                              | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan                |
| II.1.17 |                    |                                      | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                         | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| II.1.18 |                    |                                      | Program Promosi Penanaman Modal                                                                    | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| II.1.19 |                    |                                      | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                  | Tersedianya pelayanan Perizinan dan Non perizinan dengan perkuatan aplikasi berbasis online  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| II.1.20 |                    |                                      | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                   | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)                                                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| II.1.21 |                    |                                      | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                  | Persentase Sarana Distribusi yang Aktif                                                      | Dinas Perdagangan                                      |
| II.1.22 |                    |                                      | Program Pengembangan Perumahan                                                                     | Cakupan ketersediaan data rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana              | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan     |
| II.1.23 |                    |                                      | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                      | Persentase Lingkungan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU                                    |                                                        |
| II.1.23 |                    |                                      | Program Kawasan Permukiman                                                                         | Cakupan Jalan Lingkungan                                                                     |                                                        |
| II.1.24 |                    |                                      | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                               | Cakupan hasil koordinasi, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan | Bag. Ekonomi dan Pembangunan Setdako                   |

| No      | Tujuan dan Sasaran                       | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                                 | Indikator Kinerja Program                                                                                                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| II.1.24 |                                          |                                      | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                            | Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan                                                                                                           | Dinas Perdagangan                                  |
| II.1.25 |                                          |                                      | Program Pengendalian Izin Usaha industri Kabupaten/Kota                 | Persentase Layanan Perizinan Usaha Industri                                                                                                    |                                                    |
|         |                                          |                                      |                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |
| II.2    | Sasaran 4 :                              |                                      |                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |
|         | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat    | Tingkat Kemiskinan                   |                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |
| II.2.1  |                                          |                                      | Program Pemberdayaan Sosial                                             | Persentase PSKS yang Aktif Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial                                                                             | Dinas Sosial                                       |
| II.2.2  |                                          |                                      | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan          | Persentase Pemulangan Warga Negara yang tertangani                                                                                             | Dinas Sosial                                       |
| II.2.3  |                                          |                                      | Program Rehaabilitasi Sosial                                            | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya | Dinas Sosial                                       |
| II.2.4  |                                          |                                      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                 | Persentase Penanganan Fakir Miskin                                                                                                             | Dinas Sosial                                       |
|         |                                          |                                      |                                                                         | Cakupan Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Pemerintah Terfasilitasi                                                                          |                                                    |
| II.2.5  |                                          |                                      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha                                                                                                  | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| II.2.6  |                                          |                                      | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                          | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                                                                                                          | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| II.2.7  |                                          |                                      | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                           | Cakupan hasil fasilitasi hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                                 | Bag. Kesejahteraan Rakyat Setdako                  |
|         |                                          |                                      |                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |
| II.3    | Sasaran 5 :                              |                                      |                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |
|         | Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja | Tingkat Pengangguran                 |                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |
| II.3.1  |                                          |                                      | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                  | Persentase tenaga kerja yang dilatih                                                                                                           | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| II.3.2  |                                          |                                      | Program Penempatan Tenaga Kerja                                         | Persentase kesempatan kerja yang ada                                                                                                           | Dinas Tenaga Kerja                                 |

| No     | Tujuan dan Sasaran                                                                         | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran     | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| II.3.3 |                                                                                            |                                          | Program Hubungan Industrial                                                                                             | Persentase perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja di perusahaan                                                                                    | Dinas Tenaga Kerja                |
| II.4   | Sasaran 6 :                                                                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                   |
|        | Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah | Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana |                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                   |
| II.4.1 |                                                                                            |                                          | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                                             | Dinas Lingkungan Hidup            |
| II.4.2 |                                                                                            |                                          | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Pemenuhan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Proporsi Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan         | Dinas Lingkungan Hidup            |
| II.4.3 |                                                                                            |                                          | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan                                                                                                  | Dinas Lingkungan Hidup            |
| II.4.4 |                                                                                            |                                          | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | Persentase limbah B3 yang dikelola                                                                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup            |
| II.4.5 |                                                                                            |                                          | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan<br>Persentase pemberian izin - izin lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup            |
| II.4.6 |                                                                                            |                                          | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Pemenuhan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                               | Dinas Lingkungan Hidup            |
| II.4.7 |                                                                                            |                                          | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                   | Pemenuhan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                                                    | Dinas Lingkungan Hidup            |
| II.4.8 |                                                                                            |                                          | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Timbulan sampah yang ditangani<br>Persentase jumlah sampah yang berkurang 3R<br>Persentase jumlah sampah yang tertangani                                   | Dinas Lingkungan Hidup            |

| No      | Tujuan dan Sasaran                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran                    | Program                                                   | Indikator Kinerja Program                                                                                                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                      |                                                         |                                                           | Persentase cakupan area pelayanan                                                                                                |                                          |
|         |                                                                                      |                                                         |                                                           | Nilai operasionalisasi TPA/TPST/SPA                                                                                              |                                          |
| II.4.9  |                                                                                      |                                                         | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah    | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan                                    | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| II.4.10 |                                                                                      |                                                         | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                    | Bangunan tidak melanggar tata ruang                                                                                              | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|         |                                                                                      |                                                         |                                                           | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                                           |                                          |
| II.4.11 |                                                                                      |                                                         | Program Penanggulangan Bencana                            | Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana                                                                                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |
| II.4.12 |                                                                                      |                                                         | Program Penanganan Bencana                                | Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah | Dinas Sosial                             |
| II.4.13 |                                                                                      |                                                         | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Capaian Target Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian                                                                 | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan  |
|         |                                                                                      |                                                         |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
|         |                                                                                      |                                                         |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
| III     | Tujuan 3 :                                                                           |                                                         |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
|         | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani | Indeks Reformasi Birokrasi                              |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
| III.1   | Sasaran 7 :                                                                          |                                                         |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
|         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                               | Indeks Pelayanan Publik                                 |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
|         |                                                                                      | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik                |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
|         |                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                              |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
|         |                                                                                      | Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) |                                                           |                                                                                                                                  |                                          |
| III.1.1 |                                                                                      |                                                         | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum       | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                            | Satuan Polisi Pamong Praja               |
|         |                                                                                      |                                                         |                                                           | Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara                                    |                                          |

| No       | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                                                   | Indikator Kinerja Program                                                                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|----------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                    |                                      |                                                                                           | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                                           |                                                    |
| III.1.2  |                    |                                      | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban                           | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan           |
| III.1.3  |                    |                                      | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                        | Prosentase pengawasan mutu pangan                                                                          | Dinas Ketahanan Pangan                             |
| III.1.4  |                    |                                      | Program Pendaftaran Penduduk                                                              | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk                                                                 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|          |                    |                                      |                                                                                           | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                                                              |                                                    |
| III.1.5  |                    |                                      | Program Pencatatan Sipil                                                                  | Cakupan pelayanan pencatatan sipil                                                                         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|          |                    |                                      |                                                                                           | Rasio bayi ber akte kelahiran                                                                              |                                                    |
|          |                    |                                      |                                                                                           | Rasio pasangan nikah berakte nikah                                                                         |                                                    |
|          |                    |                                      |                                                                                           | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran                                                                          |                                                    |
|          |                    |                                      |                                                                                           | Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur     |                                                    |
|          |                    |                                      |                                                                                           | Persentase anak yang memiliki akte kelahiran                                                               |                                                    |
| III.1.6  |                    |                                      | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                   | Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|          |                    |                                      |                                                                                           | Ketersediaan data base kependudukan Skala Provinsi                                                         |                                                    |
| III.1.7  |                    |                                      | Program Pengendalian Penduduk                                                             | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| III.1.8  |                    |                                      | Program Pembinaan Keluarga Berencana KB                                                   | Ratio Akseptor KB                                                                                          | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| III.1.9  |                    |                                      | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                              | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB),BKR, BKL, ber-KB                                                | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| III.1.10 |                    |                                      | Program Penyelenggaraan Lalu                                                              | Jumlah arus penumpang angkutan umum                                                                        | Dinas Perhubungan                                  |



| No       | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                 | Indikator Kinerja Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                    |                                      | Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)        | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum<br>Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun<br>Panjang jalur kereta api<br>Persentase rambu dan Apill dalam kondisi baik<br>Jumlah uji KIR angkutan umum<br>Rasio ijin trayek<br>Persentase layanan angkutan darat<br>Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan<br>Persentase pemasangan rambu-rambu<br>Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                                   |                                   |
| III.1.11 |                    |                                      | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan<br>Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| III.1.12 |                    |                                      | Program Aplikasi Informatika            | Cakupan layanan telekomunikasi<br>Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon<br>Proporsi rumah tangga dengan akses internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dinas Komunikasi dan Informatika  |

| No       | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                                  | Indikator Kinerja Program                                                                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|----------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                    |                                      |                                                                          | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo |                                                        |
|          |                    |                                      |                                                                          | Proporsi individu yang menggunakan internet                                                                          |                                                        |
|          |                    |                                      |                                                                          | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam                                                            |                                                        |
|          |                    |                                      |                                                                          | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband                                                                         |                                                        |
| III.1.13 |                    |                                      | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                             | Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan                                                                         | Dinas Tenaga Kerja                                     |
| III.1.14 |                    |                                      | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | Persentase kualitas layanan sistem informasi penanaman modal                                                         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| III.1.15 |                    |                                      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                   | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                                                                 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
|          |                    |                                      |                                                                          | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                                                                                  |                                                        |
| III.1.16 |                    |                                      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                     | Persentase Pengembangan Pemuda Kader dan Pemuda Pelopor                                                              | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
|          |                    |                                      |                                                                          | Persentase Pemberdayaan Pemuda                                                                                       |                                                        |
| III.1.17 |                    |                                      | Program Pembinaan Perpustakaan                                           | Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan                                                                         | Dinas Perpustakaan                                     |
| III.1.18 |                    |                                      | Program Penyuluhan Pertanian                                             | Capaian Pembinaan Potensi Kelompok Tani                                                                              | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan                |
| III.1.19 |                    |                                      | Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                               | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat                                                     | Semua Kecamatan                                        |
| III.1.20 |                    |                                      | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                 | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                                                         | Dinas Sosial                                           |
| III.1.21 |                    |                                      | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                              | Persentase penyelesaian sengketa tanah                                                                               | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan    |
| III.1.22 |                    |                                      | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penetapan tanah untuk fasilitas umum                                                                      |                                                        |
| III.1.23 |                    |                                      | Program Pengelolaan Tanah Kosong                                         | Jumlah luas lahan yang bersertifikat                                                                                 |                                                        |

| No       | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                      | Indikator Kinerja Program                                                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab         |
|----------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| III.1.24 |                    |                                      | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                      | Persentase penyusunan Profil Kependudukan                                                      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |
|          |                    |                                      |                                                              | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK                                                            |                                           |
|          |                    |                                      |                                                              | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40Persen berpendapatan bawah                  |                                           |
| III.1.25 |                    |                                      | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                  | Persentase koperasi aktif                                                                      | Dinas Tenaga Kerja                        |
| III.1.26 |                    |                                      | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                 | Persentase koperasi yang berkualitas                                                           |                                           |
| III.1.27 |                    |                                      | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi               | Persentase kualitas Kelembagaan Koperasi                                                       |                                           |
| III.1.28 |                    |                                      | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                   | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| III.1.29 |                    |                                      | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor                     | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                                        |                                           |
| III.1.30 |                    |                                      | Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah     |                                           |
|          |                    |                                      |                                                              | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                          | Dinas Komunikasi dan Informatika          |
| III.1.31 |                    |                                      | Program Pengembangan Kebudayaan                              | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan           |
|          |                    |                                      | Program Pengembangan Kesenian Tradisonal                     | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                       |                                           |
| III.1.32 |                    |                                      | Program Pembinaan Sejarah                                    | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu                                               |                                           |
|          |                    |                                      | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya             | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi                                      |                                           |
| III.1.33 |                    |                                      | Program Pengelolaan Permuseuman                              | Jumlah Museum yang dikelola                                                                    |                                           |
|          |                    |                                      | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno         | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                  | Dinas Perpustakaan                        |
| III.1.34 |                    |                                      | Program Pengelolaan Arsip                                    | Presentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip                                             |                                           |
|          |                    |                                      | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                  | Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan                                            |                                           |
| III.1.35 |                    |                                      | Program Perizinan Penggunaan Arsip                           | persentase penyelenggaraan                                                                     |                                           |

| No       | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                                 | Indikator Kinerja Program                                                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                    |                                      |                                                                         | perizinan penggunaan arsip                                                                               |                                         |
|          |                    |                                      | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Capaian Target Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                           | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| III.1.36 |                    |                                      | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                         | Persentase Layanan Kemetrolgian Daerah                                                                   | Dinas Perdagangan                       |
|          |                    |                                      | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                      | Persentase Pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat                                                  | Sekretariat DPRD                        |
| III.1.37 |                    |                                      |                                                                         | Persentase pelaksanaan Hearing                                                                           |                                         |
| III.1.38 |                    |                                      | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                  | Persentase Pelaporan Informasi Industri melalui SIINas                                                   |                                         |
| III.1.39 |                    |                                      | Program Kepegawaian Daerah                                              | Persentase ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal                                            | BKPSDM                                  |
|          |                    |                                      |                                                                         | Persentase pelanggaran pegawai                                                                           |                                         |
|          |                    |                                      |                                                                         | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif ( Eselon I dan II ) |                                         |
| III.1.40 |                    |                                      | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                | Rata rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                              | BKPSDM                                  |
|          |                    |                                      |                                                                         | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural                          |                                         |
| III.1.41 |                    |                                      | Program Penelitian dan Pengembangan daerah                              | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan                                                           | Bappeda                                 |
|          |                    |                                      |                                                                         | Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi                                                    |                                         |
| III.1.42 |                    |                                      | Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                       | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik                                         | Seluruh Kecamatan                       |
| III.1.43 |                    |                                      | Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                              | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat                                         |                                         |
| III.1.44 |                    |                                      | Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                              | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                                         |                                         |
| III.1.45 |                    |                                      | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan            | Persentase Terlaksananya Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik       |

| No       | Tujuan dan Sasaran                                                                           | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran      | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja Program                                                                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| III.1.46 |                                                                                              |                                           | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada Masyarakat                                    |                                      |                          |
| III.1.47 |                                                                                              |                                           | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Persentase Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi                       |                                      |                          |
| III.1.48 |                                                                                              |                                           | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | Persentase penurunan pengguna narkoba di Kota Parepare                                           |                                      |                          |
| III.1.49 |                                                                                              |                                           |                                                                                                                                        | Persentase Potensi konflik agama yang tertangani                                                 |                                      |                          |
| III.1.50 |                                                                                              |                                           | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | Persentase penanganan potensi konflik sosial                                                     |                                      |                          |
| III.1.51 |                                                                                              |                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan                                               |                                      | Seluruh Perangkat Daerah |
|          |                                                                                              |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                      |                          |
| III.2    | Sasaran 8 :                                                                                  |                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                      |                          |
|          | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah | Nilai SAKIP                               |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                      |                          |
|          |                                                                                              | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                      |                          |
| III.2.1  |                                                                                              |                                           | Program Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pmbangunan Daerah                                                                    | Persentase konsistensi program RPJMD/RPD terhadapRKPDP                                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |                          |
|          |                                                                                              |                                           |                                                                                                                                        | Persentase konsistensi program RKPDP terhadap APBD                                               |                                      |                          |
|          |                                                                                              |                                           |                                                                                                                                        | Rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah                                             |                                      |                          |
| III.2.2  |                                                                                              |                                           | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA,RKPDP,Renja) lingkup bidang PPM | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |                          |
|          |                                                                                              |                                           |                                                                                                                                        | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA,RKPDP,Renja) lingkup bidang     |                                      |                          |

| No      | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Program                                                 | Indikator Kinerja Program                                                                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                    |                                      |                                                         | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, Renja) lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                                   |
| III.2.3 |                    |                                      | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                     | Cakupan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel                                                                          | Badan Keuangan Daerah             |
| III.2.4 |                    |                                      | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                 | Persentase Barang Milik Daerah dengan bukti kepemilikan yang sah                                                            | Badan Keuangan Daerah             |
| III.2.5 |                    |                                      | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                   | Persentase realisasi PAD                                                                                                    | Badan Keuangan Daerah             |
| III.2.6 |                    |                                      | Program Penyelenggaran Pengawasan                       | Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti<br>Persentase Pelanggaran Pegawai                                         | Inspektorat                       |
| III.2.7 |                    |                                      | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP )                                                              | Inspektorat                       |
|         |                    |                                      |                                                         |                                                                                                                             |                                   |
|         |                    |                                      |                                                         |                                                                                                                             |                                   |
|         |                    |                                      |                                                         |                                                                                                                             |                                   |

**BAB VI****STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH**

Rumusan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi dapat dipakai dalam pelaksanaan perumusan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan, hal yang penting untuk dilakukan adalah menilik strategi dan arah kebijakan nasional maupun regional. Agar supaya perencanaan pembangunan yang disusun dapat berkontribusi secara efektif terhadap target-target pembangunan nasional dan regional.

### **6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 adalah: *“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”*. Visi pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan arahan Presiden menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
  - a. Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial
    - 1) Tata Kelola Kependudukan
    - 2) Perlindungan Sosial
    - 3) Kesehatan
    - 4) Pendidikan
    - 5) Pengentasan Kemiskinan
    - 6) Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
  - b. Produktivitas
    - 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    - 2) Pendidikan Tinggi
    - 3) Iptek dan Inovasi



- 4) Prestasi Olahraga
- c. Pembangunan Karakter
  - 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
  - 2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
  - 3) Moderasi Beragama
  - 4) Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas
- 2. Pembangunan Infrastruktur
  - a. Infrastruktur Pelayanan Dasar
    - 1) Akses Perumahan dan Permukiman
    - 2) Layak, Aman, dan Terjangkau
    - 3) Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
    - 4) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
    - 5) Keselamatan dan Keamanan Transportasi
    - 6) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
    - 7) Waduk Multiguna dan Modernisasi
  - b. Infrastruktur Ekonomi
    - 1) Konektivitas
      - a) Darat : Jalan Tol, jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru.
      - b) Kereta Api : KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang
      - c) Laut : Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
      - d) Udara : Bandara Baru, Jembatan Udara
    - 2) Sektor Ekonomi
      - a) Industri Pengolahan
      - b) Jasa dan Pariwisata
      - c) Pertanian perkebunan Kawasan/Klaster Kelautan-Perikanan
  - c. Infrastruktur Perkotaan
    - 1) Transportasi Perkotaan
    - 2) Energi Berkelanjutan Perkotaan
    - 3) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
    - 4) Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman

5) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

3. Penyederhanaan Regulasi

a. Pendekatan OMNIBUS LAW

Penerapan pendekatan Omnibus Law, (Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya. RUU Cipta Lapangan Kerja, Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB).

4. Penyederhanaan Birokrasi

a. Penyederhanaan Prosedur

b. Penyelenggaraan E-Government

c. Reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, Kepabeanan dan Kepelabuhan

5. Transformasi Ekonomi

a. Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global

b. Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di Destinasi Pariwisata Prioritas

c. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, fashion, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik.

Untuk mewujudkan 9 misi tersebut, berdasarkan 5 arahan dari Presiden, maka dirumuskan 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

## **6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026**

### **6.2.1 Strategi Pembangunan Tahun 2024-2026**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas.
2. Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta Kualitas Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan.
4. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
5. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan iklim investasi dan usaha.
7. Meningkatkan produktifitas kualitas dan daya saing produk unggulan dan sarana/prasarana produksi , dan nilai tambah produk serta pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin.
8. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi.

9. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
10. Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial.
11. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

## **6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026**

### **6.2.2.1 Arah Kebijakan Tahun 2024**

1. Peningkatan penguatan sistem manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur.
2. Peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintah daerah
3. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
4. Peningkatan penyediaan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)
6. Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja termasuk bagi penyandang disabilitas
7. Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah.
8. Peningkatan nilai investasi melalui promosi potensi daerah
9. Penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran
10. Rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti dan Peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan social.

11. Peningkatan akses dan Kualitas Pendidikan menengah, khusus dan vokasi termasuk pendidikan inklusi
12. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan
13. Peningkatan sarana/ prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang ramah anak dan responsive disabilitas
14. Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting
15. Penguatan kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
16. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi
17. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan
18. Peningkatan cakupan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan
19. Peningkatan pengelolaan dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan
20. Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
21. Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan,serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

#### **6.2.2.2 Arah Kebijakan Tahun 2025**

1. Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi
2. Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan

3. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
4. Peningkatan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi serta pengembangan inovasi daerah bagi pelayanan public
5. Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)
6. Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerja di berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas
7. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
8. Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah
9. Perluasan cakupan peningkatan kapasitas dan kualitas produk unggulan petani, serta mewujudkan perluasan akses pemasaran berbasis teknologi informasi, mewujudkan kelembagaan petani berbasis korporas
10. Mendorong kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS dan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sector.
11. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan yang adaptif dan merata serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
12. Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan
13. Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan

jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, dan perbaikan baseline data.

14. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting
15. Peningkatan kualitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
16. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi.
17. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan.
18. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sector pembangunan.
19. Pemantapan pengelolaan dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
20. Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
21. Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

#### **6.2.2.3 Arah Kebijakan Tahun 2026**

1. Pemantapan manajemen organisasi pemerintahan, kompetensi dan kinerja ASN.
2. Pemantapan tata kelola dan kinerja pemerintahan dan penatausahaan kinerja keuangan
3. Pemantapan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel.
4. Penguatan akses dan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi publik.

5. Pemerataan dan mempertahankan kualitas layanan infrastruktur yang berkualitas memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion).
6. Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja di berbagai bidang pembangunan serta kualitas kompetensi tenaga kerja dengan pemberdayaan angkatan kerja, pelatihan canaker dan instruktur, serta kompensasi yang layak termasuk bagi penyandang disabilitas.
7. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata dan mendorong akses pemasaran yang lebih luas.
8. Penguatan kelembagaan mendukung industri yang berbasis teknologi, inovasi; menguatkan kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM berbasis sektor unggulan wilayah; penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam mendorong penanaman modal yang berkelanjutan; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah.
9. Pemantapan kapasitas dan kompetensi SDM petani, memantapkan sistem akses pemasaran produk unggulan berbasis teknologi informasi, memperluas cakupan kelembagaan petani berbasis korporasi.
10. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS, peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor serta pemberian layanan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
11. Penguatan dan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan dan tata kelola pendidikan menengah, khusus dan vokasi yang responsive disabilitas.
12. Peningkatan sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan.



13. Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi.
14. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan PUG di seluruh tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan) pembangunan daerah
16. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi
17. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan
18. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sector pembangunan
19. Pemantapan pengelolaan dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
20. Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
21. Penguatan koordinasi antar stakeholder dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

### **6.3. Strategi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024-2026**

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai, maka rumusan strategi pembangunan daerah Kota Parepare dalam RPD Kota Parepare tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif.
4. Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan dan pelayanan dasar.
5. Meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana antar daerah dan lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi serta keterbukaan data dan informasi publik.
8. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang andal dan terpercaya.

Strategi pembangunan dirumuskan pada setiap sasaran RPD yang terinci pada Tabel 6.1. berikut :

**Tabel 6.1.**

**Strategi Pembangunan RPD Kota Parepare Tahun 2024 – 2026**

| No | Tujuan                             | Sasaran                                | Strategi                                                                                         |
|----|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatkan daya saing masyarakat | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya beli |

| No | Tujuan                                                                                         | Sasaran                                                                                                                                                           | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                   | masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                | Meningkatnya Pengurusutamaan Gender (PUG)                                                                                                                         | Meningkatkan kualitas SDM, Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya produktivitas daerah                                                                                                                                 | Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                                                                                                             | Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan dan pelayanan dasar                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                | Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja                                                                                                                          | Meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                | Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah                                                                        | Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana |
| 3. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani           | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                                                                                            | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi serta keterbukaan data dan informasi publik                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                | Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan | Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi pemerintahan yang bersih, tertib regulasi, peningkatan                                                                                                                                                                                         |

| Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare |        |                                                                                          | Tahun 2024-2026                                                          |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| No                                             | Tujuan | Sasaran                                                                                  | Strategi                                                                 |
|                                                |        | keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang andal dan terpercaya | pengawasan internal, serta penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan. |

#### 6.4. Arah Kebijakan Kota Parepare Tahun 2024 – 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Parepare untuk tahun 2024-2026, yang dirinci menurut strategi yang sudah dipilih untuk merumuskan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengatasi isu strategis daerah dan isu perangkat daerah secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi pembangunan. Dalam penyusunan RPD telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam menetapkan strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan. Adapun arah kebijakan RPD Kota Parepare tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 6.2. berikut :

**Tabel 6.2**  
**Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan**  
**Kota Parepare Tahun 2024 – 2026**

| No | Tujuan                             | Sasaran                                | Strategi                                                                                                     | Arah Kebijakan                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|----|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |                                        |                                                                                                              | 2024                                                                                                                         | 2025                                                                                                                                       | 2026                                                                                                 |
| 1. | Meningkatkan daya saing masyarakat | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan Kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat. | Peningkatan pemerataan distribusi prasarana dan sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. | Peningkatan mutu layanan Pendidikan yang sesuai standar dan berorientasi keunggulan lokal dan global serta penguatan Pendidikan non formal | Peningkatkan jumlah sekolah yang terakreditasi pada jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah |
|    |                                    |                                        |                                                                                                              | Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan jaminan kesehatan          | Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan, serta sumberdaya Kesehatan                                                      | Peningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat              |
|    |                                    |                                        |                                                                                                              | Peningkatan kualitas distribusi barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga.                                              | Peningkatan kualitas distribusi barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga.                                                            | Peningkatan kualitas distribusi barang dan jasa untuk menjaga stabilitas harga.                      |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No | Tujuan                                                                                         | Sasaran                                   | Strategi                                                                                                                                                                         | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025                                                                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG) | Meningkatkan kualitas SDM, Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender                                                                                             | Penguatan kapasitas SDM dan kualitas hidup serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan                                                                                                                                                                                                 | Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas hidup serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan                                                                                                                                               | Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas hidup serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan                                                                                                                                               |
| 2. | Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya produktivitas daerah         | Meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha serta iklim investasi yang kondusif.                                                         | Mengoptimalkan daya dukung infrastruktur perekonomian daerah, perbaikan ekosistem pendukung UMKM, investasi dan ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisata daerah                                                                                                                              | Meningkatkan pengelolaan pusat-pusat perekonomian daerah, peningkatan kapasitas produksi dan UMKM, dan promosi pariwisata                                                                                                                         | Memantapkan infrastruktur perekonomian daerah, pengembangan ekosistem pendukung UMKM, investasi dan ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisata daerah                                                                                          |
|    |                                                                                                | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat     | Mengoptimalkan program perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran DTKS sebagai basis penerima sasaran program perlindungan sosial.</li> <li>2. Stabilisasi harga kebutuhan pokok.</li> <li>3. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Fasilitasi pelaku usaha kecil dan mikro terhadap perbankan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilisasi harga kebutuhan pokok.</li> <li>2. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Fasilitasi pelaku usaha kecil dan mikro terhadap perbankan</li> <li>3. Penguatan akses layanan dasar</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilisasi harga kebutuhan pokok.</li> <li>2. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Fasilitasi pelaku usaha kecil dan mikro terhadap perbankan</li> <li>3. Penguatan akses layanan dasar</li> </ol> |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| No | Tujuan | Sasaran                                                                                    | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arah Kebijakan                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024                                                                                                          | 2025                                                                                                                        | 2026                                                                                                          |
|    |        |                                                                                            | dan pelayanan dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Penguatan akses layanan dasar                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                               |
|    |        | Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja                                                   | Meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja                                                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatkan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan memperluas kesempatan kerja di sector informal | Meningkatkan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan memperluas kesempatan kerja di sektor informal               | Meningkatkan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan memperluas kesempatan kerja di sektor informal |
|    |        | Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah | Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana | Penguatan kolaborasi stakeholder dalam upaya pengurangan risiko bencana alam                                  | Penanggulangan dan pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta rehabilitasi lahan kritis | Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta rehabilitasi lahan kritis     |

| No | Tujuan                                                                               | Sasaran                                                                                      | Strategi                                                                                                                                                                                                                                        | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                                                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                       | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi serta keterbukaan data dan informasi publik                                                                                                                            | Peningkatan kualitas layanan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik serta pengembangann inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan publik                                                                                                                                        | Peningkatan kualitas data dan informasi publik berbasis teknologi informasi serta pengembangann inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan publik                                                                           | Peningkatan kualitas data dan informasi publik berbasis teknologi informasi serta pengembangann inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan publik                               |
|    |                                                                                      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah | Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang andal dan terpercaya | Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan diklat fungsional/ substansif serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung oleh pengawasan yang andal, efektif dan efisien | Meningkatkan kualitas sistem manajemen organisasi pemerintahan, perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang dengan dukungan system pengawasan yang andal, efektif dan efisien. | Memantapkan kualitas SDM Aparatur, kualitas tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, dan transparan serta pemantapan kualitas pengawasan yang andal, efektif, efisien dan terpercaya. |

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2023



## 6.5. Tema Pembangunan dan Program Prioritas

### 6.5.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Penetapan tema pembangunan setiap tahunnya merupakan hal yang penting karena memberikan gambaran tentang gagasan pokok pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan berdasarkan kondisi strategis yang dihadapi. Dari tema ini akan dirumuskan berbagai prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi isu-isu strategis yang berkembang. Tema Pembangunan Kota Parepare digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 6.1**

#### **Tema Pembangunan Kota Parepare 2024 - 2026**



Untuk mewujudkan tema pembangunan yang telah ditetapkan tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Selain mengacu pada tema pembangunan, perumusan prioritas pembangunan juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta arahan dan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan kebijakam pembangunan

nasional. Secara umum, prioritas pembangunan Kota Parepare Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan dasar;
- b. Peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian daerah;
- c. Pengembangan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif;
- d. Penanggulangan kemiskinan, melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- e. Pengurangan tingkat pengangguran melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan perluasan lapangan kerja;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
- g. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut akan diuraikan lebih lanjut menjadi prioritas pembangunan setiap tahunnya dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Adapun prioritas pembangunan Kota Parepare Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.3**  
**Prioritas Pembangunan Nasional,**  
**Proritas Pembangunan Sulawesi Selatan dan**  
**Prioritas Pembangunan Kota Parepare Tahun 2024**

| No | Prioritas Nasional<br>(RPJMN 2020-2024)                                          | Prioritas<br>Pembangunan<br>Sulawesi Selatan                                     | Prioritas Pembangunan<br>Kota Parepare                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. | Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif | Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas |
| 2. | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.      | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata                | Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM                           |
| 3. | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.             | Peningkatan Produktivitas dan nilai tambah produk                                | Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan                   |

| No | Prioritas Nasional<br>(RPJMN 2020-2024)                                           | Prioritas Pembangunan<br>Sulawesi Selatan                        | Prioritas Pembangunan<br>Kota Parepare                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                        | unggulan daerah                                                  | Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja                                    |
| 5. | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana                                               |
| 6. | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim    | Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan         | Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi |
| 7. | <b>Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b>       |                                                                  | Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel            |

#### 6.5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2024 – 2026

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Perumusan Program Pembangunan Daerah dalam rancangan akhir RPD ini bertujuan untuk mendukung upaya pencapaian arah pembangunan Daerah. Berikut digambarkan program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif Kota Parepare tahun 2024-2026.

Tabel 6.4

## Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026

| No    | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah    | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                          | Satuan  | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |         |                 |         |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                       |         |                                   |                                | 2024                                          |                | 2025    |                 | 2026    |                 |                                            |
|       |                                               |                                                                       |         |                                   |                                | Target                                        | Rp             | Target  | Rp              | Target  | Rp              |                                            |
|       |                                               |                                                                       |         |                                   |                                |                                               |                |         |                 |         |                 |                                            |
| I     | Tujuan I :                                    |                                                                       |         |                                   |                                |                                               | 03.985.328.818 |         | 216.465.258.719 |         | 217.597.754.394 | Dinas Pendidkan<br>dan Kebudayaan          |
|       | Meningkatkan Daya<br>Saing Masyarakat         | Indeks Pembangunan Manusia                                            |         | 78,54                             | 78,93                          | 79,43                                         |                | 79.85   |                 | 80.35   |                 |                                            |
| I.1   | Sasaran I :                                   | Indeks Pendidikan                                                     |         | 75,87                             | 76,19                          | 76,83                                         | 02.908.328.818 | 77.41   | 215.280.558.719 | 78.19   | 216.294.584.394 |                                            |
|       | Meningkatnya Kualitas<br>Hidup Masyarakat     | Indeks Kesehatan                                                      |         | 79,18                             | 79,74                          | 80,12                                         |                | 80.34   |                 | 80.64   |                 |                                            |
|       |                                               | Pengeluaran Perkapita                                                 | Ribu Rp | 14.027                            | 14.230                         | 14.450                                        |                | 14.670  |                 | 14.870  |                 |                                            |
| I.1.1 | Program Pengelolaan<br>Pendidikan             | Angka Partisipasi Kasar (SD/SMP)                                      | Persen  | 100                               |                                | 100                                           | 32.034.071.000 | 100     | 36.648.261.210  | 100     | 36.650.000.000  |                                            |
|       |                                               | Angka partisipasi Murni (SD-SMP)                                      | Persen  | 99,27                             |                                | 99,35                                         |                | 99,50   |                 | 99,65   |                 |                                            |
|       |                                               | Angka Pendidikan di Tamatkan                                          | Persen  | 99,05                             |                                | 99,25                                         |                | 99,45   |                 | 99,65   |                 |                                            |
|       |                                               | Angka Putus Sekolah SD/SMP)                                           | Persen  | 0,06                              |                                | 0,05                                          |                | 0,04    |                 | 0,03    |                 |                                            |
|       |                                               | Angka Kelulusan SD/Mi,SMP/MTs                                         | Persen  | 100                               |                                | 100                                           |                | 100     |                 | 100     |                 |                                            |
|       |                                               | Angka Partisipasi Sekolah<br>SD/SMP/Paket A/Paket B                   | Angka   | 1045,85                           |                                | 1045,90                                       |                | 1046,05 |                 | 1046,25 |                 |                                            |
|       |                                               | Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI<br>ke SMP/MTS                       | Persen  | 120,60                            |                                | 121,90                                        |                | 122,05  |                 | 122,25  |                 |                                            |
|       |                                               | Angka melanjutkan (AM) dari<br>SMP/MTS ke SMA/SMK/MA                  | Persen  | 120,65                            |                                | 120,85                                        |                | 121,05  |                 | 121,35  |                 |                                            |
|       |                                               | Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi<br>Bangunan Baik                     | Persen  | 97,80                             |                                | 97,95                                         |                | 98,05   |                 | 98,35   |                 |                                            |
|       |                                               | Sekolah pendidikan SMP/MTS dan<br>SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan<br>Baik | Persen  | 98,15                             |                                | 98,25                                         |                | 98,45   |                 | 98,65   |                 |                                            |
| I.1.2 | Program Pendidikan dan<br>Tenaga Kependidikan | Guru yang memenuhi kualifikasi<br>S1/D IV                             |         | 97,03                             |                                | 97,35                                         | 22.000.000     | 97,55   | 24.200.000      | 97,75   | 25.410.000      | Dinas Pendidkan<br>dan Kebudayaan          |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No     | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                                      | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                                          | Satuan       | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |            |                 |            |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                 |                                                                                                                       |              |                                   |                                | 2024                                          |                 | 2025       |                 | 2026       |                 |                                               |
|        |                                                                                 |                                                                                                                       |              |                                   |                                | Target                                        | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              |                                               |
| I.1.3  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat     | Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP                                                | Persen       | 100%                              |                                | 100%                                          | 167.032.350.418 | 100%       | 170.924.911.194 | 100%       | 171.194.835.383 | Dinas Kesehatan, RSUD. A. Makkasau dan RS HAH |
| I.1.4  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                     | Rasio dokter per satuan penduduk                                                                                      | Ratio        | 45/100.000                        |                                | 50/100.000                                    | 531.999.600     | 50/100.000 | 4.141.487.735   | 50/100.000 | 4.186.070.573   | Dinas Kesehatan, RSUD. A. Makkasau dan RS HAH |
|        |                                                                                 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                                                                                | Ratio        | 98/100.000                        |                                | 98/100.000                                    |                 | 98/100.000 |                 | 98/100.000 |                 | Dinas Kesehatan                               |
| I.1.5  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                     | Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat | Persen       | 100%                              |                                | 100%                                          | 337.907.800     | 100%       | 371.698.580     | 100%       | 408.868.438     | Dinas Kesehatan                               |
| I.1.6  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                | Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                           | Persen       | 70%                               |                                | 80%                                           | 1.850.000.000   | 85%        | 1.900.000.000   | 90%        | 2.190.000.000   | Dinas Kesehatan, RSUD. A. Makkasau dan RS HAH |
| I.1.7  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting             | Koefisien Harga Antar Waktu                                                                                           | Persen       | <1                                |                                | 0,92                                          | 600.000.000     | 0,92       | 720.000.000     | 0,92       | 945.000.000     | Dinas Perdagangan                             |
| I.1.8  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Tingkat Ketersediaan Pangan                                                                                           | gram/kp/hari | 204                               |                                | 204,9                                         | 220.000.000     | 208,9      | 242.000.000     | 213        | 266.200.000     | Dinas Ketahanan Pangan                        |
| I.1.9  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein                                                                               | Persen       | 100                               |                                | 100                                           | 260.000.000     | 100        | 286.000.000     | 100        | 343.200.000     | Dinas Ketahanan Pangan                        |
| I.1.10 | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Tingkat Penanganan Rawan Pangan                                                                                       | Persen       | 100                               |                                | 100                                           | 20.000.000      | 100        | 22.000.000      | 100        | 85.000.000      | Dinas Ketahanan Pangan                        |
|        |                                                                                 |                                                                                                                       |              |                                   |                                |                                               |                 |            |                 |            |                 |                                               |
| I.2    | Sasaran 2 :                                                                     |                                                                                                                       |              |                                   |                                |                                               | 1.077.000.000   |            | 1.184.700.000   |            | 1.303.170.000   |                                               |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No    | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                                       | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                                                            | Satuan  | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                 |         |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                  |                                                                                                                                         |         |                                   |                                | 2024                                          |                 | 2025   |                 | 2026    |                 |                                                                |
|       |                                                                                  |                                                                                                                                         |         |                                   |                                | Target                                        | Rp              | Target | Rp              | Target  | Rp              |                                                                |
|       | Meningkatnya<br>Pengarusutamaan<br>Gender                                        | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                                                              |         | 73,52                             | 76,27                          | 79,13                                         |                 | 82,10  |                 | 85,17   |                 |                                                                |
| I.2.1 | Program Peningkatan<br>Peran Serta Dan<br>Kesetaraan Gender<br>Dalam Pembangunan | Persentase perempuan produktif<br>yang berperan dalam pembangunan                                                                       | Persen  | 30%                               |                                | 30%                                           | 560.000.000     | 30%    | 616.000.000     | 32,00%  | 677.600.000     | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| I.2.2 | Program Perlindungan<br>Perempuan                                                | Cakupanperempuan korban<br>kekerasan yang<br>mendapatkanpenangananpengaduan<br>oleh petugas terlatih di dalam unit<br>pelayanan terpadu | Persen  | 100,00%                           |                                | 100,00%                                       | 225.000.000     | 100    | 247.500.000     | 100,00% | 272.250.000     | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| I.2.3 | Program Peningkatan<br>Kualitas Keluarga                                         | Partisipasi Angkatan Kerja<br>Perempuan                                                                                                 | Persen  | 51,79%                            |                                | 51,79%                                        | 80.000.000      | 51,79% | 88.000.000      | 51,80%  | 96.800.000      | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| I.2.4 | Program Pengelolaan<br>Data Gender Dan Anak                                      | persentase tersedianya data profil<br>gender dan anak                                                                                   | Persen  | 80%                               |                                | 80%                                           | 27.000.000      | 85%    | 29.700.000      | 85%     | 32.670.000      | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| I.2.5 | Program Pemenuhan Hak<br>Anak (PHA)                                              | Persentase tercapainya pemenuhan<br>Hak Anak                                                                                            | Persen  | 80%                               |                                | 80%                                           | 100.000.000     | 80%    | 110.000.000     | 80%     | 121.000.000     | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| I.2.6 | Program Perlindungan<br>Khusus Anak                                              | Cakupan anak korban kekerasan<br>yang mendapatkan penanganan<br>pengaduan oleh petugas terlatih di<br>dalam unit pelayanan terpadu      | Persen  | 100%                              |                                | 100%                                          | 85.000.000      | 100%   | 93.500.000      | 100%    | 102.850.000     | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan<br>Anak |
|       |                                                                                  |                                                                                                                                         |         |                                   |                                |                                               |                 |        |                 |         |                 |                                                                |
|       |                                                                                  |                                                                                                                                         |         |                                   |                                |                                               |                 |        |                 |         |                 |                                                                |
| II    | Tujuan II :                                                                      | PDRB Per kapita                                                                                                                         | Juta Rp | 54,26                             | 57,53                          | 60,99                                         | 113.961.035.634 | 64,66  | 133.595.417.939 | 68,56   | 126.254.078.074 |                                                                |
|       | Meningkatkan                                                                     | Inflasi                                                                                                                                 | %       | 6,66                              | 3                              | 3,00                                          |                 | 3,00   |                 |         |                 |                                                                |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No     | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                                        | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                             | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                 |        |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|------------------------------------------------|
|        |                                                                                   |                                                                                          |        |                                   |                                | 2024                                          |                | 2025   |                 | 2026   |                |                                                |
|        |                                                                                   |                                                                                          |        |                                   |                                | Target                                        | Rp             | Target | Rp              | Target | Rp             |                                                |
|        | perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat | Indeks Gini (Gini Ratio)                                                                 |        | 0,379                             | 0,348                          | 0,332                                         |                | 0,318  |                 | 0,303  |                |                                                |
| II.1.  | Sasaran 3 :<br>Meningkatnya Produktivitas Daerah                                  |                                                                                          |        |                                   |                                |                                               | 84.926.035.634 |        | 103.893.417.939 |        | 95.304.283.074 |                                                |
|        |                                                                                   | Pertumbuhan Ekonomi                                                                      |        | 5,93                              | 6,15                           | 6,5                                           |                | 6,86   |                 | 7,00   |                |                                                |
| II.1.1 | Program Penyelenggaraan Jalan                                                     | Proporsi jalan dalam kondisi baik                                                        | Persen | 80%                               |                                | 81%                                           | 60.000.000.000 | 83%    | 66.000.000.000  | 85%    | 66.660.000.000 | Dinas<br>Perkerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang |
|        |                                                                                   | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                               | point  | 1,73                              |                                | 1,71                                          |                | 1,69   |                 | 1,67   |                |                                                |
|        |                                                                                   | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembungan air (minimal 1,5m) | Persen | 16,79                             |                                | 17,50%                                        |                | 18,00% |                 | 20,00% |                |                                                |
|        |                                                                                   | Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar       | Persen | 0,38                              |                                | 0,38%                                         |                | 0,38%  |                 | 0,38%  |                |                                                |
|        |                                                                                   | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                       | Persen | 49,46                             |                                | 60%                                           |                | 62%    |                 | 65%    |                |                                                |
|        |                                                                                   | Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)                                    | Persen | 59,46                             |                                | 65%                                           |                | 67%    |                 | 70%    |                |                                                |
| II.1.2 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                              | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi               | Persen | 57,50                             |                                | 60%                                           | 125.000.000    | 62,50% | 110.000.000     | 65%    | 111.100.000    | Dinas<br>Perkerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang |
| II.1.3 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                         | Persentase irigasi dalam kondisi baik                                                    | Persen | 92,5                              |                                | 93,00%                                        | 4.550.000.000  | 93,50% | 5.005.000.000   | 94%    | 5.505.500.000  | Dinas<br>Perkerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang |
|        |                                                                                   | Rasio jaringan irigasi                                                                   | Persen | 26,87                             |                                | 26,90                                         |                | 26,93  |                 | 26,96  |                |                                                |
|        |                                                                                   | cakupan layanan irigasi terhadap daerah irigasi (DI)                                     | point  | 151,7                             |                                | 152,52                                        |                | 153,34 |                 | 154,16 |                |                                                |
|        |                                                                                   | Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan lonzor   | Persen | 57,00%                            |                                | 59,00%                                        |                | 61,00% |                 | 63,00% |                |                                                |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No      | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                       | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                       | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |         |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|----------------|---------|---------------|--------------------------------------------|
|         |                                                                  |                                                                                                    |        |                                   |                                | 2024                                          |               | 2025   |                | 2026    |               |                                            |
|         |                                                                  |                                                                                                    |        |                                   |                                | Target                                        | Rp            | Target | Rp             | Target  | Rp            |                                            |
|         |                                                                  | Persentase bencana lonsor dan abrasi pada titik rawan bencana                                      | Persen | 26,67                             |                                | 20                                            |               | 20     |                | 20      |               |                                            |
| II.1.4  | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan                                                        | Persen | 59,66                             |                                | 61,66%                                        | 2.060.656.684 | 62,33% | 2.266.722.352  | 63,50%  | 2.289.389.576 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
| II.1.5  | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                      | Pemenuhan fasilitas perkotaan                                                                      | point  | 50,00                             |                                | 5,00                                          | 3.000.000.000 | 5,00   | 13.616.318.392 | 5,00    | 3.222.562.144 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
|         |                                                                  | Persentase capaian fasilitas perkotaan                                                             | Persen | 76,92                             |                                | 84,62                                         |               |        |                | 92,31   |               |                                            |
| II.1.6  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat                              | Persen | 90,00%                            |                                | 91,00%                                        | 4.818.440.000 | 92,00% | 5.300.284.000  | 93,00%  | 5.353.286.840 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
|         |                                                                  | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun                                                            | Persen | 90,00%                            |                                | 92,00%                                        |               | 93,00% |                | 94,00%  |               |                                            |
| II.1.7  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | Persen | 99,00%                            |                                | 99,30%                                        | 4.500.000.000 | 99,60% | 4.590.000.000  | 100,00% | 4.635.900.000 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
|         |                                                                  | cakupan layanan air bersih                                                                         | Persen | 98,00%                            |                                | 98,31%                                        |               |        |                | 98,39%  |               |                                            |
| II.1.8  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                            | Capaian Target Produksi Perikanan Tangkap                                                          | Persen | 30,31                             |                                | 31,7                                          | 584.000.000   | 31,7   | 639.000.000    | 31,7    | 644.000.000   | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan    |
| II.1.9  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                           | Capaian Target Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                      | Persen | 15,46                             |                                | 15,46                                         | 223.950.000   | 15,46  | 410.000.000    | 15,46   | 450.000.000   | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan    |
| II.1.10 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                 | Capaian Produksi Pengolahan hasil Perikanan                                                        | Persen | 34,57                             |                                | 89,50                                         | 116.000.000   | 89,50  | 116.030.000    | 89,50   | 121.030.000   | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan    |
| II.1.11 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata              | Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata                                             | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 532.957.450   | 100    | 586.253.195    | 100     | 644.878.515   | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  |



# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No      | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                                                                     | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                      | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                |                                                                                                   |        |                                   |                                | 2024                                          |               | 2025   |               | 2026   |               |                                                                  |
|         |                                                                                                                |                                                                                                   |        |                                   |                                | Target                                        | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |                                                                  |
| Il.1.12 | Program Pemasaran<br>Pariwisata                                                                                | Persentase Durasi Lama kunjungan<br>wisata                                                        | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 1.578.399.500 | 100    | 2.344.500.000 | 100    | 2.578.950.000 | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata               |
| Il.1.13 | Program Pengembangan<br>Ekonomi Kreatif Melalui<br>Pemanfaatan Dan<br>Perlindungan Hak<br>Kekayaan Intelektual | Persentase Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Ekonomi Kreatif                                    | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 100.000.000   | 100    | 110.000.000   | 100    | 121.000.000   | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata               |
| Il.1.14 | Program Pengembangan<br>Sumber Daya Pariwisata<br>Dan Ekonomi Kreatif                                          | Persentase Pelaku usaha pariwisata<br>yang mendapatkan Pelatihan                                  | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 80.000.000    | 100    | 88.000.000    | 100    | 96.800.000    | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata               |
| Il.1.15 | Program Penyediaan Dan<br>Pengembangan Sarana<br>Pertanian                                                     | Capaian Target Penyediaan dan<br>Pengembangan Sarana Pertanian                                    | Persen | 3                                 |                                | 3                                             | 1.146.632.000 | 3,1    | 1.091.310.000 | 3,3    | 1.102.386.000 | Dinas Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan                    |
| Il.1.16 | Program Penyediaan Dan<br>Pengembangan<br>Prasarana Pertanian                                                  | Target Capaian Pengembangan<br>Prasarana Pertanian                                                | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 300.000.000   | 100    | 330.000.000   | 100    | 363.000.000   | Dinas Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan                    |
| Il.1.17 | Program Pengembangan<br>Iklim Penanaman Modal                                                                  | Persentase peningkatan investasi di<br>Kabupaten /Kota                                            | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 250.000.000   | 100    | 300.000.000   | 100    | 330.000.000   | Dinas Penaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| Il.1.18 | Program Promosi<br>Penanaman Modal                                                                             | Jumlah nilai investasi berskala<br>nasional (PMDN/PMA)                                            | Milyar | 173                               |                                | 174,5                                         | 250.000.000   | 175    | 275.000.000   | 176    | 302.500.000   | Dinas Penaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| Il.1.19 | Program Pelayanan<br>Penanaman Modal                                                                           | Tersedianya pelayanan Perizinan<br>dan Non perizinan dengan perkuatan<br>aplikasi berbasis online | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 200.000.000   | 100    | 100.000.000   | 100    | 110.000.000   | Dinas Penaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| Il.1.20 | Program Pengendalian<br>Pelaksanaan<br>Penanaman Modal                                                         | Jumlah Investor Berskala Nasional<br>(PMDN/PMA)                                                   | Unit   | 123                               |                                | 125                                           | 400.000.000   | 126    | 470.000.000   | 127    | 517.000.000   | Dinas Penaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No      | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                              | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                                                                   | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                                                                                                |        |                                   |                                | 2024                                          |               | 2025   |               | 2026   |               |                                            |
|         |                                                                         |                                                                                                                                                |        |                                   |                                | Target                                        | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |                                            |
| II.1.21 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | Persentase Sarana Distribusi yang Aktif                                                                                                        | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 110.000.000   | 100    | 145.000.000   | 100    | 145.000.000   | Dinas Perdagangan                          |
|         |                                                                         |                                                                                                                                                |        |                                   |                                |                                               |               |        |               |        |               |                                            |
| II.2    | Sasaran 4 :                                                             |                                                                                                                                                |        |                                   |                                |                                               | 7.459.000.000 |        | 8.061.400.000 |        | 8.434.040.000 |                                            |
|         | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat                                   | Tingkat Kemiskinan                                                                                                                             | Persen | 5,41                              | 5,29                           | 5,18                                          |               | 5,07   |               | 4,96   |               |                                            |
| II.2.1  | Program Pemberdayaan Sosial                                             | Persentase PSKS yang Aktif Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial                                                                             | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 70.000.000    | 100    | 77.000.000    | 100    | 205.000.000   | Dinas Sosial                               |
| II.2.2  | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan          | Persentase Pemulangan Warga Negara yang tertangani                                                                                             | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 55.000.000    | 100    | 68.000.000    | 100    | 68.000.000    | Dinas Sosial                               |
| II.2.3  | Program Rehaabilitasi Sosial                                            | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 750.000.000   | 100    | 1.110.000.000 | 100    | 1.110.000.000 | Dinas Sosial                               |
| II.2.4  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                 | Persentase Penanganan Fakir Miskin                                                                                                             | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 4.360.000.000 | 100    | 4.360.000.000 | 100    | 4.360.000.000 | Dinas Sosial                               |
|         |                                                                         | Cakupan Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Pemerintah Terasilitasi                                                                           | Persen | 100                               |                                | 100                                           |               | 100    |               | 100    |               |                                            |
| II.2.5  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha                                                                                                  | Persen | 45,16                             |                                | 45,18                                         | 2.224.000.000 | 45,20  | 2.446.400.000 | 45,24  | 2.691.040.000 | Dinas Tenaga Kerja                         |
|         |                                                                         |                                                                                                                                                |        |                                   |                                |                                               |               |        |               |        |               |                                            |
| II.3    | Sasaran 5 :                                                             |                                                                                                                                                |        |                                   |                                |                                               | 345.000.000   |        | 379.500.000   |        | 417.450.000   |                                            |
|         | Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja                                | Tingkat Pengangguran                                                                                                                           | Persen | 5,6                               | 5,25                           | 4,92                                          |               | 4,56   |               | 4,21   |               |                                            |
| II.3.1  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                  | Persentase tenaga kerja yang dilatih                                                                                                           | Persen | 63,62                             |                                | 64,06                                         | 220.000.000   | 64,50  | 242.000.000   | 64,94  | 266.200.000   | Dinas Tenaga Kerja                         |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No     | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                                                                                             | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                                         | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |        |                                   |                                | 2024                                          |                | 2025   |                | 2026   |                |                                            |
|        |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |        |                                   |                                | Target                                        | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             |                                            |
| II.3.2 | Program Penempatan<br>Tenaga Kerja                                                                                                     | Persentase kesempatan kerja yang<br>ada                                                                              | Persen | 83,32                             |                                | 83,76                                         | 55.000.000     | 84,59  | 60.500.000     | 85,51  | 66.550.000     | Dinas Tenaga<br>Kerja                      |
| II.3.3 | Program Hubungan<br>Industrial                                                                                                         | Persentase perusahaan yang<br>menerapkan syarat-syarat kerja di<br>perusahaan                                        | Persen | 86                                |                                | 86,32                                         | 70.000.000     | 86,71  | 77.000.000     | 87,10  | 84.700.000     | Dinas Tenaga<br>Kerja                      |
|        |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |        |                                   |                                |                                               |                |        |                |        |                |                                            |
| II.4   | Sasaran 6 :<br><br>Meningkatnya<br>ketahanan lingkungan<br>dan mitigasi bencana<br>dalam mendukung<br>perekonomian daerah              | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                     |        | 75,9                              | 76,81                          | 77,72                                         | 21.231.000.000 | 78,65  | 21.261.100.000 | 79,59  | 22.098.305.000 |                                            |
|        |                                                                                                                                        | Indeks Ketahanan Daerah<br>Terhadap Bencana                                                                          |        | 0.42                              | 0.48                           | 0.53                                          |                | 0.58   |                | 0.62   |                |                                            |
| II.4.1 | Program Perencanaan<br>Lingkungan Hidup                                                                                                | Pemenuhan Dokumen Perencanaan<br>Lingkungan Hidup                                                                    | Persen | 0,0%                              |                                | 0,0%                                          | -              | 100%   | 300.000.000    | 100%   | 200.000.000    | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup               |
| II.4.2 | Program Pengendalian<br>Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan Lingkungan<br>Hidup                                                           | Pemenuhan Pengendalian<br>Pencemaran dan Kerusakan<br>Lingkungan Hidup                                               | Persen | 100%                              |                                | 100%                                          | 170.000.000    | 100%   | 187.000.000    | 100%   | 205.700.000    | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup               |
|        |                                                                                                                                        | Proporsi Luas Lahan Kritis yang<br>direhabilitasi terhadap luas lahan<br>keseluruhan                                 | Persen | 0,010%                            |                                | 0,005%                                        |                | 0,005% |                | 0,005% |                |                                            |
| II.4.3 | Program Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati<br>(Kehati)                                                                               | Proporsi tutupan vegetasi terhadap<br>luas lahan keseluruhan                                                         | Persen | 12,62%                            |                                | 12,63%                                        | 2.685.000.000  | 12,64% | 2.710.000.000  | 12,65% | 2.655.000.000  | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup               |
| II.4.4 | Program Pengendalian<br>Bahan Berbahaya dan<br>Beracun (B3) dan Limbah<br>Bahan Berbahaya dan<br>Beracun (Limbah B3)                   | Persentase limbah B3 yang dikelola                                                                                   | Persen | 30%                               |                                | 30%                                           | 30.000.000     | 35%    | 55.000.000     | 40%    | 55.000.000     | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup               |
| II.4.5 | Program Pembinaan dan<br>Pengawasan terhadap Izin<br>Lingkungan dan Izin<br>Perlindungan dan<br>Pengelolaan Lingkungan<br>Hidup (PPLH) | Pembinaan dan pengawasan terkait<br>ketaatan penanggung jawab usaha<br>dan/atau kegiatan terhadap izin<br>lingkungan | Persen | 100%                              |                                | 100%                                          | 20.000.000     | 100%   | 30.000.000     | 100%   | 33.000.000     | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup               |
|        |                                                                                                                                        | Persentase pemberian izin - izin<br>lingkungan                                                                       | Persen | 100%                              |                                | 100%                                          |                | 100%   |                | 100%   |                |                                            |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No      | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                                                 | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                                                     | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------|
|         |                                                                                            |                                                                                                                                  |        |                                   |                                | 2024                                          |                | 2025   |                | 2026   |                |                                            |
|         |                                                                                            |                                                                                                                                  |        |                                   |                                | Target                                        | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             |                                            |
| II.4.6  | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Pemenuhan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                     | Persen | 100,0%                            |                                | 100,0%                                        | 20.000.000     | 100,0% | 30.000.000     | 100%   | 33.000.000     | Dinas Lingkungan Hidup                     |
| II.4.7  | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                      | Pemenuhan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                          | Persen | 100%                              |                                | 100%                                          | 260.000.000    | 100%   | 320.000.000    | 100%   | 320.000.000    | Dinas Lingkungan Hidup                     |
| II.4.8  | Program Pengelolaan Persampahan                                                            | Timbulan sampah yang ditangani                                                                                                   | Persen | 99%                               |                                | 99%                                           | 13.065.000.000 | 100%   | 12.150.000.000 | 100%   | 12.685.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup                     |
|         |                                                                                            | Persentase jumlah sampah yang berkurang 3R                                                                                       | Persen | 26%                               |                                | 28%                                           |                | 30%    |                | 30%    |                |                                            |
|         |                                                                                            | Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                                                         | Persen | 73%                               |                                | 71%                                           |                | 70%    |                | 70%    |                |                                            |
|         |                                                                                            | Persentase cakupan area pelayanan                                                                                                | Persen | 93%                               |                                | 94%                                           |                | 95%    |                | 96%    |                |                                            |
|         |                                                                                            | Nilai operasionalisasi TPA/TPST/SPA                                                                                              | Point  | 75                                |                                | 75                                            |                | 75     |                | 75     |                |                                            |
| II.4.9  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                     | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan                                    | Persen | 90                                |                                | 92,5                                          | 2.500.000.000  | 95     | 2.750.000.000  | 97,5   | 2.777.500.000  | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
| II.4.10 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                     | Bangunan tidak melanggar tata ruang                                                                                              | Persen | 98,00%                            |                                | 96,70%                                        | 1.295.000.000  | 97,00% | 1.424.500.000  | 97,30% | 1.438.745.000  | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
|         |                                                                                            | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                                           | Persen | 99,86%                            | 99,86%                         | 99,00%                                        |                | 99,00% |                |        |                |                                            |
| II.4.11 | Program Penanggulangan Bencana                                                             | Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana                                                                                      | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 1.056.000.000  | 100    | 1.161.600.000  | 100    | 1.277.760.000  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah        |
| II.4.12 | Program Penanganan Bencana                                                                 | Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 70.000.000     | 100    | 77.000.000     | 100    | 345.000.000    | Dinas Sosial                               |
| II.4.13 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                  | Capaian Terget Pengedalian dan penanggulangan Bencana Pertanian                                                                  | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 60.000.000     | 100    | 66.000.000     | 100    | 72.600.000     | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan    |
|         |                                                                                            |                                                                                                                                  |        |                                   |                                |                                               |                |        |                |        |                |                                            |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No      | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                                                                      | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                  | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |             |                |             |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|
|         |                                                                                                                 |                                                                                               |        |                                   |                                | 2024                                          |                | 2025        |                | 2026        |                |                                            |
|         |                                                                                                                 |                                                                                               |        |                                   |                                | Target                                        | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             |                                            |
|         |                                                                                                                 |                                                                                               |        |                                   |                                |                                               |                |             |                |             |                |                                            |
| III     | Tujuan 3 :<br><br>Meningkatkan kualitas<br>tata kelola pemerintahan<br>dan reformasi birokrasi<br>yang melayani |                                                                                               |        |                                   |                                |                                               | 64.689.162.846 |             | 66.189.700.363 |             | 67.965.972.917 |                                            |
|         |                                                                                                                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                    |        | 63,98 (CC)                        | 65,00<br>(CC)                  | 67,00 (CC)                                    |                | 70,00 (B)   |                | 72,25 (B)   |                |                                            |
| III.1   | Sasaran 7 :<br><br>Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Publik                                                    |                                                                                               |        |                                   |                                |                                               | 45.568.463.239 |             | 46.380.648.463 |             | 47.904.619.106 |                                            |
|         |                                                                                                                 | Indeks Pelayanan Publik                                                                       |        | 4,46                              | 4,48                           | 4,50                                          |                | 4,52        |                | 4,54        |                |                                            |
|         |                                                                                                                 | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik                                                      |        | 77,36                             | 77,60                          | 78,00                                         |                | 79,20       |                | 81,00       |                |                                            |
|         |                                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                    |        | 79,76                             | 82,16                          | 84,63                                         |                | 87,17       |                | 89,79       |                |                                            |
|         |                                                                                                                 | Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)                                       |        | 2,50<br>(Cukup)                   | 2,75                           | 3,0 (Baik)                                    |                | 3,15 (Baik) |                | 3,25 (Baik) |                |                                            |
| III.1.1 | Program Peningkatan<br>Ketentraman Dan<br>Ketertiban Umum                                                       | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                         | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 6.000.000.000  | 100         | 4.000.000.000  | 100         | 4.000.000.000  | Satuan Polisi Pamong Praja                 |
|         |                                                                                                                 | Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara | Persen | 100                               |                                | 100                                           |                | 100         |                |             |                |                                            |
|         |                                                                                                                 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                              | Persen | 31,5                              |                                | 32                                            |                | 32          |                | 32          |                |                                            |
| III.1.2 | Program Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan Kebakaran<br>dan Penyelamatan Non<br>Kebakaran           | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban              | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 950.000.000    | 100         | 1.045.000.000  | 100         | 1.149.500.000  | Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamatan    |
| III.1.3 | Program Pengawasan<br>Keamanan Pangan                                                                           | Prosentase pengawasan mutu pangan                                                             | Persen | 100                               |                                | 100                                           | 77.308.500     | 100         | 150.000.000    | 100         | 150.000.000    | Dinas Ketahanan Pangan                     |
| III.1.4 | Program Pendaftaran<br>Penduduk                                                                                 | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk                                                    | Angka  | 0,99                              |                                | 0,99                                          | 110.000.000    | 1           | 175.000.000    | 1           | 175.000.000    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan          |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No       | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                   | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                              | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022)      | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                               |               |                               |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab                     |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|          |                                                              |                                                                                                           |        |                                        |                                | 2024                                          |               | 2025                          |               | 2026                          |               |                                                                |
|          |                                                              |                                                                                                           |        |                                        |                                | Target                                        | Rp            | Target                        | Rp            | Target                        | Rp            |                                                                |
|          |                                                              | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                                                             | Perse  | 99                                     |                                | 99,7                                          |               | 99,75                         |               | 99,92                         |               | Sipil                                                          |
| III.1.5  | Program Pencatatan Sipil                                     | Cakupan pelayanan pencatatan sipil                                                                        | Perse  | 100                                    |                                | 100                                           | 60.000.000    | 100                           | 66.000.000    | 100                           | 72.600.000    | Dinas<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil               |
|          |                                                              | Rasio bayi ber akte kelahiran                                                                             | Angka  | 0,99                                   |                                | 1                                             |               | 1                             |               | 1                             |               |                                                                |
|          |                                                              | Rasio pasangan nikah berakte nikah                                                                        | Persen | 74,22                                  |                                | 80,55                                         |               | 80,58                         |               | 80,65                         |               |                                                                |
|          |                                                              | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran                                                                         | Persen | 99,99                                  |                                | 99,99                                         |               | 100                           |               | 100                           |               |                                                                |
|          |                                                              | Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur  | Persen | 100                                    |                                | 100                                           |               | 100                           |               | 100                           |               |                                                                |
| III.1.6  | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan      | Persentase anak yang memiliki akte kelahiran                                                              | Persen | 100                                    |                                | 100                                           |               | 100                           |               | 100                           |               | Dinas<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil               |
|          |                                                              | Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu-kan                                               | Persen | 100                                    |                                | 100                                           |               | 100                           |               | 100                           |               |                                                                |
|          |                                                              | Ketersediaan data base kependudukan Skala Provinsi                                                        | Persen | 100                                    |                                | 100                                           |               | 100                           |               | 100                           |               |                                                                |
| III.1.7  | Program Pengendalian Penduduk                                | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 59,66%                                 |                                | 45%                                           | 487.000.000   | 50%                           | 535.700.000   | 50%                           | 589.270.000   | Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| III.1.8  | Program Pembinaan Keluarga Berencana KB                      | Ratio Akseptor KB                                                                                         | Persen | 62,97%                                 |                                | 65%                                           |               | 66%                           |               | 67%                           |               |                                                                |
| III.1.9  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB),BKR, BKL, ber-KB                                               | Persen | BKB = 81,67, BKR = 83,80, BKL = 78,12, |                                | BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82,                 | 1.619.955.400 | BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82, | 1.781.950.940 | BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82, | 1.960.146.034 | Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| III.1.10 | Program Penvelenggaraan Lalu                                 | Jumlah arus penumpang angkutan umum                                                                       | Orang  | 114.652                                |                                | 2.000.000                                     | 5.807.361.380 | 2.200.000                     | 6.388.097.518 | 2.500.000                     | 6.707.502.394 | Dinas<br>Perhubungan                                           |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No       | Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)                                                                                                                                                              | Satuan       | Kondisi Kinerja Awal (2022) | Perkiraan Capaian (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |           |               |           |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                        |              |                             |                          | 2024                                          |               | 2025      |               | 2026      |               |                                   |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                        |              |                             |                          | Target                                        | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            |                                   |
|          | Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)        | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum                                                                                                                                                       | Orang/Barang | 1.995.924                   |                          | 3.000.000                                     |               | 3.300.000 |               | 3.600.000 |               |                                   |
|          |                                         | Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun                                                                                                                                                  | Orang/Barang | 1.995.924                   |                          | 3.000.000                                     |               | 3.300.000 |               | 3.600.000 |               |                                   |
|          |                                         | Panjang jalur kereta api                                                                                                                                                                               | Km           | 0                           |                          | 0                                             |               | 11        |               | 11        |               |                                   |
|          |                                         | Persentase rambu dan Apill dalam kondisi baik                                                                                                                                                          | Persen       | 85                          |                          | 85                                            |               | 85        |               | 85        |               |                                   |
|          |                                         | Jumlah uji KIR angkutan umum                                                                                                                                                                           | Unit         | 878                         |                          | 100                                           |               | 150       |               | 200       |               |                                   |
|          |                                         | Rasio ijin trayek                                                                                                                                                                                      | Rasio        | 0                           |                          | 0,0005                                        |               | 0,0006    |               | 0,00066   |               |                                   |
|          |                                         | Persentase layanan angkutan darat                                                                                                                                                                      | Persen       | 36                          |                          | 70                                            |               | 75        |               | 80        |               |                                   |
|          |                                         | Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan                                                                                                                                                                | Rasio        | 0,0775                      |                          | 0,093                                         |               | 0,1       |               | 0,11      |               |                                   |
|          |                                         | Persentase pemasangan rambu-rambu                                                                                                                                                                      | Persen       | 85                          |                          | 85                                            |               | 90        |               | 100       |               |                                   |
|          |                                         | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                                                                                                                                                               | Persen       | 58                          |                          | 25                                            |               | 30        |               | 35        |               |                                   |
| III.1.11 | Program Informasi dan Komunukasi Publik | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                     | Persen       | 100                         |                          | 100                                           | 9.157.000.000 | 100       | 9.359.000.000 | 100       | 9.462.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
|          |                                         | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan                                                                                                                                         | Persen       | 100                         |                          | 100                                           |               | 100       |               | 100       |               |                                   |
|          |                                         | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Jumlah       | 3                           |                          | 4                                             |               | 5         |               | 6         |               |                                   |
| III.1.12 | Program Aplikasi                        | Cakupan layanan telekomunikasi                                                                                                                                                                         | Persen       | 87,15                       |                          | 87,15                                         |               | 93,58     | 2.827.000.000 | 93,58     | 3.109.700.000 | Dinas                             |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No       | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                    | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                                         | Satuan     | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab             |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                               |                                                                                                                      |            |                                   |                                | 2024                                          |               | 2025   |               | 2026   |               |                                                        |
|          |                                                               |                                                                                                                      |            |                                   |                                | Target                                        | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |                                                        |
|          | Informatika                                                   | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon                                                                      | Persen     | 91,93                             |                                | 94,46                                         | 2.570.000.000 | 95,72  |               | 96,98  |               | Komunikasi dan Informatika                             |
|          |                                                               | Proporsi rumah tangga dengan akses internet                                                                          | Persen     | 81,06                             |                                | 83,59                                         |               | 84,85  |               | 86,11  |               |                                                        |
|          |                                                               | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen     | 100                               |                                | 100                                           |               | 100    |               | 100    |               |                                                        |
|          |                                                               | Proporsi individu yang menggunakan internet                                                                          | Persen     | 81,06                             |                                | 83,59                                         |               | 84,85  |               | 86,11  |               |                                                        |
|          |                                                               | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam                                                            | Persen     | 91,93                             |                                | 94,46                                         |               | 95,72  |               | 96,98  |               |                                                        |
|          |                                                               | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband                                                                         | Persen     | 81,06                             |                                | 83,59                                         |               | 84,85  |               | 86,11  |               |                                                        |
| III.1.13 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                  | Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan                                                                         | Persen     | 32,26                             |                                | 32,26                                         | 420.000.000   | 36,29  | 450.000.000   | 40,32  | 480.000.000   | Dinas Tenaga Kerja                                     |
| III.1.14 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase kualitas layanan sistem informasi penanaman modal                                                         | Persen     | 100                               |                                | 100                                           | 78.000.000    | 100    | 220.000.000   | 100    | 242.000.000   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| III.1.15 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan        | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                                                                 | Persen     | 100                               |                                | 100                                           | 3.578.060.100 | 100    | 3.935.866.110 | 100    | 4.132.659.416 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
|          |                                                               | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                                                                                  | Persen     | 100                               |                                | 100                                           |               | 100    |               | 100    |               |                                                        |
| III.1.16 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan          | Persentase Pengembangan Pemuda Kader dan Pemuda Pelopor                                                              | Persen     | 100                               |                                | 100                                           | 469.016.850   | 100    | 515.918.535   | 100    | 541.714.462   | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
|          |                                                               | Persentase Pemberdayaan Pemuda                                                                                       | Persen     | 100                               |                                | 100                                           | 100           | 100    |               |        |               |                                                        |
| III.1.17 | Program Pembinaan Perpustakaan                                | Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan                                                                         | orang/hari | 150                               |                                | 150                                           | 625.000.000   | 160    | 575.000.000   | 170    | 626.000.000   | Dinas Perpustakaan                                     |
| III.1.18 | Program Penyuluhan Pertanian                                  | Capaian Pembinaan Potensi Kelompok Tani                                                                              | Persen     | 32,5                              |                                | 41,2                                          | 358.000.000   | 52     | 393.800.000   | 62     | 404.000.000   | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan                |



# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No       | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                                                                                 | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                                                                                         | Satuan   | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |           |                |            |                | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                            |                                                                                                                                      |          |                                   |                                | 2024                                          |                | 2025      |                | 2026       |                |                                               |
|          |                                                                                                                            |                                                                                                                                      |          |                                   |                                | Target                                        | Rp             | Target    | Rp             | Target     | Rp             |                                               |
| III.1.19 | Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa Dan<br>Kelurahan                                                                           | Rata-rata jumlah kelompok binaan<br>Lembaga<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat                                                            | Kelompok | 1                                 |                                | 1                                             | 11.952.062.000 | 1         | 12.587.646.450 | 1          | 12.590.391.000 | Semua<br>Kecamatan                            |
|          |                                                                                                                            |                                                                                                                                      |          |                                   |                                |                                               |                |           |                |            |                |                                               |
| III.2    | Sasaran 8 :<br>Meningkatnya<br>akuntabilitas kinerja<br>pemerintahan dan<br>transparansi<br>pengelolaan keuangan<br>daerah |                                                                                                                                      |          |                                   |                                |                                               | 19.120.699.607 |           | 19.809.051.901 |            | 20.061.353.811 |                                               |
|          |                                                                                                                            | Nilai SAKIP                                                                                                                          |          | 62,07 (B)                         | 63,38 (B)                      | 65,04 (B)                                     |                | 66,68 (B) |                | 70,01 (BB) |                |                                               |
|          |                                                                                                                            | Indeks Pengelolaan Keuangan<br>Daerah (IPKD)                                                                                         |          | 66,46                             | 67,52                          | 68,60                                         |                | 69,70     |                | 70,81      |                |                                               |
| III.2.1  | Program Perencanaan<br>dan Pengendalian dan<br>Evaluasi Pmbangunan<br>Daerah                                               | Persentase konsistensi program<br>RPJMD/RPD terhadapRKPD                                                                             | Persen   | 100                               |                                | 100                                           | 1.175.326.200  | 100       | 1.410.391.440  | 100        | 1.551.430.585  | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
|          |                                                                                                                            | Persentase konsistensi program<br>RKPD terhadap APBD                                                                                 | Persen   | 100                               |                                | 100                                           |                | 100       |                | 100        |                |                                               |
|          |                                                                                                                            | Rata-rata capaian kinerja program<br>pembangunan daerah                                                                              | Persen   | 100                               |                                | 100                                           |                | 100       |                | 100        |                |                                               |
| III.2.2  | Program Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                                   | Persentase keselarasan antar<br>dokumen perencanaan (RPJMD,<br>RENSTRA,RKPD,Renja) lingkup<br>bidang PPM                             | Persen   | 100                               |                                | 100                                           | 1.228.916.100  | 100       | 1.474.699.320  | 100        | 1.548.434.286  | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
|          |                                                                                                                            | Persentase keselarasan<br>antardokumen perencanaan<br>(RPJMD,RENSTRA,RKPD,Renja)<br>lingkup bidang                                   | Persen   | 100                               |                                | 100                                           |                | 100       |                | 100        |                |                                               |
|          |                                                                                                                            | Persentase keselarasan antar<br>dokumen perencanaan (RPJMD,<br>RENSTRA, RKPD, Renja) lingkup<br>bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persen   | 100                               |                                | 100                                           |                | 100       |                | 100        |                |                                               |
| III.2.3  | Program Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                                                                     | Cakupan pengelolaan keuangan<br>daerah yang akuntabel                                                                                | Persen   | 100                               |                                | 100                                           | 11.166.699.157 | 100       | 11.278.366.149 | 100        | 11.300.000.000 | Badan<br>Keuangan<br>Daerah                   |
| III.2.4  | Program Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                                 | Persentase Barang Milik Daerah<br>dengan bukti kepemilikan yang sah                                                                  | Persen   | 100                               |                                | 100                                           | 1.541.998.150  | 100       | 1.557.418.132  | 100        | 1.559.150.000  | Badan<br>Keuangan<br>Daerah                   |
| III.2.5  | Program Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                                                                   | Persentase realisasi PAD                                                                                                             | Persen   | 100                               |                                | 100                                           | 3.559.546.000  | 100       | 3.595.141.460  | 100        | 3.560.000.000  | Badan<br>Keuangan<br>Daerah                   |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No           | Tujuan/Sasaran/Program<br>Prioritas Daerah                   | Indikator Kinerja<br>(Tujuan/Impact/Outcome)                      | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal (2022) | Perkiraan<br>Capaian<br>(2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                 |        |                 | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------------------------------------|
|              |                                                              |                                                                   |        |                                   |                                | 2024                                          |                 | 2025   |                 | 2026   |                 |                                            |
|              |                                                              |                                                                   |        |                                   |                                | Target                                        | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              |                                            |
| III.2.6      | Program Penyelenggaran<br>Pengawasan                         | Persentase Rekomendasi yang telah<br>ditindaklanjuti              | Persen | 51,00                             |                                | 60,00                                         | 203.269.500     | 65,00  | 223.596.450     | 70,00  | 245.956.095     | Inspektorat                                |
|              |                                                              | Persentase Pelanggaran Pegawai                                    | Persen | 0,44                              |                                | 0,40                                          |                 | 0,32   |                 | 0,26   |                 |                                            |
| III.2.7      | Program Perumusan<br>Kebijakan,Pendampingan<br>dan Asistensi | Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan<br>Intern Pemerintah ( APIP ) | Level  | 3                                 |                                | 3                                             | 244.944.500     | 3      | 269.438.950     | 3      | 296.382.845     | Inspektorat                                |
|              |                                                              |                                                                   |        |                                   |                                |                                               |                 |        |                 |        |                 |                                            |
| JUMLAH TOTAL |                                                              |                                                                   |        |                                   |                                |                                               | 382.635.527.298 |        | 416.250.377.022 |        | 411.817.805.385 |                                            |
|              |                                                              |                                                                   |        |                                   |                                |                                               |                 |        |                 |        |                 |                                            |

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka Pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tiga tahun ke depan periode RPD Kota Parepare. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program, yang akan menjadi dasar penyusunan program dan target pembangunan jangka 3 tahun kedepan. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran Pemerintah Kota Parepare selama tiga tahun kedepan tergambar pada table berikut ini.

7.1.1 Proyeksi Pendanaan Daerah Kota Parepare

Tabel 7.1

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Parepare  
Tahun 2023-2026

| No | Uraian                                                                      | Kondisi Tahun 2022 | Perkiraan Tahun 2023 | Proyeksi (Rp Milyar) |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
|    |                                                                             |                    |                      | Tahun 2024           | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|    | PENDAPATAN                                                                  | 905.70             | 907,61               | 970,00               | 980,63     | 988,91     |
| 1  | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                                | 172.92             | 179,16               | 193,22               | 199,61     | 203,99     |
| 2  | Pendapatan Transfer                                                         | 720.19             | 723,45               | 772,77               | 776,02     | 779,92     |
|    | - Transfer Pemerintah Pusat                                                 | 624.43             | 608,55               | 656,67               | 660,91     | 664,60     |
|    | - Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 95.76              | 114,89               | 115,10               | 115,10     | 115,30     |
| 3  | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                                        | 12.59              | 5,00                 | 5,00                 | 5,00       | 5,00       |
|    | - Pendapatan Hibah                                                          | 12.59              | 5,00                 | 5,00                 | 5,00       | 5,00       |
|    | - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | -                  | -                    | -                    | -          | -          |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2023 (data diolah)

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan table VII.1 diatas diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif, hal ini dipengaruhi oleh proyeksi pendapatan yang mengalami kenaikan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dimana pada tahun 2023 diperkirakan pendapatan daerah Kota Parepare sebesar 907,61 milyar lebih, mengalami kenaikan dan pertumbuhan sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 905,70 milyar.

7.1.2 Perkiraan Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare

Perhitungan pendanaan daerah Kota Parepare memperhatikan sasaran strategis yang akan dicapai. Ketersediaan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam tiga tahun.

Pengalokasian belanja diimplementasikan untuk pembiayaan program-program guna mencapai tujuan dan sasaran tiga tahun yang telah ditetapkan, sebagaimana table 7.2 berikut ini :

Tabel 7.2  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026

| No.   | Kapasitas Rill / Belanja | Kondisi 2022 | Perkiraan 2023 | Proyeksi (Rp Milyar) |        |        |
|-------|--------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------|--------|
|       |                          |              |                | 2024                 | 2025   | 2026   |
| 2     | BELANJA                  | 903.74       | 924,59         | 966,98               | 977,62 | 985,90 |
| 2.1   | Belanja Operasi          | 700.41       | 764,60         | 820,36               | 816,11 | 822,85 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai          | 337.00       | 369,93         | 379,17               | 391,34 | 397,88 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa  | 353.35       | 386,68         | 392,99               | 415,27 | 409,30 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga            | 0.77         | 1,50           | 1,50                 | 1,50   | 1,50   |
| 2.1.5 | Belanja Hibah            | 7.52         | 6,16           | 45,00                | 5,00   | 8,00   |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial   | 1.78         | 0,33           | 1,7                  | 3,00   | 6,16   |
| 2.2   | Belanja Modal            | 199.01       | 154,00         | 142,12               | 157,51 | 159,04 |
| 2.3   | Belanja Tak Terduga      | 4.31         | 6,00           | 6,00                 | 6,00   | 5,00   |
| 2.4   | Belanja Transfer         |              | -              | -                    | -      | -      |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2023 (data diolah)

Peningkatan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, disamping itu juga diharapkan dari pelampauan target pendapatan berupa optimalisasi PAD, peningkatan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**7.2 Program Perangkat Daerah**

Program perangkat daerah merupakan rangkaian tindakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan daerah, baik permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah maupun yang terkait dengan permasalahan perangkat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, program perangkat daerah mencakup program pembangunan daerah yang relevan dengan urusan perangkat daerah bersangkutan dan program perangkat daerah itu sendiri.

Berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, maka program perangkat daerah untuk tiga tahun kedepan disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program perangkat daerah dan kebutuhan pendanaan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3  
Indikasi Rencana Disertai Kebutuhan Pendanaan  
Kota Parepare Tahun 2024-2026

| Kode                                                            |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)              | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                |         |                |         |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                 | OPD PENAGGUNG JAWAB            |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                                 |    |    |                                                              |                                                  |        |                                   | 2024                                                   |                | 2025    |                | 2026    |                |                                       |                 |                                |
|                                                                 |    |    |                                                              |                                                  |        |                                   | Target                                                 | Rp             | Target  | Rp             | Target  | Rp             | Target                                | Rp              |                                |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |    |    |                                                              |                                                  |        |                                   |                                                        |                |         |                |         |                |                                       |                 |                                |
|                                                                 |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                        |                                                  |        |                                   |                                                        |                |         |                |         |                |                                       |                 |                                |
| 1                                                               | 01 | 02 | Program Pengelolaan Pendidikan                               | Angka Partisipasi Kasar (SD/SMP)                 | Persen | 100                               | 100                                                    | 32.034.071.000 | 100     | 36.648.261.210 | 100     | 36.650.000.000 | 100                                   | 105.332.332.210 | Dinas Pendidkan dan Kebudayaan |
|                                                                 |    |    |                                                              | Angka partisipasi Murni (SD-SMP)                 | Persen | 99,27                             | 99,35                                                  |                | 99,50   |                | 99,65   |                | 99,75                                 |                 |                                |
|                                                                 |    |    |                                                              | Angka Pendidikan di Tamatkan                     | Persen | 99,05                             | 99,25                                                  |                | 99,45   |                | 99,65   |                | 99,85                                 |                 |                                |
|                                                                 |    |    |                                                              | Angka Putus Sekolah SD/SMP)                      | Persen | 0,06                              | 0,05                                                   |                | 0,04    |                | 0,03    |                | 0,03                                  |                 |                                |
|                                                                 |    |    |                                                              | Angka Kelulusan SD/Mi,SMP/MTs                    | Persen | 100                               | 100                                                    |                | 100     |                | 100     |                | 100                                   |                 |                                |
|                                                                 |    |    |                                                              | Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP/Paket A/Paket B | Angka  | 1045,85                           | 1045,90                                                |                | 1046,05 |                | 1046,25 |                | 1046,50                               |                 |                                |
|                                                                 |    |    |                                                              | Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS     | Persen | 120,60                            | 121,90                                                 |                | 122,05  |                | 122,25  |                | 122,50                                |                 |                                |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                    | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                |            |                |            |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                 | OPD PENAGGUNG JAWAB            |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|      |    |    |                                                                             |                                                                        |        |                                   | 2024                                                   |                | 2025       |                | 2026       |                |                                       |                 |                                |
|      |    |    |                                                                             |                                                                        |        |                                   | Target                                                 | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                | Rp              |                                |
|      |    |    |                                                                             | Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA                      | Persen | 120,65                            | 120,85                                                 |                | 121,05     |                | 121,35     |                | 121,50                                |                 |                                |
|      |    |    |                                                                             | Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik                         | Persen | 97,80                             | 97,95                                                  |                | 98,05      |                | 98,35      |                | 98,55                                 |                 |                                |
|      |    |    |                                                                             | Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik        | Persen | 98,15                             | 98,25                                                  |                | 98,45      |                | 98,65      |                | 98,85                                 |                 |                                |
| 1    | 01 | 04 | Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan                                  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV                                 |        | 97,03                             | 97,35                                                  | 22.000.000     | 97,55      | 24.200.000     | 97,75      | 25.410.000     | 97,75                                 | 71.610.000      | Dinas Pendidkan dan Kebudayaan |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                                                                        |        |                                   |                                                        |                |            |                |            |                |                                       |                 |                                |
| 1    | 02 | 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Persen | 100%                              | 100%                                                   | 50.678.655.703 | 100%       | 51.029.034.577 | 100%       | 51.100.000.000 | 100%                                  | 152.807.690.280 | Dinas Kesehatan                |
| 1    | 02 | 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rasio dokter per satuan penduduk                                       | Ratio  | 45/100.000                        | 50/100.000                                             | 31.999.600     | 50/100.000 | 35.199.560     | 50/100.000 | 38.719.516     | 50/100.000                            | 105.918.676     | Dinas Kesehatan                |
|      |    |    |                                                                             | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                                 | Ratio  | 98/100.000                        | 98/100.000                                             |                | 98/100.000 |                | 98/100.000 |                | 98/100.000                            |                 | Dinas Kesehatan                |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                   | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                 |        |                 |        |                 | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                 | OPD PENAGGUNG JAWAB |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
|      |    |    |                                                                             |                                                                                                                       |        |                                   | 2024                                                   |                 | 2025   |                 | 2026   |                 |                                       |                 |                     |
|      |    |    |                                                                             |                                                                                                                       |        |                                   | Target                                                 | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                | Rp              |                     |
| 1    | 02 | 04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat | Persen | 100%                              | 100%                                                   | 337.907.800     | 100%   | 371.698.580     | 100%   | 408.868.438     | 100%                                  | 1.118.474.818   | Dinas Kesehatan     |
| 1    | 02 | 05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                           | Persen | 70%                               | 80%                                                    | 1.750.000.000   | 85%    | 1.800.000.000   | 90%    | 1.980.000.000   | 90%                                   | 5.530.000.000   | Dinas Kesehatan     |
|      |    |    | RS ANDI MAKKASAU                                                            |                                                                                                                       |        |                                   |                                                        |                 |        |                 |        |                 |                                       |                 |                     |
| 1    | 02 | 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP                                             | Persen | 100%                              | 100%                                                   | 101.164.844.615 | 100%   | 103.188.141.507 | 100%   | 103.220.022.922 | 100%                                  | 307.573.009.045 | RSUD A.Makkasau     |
|      |    |    | RS HASRI AINUN                                                              |                                                                                                                       |        |                                   |                                                        |                 |        |                 |        |                 |                                       |                 |                     |
| 1    | 02 | 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentanse Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                       | Persen | 100%                              | 100%                                                   | 11.899.216.600  | 100%   | 11.899.216.600  | 100%   | 11.899.216.600  | 100%                                  | 35.697.649.800  | RS Ainun Habibie    |



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                     | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                |         |                |         |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                 | OPD PENAGGUNG JAWAB                      |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                                         |        |                                   | 2024                                                   |                | 2025    |                | 2026    |                |                                       |                 |                                          |
|      |    |    |                                                              |                                                                                         |        |                                   | Target                                                 | Rp             | Target  | Rp             | Target  | Rp             | Target                                | Rp              |                                          |
| 1    | 02 | 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan                                | Persen | 100%                              | 100%                                                   | 3.789.633.500  | 100%    | 3.789.633.500  | 100%    | 3.789.633.500  | 100%                                  | 11.368.900.500  | RS Ainun Habibie                         |
| 1    | 02 | 05 | Program Pemberdayaan Masyarakt Bidang Kesehatan              | cakupan Promosi Kesehatan RS                                                            | Persen | 15                                | 15                                                     | 100.000.000    | 15      | 100.000.000    | 15      | 100.000.000    | 15                                    | 300.000.000     | RS Ainun Habibie                         |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM                    |                                                                                         |        |                                   |                                                        |                |         |                |         |                |                                       |                 |                                          |
| 1    | 03 | 02 | Program Penyelenggaraan Jalan                                | Proporsi jalan dalam kondisi baik                                                       | Persen | 80%                               | 81%                                                    | 60.000.000.000 | 83%     | 66.000.000.000 | 85%     | 66.660.000.000 | 85%                                   | 192.660.000.000 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|      |    |    |                                                              | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                              | point  | 1,73                              | 1,71                                                   |                | 1,69    |                | 1,67    |                | 1,67                                  |                 |                                          |
|      |    |    |                                                              | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembungan air (minimal1,5m) | Persen | 16,79                             | 17,50 %                                                |                | 18,00 % |                | 20,00 % |                | 20,00 %                               |                 |                                          |
|      |    |    |                                                              | Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar      | Persen | 0,38                              | 0,38%                                                  |                | 0,38%   |                | 0,38%   |                | 0,38%                                 |                 |                                          |
|      |    |    |                                                              | Proporsi panjang                                                                        | Persen | 49,46                             | 60%                                                    |                | 62%     |                | 65%     |                | 65%                                   |                 |                                          |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                    | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |         |               |         |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB                      |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                                        |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025    |               | 2026    |               |                                       |                |                                          |
|      |    |    |                                                              |                                                                                        |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target  | Rp            | Target  | Rp            | Target                                | Rp             |                                          |
|      |    |    |                                                              | jaringan jalan dalam kondisi baik                                                      |        |                                   |                                                        |               |         |               |         |               |                                       |                |                                          |
|      |    |    |                                                              | Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)                                  | Persen | 59,46                             | 65%                                                    |               | 67%     |               | 70%     |               | 70%                                   |                |                                          |
| 1    | 03 | 03 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                         | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi             | Persen | 57,50                             | 60%                                                    | 125.000.000   | 62,50 % | 110.000.000   | 65%     | 111.100.000   | 65%                                   | 346.100.000    | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 03 | 05 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)                    | Persentase irigasi dalam kondisi baik                                                  | Persen | 92,5                              | 93,00 %                                                | 4.550.000.000 | 93,50 % | 5.005.000.000 | 94%     | 5.505.500.000 | 94%                                   | 15.060.500.000 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|      |    |    |                                                              | Rasio jaringan irigasi                                                                 | Persen | 26,87                             | 26,90                                                  |               | 26,93   |               | 26,96   |               | 26,96                                 |                |                                          |
|      |    |    |                                                              | cakupan layanan irigasi terhadap daerah irigasi (DI)                                   | point  | 151,7                             | 152,52                                                 |               | 153,34  |               | 154,16  |               | 154,16                                |                |                                          |
|      |    |    |                                                              | Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan lonsor | Persen | 57,00%                            | 59,00 %                                                |               | 61,00 % |               | 63,00 % |               | 63,00 %                               |                |                                          |
|      |    |    |                                                              | Persentase bencana lonsor dan abrasi pada                                              | Persen | 26,67                             | 20                                                     |               | 20      |               | 20      |               | 20                                    |                |                                          |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)                                                       | SATUAN | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>(TAHUN<br>2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |         |                |         |               | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PRIODE RPD |                | OPD<br>PENAGGUNG<br>JAWAB                |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|      |    |    |                                                                       |                                                                                                    |        |                                               | 2024                                                   |               | 2025    |                | 2026    |               |                                          |                |                                          |
|      |    |    |                                                                       |                                                                                                    |        |                                               | Target                                                 | Rp            | Target  | Rp             | Target  | Rp            | Target                                   | Rp             |                                          |
|      |    |    |                                                                       | titik rawan bencana                                                                                |        |                                               |                                                        |               |         |                |         |               |                                          |                |                                          |
| 1    | 03 | 06 | Program Penataan Bangunan Gedung                                      | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan                                                        | Persen | 59,66                                         | 61,66 %                                                | 2.060.656.684 | 62,33 % | 2.266.722.352  | 63,50 % | 2.289.389.576 | 63,50 %                                  | 6.616.768.612  | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 03 | 08 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                           | Pemenuhan fasilitas perkotaan                                                                      | point  | 50,00                                         | 5,00                                                   | 3.000.000.000 | 5,00    | 13.616.318.392 | 5,00    | 3.222.562.144 | 5,00                                     | 19.838.880.536 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|      |    |    |                                                                       | Persentase capaian fasilitas perkotaan                                                             | Persen | 76,92                                         | 84,62                                                  |               | 92,31   |                | 100,00  |               | 100,00                                   |                |                                          |
| 1    | 03 | 09 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                  | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat                              | Persen | 90,00%                                        | 91,00 %                                                | 4.818.440.000 | 92,00 % | 5.300.284.000  | 93,00 % | 5.353.286.840 | 93,00 %                                  | 15.472.010.840 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|      |    |    |                                                                       | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun                                                            | Persen | 90,00%                                        | 92,00 %                                                |               | 93,00 % |                | 94,00 % |               | 94,00 %                                  |                |                                          |
| 1    | 03 | 10 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum      | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | Persen | 99,00%                                        | 99,30 %                                                | 4.500.000.000 | 99,60 % | 4.590.000.000  | 100,00% | 4.635.900.000 | 100,00%                                  | 13.725.900.000 | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|      |    |    |                                                                       | cakupan layanan air bersih                                                                         | Persen | 98,00%                                        | 98,31 %                                                |               | 98,39 % |                | 98,46 % |               | 98,46 %                                  |                |                                          |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                           | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                |         |                |         |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB                               |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
|      |    |    |                                                               |                                                                                               |        |                                   | 2024                                                   |                | 2025    |                | 2026    |                |                                       |                |                                                   |
|      |    |    |                                                               |                                                                                               |        |                                   | Target                                                 | Rp             | Target  | Rp             | Target  | Rp             | Target                                | Rp             |                                                   |
| 1    | 03 | 11 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah        | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | Persen | 90                                | 92,5                                                   | 2.500.000.000  | 95      | 2.750.000.000  | 97,5    | 2.777.500.000  | 97,5                                  | 8.027.500.000  | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang          |
| 1    | 03 | 12 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                        | Bangunan tidak melanggar tata ruang                                                           | Persen | 98,00%                            | 96,70 %                                                | 1.295.000.000  | 97,00 % | 1.424.500.000  | 97,30 % | 1.438.745.000  | 97,30 %                               | 4.158.245.000  | Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang          |
|      |    |    |                                                               | Ketaatan terhadap RTRW                                                                        | Persen | 99,86%                            | 99,86 %                                                |                | 99,00 % |                | 99,00 % |                | 99,00 %                               |                |                                                   |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN    |                                                                                               |        |                                   |                                                        |                |         |                |         |                |                                       |                |                                                   |
| 1    | 04 | 02 | Program Pengembangan Perumahan                                | Cakupan ketersediaan data rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena terkena bencana       | Persen | 100                               | 100                                                    | 160.000.000    | 100     | 460.000.000    | 100     | 515.000.000    | 100                                   | 1.135.000.000  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1    | 04 | 03 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Lingkungan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU                                     | Persen | 100                               | 100                                                    | 2.000.000.000  | 100     | 2.000.000.000  | 100     | 2.000.000.000  | 100                                   | 6.000.000.000  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1    | 04 | 04 | Program Kawasan Permukiman                                    | Cakupan Jalan Lingkungan                                                                      | Persen | 100                               | 100                                                    | 10.174.200.000 | 100     | 10.074.200.000 | 100     | 10.074.200.000 | 100                                   | 30.272.600.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman                |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                              | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                           | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB                               |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
|      |    |    |                                                                                           |                                                                                               |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |                |                                                   |
|      |    |    |                                                                                           |                                                                                               |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp             |                                                   |
|      |    |    |                                                                                           |                                                                                               |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                | dan<br>Pertanahan                                 |
| 1    | 04 | 05 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                                            | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                                                         | Persen | 100                               | 100                                                    | 4.600.000.000 | 100    | 7.187.200.000 | 100    | 4.600.000.000 | 100                                   | 16.387.200.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                               |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                                                   |
| 1    | 05 | 02 | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                       | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                         | Persen | 100                               | 100                                                    | 6.000.000.000 | 100    | 4.000.000.000 | 100    | 3.500.000.000 | 100                                   | 13.500.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja                        |
|      |    |    |                                                                                           | Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara | Persen | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                                                   |
|      |    |    |                                                                                           | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                              | Persen | 31,5                              | 32                                                     |               | 32     |               | 32     |               | 32                                    |                |                                                   |
| 1    | 05 | 03 | Program Penanggulangan Bencana                                                            | Persentase Pelayanan Penanggulanga n Bencana                                                  | Persen | 100                               | 100                                                    | 1.056.000.000 | 100    | 1.161.600.000 | 100    | 1.277.760.000 | 100                                   | 3.495.360.000  | Badan Penanggulang an Bencana Daerah              |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                              | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                            | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB                      |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|      |    |    |                                                                                           |                                                                                                                                                |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |                |                                          |
|      |    |    |                                                                                           |                                                                                                                                                |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp             |                                          |
| 1    | 05 | 04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban                                                               | Persen | 100                               | 100                                                    | 950.000.000   | 100    | 1.045.000.000 | 100    | 1.149.500.000 | 100                                   | 3.144.500.000  | Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamata n |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                                                                                                                                                |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                                          |
| 1    | 06 | 02 | Program Pemberdayaan Sosial                                                               | Persentase PSKS yang Aktif Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial                                                                             | Persen | 100                               | 100                                                    | 70.000.000    | 100    | 77.000.000    | 100    | 205.000.000   | 100                                   | 352.000.000    | Dinas Sosial                             |
| 1    | 06 | 03 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                            | Persentase Pemulangan Warga Negara yang tertangani                                                                                             | Persen | 100                               | 100                                                    | 55.000.000    | 100    | 68.000.000    | 100    | 68.000.000    | 100                                   | 191.000.000    | Dinas Sosial                             |
| 1    | 06 | 04 | Program Rehaabilitasi Sosial                                                              | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya | Persen | 100                               | 100                                                    | 750.000.000   | 100    | 1.110.000.000 | 100    | 1.110.000.000 | 100                                   | 2.970.000.000  | Dinas Sosial                             |
| 1    | 06 | 05 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                   | Persentase Penanganan Fakir Miskin                                                                                                             | Persen | 100                               | 100                                                    | 4.360.000.000 | 100    | 4.360.000.000 | 100    | 4.360.000.000 | 100                                   | 13.080.000.000 | Dinas Sosial                             |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                              | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |        |             |        |             | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |             | OPD PENAGGUNG JAWAB |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|
|      |    |    |                                                                       |                                                                                                                                  |        |                                   | 2024                                                   |             | 2025   |             | 2026   |             |                                       |             |                     |
|      |    |    |                                                                       |                                                                                                                                  |        |                                   | Target                                                 | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                | Rp          |                     |
| 1    | 06 |    |                                                                       | Cakupan Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Pemerintah Terfasilitasi                                                            | Persen | 100                               | 100                                                    |             | 100    |             | 100    |             | 100                                   |             |                     |
| 1    | 06 | 06 | Program Penanganan Bencana                                            | Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah | Persen | 100                               | 100                                                    | 70.000.000  | 100    | 77.000.000  | 100    | 345.000.000 | 100                                   | 492.000.000 | Dinas Sosial        |
| 1    | 06 | 07 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                              | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                                                                     | Persen | 100                               | 100                                                    | 100.000.000 | 100    | 150.000.000 | 100    | 150.000.000 | 100                                   | 400.000.000 | Dinas Sosial        |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                  |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |             |                     |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |                                                                                                                                  |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |             |                     |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                              | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |        |             |         |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB                                |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|      |    |    |                                                                         |                                                                                                                  |        |                                   | 2024                                                   |             | 2025   |             | 2026    |               |                                       |               |                                                    |
|      |    |    |                                                                         |                                                                                                                  |        |                                   | Target                                                 | Rp          | Target | Rp          | Target  | Rp            | Target                                | Rp            |                                                    |
| 2    | 07 | 03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                  | Persentase tenaga kerja yang dilatih                                                                             | Persen | 63,62                             | 64,06                                                  | 920.000.000 | 64,50  | 942.000.000 | 64,94   | 1.066.200.000 | 64,94                                 | 2.928.200.000 | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| 2    | 07 | 04 | Program Penempatan Tenaga Kerja                                         | Persentase kesempatan kerja yang ada                                                                             | Persen | 83,32                             | 83,76                                                  | 154.000.000 | 84,59  | 360.000.000 | 85,51   | 366.550.000   | 85,51                                 | 880.550.000   | Dinas Tenaga Kerja                                 |
| 2    | 07 | 05 | Program Hubungan Industrial                                             | Persentase perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja di perusahaan                                          | Persen | 86                                | 86,32                                                  | 570.000.000 | 86,71  | 577.000.000 | 87,10   | 584.700.000   | 87,10                                 | 1.731.700.000 | Dinas Tenaga Kerja                                 |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                                                  |        |                                   |                                                        |             |        |             |         |               |                                       |               |                                                    |
| 2    | 08 | 02 | Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Persentase perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan                                                   | Persen | 30%                               | 30%                                                    | 560.000.000 | 30%    | 616.000.000 | 32,00 % | 677.600.000   | 35%                                   | 1.853.600.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2    | 08 | 03 | Program Perlindungan Perempuan                                          | Cakupanperempuan korban kekerasan yang mendapatkankedudukanoleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 100,00%                           | 100,00%                                                | 225.000.000 | 100    | 247.500.000 | 100,00% | 272.250.000   | 100,00%                               | 744.750.000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |   |    | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                    | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)                                                                                                            | SATUAN          | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>(TAHUN<br>2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |            |             |            |             | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PRIODE RPD |             | OPD<br>PENAGGUNG<br>JAWAB                                         |
|------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |   |    |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                 |                                               | 2024                                                   |             | 2025       |             | 2026       |             |                                          |             |                                                                   |
|      |   |    |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                 |                                               | Target                                                 | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target                                   | Rp          |                                                                   |
| 2    | 0 | 04 | Program Peningkatan<br>Kualitas Keluarga                                                 | Partisipasi<br>Angkatan Kerja<br>Perempuan                                                                                                              | Persen          | 51,79%                                        | 51,79<br>%                                             | 80.000.000  | 51,<br>79% | 88.000.000  | 51,80<br>% | 96.800.000  | 51,80<br>%                               | 264.800.000 | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| 2    | 0 | 05 | Program Pengelolaan Data<br>Gender Dan Anak                                              | persentase<br>tersedianya<br>data profil<br>gender dan<br>anak                                                                                          | Persen          | 80%                                           | 80%                                                    | 27.000.000  | 85%        | 29.700.000  | 85%        | 32.670.000  | 85%                                      | 89.370.000  | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| 2    | 0 | 06 | Program Pemenuhan Hak<br>Anak (Pha)                                                      | Persentase<br>tercapainya<br>pemenuhan<br>Hak Anak                                                                                                      | Persen          | 80%                                           | 80%                                                    | 100.000.000 | 80%        | 110.000.000 | 80%        | 121.000.000 | 80%                                      | 331.000.000 | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak |
| 2    | 0 | 07 | Program Perlindungan<br>Khusus Anak                                                      | Cakupan anak<br>korban<br>kekerasan yang<br>mendapatkan<br>penanganan<br>pengaduan<br>oleh petugas<br>terlatih di<br>dalam unit<br>pelayanan<br>terpadu | Persen          | 100%                                          | 100%                                                   | 85.000.000  | 100%       | 93.500.000  | 100%       | 102.850.000 | 100%                                     | 281.350.000 | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETAHANAN<br>PANGAN                                        |                                                                                                                                                         |                 |                                               |                                                        |             |            |             |            |             |                                          |             |                                                                   |
| 2    | 0 | 02 | Program Pengelolaan<br>Sumber Daya Ekonomi<br>Untuk Kedaulatan Dan<br>Kemandirian Pangan | Tingkat<br>Ketersediaan<br>Pangan                                                                                                                       | grm/kp/<br>hari | 204                                           | 204,9                                                  | 220.000.000 | 208,9      | 242.000.000 | 213        | 266.200.000 | 213                                      | 728.200.000 | Dinas<br>Ketahanan<br>Pangan                                      |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |   |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN             | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)             | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB                               |
|------|---|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|      |   |    |                                                                          |                                                 |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |               |                                                   |
|      |   |    |                                                                          |                                                 |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp            |                                                   |
| 2    | 0 | 03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat        | Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein         | Persen | 100                               | 100                                                    | 260.000.000   | 100    | 286.000.000   | 100    | 343.200.000   | 100                                   | 889.200.000   | Dinas Ketahanan Pangan                            |
| 2    | 0 | 04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                      | Tingkat Penanganan Rawan Pangan                 | Persen | 100                               | 100                                                    | 20.000.000    | 100    | 22.000.000    | 100    | 85.000.000    | 100                                   | 127.000.000   | Dinas Ketahanan Pangan                            |
| 2    | 0 | 05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                       | Prosentase pengawasan mutu pangan               | Persen | 100                               | 100                                                    | 77.308.500    | 100    | 150.000.000   | 100    | 150.000.000   | 100                                   | 377.308.500   | Dinas Ketahanan Pangan                            |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                    |                                                 |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                                                   |
| 2    | 1 | 04 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                              | Persentase penyelesaian sengketa tanah          | Persen | 100                               | 100                                                    | 50.000.000    | 100    | 50.000.000    | 100    | 50.000.000    | 100                                   | 150.000.000   | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 2    | 1 | 05 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penetapan tanah untuk fasilitas umum | Persen | 36                                | 100                                                    | 3.500.000.000 | 100    | 2.500.000.000 | 100    | 2.500.000.000 | 100                                   | 8.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 2    | 1 | 08 | Program Pengelolaan Tanah Kosong                                         | Jumlah luas lahan yang bersertifikat            | km²    | 0,139                             | 2                                                      | 100.000.000   | 2      | 100.000.000   | 2      | 100.000.000   | 6                                     | 300.000.000   | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                              |                                                 |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                                                   |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |   |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                            | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |         |               |         |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB    |
|------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|
|      |   |    |                                                                                                                         |                                                                                |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025    |               | 2026    |               |                                       |               |                        |
|      |   |    |                                                                                                                         |                                                                                |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target  | Rp            | Target  | Rp            | Target                                | Rp            |                        |
| 2    | 1 | 02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup                                 | Persen | 0,0%                              | 0,0%                                                   | -             | 100%    | 300.000.000   | 100%    | 200.000.000   | 100%                                  | 500.000.000   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 1 | 03 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Pemenuhan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup               | Persen | 100%                              | 100%                                                   | 170.000.000   | 100%    | 187.000.000   | 100%    | 205.700.000   | 100%                                  | 562.700.000   | Dinas Lingkungan Hidup |
|      |   |    |                                                                                                                         | Proporsi Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan | Persen | 0,010%                            | 0,005 %                                                |               | 0,005 % |               | 0,005 % |               | 0,015 %                               |               |                        |
| 2    | 1 | 04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan                      | Persen | 12,62%                            | 12,63 %                                                | 2.682.160.000 | 12,64 % | 2.710.000.000 | 12,65 % | 2.652.000.000 | 12,65 %                               | 8.044.160.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 1 | 05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | Persentase limbah B3 yang dikelola                                             | Persen | 30%                               | 30%                                                    | 30.000.000    | 35%     | 55.000.000    | 40%     | 55.000.000    | 40%                                   | 140.000.000   | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 1 | 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau      | Persen | 100%                              | 100%                                                   | 20.000.000    | 100%    | 30.000.000    | 100%    | 33.000.000    | 98%                                   | 83.000.000    | Dinas Lingkungan Hidup |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                               | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                          | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                |         |                |        |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB    |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|
|      |    |    |                                                                                            |                                                                                              |        |                                   | 2024                                                   |                | 2025    |                | 2026   |                |                                       |                |                        |
|      |    |    |                                                                                            |                                                                                              |        |                                   | Target                                                 | Rp             | Target  | Rp             | Target | Rp             | Target                                | Rp             |                        |
|      |    |    |                                                                                            | kegiatan terhadap izin lingkungan                                                            |        |                                   |                                                        |                |         |                |        |                |                                       |                |                        |
|      |    |    |                                                                                            | Persentase pemberian izin - izin lingkungan                                                  | Persen | 100%                              | 100%                                                   |                | 100%    |                | 100%   |                | 100%                                  |                |                        |
| 2    | 11 | 08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Pemenuhan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Persen | 100,0%                            | 100,0 %                                                | 20.000.000     | 100,0 % | 30.000.000     | 100%   | 33.000.000     | 100%                                  | 83.000.000     | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11 | 09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                      | Pemenuhan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                      | Persen | 100%                              | 100%                                                   | 260.000.000    | 100%    | 320.000.000    | 100%   | 320.000.000    | 100%                                  | 900.000.000    | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11 | 10 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                              | Penanganan pengaduan masyarakat                                                              | Persen | 0%                                | 100%                                                   | 20.000.000     | 100%    | 30.000.000     | 100%   | 50.000.000     | 100%                                  | 100.000.000    | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11 | 11 | Program Pengelolaan Persampahan                                                            | Timbulan sampah yang ditangani                                                               | Persen | 99%                               | 99%                                                    | 13.065.000.000 | 100%    | 12.150.000.000 | 100%   | 12.700.000.000 | 100%                                  | 37.915.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
|      |    |    |                                                                                            | Persentase jumlah sampah yang berkurang 3R                                                   | Persen | 26%                               | 28%                                                    |                | 30%     |                | 30%    |                | 30%                                   |                |                        |
|      |    |    |                                                                                            | Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                     | Persen | 73%                               | 71%                                                    |                | 70%     |                | 70%    |                | 70%                                   |                |                        |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN              | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)           | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |        |             |        |             | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |             | OPD PENAGGUNG JAWAB                     |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|      |    |    |                                                                           |                                               |        |                                   | 2024                                                   |             | 2025   |             | 2026   |             |                                       |             |                                         |
|      |    |    |                                                                           |                                               |        |                                   | Target                                                 | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                | Rp          |                                         |
|      |    |    |                                                                           | Persentase cakupan area pelayanan             | Persen | 93%                               | 94%                                                    |             | 95%    |             | 96%    |             | 96%                                   |             |                                         |
|      |    |    |                                                                           | Nilai operasionalisasi TPA/TPST/SPA           | Point  | 75                                | 75                                                     |             | 75     |             | 75     |             | 75                                    |             |                                         |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                               |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |             |                                         |
| 2    | 12 | 02 | Program Pendaftaran Penduduk                                              | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk    | Angka  | 0,99                              | 0,99                                                   | 110.000.000 | 1      | 175.000.000 | 1      | 175.000.000 | 1                                     | 460.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|      |    |    |                                                                           | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Perse  | 99                                | 99,7                                                   |             | 99,75  |             | 99,92  |             | 99,92                                 |             |                                         |
| 2    | 12 | 03 | Program Pencatatan Sipil                                                  | Cakupan pelayanan pencatatan sipil            | Perse  | 100                               | 100                                                    | 60.000.000  | 100    | 66.000.000  | 100    | 72.600.000  | 100                                   | 198.600.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|      |    |    |                                                                           | Rasio bayi ber akte kelahiran                 | Angka  | 0,99                              | 1                                                      |             | 1      |             | 1      |             | 1                                     |             |                                         |
|      |    |    |                                                                           | Rasio pasangan nikah berakte nikah            | Persen | 74,22                             | 80,55                                                  |             | 80,58  |             | 80,65  |             | 80,65                                 |             |                                         |
|      |    |    |                                                                           | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran             | Persen | 99,99                             | 99,99                                                  |             | 100    |             | 100    |             | 100                                   |             |                                         |

| Kode |        |    | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)                                                             | SATUAN | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>(TAHUN<br>2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |            |        |            |        |            | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PRIODE RPD |             | OPD<br>PENAGGUNG<br>JAWAB                         |
|------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|      |        |    |                                                                       |                                                                                                          |        |                                               | 2024                                                   |            | 2025   |            | 2026   |            |                                          |             |                                                   |
|      |        |    |                                                                       |                                                                                                          |        |                                               | Target                                                 | Rp         | Target | Rp         | Target | Rp         | Target                                   | Rp          |                                                   |
|      |        |    |                                                                       | Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur | Persen | 100                                           | 100                                                    |            | 100    |            | 100    |            | 100                                      |             |                                                   |
|      |        |    |                                                                       | Persentase anak yang memiliki akte kelahiran                                                             | Persen | 100                                           | 100                                                    |            | 100    |            | 100    |            | 100                                      |             |                                                   |
| 2    | 1<br>2 | 04 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan               | Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu-kan                                              | Persen | 100                                           | 100                                                    | 70.000.000 | 100    | 77.000.000 | 100    | 84.700.000 | 100                                      | 231.700.000 | Dinas Kependuduka<br>n dan<br>Pencatatan<br>Sipil |
|      |        |    |                                                                       | Ketersediaan data base kependudukan Skala Provinsi                                                       | Persen | 100                                           | 100                                                    |            | 100    |            | 100    |            | 100                                      |             |                                                   |
| 2    | 1<br>2 | 05 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                               | Persentase penyusunan Profil Kependudukan                                                                | Persen |                                               | 100                                                    | 5.000.000  | 100    | 10.000.000 | 100    | 10.000.000 | 100                                      | 25.000.000  | Dinas Kependuduka<br>n dan<br>Pencatatan<br>Sipil |
|      |        |    |                                                                       | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK                                                                      | Persen |                                               | 100                                                    |            | 100    |            | 100    |            | 100                                      |             |                                                   |
|      |        |    |                                                                       | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40Persen                                                | Persen |                                               | 99,99                                                  |            | 99,99  |            | 99,99  |            | 99,99                                    |             |                                                   |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                       | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022)      | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |                               |               |                               |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB                                |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|      |    |    |                                                                         |                                                                                                           |        |                                        | 2024                                                   |               | 2025                          |               | 2026                          |               |                                       |                |                                                    |
|      |    |    |                                                                         |                                                                                                           |        |                                        | Target                                                 | Rp            | Target                        | Rp            | Target                        | Rp            | Target                                | Rp             |                                                    |
|      |    |    |                                                                         | berpendapatan bawah                                                                                       |        |                                        |                                                        |               |                               |               |                               |               |                                       |                |                                                    |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                                           |        |                                        |                                                        |               |                               |               |                               |               |                                       |                |                                                    |
| 2    | 14 | 02 | Program Pengendalian Penduduk                                           | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 59,66%                                 | 45%                                                    | 487.000.000   | 50%                           | 535.700.000   | 50%                           | 589.270.000   | 50%                                   | 1.611.970.000  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2    | 14 | 03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana KB                                 | Ratio Akseptor KB                                                                                         | Persen | 62,97%                                 | 65%                                                    | 1.179.699.009 | 66%                           | 1.297.668.910 | 67%                           | 1.427.435.801 | 66%                                   | 3.904.803.720  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2    | 14 | 04 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)            | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB),BKR, BKL, ber-KB                                               | Persen | BKB = 81,67, BKR = 83,80, BKL = 78,12, | BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82,                          | 1.619.955.400 | BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82, | 1.781.950.940 | BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82, | 1.960.146.034 | BKB = 83, BKR = 85, BKL = 82,         | 5.362.052.374  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                  |                                                                                                           |        |                                        |                                                        |               |                               |               |                               |               |                                       |                |                                                    |
| 2    | 15 | 02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)           | Jumlah arus penumpang angkutan umum                                                                       | Orang  | 114.652                                | 2.000.000                                              | 7.124.661.380 | 2.200.000                     | 6.388.097.518 | 2.500.000                     | 6.707.502.394 | 6.700.000                             | 18.902.961.292 | Dinas Perhubungan                                  |

| Kode |  |  | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)          | SATUAN        | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>(TAHUN<br>2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |    |           |    |           |    | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PRIODE RPD |    | OPD<br>PENAGGUNG<br>JAWAB |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|------------------------------------------|----|---------------------------|
|      |  |  |                                                                       |                                                       |               |                                               | 2024                                                   |    | 2025      |    | 2026      |    |                                          |    |                           |
|      |  |  |                                                                       |                                                       |               |                                               | Target                                                 | Rp | Target    | Rp | Target    | Rp | Target                                   | Rp |                           |
|      |  |  |                                                                       | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum      | Orang/B arang | 1.995.924                                     | 3.000.000                                              |    | 3.300.000 |    | 3.600.000 |    | 9.900.000                                | -  |                           |
|      |  |  |                                                                       | Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun | Orang/B arang | 1.995.924                                     | 3.000.000                                              |    | 3.300.000 |    | 3.600.000 |    | 3.600.000                                |    |                           |
|      |  |  |                                                                       | Panjang jalur kereta api                              | Km            | 0                                             | 0                                                      |    | 11        |    | 11        |    | 11                                       |    |                           |
|      |  |  |                                                                       | Persentase rambu dan Apill dalam kondisi baik         | Persen        | 85                                            | 85                                                     |    | 85        |    | 85        |    | 85                                       |    |                           |
|      |  |  |                                                                       | Jumlah uji KIR angkutan umum                          | Unit          | 878                                           | 100                                                    |    | 150       |    | 200       |    | 200                                      |    |                           |
|      |  |  |                                                                       | Rasio ijin trayek                                     | Rasio         | 0                                             | 0,0005                                                 |    | 0,0006    |    | 0,00066   |    | 0,00066                                  |    |                           |
|      |  |  |                                                                       | Persentase layanan angkutan darat                     | Persen        | 36                                            | 70                                                     |    | 75        |    | 80        |    | 80                                       |    |                           |
|      |  |  |                                                                       | Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan               | Rasio         | 0,0775                                        | 0,093                                                  |    | 0,1       |    | 0,11      |    | 0,11                                     |    |                           |
|      |  |  |                                                                       | Persentase pemasangan rambu-rambu                     | Persen        | 85                                            | 85                                                     |    | 90        |    | 100       |    | 100                                      |    |                           |
|      |  |  |                                                                       | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum              | Persen        | 58                                            | 25                                                     |    | 30        |    | 35        |    | 35                                       |    |                           |



| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                                                                | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB              |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                                                                                                                    |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |                |                                  |
|      |    |    |                                                              |                                                                                                                                                                    |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp             |                                  |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |                                                                                                                                                                    |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                                  |
| 2    | 16 | 02 | Program Informasi dan Komunukasi Publik                      | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100                               | 100                                                    | 7.797.000.000 | 100    | 8.324.000.000 | 100    | 8.571.700.000 | 100                                   | 24.692.700.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|      |    |    |                                                              | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan                                                                                                     | Persen | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                                  |
|      |    |    |                                                              | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana       | Jumlah | 3                                 | 4                                                      |               | 5      |               | 6      |               | 15                                    |                |                                  |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                                  | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB              |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                                                                      |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |                |                                  |
|      |    |    |                                                              |                                                                                                                      |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp             |                                  |
|      |    |    |                                                              | diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                            |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                                  |
| 2    | 16 | 03 | Program Aplikasi Informatika                                 | Cakupan layanan telekomunikasi                                                                                       | Persen | 87,15                             | 87,15                                                  | 3.930.000.000 | 93,58  | 3.862.000.000 | 93,58  | 4.000.000.000 | 93,58                                 | 11.792.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|      |    |    |                                                              | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon                                                                      | Persen | 91,93                             | 94,46                                                  |               | 95,72  |               | 96,98  |               | 96,98                                 |                |                                  |
|      |    |    |                                                              | Proporsi rumah tangga dengan akses internet                                                                          | Persen | 81,06                             | 83,59                                                  |               | 84,85  |               | 86,11  |               | 86,11                                 |                |                                  |
|      |    |    |                                                              | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100,00                                |                |                                  |
|      |    |    |                                                              | Proporsi individu yang menggunakan internet                                                                          | Persen | 81,06                             | 83,59                                                  |               | 84,85  |               | 86,11  |               | 86,11                                 |                |                                  |
|      |    |    |                                                              | Proporsi individu yang menguasai/me                                                                                  | Persen | 91,93                             | 94,46                                                  |               | 95,72  |               | 96,98  |               | 96,98                                 |                |                                  |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)           | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |        |             |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB               |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|      |    |    |                                                                        |                                               |        |                                   | 2024                                                   |             | 2025   |             | 2026   |               |                                       |               |                                   |
|      |    |    |                                                                        |                                               |        |                                   | Target                                                 | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp            | Target                                | Rp            |                                   |
|      |    |    |                                                                        | miliki telepon genggam                        |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |               |                                       |               |                                   |
|      |    |    |                                                                        | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband  | Persen | 81,06                             | 83,59                                                  |             | 84,85  |             | 86,11  |               | 86,11                                 |               |                                   |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM                           |                                               |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |               |                                       |               |                                   |
| 2    | 17 | 03 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                            | Persentase koperasi aktif                     | Persen | 43,20                             | 44,80                                                  | 25.000.000  | 45,60  | 27.500.000  | 44,35  | 30.250.000    | 44,35                                 | 82.750.000    | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2    | 17 | 04 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi                           | Persentase koperasi yang berkualitas          | Persen | 60,48                             | 61,6                                                   | 40.000.000  | 64,52  | 44.000.000  | 68,55  | 48.400.000    | 68,55                                 | 132.400.000   | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2    | 17 | 05 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                           | Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan  | Persen | 32,26                             | 32,26                                                  | 420.000.000 | 36,29  | 450.000.000 | 40,32  | 480.000.000   | 40,32                                 | 1.350.000.000 | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2    | 17 | 06 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                         | Persentase kualitas Kelembagaan Koperasi      | Persen | 20,15                             | 20,15                                                  | 30.000.000  | 22,58  | 33.000.000  | 24,19  | 36.300.000    | 24,19                                 | 99.300.000    | Dinas Tenaga Kerja                |
| 2    | 17 | 07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) | Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha | Persen | 45,16                             | 45,18                                                  | 925.000.000 | 45,20  | 946.400.000 | 45,24  | 1.091.040.000 | 45,24                                 | 2.962.440.000 | Dinas Tenaga Kerja                |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                             |                                               |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |               |                                       |               |                                   |
| 2    | 18 | 02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                             | Persentase peningkatan investasi di           | Persen | 100                               | 100                                                    | 250.000.000 | 100    | 300.000.000 | 100    | 330.000.000   | 100                                   | 880.000.000   | Dinas Penaman Modal dan Pelayanan |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                         | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |        |             |        |             | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB                                  |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|      |    |    |                                                               |                                                                                             |        |                                   | 2024                                                   |             | 2025   |             | 2026   |             |                                       |               |                                                      |
|      |    |    |                                                               |                                                                                             |        |                                   | Target                                                 | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                | Rp            |                                                      |
|      |    |    |                                                               | Kabupaten /Kota                                                                             |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               | Terpadu Satu Pintu                                   |
| 2    | 18 | 03 | Program Promosi Penanaman Modal                               | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)                                         | Milyar | 173                               | 174,5                                                  | 250.000.000 | 175    | 275.000.000 | 176    | 302.500.000 | 525,5                                 | 827.500.000   | Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2    | 18 | 04 | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Tersedianya pelayanan Perizinan dan Non perizinan dengan perkuatan aplikasi berbasis online | Persen | 100                               | 100                                                    | 200.000.000 | 100    | 200.000.000 | 100    | 220.000.000 | 300                                   | 620.000.000   | Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2    | 18 | 05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)                                                | Unit   | 123                               | 125                                                    | 400.000.000 | 126    | 470.000.000 | 127    | 517.000.000 | 378                                   | 1.387.000.000 | Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2    | 18 | 06 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase kualitas layanan sistem informasi penanaman modal                                | Persen | 100                               | 100                                                    | 178.000.000 | 100    | 220.000.000 | 100    | 242.000.000 | 300                                   | 640.000.000   | Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA            |                                                                                             |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                                      |
| 2    | 19 | 02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan          | Persentase Pengembangan Pemuda Kader dan Pemuda Pelopor                                     | Persen | 100                               | 100                                                    | 469.016.850 | 100    | 515.918.535 | 100    | 541.714.462 | 100                                   | 1.526.649.847 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata            |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                            | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB                       |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                                                |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |                |                                           |
|      |    |    |                                                              |                                                                                                |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp             |                                           |
|      |    |    |                                                              | Persentase Pemberdayaan Pemuda                                                                 | Persen | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                                           |
| 2    | 19 | 03 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan       | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                                           | Persen | 100                               | 100                                                    | 3.578.060.100 | 100    | 3.935.866.110 | 100    | 4.132.659.416 | 100                                   | 11.646.585.626 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
|      |    |    |                                                              | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                                                            | Persen | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                                           |
| 2    | 19 | 04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                   | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | Persen | 100                               | 100                                                    | 255.049.200   | 100    | 505.000.000   | 100    | 530.250.000   | 100                                   | 1.290.299.200  |                                           |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                         |                                                                                                |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                                           |
| 2    | 20 | 02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                   | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                                        |        | 100                               | 100                                                    | 250.000.000   | 100    | 300.000.000   | 100    | 350.000.000   | 100                                   | 900.000.000    | Dinas Komunikasi dan Informatika          |
|      |    |    |                                                              | Buku "kabupaten dalam angka"                                                                   |        | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                                           |
|      |    |    |                                                              | Buku "PDRB"                                                                                    |        | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                                           |
|      |    |    |                                                              | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam             |        | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                                           |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                        | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |            |        |             |        |             | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |             | OPD PENAGGUNG JAWAB              |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                                            |        |                                   | 2024                                                   |            | 2025   |             | 2026   |             |                                       |             |                                  |
|      |    |    |                                                              |                                                                                            |        |                                   | Target                                                 | Rp         | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                | Rp          |                                  |
|      |    |    |                                                              | menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                    |        |                                   |                                                        |            |        |             |        |             |                                       |             |                                  |
|      |    |    |                                                              | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah |        | 100                               | 100                                                    |            | 100    |             | 100    |             | 100                                   |             |                                  |
|      |    |    |                                                              | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar             |        | 100                               | 100                                                    |            | 100    |             | 100    |             | 100                                   |             |                                  |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                        |                                                                                            |        |                                   |                                                        |            |        |             |        |             |                                       |             |                                  |
| 2    | 21 | 02 | Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah |        | 97,06                             | 100                                                    | 84.000.000 | 100    | 155.000.000 | 100    | 170.000.000 | 100                                   | 409.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|      |    |    |                                                              | Tingkat keamanan                                                                           |        | 100,00                            | 100                                                    |            | 100    |             | 100    |             | 100                                   |             |                                  |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |   |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                       | SATUAN      | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |        |             |        |             | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB            |
|------|---|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|      |   |    |                                                              |                                                           |             |                                   | 2024                                                   |             | 2025   |             | 2026   |             |                                       |               |                                |
|      |   |    |                                                              |                                                           |             |                                   | Target                                                 | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                | Rp            |                                |
|      |   |    |                                                              | informasi pemerintah                                      |             |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                        |                                                           |             |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                |
| 2    | 2 | 02 | Program Pengembangan Kebudayaan                              | Penyelenggara an festival seni dan budaya                 | Situs       | 24                                | 24                                                     | 150.000.000 | 24     | 165.000.000 | 24     | 166.650.000 | 24                                    | 481.650.000   | Dinas Pendidika dan Kebudayaan |
| 2    | 2 | 03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisonal                     | Penyelenggara an festival seni dan budaya                 | Kegiatan    | 24                                | 24                                                     | 167.000.000 | 24     | 177.000.000 | 24     | 178.770.000 | 24                                    | 522.770.000   | Dinas Pendidika dan Kebudayaan |
| 2    | 2 | 04 | Program Pembinaan Sejarah                                    | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu          | Situs       | 41                                | 41                                                     | 20.000.000  | 41     | 20.000.000  | 41     | 20.200.000  | 41                                    | 60.200.000    | Dinas Pendidika dan Kebudayaan |
| 2    | 2 | 05 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya             | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | Situs       | 41                                | 41                                                     | 600.000.000 | 41     | 660.000.000 | 41     | 666.600.000 | 41                                    | 1.926.600.000 | Dinas Pendidika dan Kebudayaan |
| 2    | 2 | 06 | Program Pengelolaan Permuseuman                              | Jumlah Museum yang dikelola                               | Situs       | 2                                 | 2                                                      | 40.000.000  | 2      | 44.000.000  | 2      | 44.440.000  | 2                                     | 128.440.000   | Dinas Pendidika dan Kebudayaan |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                      |                                                           |             |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                |
| 2    | 2 | 02 | Program Pembinaan Perpustakaan                               | Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan              | orang/ hari | 150                               | 150                                                    | 625.000.000 | 160    | 575.000.000 | 170    | 626.000.000 | 480                                   | 1.826.000.000 | Dinas Perpustakaan             |
| 2    | 2 | 03 | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno         | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno               | persen      | 20                                | 20                                                     | 90.000.000  | 25     | 105.000.000 | 30     | 65.000.000  | 75                                    | 260.000.000   | Dinas Perpustakaan             |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                    | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |        |             |        |             | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB                     |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                        |        |                                   | 2024                                                   |             | 2025   |             | 2026   |             |                                       |               |                                         |
|      |    |    |                                                              |                                                        |        |                                   | Target                                                 | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                | Rp            |                                         |
|      |    |    |                                                              | yang dilestarikan                                      |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                         |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ARSIP                             |                                                        |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                         |
| 2    | 24 | 02 | Program Pengelolaan Arsip                                    | Presentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip     | persen | 80                                | 80                                                     | 77.000.000  | 85     | 89.000.000  | 90     | 111.000.000 | 90                                    | 277.000.000   | Dinas Perpustakaan                      |
| 2    | 24 | 03 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                  | Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan    | Persen | 0                                 | 40                                                     | 65.000.000  | 50     | 83.000.000  | 55     | 99.500.000  | 55                                    | 247.500.000   | Dinas Perpustakaan                      |
| 2    | 24 | 04 | Program Perizinan Penggunaan Arsip                           | persentase penyelenggara an perizinan penggunaan arsip | persen | 50                                | 50                                                     | 10.000.000  | 50     | 10.000.000  | 50     | 14.000.000  | 50                                    | 34.000.000    | Dinas Perpustakaan                      |
|      |    |    |                                                              |                                                        |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                         |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                  |                                                        |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                         |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN            |                                                        |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                         |
| 3    | 25 | 03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                        | Capaian Target Produksi Perikanan Tangkap              | Persen | 30,31                             | 31,7                                                   | 584.000.000 | 31,7   | 639.000.000 | 31,7   | 644.000.000 | 95,1                                  | 1.867.000.000 | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3    | 25 | 04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                       | Capaian Target Pengelolaan Perikanan Budidaya          | Persen | 15,46                             | 15,46                                                  | 223.950.000 | 15,46  | 410.000.000 | 15,46  | 450.000.000 | 46,38                                 | 1.083.950.000 | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3    | 25 | 06 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan             | Capaian Produksi Pengolahan hasil Perikanan            | Persen | 34,57                             | 89,50                                                  | 116.000.000 | 89,50  | 116.030.000 | 89,50  | 121.030.000 | 89,5                                  | 353.060.000   | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |



|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |   |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                           | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB                       |
|------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|      |   |    |                                                                                                    |                                                               |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |               |                                           |
|      |   |    |                                                                                                    |                                                               |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp            |                                           |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                              |                                                               |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                                           |
| 3    | 2 | 02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata        | Persen | 100                               | 100                                                    | 532.957.450   | 100    | 586.253.195   | 100    | 644.878.515   | 100                                   | 1.764.089.160 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3    | 2 | 03 | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | Persentase Durasi Lama kunjungan wisata                       | Persen | 100                               | 100                                                    | 1.578.399.500 | 100    | 2.344.500.000 | 100    | 2.578.950.000 | 100                                   | 6.501.849.500 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3    | 2 | 04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif   | Persen | 100                               | 100                                                    | 100.000.000   | 100    | 110.000.000   | 100    | 121.000.000   | 100                                   | 331.000.000   | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3    | 2 | 05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase Pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan Pelatihan | Persen | 100                               | 100                                                    | 80.000.000    | 100    | 88.000.000    | 100    | 96.800.000    | 100                                   | 264.800.000   | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
|      |   |    |                                                                                                    |                                                               |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                                           |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                               |                                                               |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                                           |
| 3    | 2 | 02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               | Capaian Target Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Persen | 3                                 | 3                                                      | 1.146.632.000 | 3,1    | 1.091.310.000 | 3,3    | 1.102.386.000 | 9,4                                   | 3.340.328.000 | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan   |
| 3    | 2 | 03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            | Target Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian               | Persen | 100                               | 100                                                    | 300.000.000   | 100    | 330.000.000   | 100    | 363.000.000   | 100                                   | 993.000.000   | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan   |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |   |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                            | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |             |        |             |        |             | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB                     |
|------|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|      |   |    |                                                                         |                                                                                |        |                                   | 2024                                                   |             | 2025   |             | 2026   |             |                                       |               |                                         |
|      |   |    |                                                                         |                                                                                |        |                                   | Target                                                 | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                | Rp            |                                         |
| 3    | 2 | 04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Capaian Target Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persen | 63                                | 57,5                                                   | 200.000.000 | 60     | 220.000.000 | 63     | 242.000.000 | 100                                   | 662.000.000   | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3    | 2 | 05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Capaian Terget Penedalian dan penanggulanga n Bencana Pertanian                | Persen | 100                               | 100                                                    | 60.000.000  | 100    | 66.000.000  | 100    | 72.600.000  | 100                                   | 198.600.000   | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 3    | 2 | 07 | Program Penyuluhan Pertanian                                            | Capaian Pembinaan Potensi Kelompok Tani                                        | Persen | 32,5                              | 41,2                                                   | 358.000.000 | 52     | 393.800.000 | 62     | 404.000.000 | 62                                    | 1.155.800.000 | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
|      |   |    |                                                                         |                                                                                |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                         |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                  |                                                                                |        |                                   |                                                        |             |        |             |        |             |                                       |               |                                         |
| 3    | 3 | 02 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                            | Persentase Layanan Perizinan Usaha Perdagangan                                 | Persen | 100                               | 100                                                    | 50.000.000  | 100    | 50.000.000  | 100    | 50.000.000  | 100                                   | 150.000.000   | Dinas Perdagangan                       |
| 3    | 3 | 03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | Persentase Sarana Distribusi yang Aktif                                        | Persen | 100                               | 100                                                    | 110.000.000 | 100    | 145.000.000 | 100    | 145.000.000 | 100                                   | 400.000.000   | Dinas Perdagangan                       |
| 3    | 3 | 04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting     | Koefisien Harga Antar Waktu                                                    | Persen | <1                                | 0,92                                                   | 600.000.000 | 0,92   | 720.000.000 | 0,92   | 945.000.000 | 0,92                                  | 2.265.000.000 | Dinas Perdagangan                       |
| 3    | 3 | 05 | Program Pengembangan Ekspor                                             | Nilai Ekspor Daerah                                                            | USD    | 0                                 | 3000                                                   | 40.000.000  | 0      |             | 0      |             | 3000                                  | 40.000.000    | Dinas Perdagangan                       |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                            | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB     |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                                                |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |                |                         |
|      |    |    |                                                              |                                                                                                |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp             |                         |
| 3    | 30 | 06 | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen              | Persentase Layanan Kemetrolagian Daerah                                                        | Persen | 100                               | 100                                                    | 150.000.000   | 100    | 180.000.000   | 100    | 585.000.000   | 100                                   | 915.000.000    | Dinas Perdagangan       |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                     |                                                                                                |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                         |
| 3    | 31 | 02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                 | Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan                                                           | Persen | 7,5                               | 7,5                                                    | 1.075.000.000 | 7,6    | 1.612.500.000 | 7,7    | 1.500.000.000 | 7,7                                   | 4.187.500.000  | Dinas Perdagangan       |
| 3    | 31 | 03 | Program Pengendalian Izin Usaha ndustri Kabupaten/Kota       | Persentase Layanan Perizinan Usaha Industri                                                    | Persen | 100                               | 100                                                    | 50.000.000    | 100    | 60.000.000    | 100    | 65.000.000    | 100                                   | 175.000.000    | Dinas Perdagangan       |
| 3    | 31 | 04 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional       | Persentase Pelaporan Informasi Industri melalui SIINas                                         | Persen | 100                               | 100                                                    | 50.000.000    | 100    | 60.000.000    | 100    | 65.000.000    | 100                                   | 175.000.000    | Dinas Perdagangan       |
|      |    |    |                                                              |                                                                                                |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                         |
|      |    |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                          |                                                                                                |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                         |
|      |    |    | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                                                |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                         |
| 4    | 01 | 02 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                | Cakupan hasil fasilitasi hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Poin   | 3.200                             | 3.200                                                  | 8.708.807.330 | 3.300  | 8.795.895.403 | 3.400  | 8.800.000.000 | 3.400                                 | 26.304.702.733 | Sekretariat Daerah Kota |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |   |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN        | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                          | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                |        |                |        |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB                   |
|------|---|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|      |   |    |                                                                     |                                                                                              |        |                                   | 2024                                                   |                | 2025   |                | 2026   |                |                                       |                |                                       |
|      |   |    |                                                                     |                                                                                              |        |                                   | Target                                                 | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                | Rp             |                                       |
| 4    | 0 | 03 | Program Perekonomian dan Pembangunan                                | Cakupan hasil koordinasi, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persen | 100                               | 100                                                    | 1.616.108.800  | 100%   | 1.696.914.240  | 100    | 1.700.000.000  | 100                                   | 5.013.023.040  | Sekretariat Daerah Kota               |
|      |   |    | SEKRETARIAT DPRD                                                    |                                                                                              |        |                                   |                                                        |                |        |                |        |                |                                       | -              |                                       |
| 4    | 0 | 02 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                  | Persentase Pelaksanaan penjangingan aspirasi masyarakat                                      | Persen | 100                               | 100                                                    | 16.665.274.700 | 100    | 16.831.927.447 | 100    | 16.850.000.000 | 100                                   | 50.347.202.147 | Sekretariat DPRD                      |
|      |   |    |                                                                     | Persentase pelaksanaan Hearing                                                               | Persen | 100                               | 100                                                    |                | 100    |                | 100    |                | 100                                   |                |                                       |
|      |   |    |                                                                     | Persentase Ranpeda yang disahkan                                                             | Persen | 100                               | 100                                                    |                | 100    |                | 100    |                | 100                                   |                |                                       |
|      |   |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                                                              |        |                                   |                                                        |                |        |                |        |                |                                       |                |                                       |
|      |   |    | URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN                                     |                                                                                              |        |                                   |                                                        |                |        |                |        |                |                                       |                |                                       |
|      |   |    | Program Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pmbangunan Daerah | Persentase konsistensi program RPJMD/RPD terhadapRKPD                                        | Persen | 100                               | 100                                                    | 1.375.326.200  | 100    | 1.410.391.440  | 100    | 1.551.430.585  | 100                                   | 4.137.148.225  | Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah |
|      |   |    |                                                                     | Persentase konsitensi program RKPD terhadap APBD                                             | Persen | 100                               | 100                                                    |                | 100    |                | 100    |                | 100                                   |                |                                       |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |  |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                               | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB                  |
|------|--|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|      |  |  |                                                                    |                                                                                                   |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |               |                                      |
|      |  |  |                                                                    |                                                                                                   |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp            |                                      |
|      |  |  |                                                                    | Rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah                                              | Persen | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |               |                                      |
|      |  |  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA,RKPD, Ren ja) lingkup bidang PPM | Persen | 100                               | 100                                                    | 1.228.916.100 | 100    | 1.474.699.320 | 100    | 1.548.434.286 |                                       | 4.252.049.706 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|      |  |  |                                                                    | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA,RKPD, Ren ja) lingkup bidang     | Persen | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               |                                       |               |                                      |
|      |  |  |                                                                    | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA,RKPD, Ren ja) lingkup bidang     | Persen | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               |                                       |               |                                      |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                              | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                |        |                |        |                | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB                        |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                  |        |                                   | 2024                                                   |                | 2025   |                | 2026   |                |                                       |                |                                            |
|      |    |    |                                                              |                                                                  |        |                                   | Target                                                 | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target                                | Rp             |                                            |
|      |    |    |                                                              | Infrastruktur dan Kewilayahan                                    |        |                                   |                                                        |                |        |                |        |                |                                       |                |                                            |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN DAERAH                   |                                                                  |        |                                   |                                                        |                |        |                |        |                |                                       |                |                                            |
| 5    | 02 | 02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                          | Cakupan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel               | Persen | 100                               | 100                                                    | 11.166.699.157 | 100    | 11.278.366.149 | 100    | 11.300.000.000 | 100                                   | 33.745.065.306 | Badan Keuangan Daerah                      |
| 5    | 02 | 03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | Persentase Barang Milik Daerah dengan bukti kepemilikan yang sah | Persen | 100                               | 100                                                    | 1.541.998.150  | 100    | 1.557.418.132  | 100    | 1.559.150.000  | 100                                   | 4.658.566.282  | Badan Keuangan Daerah                      |
| 5    | 02 | 04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                        | Persentase realisasi PAD                                         | Persen | 100                               | 100                                                    | 3.559.546.000  | 100    | 3.595.141.460  | 100    | 3.560.000.000  | 100                                   | 10.714.687.460 | Badan Keuangan Daerah                      |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN                       |                                                                  |        |                                   |                                                        |                |        |                |        |                |                                       | -              |                                            |
| 5    | 03 | 02 | Program Kepegawaian Daerah                                   | Persentase ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal    | Persen | 2,72                              | 2,69                                                   | 2.385.509.200  | 2,66   | 2.430.000.000  | 2,62   | 2.470.000.000  | 7,97                                  | 7.285.509.200  | Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber |

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                                                      | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB                                     |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                                                          |        |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |               |                                                         |
|      |    |    |                                                              |                                                                                                          |        |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp            |                                                         |
|      |    |    |                                                              | Persentase pelanggaran pegawai                                                                           | Persen | 0,44                              | 0,40                                                   |               | 0,32   |               | 0,26   |               | 0,26                                  |               | Daya Manusia                                            |
|      |    |    |                                                              | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif ( Eselon I dan II ) | Persen | 22,86                             | 20,59                                                  |               | 20,59  |               | 20,59  |               |                                       |               |                                                         |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIAHN          |                                                                                                          |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                                                         |
| 5    | 04 | 02 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                     | Rata rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                              | JP     | 27                                | 27                                                     | 1.164.368.200 | 27     | 1.264.368.000 | 27     | 1.277.011.680 | 81                                    | 3.705.747.880 | Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia |
|      |    |    |                                                              | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural                          | Persen | 0                                 | 6,8                                                    |               | 4,54   |               | 2,27   |               | 13,61                                 |               |                                                         |
|      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN              |                                                                                                          |        |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                                                         |
|      |    |    | Program Penelitian dan Pengembangan daerah                   | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan                                                           | Persen | 30                                | 30                                                     | 479.552.300   | 40     | 575.462.760   | 45     | 600.000.000   | 45                                    | 1.655.015.060 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                              | SATUAN   | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                  |          |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |               |                     |
|      |    |    |                                                              |                                                                  |          |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp            |                     |
|      |    |    |                                                              | Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi            | Persen   | 50                                | 50                                                     |               | 60     |               | 70     |               | 70                                    |               |                     |
|      |    |    | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                  |          |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                     |
|      |    |    | UNUSR PENGAWASAN                                             |                                                                  |          |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                     |
| 6    | 01 | 02 | Program Penyelenggaran Pengawasan                            | Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti                | Persen   | 51,00                             | 60,00                                                  | 203.269.500   | 65,00  | 223.596.450   | 70,00  | 245.956.095   | 70,00                                 | 672.822.045   | Inspektorat         |
|      |    |    |                                                              | Persentase Pelanggaran Pegawai                                   | Persen   | 0,44                              | 0,40                                                   |               | 0,32   |               | 0,26   |               | 0,26                                  |               |                     |
| 6    | 01 | 03 | Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan dan Asistensi       | Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP )   | Level    | 3                                 | 3                                                      | 244.944.500   | 3      | 269.438.950   | 3      | 296.382.845   | 3                                     | 810.766.295   | Inspektorat         |
|      |    |    | UNSUR KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN                               |                                                                  |          |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                     |
|      |    |    | KECAMATAN                                                    |                                                                  |          |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                     |
|      |    |    | BACUKIKI                                                     |                                                                  |          |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                     |
| 7    | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik            | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen   | 100                               | 100                                                    | 25.500.000    | 100    | 50.750.000    | 100    | 50.750.000    | 100                                   | 127.000.000   | Bacukiki            |
| 7    | 01 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                   | Rata-rata jumlah kelompok binaan                                 | Kelompok | 1                                 | 1                                                      | 2.239.542.600 | 1      | 2.370.180.000 | 1      | 2.370.180.000 | 1                                     | 6.979.902.600 | Bacukiki            |



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                              | SATUAN   | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |               | OPD PENAGGUNG JAWAB |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                  |          |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |               |                     |
|      |    |    |                                                              |                                                                  |          |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp            |                     |
|      |    |    |                                                              | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat                                  |          |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                     |
|      |    |    |                                                              | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                             | Kelompok | 28                                | 28                                                     |               | 28     |               | 28     |               | 28                                    |               |                     |
|      |    |    |                                                              | Persentase PKK aktif                                             | Persen   | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |               |                     |
|      |    |    |                                                              | Persentase Posyandu aktif                                        | Persen   | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |               |                     |
| 7    | 01 | 04 | Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                   | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                 | Persen   | 100                               | 100                                                    | 33.523.000    | 100    | 65.650.000    | 100    | 65.650.000    | 100                                   | 164.823.000   | Bacukiki            |
|      |    |    | BACUKIKI BARAT                                               |                                                                  |          |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |               |                     |
| 7    | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik            | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen   | 100                               | 100                                                    | 60.445.000    | 100    | 88.000.000    | 100    | 88.000.000    | 100                                   | 236.445.000   | Bacukiki Barat      |
| 7    | 01 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                   | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Kelompok | 0                                 | 1                                                      | 3.158.084.900 | 1      | 3.360.564.000 | 1      | 3.392.664.000 | 1                                     | 9.911.312.900 | Bacukiki Barat      |
|      |    |    |                                                              | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                             | Kelompok | 28                                | 28                                                     |               | 28     |               | 28     |               | 28                                    |               |                     |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                              | SATUAN   | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
|      |    |    |                                                              |                                                                  |          |                                   | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                       |                |                     |
|      |    |    |                                                              |                                                                  |          |                                   | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp             |                     |
|      |    |    |                                                              | Persentase PKK aktif                                             | Persen   | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                     |
|      |    |    |                                                              | Persentase Posyandu aktif                                        | Persen   | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                     |
| 7    | 01 | 04 | Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                   | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                 | Persen   | 100                               | 100                                                    | 35.925.000    | 100    | 91.650.000    | 100    | 91.650.000    | 100                                   | 219.225.000    | Bacukiki Barat      |
|      |    |    | SOREANG                                                      |                                                                  |          |                                   |                                                        |               |        |               |        |               |                                       |                |                     |
| 7    | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik            | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen   | 100                               | 100                                                    | 6.000.000     | 100    | 6.600.000     | 100    | 109.000.000   | 100                                   | 121.600.000    | Soreang             |
| 7    | 01 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                   | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Kelompok | 1                                 | 1                                                      | 3.602.705.000 | 1      | 3.962.975.500 | 1      | 3.591.000.000 | 1                                     | 11.156.680.500 | Soreang             |
|      |    |    |                                                              | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                             | Kelompok | 28                                | 28                                                     |               | 28     |               | 28     |               | 28                                    |                |                     |
|      |    |    |                                                              | Persentase PKK aktif                                             | Persen   | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                     |
|      |    |    |                                                              | Persentase Posyandu aktif                                        | Persen   | 100                               | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                     |
| 7    | 01 | 04 | Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                   | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                 | Persen   | 100                               | 100                                                    | 35.600.000    | 100    | 76.850.000    | 100    | 76.850.000    | 100                                   | 189.300.000    | Soreang             |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)                     | SATUAN   | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>(TAHUN<br>2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA<br>AKHIR PRIODE RPD |               | OPD<br>PENAGGUNG<br>JAWAB |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|      |    |    |                                                                       |                                                                  |          |                                               | 2024                                                   |               | 2025   |               | 2026   |               |                                          |               |                           |
|      |    |    |                                                                       |                                                                  |          |                                               | Target                                                 | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                   | Rp            |                           |
|      |    |    | UJUNG                                                                 |                                                                  |          |                                               |                                                        |               |        |               |        |               |                                          | -             |                           |
| 7    | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                     | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen   | 100                                           | 100                                                    | 65.000.000    | 100    | 95.000.000    | 100    | 190.500.000   | 100                                      | 350.500.000   | Ujung                     |
| 7    | 01 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                            | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Kelompok | 0 Klp                                         | 1                                                      | 2.951.729.500 | 1      | 3.246.902.450 | 1      | 3.236.547.000 | 1                                        | 9.435.178.950 | Ujung                     |
|      |    |    |                                                                       | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                             | Kelompok | 19 Klp                                        | 19                                                     |               | 20     |               | 20     |               | 20                                       |               |                           |
|      |    |    |                                                                       | Persentase PKK aktif                                             | Persen   | 100                                           | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                      |               |                           |
|      |    |    |                                                                       | Persentase Posyandu aktif                                        | Persen   | 100                                           | 100                                                    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                      |               |                           |
| 7    | 01 | 04 | Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                            | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                 | Persen   | 100                                           | 100                                                    | 42.250.000    | 100    | 125.000.000   | 100    | 155.000.000   | 100                                      | 322.250.000   |                           |
|      |    |    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN                                  |                                                                  |          |                                               |                                                        |               |        |               |        |               |                                          |               |                           |
|      |    |    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                           |                                                                  |          |                                               |                                                        |               |        |               |        |               |                                          |               |                           |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare</b> | <b>Tahun 2024-2026</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

| Kode |    |    | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                                        | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                |        |               |        |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                | OPD PENAGGUNG JAWAB |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
|      |    |    |                                                                                                                                        |                                                                            |        |                                   | 2024                                                   |                | 2025   |               | 2026   |               |                                       |                |                     |
|      |    |    |                                                                                                                                        |                                                                            |        |                                   | Target                                                 | Rp             | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                | Rp             |                     |
| 8    | 01 | 02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Persentase Terlaksananya Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa | Persen | 100                               | 100                                                    | 1.968.100.000  | 100    | 940.000.000   | 100    | 950.000.000   | 100                                   | 3.858.100.000  | Kesbangpol          |
| 8    | 01 | 03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada Masyarakat              | Persen | 100                               | 100                                                    | 29.536.501.650 | 100    | 1.246.879.992 | 100    | 1.259.348.792 | 100                                   | 32.042.730.434 | Kesbangpol          |
| 8    | 01 | 04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Persentase Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi | Persen | 100                               | 100                                                    | 590.000.000    | 100    | 566.500.000   | 100    | 572.165.000   | 100                                   | 1.728.665.000  | Kesbangpol          |
| 8    | 01 | 05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | Persentase penurunan pengguna narkoba di Kota Parepare                     | Persen | 2                                 | 2                                                      | 860.000.000    | 2      | 337.589.120   | 5      | 340.965.011   | 5                                     | 1.538.554.131  | Kesbangpol          |
|      |    |    |                                                                                                                                        | Persentase Potensi konflik agama yang tertangani                           | Persen | 100                               | 100                                                    |                | 100    |               | 100    |               | 100                                   |                |                     |
| 8    | 01 | 06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Persentase penanganan potensi konflik sosial                               | Persen | 100                               | 100                                                    | 9.036.852.886  | 100    | 709.500.000   | 100    | 716.595.000   | 100                                   | 10.462.947.886 | Kesbangpol          |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| Kode |    |   | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)                | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2022) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN |                 |        |                 |        |                 | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD |                   | OPD PENAGGUNG JAWAB |
|------|----|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|      |    |   |                                                              |                                                    |        |                                   | 2024                                                   |                 | 2025   |                 | 2026   |                 |                                       |                   |                     |
|      |    |   |                                                              |                                                    |        |                                   | Target                                                 | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target                                | Rp                |                     |
| x    | xx | x | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan | Persen | 100                               | 100                                                    | 489.519.843.169 | 100    | 501.596.069.936 | 100    | 507.882.043.266 | 100                                   | 1.498.997.947.371 | Semua OPD           |

**BAB VIII****KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada akhir periode masa jabatan kepala daerah. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan hingga akhir tahun perencanaan.

Kinerja yang hendak dicapai dinyatakan dengan suatu indikator yang jelas pada tahap perencanaan. Selanjutnya indikator kinerja juga diperuntukkan untuk memberi gambaran tentang keadaan yang diharapkan dimasa mendatang. Ini penting untuk menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diperlukan dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan.

**8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota pada akhir periode masa jabatan, maka ditetapkan beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikator kinerja daerah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**8.1.1 Indikator Kinerja Makro**

Ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa digunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator).

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Gini Ratio. Indikator tersebut juga merupakan bagian IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel VIII.1  
Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Parepare Tahun 2018-2023

| No. | Indikator                  | Satuan      | Kondisi Awal 2022 | Perkiraan Capaian Tahun 2023 | Target |       |       | Kondisi Akhir Periode |
|-----|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-----------------------|
|     |                            |             |                   |                              | 2024   | 2025  | 2026  |                       |
| 1   | Indeks Pembangunan Manusia | Angka/nilai | 78,54             | 78,92                        | 79,43  | 79,85 | 80,35 | 80,35                 |
| 2   | Tingkat Kemiskinan         | Persen      | 5,41              | 5,29                         | 5,18   | 5,07  | 4,96  | 4,96                  |
| 3   | Tingkat Pengangguran       | Persen      | 5,60              | 5,25                         | 5,92   | 4,56  | 4,21  | 4,21                  |
| 4   | Pertumbuhan Ekonomi        | Persen      | 5,93              | 6,15                         | 6,50   | 6,86  | 7,00  | 7,00                  |
| 5   | PDRB Per Kapita            | Juta (Rp.)  | 54,26             | 57,53                        | 60,99  | 64,66 | 68,56 | 68,56                 |
| 6   | Gini Rasio                 | Indeks      | 0,379             | 0,348                        | 0,332  | 0,318 | 0,303 | 0,303                 |

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2023

### 8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara garis besar diklasifikasi kedalam tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Aspek pelayanan umum terdiri dari layanan umum wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan, dan layanan penunjang urusan.

Formulasi IKU disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program perangkat daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utamadan pelayanan yang harus dilaksanakan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang telah direncanakan, dimana tahun 2022 merupakan tahun dasar (baseline). Seluruh indikator kinerja utama pemerintah daerah Kota Parepare untuk lima tahun ke depan dituangkan ke dalam tabel berikut ini :

Tabel 8.2  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Parepare Tahun 2024-2026

| No. | Indikator Kinerja Sasaran        | Satuan  | Capaian Kinerja 2022 | Perkiraan 2023 | Target Kinerja |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|----------------------------------|---------|----------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------------------------------|
|     |                                  |         |                      |                | 2024           | 2025   | 2026   |                                          |
| 1   | Indeks Pembangunan Manusia       |         | 78,54                | 78,93          | 79,43          | 79,85  | 80,35  | 80,35                                    |
| a   | Indeks Pendidikan                |         | 75,87                | 76,19          | 76,83          | 77,41  | 78,19  | 78,19                                    |
| b   | Indeks Kesehatan                 |         | 79,18                | 79,74          | 80,12          | 80,34  | 80,64  | 80,64                                    |
| c   | Pengeluaran per kapita           |         | 14,027               | 14,230         | 14,450         | 14,670 | 14,870 | 14,870                                   |
| d   | Indeks Pemberdayaan Gender       |         | 73,52                | 76,27          | 79,13          | 82,10  | 85,17  | 85,17                                    |
| 2   | PDRB Per kapita                  | Juta Rp | 54,26                | 57,53          | 60,99          | 64,66  | 68,56  | 68,56                                    |
|     | Indeks Gini (Gini ratio)         |         | 0,379                | 0,348          | 0,332          | 0,318  | 0,303  | 0,303                                    |
|     | Inflasi                          | Persen  | 6,66                 | 3,0            | 3,0            | 3,0    | 3,0    | 3,0                                      |
| a   | Pertumbuhan Ekonomi              | Persen  | 5,93                 | 6,15           | 6,50           | 6,86   | 7,00   | 7,00                                     |
| b   | Tingkat Kemiskinan               | Persen  | 5,41                 | 5,29           | 5,18           | 5,07   | 4,96   | 4,96                                     |
| c   | Tingkat Pengangguran             | Persen  | 5,60                 | 5,25           | 4,92           | 4,56   | 4,21   | 4,21                                     |
| d   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |         | 75,90                | 76,81          | 77,72          | 78,65  | 79,59  | 79,59                                    |
|     | Indeks Ketahanan                 |         | 0,42                 | 0,48           | 0,53           | 0,58   | 0,62   | 0,62                                     |



| No. | Indikator Kinerja Sasaran                               | Satuan | Capaian Kinerja 2022 | Perkiraan 2023 | Target Kinerja |             |             | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------------|
|     |                                                         |        |                      |                | 2024           | 2025        | 2026        |                                          |
|     | Daerah terhadap bencana                                 |        |                      |                |                |             |             |                                          |
| 3   | Indeks Reformasi Birokrasi                              |        | 63,98 (CC)           | 65,00 (CC)     | 67,00 (C)      | 70,00 (B)   | 72,25 (BB)  | 72,25 (BB)                               |
| a   | Indeks Pelayanan Publik                                 |        | 4,46                 | 4,48           | 4,50           | 4,52        | 4,54        | 4,54                                     |
| b   | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik                |        | 77,36                | 77,60          | 78,00          | 79,20       | 81,00       | 81,00                                    |
| c   | Indeks Kepuasan Masyarakat                              |        | 79,76                | 82,16          | 84,63          | 87,17       | 89,79       | 89,79                                    |
| d   | Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) |        | 2,50 (Cukup)         | 2,75 (Cukup)   | 3,0 (Baik)     | 3,15 (Baik) | 3,25 (Baik) | 3,25 (Baik)                              |
| e   | Nilai SAKIP                                             |        | 62,07 (B)            | 63,38 (B)      | 65,04 (B)      | 66,68 (B)   | 70,01 (BB)  | 70,01 (BB)                               |
| f   | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)               |        | 66,46                | 67,52          | 68,60          | 69,70       | 70,81       | 70,81                                    |

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2023

### 8.1.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Parepare Tahun 2024-2026

| NO                             | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Satuan      | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------|
|                                |                                                                   |             | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                            |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |                                                                   |             |         |           |          |        |        |                            |
| 1                              | Pertumbuhan Ekonomi                                               | %           | 5,93    | 6,15      | 6,5      | 6,86   | 7,00   |                            |
| 2                              | Laju Inflasi                                                      | %           | 6,66    | 3,00      | 3,00     | 3,00   | 3,00   |                            |
| 3                              | PDRB Per Kapita (Juta Rp)                                         | Juta Rp     | 54,26   | 57,53     | 60,99    | 64,66  | 68,56  |                            |
| 4                              | Indeks Gini                                                       | Angka       | 0,379   | 0,348     | 0,332    | 0,318  | 0,303  |                            |
| 7                              | Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan                      | %           | 94,59   | 94,71     | 94,75    | 94,79  | 94,83  |                            |
| 8                              | Persentase Penduduk Miskin                                        | %           | 5,41    | 5,41      | 5,29     | 5,18   | 5,07   |                            |
| 9                              | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                  | %           | 78,54   | 78,54     | 78,93    | 79,43  | 79,85  |                            |
| 10                             | Angka Melek Huruf (AMH)                                           | Angka       | 98,42   | 97,47     | 97,24    | 97,00  | 96,77  |                            |
| 11                             | Harapan Lama Sekolah                                              | Tahun       | 14,52   | 14,54     | 14,55    | 14,56  | 14,58  |                            |
| 12                             | Angka Rata-rata Lama Sekolah                                      | Tahun       | 10,66   | 11,01     | 11,20    | 11,38  | 11,56  |                            |
| 13                             | Angka usia harapan hidup                                          | Tahun       | 71,57   | 71,65     | 71,79    | 71,93  | 72,07  |                            |
| 14                             | Paritas Daya Beli                                                 | Juta Rp     | 14,02   | 14,23     | 14,45    | 14,67  | 14,87  |                            |
| 15                             | Persentase balita gizi buruk                                      | %           | 0,12    | 0,10      | 0,02     | 0,01   | 0,01   |                            |
| 16                             | Prevalensi Balita Gizi Kurang                                     | %           | 4,93    | 4,81      | 5,72     | 6,63   | 7,53   |                            |
| 17                             | Angka Partisipasi Angkatan Kerja                                  | Angka       | 63,61   | 67,82     | 69,03    | 70,25  | 71,46  |                            |
| 18                             | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                | Angka       | 63,61   | 67,64     | 68,60    | 69,56  | 70,53  |                            |
| 19                             | Tingkat Pengangguran Terbuka                                      | Angka       | 5,59    | 7,32      | 7,52     | 7,73   | 7,93   |                            |
| 20                             | Rasio Penduduk yang Bekerja                                       | Angka       | 94,40   | 93,06     | 93,01    | 92,96  | 92,91  |                            |
| 21                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                        | Angka       | 79,76   | 77,65     | 77,92    | 78,19  | 78,46  |                            |
| 22                             | Persentase PAD terhadap pendapatan                                | %           | 16,66   | 17,20     | 17,62    | 18,04  | 18,46  |                            |
| 23                             | Opini BPK                                                         | Hasil Opini | WTP     | WTP       | WTP      | WTP    | WTP    |                            |
| 24                             | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                         | Angka       | 88,5    | 94,50     | 96,50    | 98,50  | 100,50 |                            |
| 25                             | Penguatan Cadangan Pangan                                         | Angka       | 100     | 127,50    | 147,50   | 167,50 | 187,50 |                            |
| 26                             | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB              | %           | 0,99    | 0,97      | 1,02     | 1,08   | 1,14   |                            |
| 27                             | Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB                      | %           | 0,26    | 0,25      | 0,24     | 0,22   | 0,20   |                            |
| 28                             | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB                       | %           | 16,67   | 15,66     | 15,60    | 15,53  | 15,47  |                            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO                                | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah  | Satuan | Kondisi   | Perkiraan | Proyeksi  |           |           | OPD<br>Penanggung<br>Jawab      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
|                                   |                                                                    |        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |                                 |
| 29                                | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB                           | %      | 2,09      | 1,89      | 1,82      | 1,79      | 1,70      |                                 |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>    |                                                                    |        |           |           |           |           |           |                                 |
| 1                                 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita                       | Rupiah | 1.302.669 | 1.584.590 | 1.677.589 | 1.736.307 | 1.863.587 |                                 |
| 3                                 | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita               | %      | 54,67     | 55,69     | 56,12     | 56,76     | 56,99     |                                 |
| 4                                 | Produktivitas total daerah                                         | Angka  | 120,91    | 118,84    | 123,02    | 127,98    | 131,39    |                                 |
| 6                                 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi) | Angka  | 1,20      | 1,26      | 1,32      | 1,39      | 1,44      |                                 |
| 7                                 | Bank Milik Pemerintah                                              | Buah   | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |                                 |
| 8                                 | Bank Milik Swasta Nasional                                         | Buah   | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         |                                 |
| 9                                 | Bank Milik Swasta Asing                                            | Buah   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                                 |
| 10                                | Bank Milik Pemerintah Daerah                                       | Buah   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                                 |
| 11                                | Jenis dan Jumlah Bank                                              | Buah   | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        |                                 |
| 12                                | Hotel Bintang Satu                                                 | buah   | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |                                 |
| 13                                | Hotel Non Bintang                                                  | buah   | 34        | 34        | 34        | 34        | 34        |                                 |
| 14                                | Angka kriminalitas yang tertangani                                 | Angka  | 34,17     | 38,23     | 50,00     | 52,00     | 54,00     |                                 |
| 15                                | Rasio ketergantungan                                               | Angka  | 44,91     | 43,41     | 42,22     | 40,92     | 39,85     |                                 |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>       |                                                                    |        |           |           |           |           |           |                                 |
| <b>LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b> |                                                                    |        |           |           |           |           |           |                                 |
| <b>I</b>                          | <b>PENDIDIKAN</b>                                                  |        |           |           |           |           |           |                                 |
| 1,1                               | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                   | %      | 42,01     | 38,73     | 37,40     | 33,68     | 34,72     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| <b>1,2</b>                        | <b>Angka Partisipasi Kasar</b>                                     |        |           |           |           |           |           |                                 |
|                                   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A                        |        | 94,48     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |                                 |
|                                   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B                      |        | 87,96     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |                                 |
|                                   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C                   |        | 115,25    | 130,14    | 141,16    | 150,67    | 163,20    |                                 |
| 1,3                               | Angka Pendidikan yang ditamatkan                                   | %      | 1         | 1,35      | 1,24      | 1,00      | 1,01      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| <b>1,4</b>                        | <b>Angka Partisipasi Murni</b>                                     |        |           |           |           |           |           |                                 |
| 1.4.1                             | Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A                        | %      | 99,27     | 99,29     | 99,35     | 99,50     | 99,65     |                                 |
| 1.4.2                             | Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B                      | %      | 87,33     | 99,29     | 99,35     | 99,50     | 99,65     | Dinas Pendidikan                |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO         | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                     | Satuan | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |         |         | OPD<br>Penanggung<br>Jawab      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------------|
|            |                                                                                       |        | 2022    | 2023      | 2024     | 2025    | 2026    |                                 |
| 1.4.3      | Angka partisipasi murni (APM) SMA/ SMK/MA/Paket C                                     | %      | 121,17  | 123,19    | 138,25   | 158,42  | 168,39  | dan<br>Kebudayaan               |
| <b>1,5</b> | <b>Angka Partisipasi Sekolah</b>                                                      |        |         |           |          |         |         |                                 |
| 1.5.1      | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A                                         | %      | 934,51  | 1045,70   | 1045,85  | 1045,95 | 1046,05 |                                 |
| 1.5.2      | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B                                       | %      | 873,36  | 1035,65   | 1035,85  | 1035,95 | 1036,05 |                                 |
| 1.5.3      | Angka Partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C                                    | %      | 1211,73 | 1244,95   | 1281,74  | 1269,44 | 1355,32 |                                 |
| <b>1,6</b> | <b>Angka Putus Sekolah :</b>                                                          |        |         |           |          |         |         |                                 |
| 1.6.1      | Angka putus sekolah (APS) SD/MI                                                       | %      | 0,06    | 0,06      | 0,05     | 0,04    | 0,03    |                                 |
| 1.6.2      | Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs                                                     | %      | 0,04    | 0,04      | 0,03     | 0,02    | 0,01    |                                 |
| 1.6.3      | Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/ MA                                                 | %      | 0,09    | 0,10      | 0,07     | 0,04    | 0,01    |                                 |
| <b>1,7</b> | <b>Angka Kelulusan :</b>                                                              |        |         |           |          |         |         |                                 |
| 1.7.1      | Angka kelulusan (AL) SD/MI                                                            | %      | 96,87   | 99,05     | 117,52   | 123,06  | 123,06  |                                 |
| 1.7.2      | Angka kelulusan (AL) SMP/MTs                                                          | %      | 93,7    | 100,00    | 100,00   | 100,00  | 100,00  |                                 |
| 1.7.3      | Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA                                                       | %      | 107,98  | 111,23    | 113,80   | 117,22  | 118,93  |                                 |
| <b>1,8</b> | <b>Angka Melanjutkan (AM) :</b>                                                       |        |         |           |          |         |         |                                 |
| 1.8.1      | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                                          | %      | 96,7    | 122,60    | 122,75   | 122,94  | 123,05  |                                 |
| 1.8.2      | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                                     | %      | 125,93  | 120,65    | 120,75   | 120,95  | 121,00  |                                 |
| 1,9        | Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik                                        | %      | 93,5    | 97,80     | 97,85    | 97,95   | 98,65   |                                 |
| 1.9.1      | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik                       | %      | 91,29   | 98,15     | 98,25    | 98,35   | 98,85   |                                 |
| 1.9.2      | Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar                    | %      | 51,51   | 52,58     | 52,58    | 52,48   | 52,58   |                                 |
| 1,10       | Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama | Angka  | 37,92   | 30,81     | 28,91    | 25,27   | 25,11   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO        | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah             | Satuan | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------|
|           |                                                                               |        | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                            |
| 1,11      | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | Angka  | 37,92   | 30,81     | 28,91    | 25,27  | 25,11  |                            |
| 1,12      | Rasio Guru/murid sekolah pendidikan dasar                                     | Angka  | 809,22  | 772,51    | 803,07   | 827,69 | 864,19 |                            |
| 1,13      | Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah                                 | Angka  | 894,93  | 845,67    | 842,73   | 812,99 | 836,86 |                            |
| 1,14      | Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Dasar                         | Angka  | 45,25   | 44,41     | 39,60    | 30,73  | 29,98  |                            |
| 1,15      | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah             | Angka  | 416,71  | 405,67    | 400,00   | 400,00 | 400,00 |                            |
| 1,16      | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar                 | %      | 82,05   | 75,33     | 69,34    | 65,69  | 57,35  |                            |
| 1,17      | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki          | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 1,18      | Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)              | %      | 98,17   | 99,98     | 99,99    | 99,99  | 100,00 |                            |
| 1,19      | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                                        | %      | 95,57   | 97,03     | 97,55    | 99,00  | 100,00 |                            |
|           |                                                                               |        |         |           |          |        |        |                            |
| <b>II</b> | <b>KESEHATAN</b>                                                              |        |         |           |          |        |        |                            |
| 2,1       | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                            | Orang  | 9,76    | 7,64      | 8,16     | 11,44  | 9,19   | Dinas Kesehatan            |
| 2,2       | Angka kelangsungan hidup bayi                                                 | Orang  | 977     | 975,20    | 970,80   | 962,56 | 962,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,3       | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup                                | Orang  | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | Dinas Kesehatan            |
| 2,4       | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup                              | Angka  | 8,49    | 6,06      | 6,10     | 7,08   | 6,16   | Dinas Kesehatan            |
| 2,5       | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup                                | Angka  | 212,31  | 225,48    | 246,83   | 282,90 | 289,53 | Dinas Kesehatan            |
| 2,6       | Rasio posyandu per satuan balita                                              | Angka  | 61,3    | 48,04     | 57,19    | 73,32  | 75,50  | Dinas Kesehatan            |
| 2,7       | Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk                    | Angka  | 0,29    | 0,31      | 0,32     | 0,33   | 0,35   | Dinas Kesehatan            |
| 2,8       | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk                                         | Angka  | 0,03    | 0,03      | 0,03     | 0,03   | 0,03   | Dinas Kesehatan            |
| 2,9       | Rasio dokter per satuan penduduk                                              | Angka  | 4,50    | 4,13      | 4,90     | 6,05   | 6,44   | Dinas Kesehatan            |
| 2,10      | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                                        | Angka  | 10,2    | 11,31     | 12,19    | 13,33  | 13,96  | Dinas Kesehatan            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO   | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                  | Satuan                | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------|
|      |                                                                                                                                    |                       | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                            |
| 2,11 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                                                                                        | %                     | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,12 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan                                            | %                     | 87      | 80,70     | 78,29    | 77,11  | 73,48  | Dinas Kesehatan            |
| 2,13 | Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)                                                                   | %                     | 100     | 98,18     | 98,18    | 99,15  | 98,18  | Dinas Kesehatan            |
| 2,14 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                                                                                       | %                     | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,15 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | %                     | 60      | 61,77     | 59,31    | 55,34  | 54,40  | Dinas Kesehatan            |
| 2,16 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                                                               | %                     | 100     | 98,61     | 94,34    | 88,31  | 85,80  | Dinas Kesehatan            |
| 2,17 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk                                                                                            | Per 100.000 Penduduk  | 0,01    | 0,01      | 0,02     | 0,02   | 0,02   | Dinas Kesehatan            |
| 2,18 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani                                                                                            | %                     | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,19 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                                                                         | %                     | 70,42   | 73,95     | 81,29    | 76,57  | 95,97  | Dinas Kesehatan            |
| 2,20 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                                                             | per 100.000 penduduk) | 290,09  | 290,00    | 280,00   | 270,00 | 260,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,21 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                                                        | per 100.000 penduduk  | 3,65    | 4,00      | 4,00     | 4,00   | 4,00   | Dinas Kesehatan            |
| 2,22 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                                                              | %                     | 87      | 87,00     | 90,00    | 95,00  | 95,00  | Dinas Kesehatan            |
| 2,23 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                                                             | %                     | 87      | 87,00     | 90,00    | 95,00  | 95,00  | Dinas Kesehatan            |
| 2,24 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                                                             | %                     | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,25 | Penderita diare yang ditangani                                                                                                     | %                     | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,26 | Angka kejadian Malaria                                                                                                             | Kasus                 | 10      | 9,00      | 8,00     | 7,00   | 7,00   | Dinas Kesehatan            |
| 2,27 | Tingkat kematian akibat malaria                                                                                                    | %                     | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | Dinas Kesehatan            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO   | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                 | Satuan | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------|
|      |                                                                                                   |        | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                            |
| 2,28 | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida                                     | %      | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | Dinas Kesehatan            |
| 2,29 | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat                | %      | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | Dinas Kesehatan            |
| 2,30 | Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi                                                       | %      | 0,35    | 0,32      | <5       | <5     | <5     | Dinas Kesehatan            |
| 2,31 | Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir                                     | %      | 75      | 75,00     | 80,00    | 80,00  | 85,00  | Dinas Kesehatan            |
| 2,32 | Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS | %      | 50      | 50,00     | 60,00    | 70,00  | 80,00  | Dinas Kesehatan            |
| 2,33 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin                                      | %      | 100     | 122,40    | 145,40   | 175,65 | 191,40 | Dinas Kesehatan            |
| 2,34 | Cakupan kunjungan bayi                                                                            | %      | 90      | 86,16     | 81,33    | 78,55  | 71,67  | Dinas Kesehatan            |
| 2,35 | Cakupan puskesmas                                                                                 | %      | 200     | 225,00    | 240,00   | 255,00 | 270,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,36 | Cakupan pembantu puskesmas                                                                        | %      | 95,45   | 83,18     | 70,90    | 54,27  | 46,36  | Dinas Kesehatan            |
| 2,37 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                                                                    | %      | 65,8    | 59,88     | 54,00    | 48,65  | 42,25  | Dinas Kesehatan            |
| 2,38 | Cakupan pelayanan nifas                                                                           | %      | 69,7    | 64,05     | 57,45    | 50,73  | 44,26  | Dinas Kesehatan            |
| 2,39 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                                 | %      | 90      | 100,22    | 108,89   | 123,79 | 126,24 | Dinas Kesehatan            |
| 2,40 | Cakupan pelayanan anak balita                                                                     | %      | 100     | 80,22     | 78,05    | 80,22  | 73,72  | Dinas Kesehatan            |
| 2,41 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin                | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,42 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat                                              | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,43 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin                                               | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,44 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)                | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
| 2,45 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam            | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan            |
|      |                                                                                                   |        |         |           |          |        |        |                            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO         | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                  | Satuan  | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
|            |                                                                                                    |         | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                                                     |
| <b>III</b> | <b>PEKERJAAN UMUM<br/>DAN PENATAAN<br/>RUANG</b>                                                   |         |         |           |          |        |        |                                                     |
| <b>3,1</b> | <b>Pekerjaan Umum:</b>                                                                             |         |         |           |          |        |        |                                                     |
| 3.1.1      | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                                 | %       | 83,17   | 80,00     | 81,00    | 83,00  | 85,00  | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
| 3.1.2      | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                         | Km/Jiwa | 1,9     | 1,73      | 1,71     | 1,69   | 1,67   |                                                     |
| 3.1.4      | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam )                                       | %       | 83,17   | 89,26     | 95,00    | 97,00  | 99,00  |                                                     |
| 3.1.5      | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)         | %       | 18,9    | 19,81     | 20,37    | 20,79  | 21,48  |                                                     |
| 3.1.6      | persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar                 | %       | 38      | 38,00     | 38,00    | 38,00  | 38,00  |                                                     |
| 3.1.7      | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                                                               | %       | 88,81   | 92,50     | 95,00    | 97,50  | 91,33  |                                                     |
| 3.1.8      | Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar                                              | %       | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |                                                     |
| 3.1.9      | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat                       | %       | 90      | 91,00     | 91,00    | 92,00  | 93,00  |                                                     |
| 3.1.10     | Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun                                                            | %       | 94,69   | 95,23     | 95,84    | 96,64  | 97,07  |                                                     |
| 3.1.11     | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor           | %       | 80      | 87,00     | 89,00    | 91,00  | 93,00  |                                                     |
| 3.1.12     | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                                    | %       | 95,07   | 96,94     | 98,48    | 100,17 | 101,56 |                                                     |
| 3.1.13     | Rasio Jaringan Irigasi                                                                             | M/Ha    | 26,84   | 26,87     | 26,90    | 26,93  | 26,96  |                                                     |
| 3.1.14     | Persentase penduduk berakses air minum                                                             | %       | 97,97   | 98,00     | 98,31    | 98,39  | 98,46  |                                                     |
| 3.1.15     | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan | %       | 98,22   | 98,30     | 99,30    | 99,60  | 100,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
| 3.1.16     | Persentase areal kawasan kumuh                                                                     | %       | -       | 4,64      | 1,66     | 0,18   | -4,30  |                                                     |



**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO         | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                           | Satuan    | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                             |           | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                                                        |
| 3.1.1<br>7 | Tersedianya Fasilitas<br>Pengurangan Sampah<br>di Perkotaan                                                                                 | %         | -       | 15,81     | 16,37    | 16,89  | 17,47  |                                                        |
| 3.1.1<br>9 | Rasio Tempat Ibadah<br>per Satuan Penduduk                                                                                                  | Unit/Jiwa | -       | 1,78      | 1,85     | 1,90   | 1,99   |                                                        |
| <b>3,2</b> | <b>Penataan Ruang:</b>                                                                                                                      |           |         |           |          |        |        |                                                        |
| 3.2.3      | Rasio bangunan ber-<br>IMB per satuan<br>bangunan                                                                                           | %         | 59,66   | 74,76     | 79,46    | 82,37  | 88,86  |                                                        |
| 3.2.4      | Ruang Publik yang<br>Berubah Peruntukannya                                                                                                  | %         | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |                                                        |
| 3.2.5      | Rasio Luas Kawasan<br>Tertutup pepohonan<br>berdasarkan hasil<br>pemotretan citra satelit<br>dan survei foto udara<br>terhadap luas daratan |           | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |                                                        |
| 2.3.6      | Ketaatan terhadap<br>RTRW                                                                                                                   | %         | 99,86   | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                                        |
| <b>IV</b>  | <b>PERUMAHAN<br/>RAKYAT DAN<br/>KAWASAN<br/>PERMUKIMAN</b>                                                                                  |           |         |           |          |        |        |                                                        |
| 4,1        | Rasio Rumah Layak<br>Huni                                                                                                                   | %         | 0,24    | 0,22      | 0,22     | 0,22   | 0,21   | Dinas<br>Perumahan,<br>Permukiman<br>dan<br>Pertanahan |
| 4,2        | Rasio permukiman<br>layak huni                                                                                                              | %         | 0,768   | 0,64      | 0,57     | 0,51   | 0,43   |                                                        |
| 4,3        | Cakupan Ketersediaan<br>Rumah Layak Huni                                                                                                    | %         | 96,53   | 95,40     | 95,17    | 95,21  | 94,72  |                                                        |
| 4,4        | Cakupan Layanan<br>Rumah Layak Huni<br>yang Terjangkau                                                                                      | %         | 82,7    | 89,88     | 98,74    | 99,00  | 100,00 |                                                        |
| 4,6        | Persentase Lingkungan<br>Permukiman Kumuh                                                                                                   | %         | 2,68    | 2,31      | 2,00     | 2,00   | 2,00   |                                                        |
| 4,7        | Persentase Luasan<br>Permukiman Kumuh di<br>Kawasan Perkotaan                                                                               | %         | 4,71    | 4,34      | 4,00     | 3,00   | 2,00   |                                                        |
| 4,8        | Proporsi Rumah<br>Tangga Kumuh<br>Perkotaan                                                                                                 | %         | 12,72   | 15,36     | 17,69    | 19,80  | 22,34  |                                                        |
| 4,9        | Cakupan Lingkungan<br>yang Sehat dan Aman<br>yang Didukung dengan<br>PSU                                                                    | %         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas<br>Perumahan,<br>Permukiman<br>dan<br>Pertanahan |
| <b>V</b>   | <b>KETENTRAMAN,<br/>KETERTIBAN UMUM,</b>                                                                                                    |           |         |           |          |        |        |                                                        |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO        | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                            | Satuan                    | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------|
|           |                                                                                                                                                                              |                           | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                            |
|           | <b>DAN PERLINDUNGAN<br/>MASYARAKAT</b>                                                                                                                                       |                           |         |           |          |        |        |                            |
| 5,1       | Cakupan Petugas<br>Perlindungan<br>Masyarakat (Linmas)                                                                                                                       | Per<br>10.000<br>penduduk | 32      | 37,99     | 46,52    | 57,99  | 63,57  | Dinas Satpol<br>PP         |
| 5,2       | Tingkat Penyelesaian<br>Pelanggaran K3<br>(Ketertiban,<br>Ketentraman,<br>Keindahan) (%)                                                                                     | %                         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 5,3       | Cakupan Pelayanan<br>Bencana Kebakaran<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                     | %                         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 5,4       | Tingkat Waktu Tanggap<br>( <i>Response Time Rate</i> )<br>Daerah Layanan<br>Wilayah Manajemen<br>Kebakaran (WMK)                                                             | %                         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 5,5       | Persentase Penegakan<br>PERDA                                                                                                                                                | %                         | 100     | 102,62    | 104,72   | 106,84 | 108,92 |                            |
|           |                                                                                                                                                                              |                           |         |           |          |        |        |                            |
| <b>VI</b> | <b>SOSIAL</b>                                                                                                                                                                |                           |         |           |          |        |        |                            |
| 6,1       | Persentase PMKS<br>Memperoleh Bantuan<br>Sosial (%)                                                                                                                          | %                         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Sosial               |
| 6,2       | Persentase PMKS yang<br>Tertangani                                                                                                                                           | %                         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 6,3       | Persentase PMKS<br>Skala yang Memperoleh<br>Bantuan Sosial untuk<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Dasar                                                                             | %                         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 6,4       | Persentase Panti Sosial<br>yang Menerima<br>Program<br>Pemberdayaan Sosial<br>Melalui Kelompok<br>Usaha Bersama (KUBE)<br>atau Kelompok Sosial<br>Ekonomi Sejenis<br>Lainnya | %                         | -       | 11,00     | 11,00    | 11,00  | 11,00  |                            |
| 6,5       | Persentase Panti Sosial<br>yang Menyediakan<br>Sarana Prasarana<br>Pelayanan Kesehatan<br>Sosial                                                                             | %                         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 6,6       | Persentase Wahana<br>Kesejahteraan Sosial<br>Berbasis Masyarakat<br>(WKBSM) yang<br>Menyediakan Sarana<br>Prasarana Pelayanan<br>Kesejahteraan Sosial                        | %                         | 11      | 11,00     | 11,00    | 11,00  | 11,00  | Dinas Sosial               |
| 6,7       | Persentase Korban<br>Bencana yang<br>Menerima Bantuan<br>Sosial Selama Masa<br>Tanggap Darurat                                                                               | %                         | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO                             | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                  | Satuan | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------|
|                                |                                                                                                                    |        | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                            |
| 6,8                            | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap              | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 6,9                            | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | %      | 32,1    | 33,50     | 34,87    | 38,71  | 37,63  |                            |
|                                |                                                                                                                    |        |         |           |          |        |        |                            |
| LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR |                                                                                                                    |        |         |           |          |        |        |                            |
| I                              | TENAGA KERJA                                                                                                       |        |         |           |          |        |        |                            |
| 1,1                            | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja                                                                                   | %      | 13      | 11,00     | 8,00     | 7,00   | 5,00   | Dinas<br>Tenaga Kerja      |
| 1,2                            | Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)                                                     | %      | 61,5    | 75,00     | 85,00    | 90,00  | 95,00  | Dinas<br>Tenaga Kerja      |
| 1,3                            | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan                                                              | %      | 83,35   | 84,00     | 85,00    | 87,00  | 90,00  | Dinas<br>Tenaga Kerja      |
| 1,5                            | Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK                                                       | %      | 97,64   | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas<br>Tenaga Kerja      |
| 1,6                            | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah                                              | %      | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | Dinas<br>Tenaga Kerja      |
| 1,9                            | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi                                                | %      | 79,82   | 82,00     | 85,00    | 88,00  | 90,00  | Dinas<br>Tenaga Kerja      |
| 1,10                           | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat                                                | %      | 79,78   | 80,00     | 82,00    | 84,00  | 86,00  | Dinas<br>Tenaga Kerja      |
| 1,12                           | Rasio Lulusan S1/S2/S3                                                                                             | %      | 26,83   | 29,48     | 33,56    | 38,15  | 41,70  | Dinas<br>Tenaga Kerja      |
|                                |                                                                                                                    |        |         |           |          |        |        |                            |
| II                             | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                       |        |         |           |          |        |        |                            |
| 2,1                            | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                                             | %      | 18,79   | 21,50     | 24,41    | 28,41  | 30,23  | DP3A                       |
| 2,2                            | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD                                                                     | %      | 20      | 20,00     | 20,00    | 20,00  | 20,00  |                            |
| 2,3                            | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                                                                            | %      | 81,21   | 83,00     | 86,00    | 89,00  | 91,00  |                            |
| 2,4                            | Rasio KDRT                                                                                                         | %      | 0,045   | 0,10      | 0,09     | 0,06   | 0,07   |                            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO   | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                             | Satuan | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                               |        | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                            |
| 2,5  | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur                                                                                                                                   | %      | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |                            |
| 2,6  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                                                                                                                          | %      | 41,62   | 40,28     | 38,20    | 34,77  | 34,05  |                            |
| 2,7  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 2,8  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 2,9  | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu         | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 2,10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                       | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 2,11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                                            | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 2,12 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                           | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | DP3A                       |
| 2,13 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                   | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                            |
| 2,14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                                                                                           | %      | 1       | 1,00      | 1,00     | 1,01   | 1,01   |                            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO   | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah             | Satuan        | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|----------|--------|--------|--------------------------------------------|
|      |                                                                               |               | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                                            |
| 2,15 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                          | %             | 1,1     | 1,12      | 1,14     | 1,18   | 1,19   |                                            |
| 2,16 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA                                          | %             | 1,2     | 1,02      | 0,84     | 0,60   | 0,48   |                                            |
| 2,17 | Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi                             | %             | 1,13    | 1,59      | 1,68     | 1,77   | 1,86   |                                            |
| 2,18 | Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 tahun | %             | 1       | 1,00      | 1,00     | 1,00   | 1,00   |                                            |
| 2,19 | Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian           | %             | 42,54   | 43,12     | 43,69    | 44,45  | 44,82  |                                            |
|      |                                                                               |               |         |           |          |        |        |                                            |
| III  | PANGAN                                                                        |               |         |           |          |        |        |                                            |
| 3,1  | Ketersediaan pangan utama                                                     | %             | 253,2   | 255,51    | 257,29   | 252,87 | 260,84 | Dinas Ketahanan Pangan                     |
| 3,2  | Ketersediaan energi dan protein perkapita                                     | %             | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                            |
| 3    | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan          | %             | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                            |
|      |                                                                               |               |         |           |          |        |        |                                            |
| IV   | PERTANAHAN                                                                    |               |         |           |          |        |        |                                            |
|      | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi              |               | 3       | 4,60      | 5,40     | 6,41   | 7,00   | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
|      | Persentase objek lahan Milik Pemda yang bersertifikat                         | %             | 0,25    | 0,30      | 0,50     | 0,70   | 1,00   |                                            |
|      |                                                                               |               |         |           |          |        |        |                                            |
| V    | LINGKUNGAN HIDUP                                                              |               |         |           |          |        |        |                                            |
| 5,26 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota                                              | Ada/Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    | Dinas Lingkungan Hidup                     |
| 5,27 | Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota                | Ada/Tidak Ad  | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    |                                            |
| 5,28 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi                     | Ada/Tidak Ad  | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    |                                            |
| 5,29 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air                                          | %             | 96,4    | 98,40     | 95,00    | 96,00  | 96,00  |                                            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO   | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                                                                                                 | Satuan           | Kondisi      | Perkiraan | Proyeksi     |              |              | OPD<br>Penanggung<br>Jawab   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 2022         | 2023      | 2024         | 2025         | 2026         |                              |
| 5,30 | Hasil Pengukuran<br>Indeks Kualitas Udara                                                                                                                                                                                                         | %                | 90           | 99,76     | 90,00        | 90,00        | 91,00        |                              |
| 5,31 | Hasil Pengukuran<br>Indeks Kualitas Tutupan<br>Lahan                                                                                                                                                                                              | %                | 63,79        | 61,31     | 62,00        | 63,00        | 63,70        |                              |
| 5,32 | Pembinaan dan<br>Pengawasan Terkait<br>Ketaatan Penanggung<br>Jawab Usaha dan/atau<br>Kegiatan yang Diawasi<br>Ketaatannya terhadap<br>Izin Lingkungan, Izin<br>PPLH dan PUU LH d<br>yang Diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | %                | 100          | 100,00    | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                              |
| 5,33 | Peningkatan Kapasitas<br>dan Sarana Prasarana<br>Pejabat Pengawas<br>Lingkungan Hidup di<br>Daerah (PPLHD) di<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Ada/Tidak<br>Ada | Ada          | Ada       | Ada          | Ada          | Ada          |                              |
| 5,34 | Terfasilitasi<br>Pendampingan<br>Pengakuan MHA                                                                                                                                                                                                    | %                | Tidak<br>Ada | Tidak Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada |                              |
| 5,36 | Terverifikasi Hak<br>Kearifan Lokal atau Hak<br>Pengetahuan<br>Tradisional                                                                                                                                                                        | %                | Tidak<br>Ada | Tidak Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada |                              |
| 5,37 | Penetapan Hak MHA                                                                                                                                                                                                                                 | %                | Tidak<br>Ada | Tidak Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada |                              |
| 5,38 | Terfasilitasi Kegiatan<br>Peningkatan<br>Pengetahuan dan<br>Keterampilan                                                                                                                                                                          | %                | Tidak<br>Ada | Tidak Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada |                              |
| 5,39 | Terfasilitasi Penyediaan<br>Sarana/Prasarana                                                                                                                                                                                                      | %                | Tidak<br>Ada | Tidak Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada | Tidak<br>Ada |                              |
| 5,40 | Terlaksananya<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan Masyarakat                                                                                                                                                                                           | Pelatihan        | 1            | 1         | 1            | 1            | 1            |                              |
| 5,41 | Terlaksananya<br>Pemberian<br>Penghargaan<br>Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                     | Ada/Tidak<br>Ada | Ada          | Ada       | Ada          | Ada          | Ada          | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |
| 5,42 | Pengaduan Masyarakat<br>Terkait Izin Lingkungan,<br>Izin PPLH dan PUU LH<br>yang diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota, Lokasi<br>Usaha dan Dampaknya<br>di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                            | Kasus            | 100          | 100,00    | 100,00       | 100,00       | 100,00       |                              |
| 5,43 | Timbulan Sampah yang<br>Ditangani                                                                                                                                                                                                                 | %                | 99           | 99,00     | 99,00        | 100,00       | 100,00       |                              |
| 5,44 | Persentase Jumlah<br>Sampah yang<br>Terkurangi Melalui 3R                                                                                                                                                                                         | %                | 26           | 28,00     | 30,00        | 30,00        | 30,00        |                              |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO         | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                         | Satuan        | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|----------|--------|--------|-----------------------------------------|
|            |                                                                                           |               | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                                         |
| 5,45       | Persentase Cakupan Area Pelayanan                                                         | %             | 93      | 94,00     | 95,00    | 96,00  | 96,00  |                                         |
| 5,46       | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani                                                  | %             | 72      | 72,00     | 71,00    | 71,00  | 71,00  |                                         |
| 5,47       | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota                                           | %             | 75      | 75,00     | 75,00    | 75,00  | 75,00  |                                         |
| 5,48       | Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan                           | %             | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                         |
| 5,49       | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | %             | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                         |
|            |                                                                                           |               |         |           |          |        |        |                                         |
| <b>VI</b>  | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                     |               |         |           |          |        |        |                                         |
| 6,1        | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk                                                | Angka         | 0,99    | 1,00      | 1,00     | 1,00   | 1,01   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6,2        | Rasio bayi berakte kelahiran                                                              | Angka         | 1       | 1,00      | 1,01     | 1,01   | 1,01   |                                         |
| 6,3        | Rasio pasangan berakte nikah                                                              | Angka         | 0,74    | 0,76      | 0,74     | 0,72   | 0,72   |                                         |
| 6,4        | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi                                         | Ada/Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    |                                         |
| 6,5        | Penerapan KTP Nasional berbais NIK                                                        | Sudah/Belum   | Sudah   | Sudah     | Sudah    | Sudah  | Sudah  |                                         |
| 6,6        | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                                             | %             | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                         |
| 6,7        | Cakupan penerbitan akta kelahiran                                                         | %             | 100     | 100,55    | 100,83   | 100,81 | 101,38 |                                         |
|            |                                                                                           |               |         |           |          |        |        |                                         |
| <b>VII</b> | <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                                                   |               |         |           |          |        |        |                                         |
| 7,1        | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik                          | %             | 100     | 100       | 100      | 100    | 100    | Kecamatan                               |
|            | Kecamatan Bacukiki                                                                        | %             | 100     | 100       | 100      | 100    | 100    |                                         |
|            | Kecamatan Bacukiki Barat                                                                  | %             | 100     | 100       | 100      | 100    | 100    |                                         |
|            | Kecamatan Soreang                                                                         | %             | 100     | 100       | 100      | 100    | 100    |                                         |
|            | Kecamatan Ujung                                                                           | %             | 100     | 100       | 100      | 100    | 100    |                                         |
| 7,2        | Rata-rata jumlah kelompok binaan                                                          | %             | 0       | 0         | 0        | 0      | 0      |                                         |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO          | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                         | Satuan   | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |       |       | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                           |          | 2022    | 2023      | 2024     | 2025  | 2026  |                                                                |
|             | lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)                                                                     |          |         |           |          |       |       |                                                                |
|             | Kecamatan Bacukiki                                                                                        | Kelompok | 0       | 0         | 0        | 0     | 0     |                                                                |
|             | Kecamatan Bacukiki Barat                                                                                  | Kelompok | 0       | 0         | 0        | 0     | 0     |                                                                |
|             | Kecamatan Soreang                                                                                         | Kelompok | 0       | 0         | 0        | 0     | 0     |                                                                |
|             | Kecamatan Ujung                                                                                           | Kelompok | 0       | 0         | 0        | 0     | 0     |                                                                |
| 7,3         | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK                                                                      |          |         |           |          |       |       |                                                                |
|             | Kecamatan Bacukiki                                                                                        | Kelompok | 26      | 26        | 26       | 26    | 26    |                                                                |
|             | Kecamatan Bacukiki Barat                                                                                  | Kelompok | 7       | 7         | 7        | 7     | 7     |                                                                |
|             | Kecamatan Soreang                                                                                         | Kelompok | 28      | 28        | 28       | 28    | 28    |                                                                |
|             | Kecamatan Ujung                                                                                           | Kelompok | 16      | 16        | 16       | 16    | 16    |                                                                |
| 7,6         | Persentase PKK Aktif                                                                                      | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             | Kecamatan Bacukiki                                                                                        | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             | Kecamatan Bacukiki Barat                                                                                  | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             | Kecamatan Soreang                                                                                         | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             | Kecamatan Ujung                                                                                           | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
| 7,7         | Persentase Posyandu Aktif                                                                                 | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             | Kecamatan Bacukiki                                                                                        | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             | Kecamatan Bacukiki Barat                                                                                  | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             | Kecamatan Soreang                                                                                         | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             | Kecamatan Ujung                                                                                           | %        | 100     | 100       | 100      | 100   | 100   |                                                                |
|             |                                                                                                           |          |         |           |          |       |       |                                                                |
| <b>VIII</b> | <b>PENGENDALIAN<br/>PENDUDUK DAN<br/>KELUARGA<br/>BERENCANA</b>                                           |          |         |           |          |       |       |                                                                |
| 8,1         | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)                                                                           | %        | 1,26    | 1,47      | 1,50     | 1,54  | 1,58  | Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk<br>dan Keluarga<br>Berencana |
| 8,2         | Total Fertility Rate (TFR)                                                                                | %        | 2,35    | 2,23      | 2,22     | 2,28  | 2,20  |                                                                |
| 8,3         | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | %        | 40      | 38,00     | 40,00    | 43,07 | 44,00 |                                                                |



**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO   | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                   | Satuan | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |       |       | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                     |        | 2022    | 2023      | 2024     | 2025  | 2026  |                                                                |
| 8,4  | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                                      | %      | 23,76   | 25,62     | 30,96    | 36,90 | 41,66 |                                                                |
| 8,5  | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                      | Jumlah | 1       | 1,40      | 1,60     | 1,59  | 2,00  |                                                                |
| 8,6  | Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan | Jumlah | 5       | 4,20      | 5,00     | 6,23  | 6,60  |                                                                |
| 8,7  | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                                 |        | 38      | 53,20     | 61,20    | 63,23 | 77,20 |                                                                |
| 8,8  | Rata-rata jumlah anak per keluarga                                                                                                                  | Angka  | 3       | 3,56      | 3,91     | 4,37  | 4,62  |                                                                |
| 8,9  | Ratio Akseptor KB                                                                                                                                   | %      | 62,97   | 65,38     | 65,60    | 65,34 | 66,03 |                                                                |
| 8,10 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49                                                                                 | Angka  | 12,185  | 12,74     | 12,82    | 12,79 | 12,99 |                                                                |
| 8,11 | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15 19 Tahun (ASFR 15–19)                                                     | Angka  | 20      | 15,51     | 14,05    | 14,98 | 11,13 |                                                                |
| 8,12 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)                                                                                | %      | 0,31    | 0,11      | -0,01    | -0,03 | -0,26 |                                                                |
| 8,13 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                          | %      | 15,41   | 13,55     | 13,85    | 15,18 | 14,43 | Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk<br>dan Keluarga<br>Berencana |
| 8,14 | persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                             | %      | 36,08   | 38,58     | 40,34    | 41,91 | 43,85 |                                                                |
| 8,15 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                            | %      | 48,09   | 42,29     | 37,91    | 33,12 | 29,15 |                                                                |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO   | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                               | Satuan | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                 |        | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                                                                |
| 8,16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                                               | %      | 81,67   | 83,76     | 86,55    | 89,00  | 92,14  |                                                                |
| 8,17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                                               | %      | 83,8    | 83,60     | 86,52    | 91,61  | 92,35  |                                                                |
| 8,18 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                                                               | %      | 78,12   | 73,10     | 74,32    | 78,22  | 76,77  |                                                                |
| 8,19 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan                                                                                                   | %      | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |                                                                |
| 8,20 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                                             | %      | 855     | 950,00    | 950,00   | 950,00 | 950,00 |                                                                |
| 8,21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk                    | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                                                |
| 8,22 | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri                                                      | %      | 72,44   | 75,00     | 75,00    | 75,00  | 75,00  |                                                                |
| 8,23 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                                            | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                                                |
| 8,24 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                              | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk<br>dan Keluarga<br>Berencana |
| 8,25 | persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                                                |
| 8,26 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                                                                 | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |                                                                |
| 8,27 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)                                                                                                    | %      | 0       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |                                                                |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO        | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                           | Satuan           | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |         |         | OPD<br>Penanggung<br>Jawab       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------------------------------|
|           |                                                                                                                             |                  | 2022    | 2023      | 2024     | 2025    | 2026    |                                  |
| 8,28      | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                       | %                | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00  | 100,00  |                                  |
| 8,29      | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | %                | 54,64   | 72,11     | 76,01    | 77,23   | 83,81   |                                  |
| 8,30      | Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                         | Tahun            | 21      | 20,90     | 21,00    | 21,42   | 21,20   |                                  |
| 8,31      | Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes               | %                | 0,54    | 0,55      | 0,56     | 0,59    | 0,61    |                                  |
|           |                                                                                                                             |                  |         |           |          |         |         |                                  |
| <b>IX</b> | <b>PERHUBUNGAN</b>                                                                                                          |                  |         |           |          |         |         |                                  |
| 9,1       | Jumlah arus penumpang angkutan umum                                                                                         | Juta Orang       | 114,652 | 200       | 200      | 220     | 250     | Dinas Perhubungan                |
| 9,2       | Rasio Ijin Trayek                                                                                                           | Angka            | 0       | 0,00      | 0,00050  | 0,00060 | 0,00066 | Dinas Perhubungan                |
| 9,3       | Jumlah uji kir angkutan umum                                                                                                | Jumlah pengujian | 878     | 601,90    | 100,00   | 150,00  | 200,00  | Dinas Perhubungan                |
| 9,4       | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                                                                                    | Jumlah Pelabuhan | 6       | 6         | 6        | 6       | 6       | Dinas Perhubungan                |
| 9,5       | Persentase layanan angkutan darat                                                                                           | %                | 36      | 27,80     | 19,40    | 5,77    | 2,60    | Dinas Perhubungan                |
| 9,6       | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                                                                                    | %                | 58      | 62,40     | 70,60    | 81,79   | 87,00   | Dinas Perhubungan                |
| 9,7       | Pemasangan Rambu-rambu                                                                                                      | %                | 24      | 28,00     | 30,00    | 38,00   | 46,00   | Dinas Perhubungan                |
| 9,8       | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan                                                                                    | Km/Kendaraan     | 0,0148  | 0,93      | 0,10     | 0,11    | 0,12    | Dinas Perhubungan                |
| 9,9       | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum                                                                           | Ton              | 1995924 | 3000000   | 3300000  | 3600000 | 3800000 | Dinas Perhubungan                |
| 9,10      | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun                                                              | Ton              | 1995924 | 3000000   | 3300000  | 3600000 | 3800000 | Dinas Perhubungan                |
|           |                                                                                                                             |                  |         |           |          |         |         |                                  |
| <b>X</b>  | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                           |                  |         |           |          |         |         |                                  |
| 10,1      | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan                                    | %                | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00  | 100,00  | Dinas Komunikasi dan Informatika |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO          | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Satuan      | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------|
|             |                                                                   |             | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                                                        |
| 10,2        | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                    | %           | 87,15   | 85,54     | 87,15    | 93,58  | 93,58  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| 10,3        | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon                   | %           | 91,8    | 95,00     | 94,46    | 95,72  | 96,98  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| 10,4        | Proporsi rumah tangga dengan akses internet                       | %           | 81,06   | 90,84     | 98,76    | 99,00  | 99,00  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| 10,5        | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi              | %           | 30,81   | 27,49     | 29,54    | 30,11  | 33,62  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
|             |                                                                   |             |         |           |          |        |        |                                                        |
| <b>XI</b>   | <b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>                        |             |         |           |          |        |        |                                                        |
| 11,1        | Persentase koperasi aktif                                         | %           | 56,56   | 55,80     | 55,52    | 55,77  | 54,96  | Dinas Tenaga Kerja                                     |
| 11,2        | Persentase UKM non BPR/LMK aktif                                  | Unit        | 25      | 30,00     | 32,00    | 34,00  | 37,00  | Dinas Tenaga Kerja                                     |
| 11,4        | Persentase Usaha Mikro dan Kecil                                  | %           | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Tenaga Kerja                                     |
|             |                                                                   |             |         |           |          |        |        |                                                        |
| <b>XII</b>  | <b>PENANAMAN MODAL</b>                                            |             |         |           |          |        |        |                                                        |
| 12,1        | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)                      | Unit Bisnis | 893     | 123,00    | 124,00   | 125,00 | 126,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 12,2        | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)               | Milyar Rp   | 173     | 174,00    | 175,00   | 175,00 | 177,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 12,3        | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja                                     | Orang/Unit  | 5,3     | 4,60      | 4,90     | 5,29   | 5,48   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 12,4        | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)           | Milyar Rp   | 1       | 1,10      | 1,40     | 1,50   | 1,70   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|             |                                                                   |             |         |           |          |        |        |                                                        |
| <b>XIII</b> | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>                                   |             |         |           |          |        |        |                                                        |
| 13,1        | persentase organisasi pemuda yang aktif                           | %           | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Dinas Kepemudaan                                       |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO         | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                      | Satuan           | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |         |         | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                        |                  | 2022    | 2023      | 2024     | 2025    | 2026    |                                                        |
|            |                                                                                                        |                  |         |           |          |         |         | , Olahraga<br>dan<br>Pariwisata                        |
| 13,2       | persentase wirausaha<br>muda                                                                           | %                | 5,98    | 9,67      | 10,62    | 8,96    | 12,52   | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
|            | Jumlah Wirausaha<br>Muda                                                                               | Jiwa             | 1297    | 1300,00   | 1300,00  | 1310,00 | 1320,00 | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
| 13,3       | Cakupan pembinaan<br>olahraga                                                                          | %                | 96,55   | 96,55     | 96,55    | 96,55   | 98,00   | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
| 13,4       | Cakupan Pelatih yang<br>bersertifikasi                                                                 | %                | 86,06   | 89,13     | 90,00    | 91,25   | 91,50   | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
| 13,5       | Cakupan pembinaan<br>atlet muda                                                                        | %                | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00  | 100,00  | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
| 13,6       | Jumlah atlet berprestasi                                                                               | Atlet            | 118     | 100,00    | 100,00   | 100,00  | 100,00  | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
| 13,7       | Jumlah prestasi<br>olahraga                                                                            | Medali           | 77      | 77,00     | 78,00    | 79,00   | 80,00   | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
|            |                                                                                                        |                  |         |           |          |         |         |                                                        |
| <b>XIV</b> | <b>STATISTIK</b>                                                                                       |                  |         |           |          |         |         |                                                        |
| 14,1       | Tersedianya sistem<br>data dan statistik yang<br>terintegrasi                                          | Ada/Tidak<br>Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada     | Ada     | Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika              |
| 14,2       | Buku "kabupaten dalam<br>angka"                                                                        | Ada/Tidak<br>Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada     | Ada     | Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika              |
| 14,3       | Buku "PDRB"                                                                                            | Ada/Tidak<br>Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada     | Ada     | Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika              |
|            | Persentase perangkat<br>daerah yang telah<br>menggunakan sandi<br>dalam komunikasi<br>perangkat daerah |                  | 87,88   | 87,88     | 87,88    | 87,88   | 87,88   | Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika              |
|            |                                                                                                        |                  |         |           |          |         |         |                                                        |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO                            | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                          | Satuan    | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |          |          | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
|                               |                                                                                            |           | 2022    | 2023      | 2024     | 2025     | 2026     |                                            |
| <b>XV</b>                     | <b>PERSANDIAN</b>                                                                          |           |         |           |          |          |          |                                            |
| 15,1                          | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | %         | 87,88   | 87,88     | 87,88    | 87,88    | 87,88    | Dinas Komunikasi dan Informatika           |
|                               |                                                                                            |           |         |           |          |          |          |                                            |
| <b>XVI</b>                    | <b>KEBUDAYAAN</b>                                                                          |           |         |           |          |          |          |                                            |
| 16,1                          | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                   | Kali      | 2       | 2,00      | 2,00     | 2,00     | 3,00     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |
| 16,2                          | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                    | Buah      | 41      | 41,00     | 41,00    | 41,00    | 41,00    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |
| 16,3                          | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                  | Buah      | 41      | 41,00     | 41,00    | 41,00    | 41,00    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |
|                               |                                                                                            |           |         |           |          |          |          |                                            |
| <b>XVII</b>                   | <b>PERPUSTAKAAN</b>                                                                        |           |         |           |          |          |          |                                            |
| 17,1                          | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                                                   | Orang     | 31,806  | 14,66     | 9,32     | 5,25     | -1,36    | Dinas Perpustakaan                         |
| 17,2                          | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                                          | Exp       | 43,929  | 47,16     | 49,74    | 52,31    | 54,90    | Dinas Perpustakaan                         |
| 17,3                          | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                                                      | Unit/Jiwa | 0,98    | 1,12      | 1,10     | 1,03     | 1,06     | Dinas Perpustakaan                         |
| 17,4                          | Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun                                             | Orang     | 87      | 88,00     | 90,00    | 92,00    | 94,00    | Dinas Perpustakaan                         |
| 17,5                          | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                                     | Exp       | 13934   | 13367,00  | 13399,00 | 14039,00 | 14162,00 | Dinas Perpustakaan                         |
| 17,6                          | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat                     | Orang     | 5       | 6,00      | 7,00     | 8,00     | 9,00     | Dinas Perpustakaan                         |
|                               |                                                                                            |           |         |           |          |          |          |                                            |
| <b>XVIII</b>                  | <b>KEARSIPAN</b>                                                                           |           |         |           |          |          |          |                                            |
| 18,1                          | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku                               | %         | 30      | 35,00     | 45,00    | 65,00    | 85,00    | Dinas Perpustakaan                         |
| 18,2                          | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                                        | Orang     | 7       | 8,00      | 9,00     | 9,00     | 10,00    | Dinas Perpustakaan                         |
|                               |                                                                                            |           |         |           |          |          |          |                                            |
| <b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b> |                                                                                            |           |         |           |          |          |          |                                            |
| <b>I</b>                      | <b>PARIWISATA</b>                                                                          |           |         |           |          |          |          |                                            |
| 1,1                           | Kunjungan wisata                                                                           | %         | 99,,25  | 99,25     | 99,50    | 99,50    | 99,75    | Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO          | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah         | Satuan           | Kondisi           | Perkiraan         | Proyeksi           |                        |                    | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|             |                                                                           |                  | 2022              | 2023              | 2024               | 2025                   | 2026               |                                                        |
| 1,2         | Lama kunjungan Wisata                                                     | Hari             | 3,05              | 2,45              | 2,60               | 2,60                   | 2,70               | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
| 1,3         | PAD sektor pariwisata<br>(juta Rupiah)                                    | Rupiah           | 8.879.65<br>0.847 | 93149698<br>45,90 | 1018464<br>2590,60 | 107032<br>71908,4<br>2 | 1192398<br>8080,00 | Dinas<br>Kepemudaan<br>, Olahraga<br>dan<br>Pariwisata |
|             |                                                                           |                  |                   |                   |                    |                        |                    |                                                        |
| <b>II</b>   | <b>PERTANIAN</b>                                                          |                  |                   |                   |                    |                        |                    |                                                        |
| 2,1         | Kontribusi sektor<br>pertanian/perkebunan<br>terhadap PDRB                | %                | 0,99              | 0,97              | 1,02               | 1,29                   | 1,14               | Dinas<br>Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan       |
| 2,2         | Kontribusi sektor<br>pertanian (palawija)<br>terhadap PDRB                | %                | 36,77             | 31,78             | 36,38              | 39,45                  | 45,59              | Dinas<br>Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan       |
| 2,3         | Kontribusi sektor<br>perkebunan (tanaman<br>keras) terhadap PDRB          | %                | 5,61              | 4,43              | 5,45               | 6,88                   | 7,50               | Dinas<br>Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan       |
| 2,4         | Kontribusi Produksi<br>kelompok petani<br>terhadap PDRB                   | %                | 28,35             | 26,43             | 21,45              | 23,83                  | 25,49              | Dinas<br>Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan       |
| 2,5         | Produktivitas padi atau<br>bahan pangan utama<br>lokal lainnya per hektar | Ton              | 5,93              | 5,48              | 5,58               | 5,93                   | 6,00               | Dinas<br>Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan       |
| 2,6         | Cakupan bina kelompok<br>petani                                           | %                | 41,96             | 27,04             | 28,02              | 31,74                  | 33,00              | Dinas<br>Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan       |
|             |                                                                           |                  |                   |                   |                    |                        |                    |                                                        |
| <b>V</b>    | <b>PERDAGANGAN</b>                                                        |                  |                   |                   |                    |                        |                    |                                                        |
| 5,1         | Ekspor bersih<br>perdagangan                                              | Milyar<br>Rupiah | 0                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | Dinas<br>Perdagangan                                   |
| 5,2         | Cakupan bina kelompok<br>pedagang/usaha<br>informal                       | %                | 22,5              | 20,35             | 22,42              | 25,93                  | 26,56              | Dinas<br>Perdagangan                                   |
|             |                                                                           |                  |                   |                   |                    |                        |                    |                                                        |
| <b>VI</b>   | <b>PERINDUSTRIAN</b>                                                      |                  |                   |                   |                    |                        |                    |                                                        |
| 6,1         | Cakupan bina kelompok<br>pengrajin                                        | %                | 21,41             | 20,80             | 24,25              | 26,24                  | 31,14              | Dinas<br>Perdagangan                                   |
|             |                                                                           |                  |                   |                   |                    |                        |                    |                                                        |
| <b>VIII</b> | <b>KELAUTAN DAN<br/>PERIKANAN</b>                                         |                  |                   |                   |                    |                        |                    |                                                        |
| 8,1         | Produksi perikanan                                                        | %                | 132,28            | 133,17            | 133,57             | 133,92                 | 134,36             | Dinas<br>Pertanian,<br>Kelautan dan<br>Perikanan       |
| 82          | Konsumsi ikan                                                             | %                | 89                | 80,74             | 79,18              | 80,61                  | 76,07              | Dinas<br>Pertanian,                                    |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO                      | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                  | Satuan        | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|----------|--------|--------|-----------------------------------------|
|                         |                                                                                    |               | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                                         |
|                         |                                                                                    |               |         |           |          |        |        | Kelautan dan Perikanan                  |
| 8,3                     | Cakupan bina kelompok nelayan                                                      | %             | 15,82   | 16,32     | 16,42    | 16,57  | 16,61  | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 8,4                     | Produksi perikanan kelompok nelayan                                                | %             | 61,65   | 56,88     | 53,74    | 54,38  | 47,45  | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 8,7                     | Nilai tukar nelayan                                                                | %             | 104,19  | 103,00    | 102,85   | 103,21 | 103,56 | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
|                         |                                                                                    |               |         |           |          |        |        |                                         |
| <b>PENUNJANG URUSAN</b> |                                                                                    |               |         |           |          |        |        |                                         |
| <b>I</b>                | <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>                                                     |               |         |           |          |        |        |                                         |
| 1,1                     | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada/Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    | Bappeda                                 |
| 1,2                     | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    |                                         |
| 1,3                     | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada/Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    |                                         |
| 1,4                     | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Ada/Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    |                                         |
| 1,5                     | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                  | %             | 50,29   | 59,47     | 49,73    | 34,60  | 30,24  |                                         |
| 1,6                     | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD                                   | %             | 100     | 100       | 100      | 100    | 100    |                                         |
| 1,7                     | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW                                         | %             | 100     | 100       | 100      | 100    | 100    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    |
|                         |                                                                                    |               |         |           |          |        |        |                                         |
| <b>II</b>               | <b>KEUANGAN</b>                                                                    |               |         |           |          |        |        |                                         |
| 2,1                     | Opini BPK terhadap laporan keuangan                                                | Hasil Opini   | WTP     | WTP       | WTP      | WTP    | WTP    | Badan Keuangan Daerah                   |
| 2,3                     | Persentase SILPA terhadap APBD                                                     | %             | 1,85    | 1,72      | 1,18     | -0,26  | 0,09   | Badan Keuangan Daerah                   |
| 2,4                     | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana                                  | %             | 2,34    | 2,56      | 2,91     | 3,78   | 3,61   | Badan Keuangan Daerah                   |



**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO  | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah               | Satuan                               | Kondisi            | Perkiraan          | Proyeksi           |                    |                    | OPD<br>Penanggung<br>Jawab  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                 |                                      | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |                             |
| 2,5 | Persentase belanja pendidikan (20 %)                                            | %                                    | 20,28              | 17,80              | 18,87              | 25,59              | 21,00              | Badan<br>Keuangan<br>Daerah |
| 2,6 | Persentase belanja kesehatan (10 %)                                             | %                                    | 29,49              | 35,91              | 40,13              | 41,22              | 48,56              | Badan<br>Keuangan<br>Daerah |
| 2,7 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung              | Rasio                                | 59.79% :<br>41.15% | 59.79% :<br>41.15% | 59.79% :<br>41.15% | 59.79% :<br>41.15% | 59.79% :<br>41.15% | Badan<br>Keuangan<br>Daerah |
| 2,8 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa                                              | %                                    | 0                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | Badan<br>Keuangan<br>Daerah |
| 2,9 | Penetapan APBD                                                                  | Tepat Waktu/<br>Tidak<br>Tepat Waktu | Tepat Waktu        | Tepat Waktu        | Tepat Waktu        | Tepat Waktu        | Tepat Waktu        | Badan<br>Keuangan<br>Daerah |
|     |                                                                                 |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                             |
| III | KEPEGAWAIAN<br>SERTA PENDIDIKAN<br>DAN PELATIHAN                                |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                             |
| 3,1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP)                | Jp/Tahun                             | 27                 | 27,00              | 27,00              | 27,00              | 27,00              | BKPSDM                      |
| 3,2 | persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                   | %                                    | 2,72               | 2,69               | 2,69               | 2,66               | 2,62               |                             |
| 3,3 | persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | %                                    | 0                  | 6,80               | 6,80               | 4,54               | 2,27               |                             |
| 3,4 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                         | Jabatan                              | 35                 | 35                 | 35                 | 35                 | 35                 |                             |
| 3,5 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah                            | Jabatan                              | 1,335              | 1,335              | 1,335              | 1,335              | 1,335              |                             |
| 3,6 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah            | Orang                                | 2,246              | 2,246              | 2,246              | 2,246              | 2,246              |                             |
|     |                                                                                 |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                             |
| IV  | PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                                                  |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                             |
| 4,1 | persentase implementasi rencana kelitbangan                                     | %                                    | 100                | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | Bappeda                     |
| 4,2 | persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                                        | %                                    | 25                 | 30,50              | 34,00              | 35,90              | 41,00              |                             |
| 4,3 | persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah    | %                                    | 100                | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |                             |
|     |                                                                                 |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                             |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| NO         | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                                                                           | Satuan            | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|----------|--------|--------|----------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                             |                   | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                            |
| <b>V</b>   | <b>PENGAWASAN</b>                                                                                                                                                                                                           |                   |         |           |          |        |        |                            |
| 5,1        | Persentase tindak lanjut temuan                                                                                                                                                                                             | %                 | 51      | 58,00     | 60,00    | 65,00  | 70,00  | Inspektorat                |
| 5,2        | persentase pelanggaran pegawai                                                                                                                                                                                              | %                 | 0,44    | 0,40      | 0,32     | 0,32   | 0,26   | Inspektorat                |
| 5,3        | Jumlah temuan BPK                                                                                                                                                                                                           | Kasus             | 9       | 9,00      | 9,00     | 9,00   | 9,00   | Inspektorat                |
| <b>VI</b>  | <b>SEKRETARIAT<br/>DEWAN</b>                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |          |        |        |                            |
| 6,1        | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota                                                                                                                                  | Ada/<br>Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    | Sekretariat DPRD           |
| 6,2        | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/<br>Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    | Sekretariat DPRD           |
| 6,3        | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD                                                        | Ada/<br>Tidak Ada | Ada     | Ada       | Ada      | Ada    | Ada    | Sekretariat DPRD           |
| <b>VII</b> | <b>SEKRETARIAT<br/>DAERAH KOTA</b>                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |          |        |        |                            |
| 7,1        | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                               | %                 | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah         |
| 7,2        | Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                                                                 | %                 | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah         |
| 7,3        | Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian                                                                                                                                                                   | %                 | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah         |
| 7,4        | Cakupan fasilitasi penataan standarisasi tatalaksana lingkup Pemkot Parepare                                                                                                                                                | %                 | 33      | 33,00     | 33,00    | 33,00  | 33,00  | Sekretariat Daerah         |
| 7,5        | Cakupan Pembinaan Sakip                                                                                                                                                                                                     | %                 | 33      | 33,00     | 33,00    | 33,00  | 33,00  | Sekretariat Daerah         |

| NO          | Aspek/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                      | Satuan | Kondisi | Perkiraan | Proyeksi |        |        | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|--------|--------------------------------------------|
|             |                                                                                        |        | 2022    | 2023      | 2024     | 2025   | 2026   |                                            |
| 7,6         | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Keprotokoleran                                        | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Sekretariat<br>Daerah                      |
|             |                                                                                        |        |         |           |          |        |        |                                            |
| <b>VIII</b> | <b>KEBANGSANAAN DAN<br/>POLITIK</b>                                                    |        |         |           |          |        |        |                                            |
| 8,1         | Persentase masyarakat<br>yang mendapatkan<br>pembinaan wawasan<br>kebangsaan           | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8,2         | Persentase masyarakat<br>yang mendapat<br>pendidikan politik                           | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8,3         | Persentase cakupan<br>organisasi<br>kemasyarakatan yang<br>diberdayakan dan<br>diawasi | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8,4         | persentase penurunan<br>penyalahgunaan<br>narkoba                                      | %      | 2       | 2,00      | 2,00     | 2,00   | 2,00   | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8,5         | persentase wilayah<br>Kota Parepare<br>berpotensi konflik<br>agama yang ditangani      | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8,6         | persentase penurunan<br>jumlah potensi konflik di<br>lingkungan masyarakat             | %      | 100     | 100,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |
| 8,7         | persentase angka<br>kriminalitas per 10.000<br>penduduk                                | %      | 34,17   | 30,77     | 28,90    | 27,03  | 25,16  | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik |

## 8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimum. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Indikator SPM mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman, ketertiban, dan pelayanan masyarakat; dan sosial. Seluruh indikator SPM sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimum. Penetapan target indikator SPM Kota Parepare tahun 2024-2026, disajikan di dalam tabel 8.4 berikut :

Tabel 8.4  
Penetapan Target Indikator SPM Kota Parepare Tahun 2024-2026

| No.                         | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator                                                                                                                                                 | Target Nasional                         | Tahun 2022 |         | Target     |            |            |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
|                             |                           |                                                                                                                                                           |                                         | Target     | Capaian | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN |                           |                                                                                                                                                           |                                         |            |         |            |            |            |
| 1                           | Pendidikan Dasar          | Persentase warga negara usia 7 -15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar                                                                     | 100                                     | 100        | 99,12   | 100        | 100        | 100        |
|                             |                           | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional                                                                       | Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya | N/A        | 1,77    | 1,85       | 1,90       | 2,00       |
| 2                           | Pendidikan Kesetaraan     | Persentase warga negara usia 7 -18 tahun yang belum yang menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | 100                                     | 100        | 96,56   | 100        | 100        | 100        |
|                             |                           | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional                                                                       | Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya | N/A        | N/A     | 1,50       | 1,55       | 1,60       |
| 3                           | Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan PAUD                                                                      | 100                                     | 100        | 79,69   | 100        | 100        | 100        |
| 2. BIDANG URUSAN KESEHATAN  |                           |                                                                                                                                                           |                                         |            |         |            |            |            |

**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare**
**Tahun 2024-2026**

| No.                                    | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                | Target Nasional | Tahun 2022 |         | Target     |            |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------------|------------|------------|
|                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                 | Target     | Capaian | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1                                      | Pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                                    | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                  | 100             | 100        | 97,07   | 100        | 100        | 100        |
| 2                                      | Pelayanan kesehatan ibu bersalin                                                                                                 | Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                               | 100             | 100        | 87,35   | 100        | 100        | 100        |
| 3                                      | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                                              | Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                            | 100             | 100        | 91,53   | 100        | 100        | 100        |
| 4                                      | Pelayanan kesehatan balita                                                                                                       | Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                     | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 5                                      | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar                                                                                   | Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan                                                         | 100             | 100        | 61,79   | 100        | 100        | 100        |
| 6                                      | Pelayanan kesehatan pada usia produktif                                                                                          | Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                | 100             | 100        | 24,32   | 100        | 100        | 100        |
| 7                                      | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                                                                                             | Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                   | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 8                                      | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi                                                                                         | Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan                                    | 100             | 100        | 22,06   | 100        | 100        | 100        |
| 9                                      | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus                                                                                   | Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan Layanan kesehatan                             | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 10                                     | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                                                             | Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                  | 100             | 100        | 67,23   | 100        | 100        | 100        |
| 11                                     | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                                                                   | Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan                                                          | 100             | 100        | 79,72   | 100        | 100        | 100        |
| 12                                     | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| <b>3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM</b> |                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                 |            |         |            |            |            |
| 1                                      | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                                                 | Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                            | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |

# Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare

Tahun 2024-2026

| No.                                                                               | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                 | Target Nasional | Tahun 2022 |         | Target     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------------|------------|------------|
|                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                 | Target     | Capaian | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 2                                                                                 | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik                                                        | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                       | 100             | 100        | 94,01   | 100        | 100        | 100        |
| <b>4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                 |            |         |            |            |            |
| 1                                                                                 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                        | Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana                                                                                                 | 100             | 100        | 94,62   | 100        | 100        | 100        |
| 2                                                                                 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| <b>5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                 |            |         |            |            |            |
| 1                                                                                 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                  | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada                                                             | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 2                                                                                 | Pelayanan informasi rawan bencana                                                                           | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                   | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 3                                                                                 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                     | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                             | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 4                                                                                 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                          | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                  | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 5                                                                                 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                        | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran                                                                | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| <b>6. BIDANG URUSAN SOSIAL</b>                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                 |            |         |            |            |            |
| 1                                                                                 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                                    | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                                           | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 2                                                                                 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                                      | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                                                                | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                                   | Indikator                                                                                                                                                    | Target Nasional | Tahun 2022 |         | Target     |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------------|------------|------------|
|     |                                                                                         |                                                                                                                                                              |                 | Target     | Capaian | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 3   | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                           | Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                                               | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 4   | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti  | Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti                                         | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |
| 5   | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana | 100             | 100        | 100     | 100        | 100        | 100        |

## **BAB IX P E N U T U P**

### **9.1. Pedoman Transisi**

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan serta menghindari terjadinya kekosongan perencanaan, maka diperlukan sebuah pedoman transisi yang akan digunakan pada pergantian Walikota dan Wakil Walikota Parepare pada tahun 2023.

Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare tahun 2024 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare tahun 2024-2026 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

### **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

RPD Kota Parepare merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara sinergis dan kolaboratif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPD Kota Parepare Tahun 2024 – 2026 harus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Parepare dalam kurun waktu 2024-2026.
2. Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya.
3. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPD Kota Parepare tahun 2024-2026 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.



4. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPD Kota Parepare tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare berkewajiban untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPD Kota Parepare tahun 2024-2026 kedalam Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKPD.
5. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada RPD Kota Parepare tahun 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

**WALIKOTA PAREPARE,**

**TTD**

**TAUFAN PAWE**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 76, KOTA PAREPARE**  
website : [bappeda.pareparekota.go.id](http://bappeda.pareparekota.go.id)  
✉ [bappeda@pareparekota.go.id](mailto:bappeda@pareparekota.go.id)

